



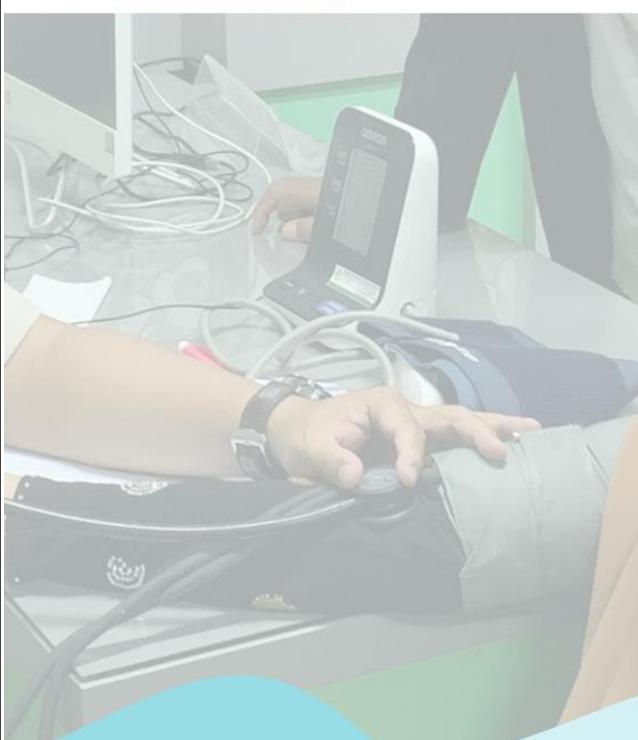
PROFIL

KANTOR KESEHATAN

PELABUHAN KELAS I

MAKASSAR

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah Nya sehingga Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023 ini dapat terselesaikan.

Profil ini merupakan salah satu sarana penyajian data dan informasi program kegiatan serta pencapaian kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar selama tahun 2023.

Profil ini disusun dengan harapan agar dapat dijadikan salah satu media pertukaran data, informasi, umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

Profil ini disusun oleh Tim yang terdiri dari Substansi Tata Usaha, Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Kesehatan. Terima kasih kepada Tim yang telah memberikan data serta pembahasan dan masukan dalam penyusunan profil ini.

Kami menyadari bahwa profil ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan kedepan dari semua pihak.

Makassar, Januari 2024

Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan
Makassar

Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
NIP 196908221993031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	6
C. VISI DAN MISI	7
D. URAIAN TUGAS, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN	8
E. WILAYAH KERJA.....	10
1. Wilayah Kerja Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar..	10
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar	12
3. Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi.....	14
4. Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare	19
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange.....	22
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-belang.....	23
7. Wilayah Kerja Bandara Tampa Padang.....	26
8. Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo.....	29
9. Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe.....	33
10. Wilayah Kerja Pelabuhan Malili.....	36
11. Pos Pelabuhan Bulukumba.....	38
12. Pos Pelabuhan Paotere	39
13. Pos Pelabuhan Siwa.....	40
14. Pos Pelabuhan Majene.....	43
15. Pos Pelabuhan Pasangkayu	45

BAB III HASIL KEGIATAN	48
A. SUBSTANSI TATA USAHA	48
1. Sub Substansi Program dan Laporan	48
2. Sub Substansi Keuangan dan Umum	69
B. SUBSTANSI PENGENDALIAN KARANTINA DAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI	86
1. Sub Substansi Pengendalian Karantina.....	86
2. Sub Substansi Surveilans Epidemiologi.....	104
C. SUBSTANSI PENGENDALIAN RISIKO LINGKUNGAN	127
1. Sub Substansi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	127
2. Sub Substansi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan	158
D. SUBSTANSI UPAYA KESEHATAN DAN LINTAS WILAYAH	174
1. Sub Substansi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah.....	174
2. Sub Substansi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan	188
E. PELAKSANAAN KESEHATAN HAJI	221
TIM PENYUSUN.....	241

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.B.1	Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	7
Gambar II.D.1	Tempat Pelayanan Kesehatan di Terminal Keberangkatan Domestic (Kiri) Dan Terminal Kedatangan Internasional (Kanan) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar.....	10
Gambar II.D.2	Pengawasan Suhu pada Pelaku Perjalanan Internasional (Jamaah Umrah)	11
Gambar II.D.3	Kegiatan Evakuasi Penumpang dari Pesawat	11
Gambar II.D.4	Kegiatan Pengawasan Makanan dan Minuman serta Pengendalian Vektor di Tempat Pengolahan Pangan.....	11
Gambar II.D.5	Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Makassar	12
Gambar II.D.6	Kegiatan Pengendalian, Identifikasi Dan Menghitung Kepadatan Lalat Di Pelabuhan Makassar	13
Gambar II.D.7	Pemeriksaan Air Oleh Petugas Wilker Pelabuhan Makassar....	13
Gambar II.D.8	Pengawasan Sanitasi Alat Angkut Oleh Petugas Wilker Pelabuhan Makassar	13
Gambar II.D.9	Kantor Wilker Pelabuhan Biringkassi.....	14
Gambar II.D.10	Pengawasan Kapal Dari Dalam Dan Luar Negeri	15
Gambar II.D.11	Surveilans Migrasi Malaria di Wilker Biringkassi	16
Gambar II.D.12	Surveilans Epidemiologi di Wilker Biringkassi.....	16
Gambar II.D.13	Evakuasi Pasien oleh Petugas Wilker Biringkassi	16
Gambar II.D.14	Posko Terpadu Pelabuhan Maccini Baji	17
Gambar II.D.15	Pemeriksaan Sanitasi Kapal oleh Petugas Wilker Biringkassi ..	17
Gambar II.D.16	Pemeriksaan Jentik dan Lalat oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi	18
Gambar II.D.17	Pemeriksaan Jentik oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi	18
Gambar II.D.18	Pemeriksaan TPM dan Air Bersih di Wilker Biringkassi	18
Gambar II.D.19	Kunjungan Dirjen P2P di Kantor Wilker Pelabuhan Parepare...	19
Gambar II.D.20	Pembimbingan Mahasiswa Magang di Wilker Pelabuhan Parepare	20
Gambar II.D.21	Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Parepare.....	21
Gambar II.D.22	Kantor Wilker Pelabuhan Awerange	22
Gambar II.D.23	Foto Bersama Posko Terpadu	

	Wilker Pelabuhan Belang-belang.....	23
Gambar II.D.24	Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Belang-belang.....	25
Gambar II.D.25	Gedung Kantor Wilker Bandara Tampa Padang.....	26
Gambar II.D.26	Pemasangan Perangkap Tikus, Survey Lalat dan Survey Kecoa.....	27
Gambar II.D.27	Survey Anopheles dan survey jentik Aedes.....	27
Gambar II.D.28	Pemeriksaan Air dan Pemeriksaan Makanan.....	27
Gambar II.D.29	Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Sanitasi Kapal.....	28
Gambar II.D.30	Pemeriksaan kesehatan untuk Kier, rujukan ke RS, dan pelaksanaan vaksinasi.....	28
Gambar II.D.31	Pengawasan PHEIC, pengawasan keberangkatan kapal luar negeri, pemeriksaan P3K kapal dan pesawat.....	28
Gambar II.D.32	Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Palopo.....	29
Gambar II.D.33	Kegiatan Susbtansi UKLW Wilker Pelabuhan Palopo.....	30
Gambar II.D.34	Kegiatan Susbtansi PKSE Wilker Pelabuhan Palopo.....	31
Gambar II.D.35	Kegiatan Susbtansi PRL Wilker Pelabuhan Palopo.....	31
Gambar II.D.36	Pembuatan surat Srikandi dan Billing PNBP Wilker Pelabuhan Palopo.....	32
Gambar II.D.37	Gedung Wilker Pelabuhan Bajoe.....	33
Gambar II.D.38	Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Bajoe.....	35
Gambar II.D.39	Kantor Wilker Pelabuhan Malili.....	36
Gambar II.D.40	Pelabuhan Umum Syahbandar Lampia.....	36
Gambar II.D.41	Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara.....	37
Gambar II.D.42	Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Bira Bulukumba.....	38
Gambar II.D.43	Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Paotere.....	39
Gambar II.D.44	Pengawasan Penumpang Pelabuhan Siwa.....	40
Gambar II.D.45	Surveilans Migrasi Malaria Pelabuhan Siwa.....	40
Gambar II.D.46	Pemeriksaan P3K Kapal Pelabuhan Siwa.....	41
Gambar II.D.47	Pemeriksaan HIV dan ILI Pelabuhan Siwa.....	41
Gambar II.D.48	Pemasangan Perangkap Tikus Pelabuhan Siwa.....	41
Gambar II.D.49	Survey Lalat dan Jentik Pelabuhan Siwa.....	42
Gambar II.D.50	Pemeriksaan Kadaluarsa Makanan, Pemeriksaan Sampel Air, dan Penyehatan Alat Angkut Pelabuhan Siwa.....	42
Gambar II.D.51	Pelaksanaan Kegiatan di Pos Pelabuhan Majene.....	43
Gambar II.D.52	Survey Lalat dan Jentik Pelabuhan Siwa.....	45
Gambar II.D.53	Pemeriksaan Sanitasi Kapal.....	47
Gambar II.D.54	Pemeriksaan Suhu/Body Temperatur Crew.....	47

Gambar II.D.55	Trapping, Survey Jentik dan Pengukuran Kepadatan Lalat	47
Gambar III.A.1.1	Tampilan Aplikasi SAKTI	48
Gambar III.A.1.2	Proses Desk Usulan Anggaran Awal Tahun 2024	49
Gambar III.A.1.3	Desk, Penelitian, Reviu RKAKL Pagu Anggaran Indikatif 2024	50
Gambar III.A.1.4	Aplikasi KRISNA.....	50
Gambar III.A.1.5	Desk, Penelitian, Reviu RKAKL Pagu Anggaran Alokasi 2024.....	51
Gambar III.A.1.6	Aplikasi Pemantik	54
Gambar III.A.1.7	Aplikasi E-Performance	55
Gambar III.A.1.8	Tampilan Aplikasi SMART DJA	56
Gambar III.A.1.9	Aplikasi Monev Bappenas	56
Gambar III.A.1.10	Dokumen Laporan Kinerja, Profil dan Laporan Tahunan 2022 Disusun Tahun 2023	57
Gambar III.A.1.11	Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2021 KKP Kelas I Makassar.....	59
Gambar III.A.1.12	Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2022 KKP Kelas I Makassar.....	60
Gambar III.A.1.13	Tampilan Website KKP Makassar	61
Gambar III.A.1.14	Tampilan Fanpage Facebook KKP Makassar.....	62
Gambar III.A.1.15	Tampilan Instagram KKP Makassar	62
Gambar III.A.1.16	Tampilan Twitter KKP Makassar.....	63
Gambar III.A.1.17	Tampilan Youtube KKP Makassar	63
Gambar III.A.1.18	Piagam WBK KKP Kelas I Makassar.....	67
Gambar III.A.1.19	Sertifikat ISO	68
Gambar III.A.2.1	Tampilan Dashboard Aplikasi Srikandi	76
Gambar III.B.2.1	Penyusunan Reviu Renkon dan TTX Pelabuhan Makassar.....	111
Gambar III.B.2.2	Pertemuan Assessment Core Capacity dan Evaluasi Layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar.....	114
Gambar III.B.2.3	Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan...	115
Gambar III.B.2.4	Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.....	117
Gambar III.B.2.5	Kegiatan Surveilans Migrasi Malaria.....	124
Gambar III.B.2.6	PE Kabupaten Sidrap	126
Gambar III.B.2.7	PE RS Pertamina	126
Gambar III.B.2.8	PE RS Wahidin.....	126
Gambar III.C.1.1	Pemasangan Perangkat Tikus.....	131

Gambar III.C.1.2	Survei Kepadatan Lalat	136
Gambar III.C.1.3	Survei Kepadatan Kecoak	140
Gambar III.C.1.4	Survey Jentik Aedes aegypti	146
Gambar III.C.1.5	Kegiatan Larvasidasi	148
Gambar III.C.1.6	Kegiatan Fogging	149
Gambar III.C.1.7	Survei Jentik Anopheles sp.	151
Gambar III.C.1.8	Kegiatan Uji Resistensi.....	153
Gambar III.C.1.9	Tindakan Penyehatan Alat Angkut.....	154
Gambar III.C.1.10	Pembedahan dan Pengambilan Sampel Ginjal Tikus	157
Gambar III.C.2.1	Pemeriksaan Sanitasi Kapal.....	159
Gambar III.C.2.2	Pemeriksaan Sanitasi Pesawat	161
Gambar III.C.2.3	Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan dan TTU.....	165
Gambar III.C.2.5	Pengawasan, pengambilan & pemeriksaan sampel air bersih	169
Gambar III.C.2.6	Pengawasan, Pemeriksaan Makanan dan Minuman	173
Gambar III.D.1.1	Pemberian Vaksinasi.....	180
Gambar III.D.1.2	Penerbitan ICV untuk calon jamaah umroh	182
Gambar III.D.1.3	Pemeriksaan kesehatan penumpang yang dilakukan untuk menerbitkan dokumen Kesehatan.....	184
Gambar III.D.1.4	Evakuasi penumpang	185
Gambar III.D.2.1	Pengujian Kesehatan di KKP Kelas I Makassar.....	189
Gambar III.D.2.2	Penerbitan Sertifikat P3K Alat Angkut oleh KKP Kelas I Makassar	191
Gambar III.D.2.3	Pelayanan Laboratorium di KKP Kelas I Makassar.....	195
Gambar III.D.2.4	Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV-AIDS (VCT Mobile) oleh KKP Kelas I Makassar	198
Gambar III.D.2.5	Layanan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB) oleh KKP Kelas I Makassar	199
Gambar III.D.2.6	Screening Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan.....	203
Gambar III.D.2.7	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59 Di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar.....	204
Gambar III.D.2.8	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59 Di Wilker Pelabuhan Makassar.....	205
Gambar III.D.2.9	Tes Kebugaran Metode Rockport Pada ASN KKP Kelas I Makassar	206
Gambar III.E.1	Jamaah Calon Haji di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji	223
Gambar III.E.2	Pemeriksaan Tahap Ketiga Jamaah Calon Haji	

	di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji	228
Gambar III.E.3	Meja Pemeriksaan Khusus Wanita Usia Subur (WUS) Calon Jamaah Haji	229
Gambar III.E.4	Layanan Berobat Calon Jamaah Haji di Poliklinik Asrama Haji	229
Gambar III.E.5	Pelayanan Observasi Calon Jamaah Haji di Poliklinik Asrama Haji	230
Gambar III.E.6	Layanan Rujukan Calon Jamaah Haji Menggunakan Ambulance	231
Gambar III.E.7	Penyuluhan Kesehatan Calon Jamaah Haji.....	231
Gambar III.E.8	Pengawasan kualitas makanan calon jamaah haji.....	233
Gambar III.E.9	Pengamatan dan pengendalian vector	234
Gambar III.E.10	Pengukuran suhu jamaah haji di pesawat	237

DAFTAR GRAFIK

Grafik III.A.1.1	Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar tahun 2017-2020	58
Grafik III.A.1.2	Trend Hasil Penilaian AKIP KKP Kelas I Makassar Tahun 2021 – 2022	60
Grafik III.A.1.3	Jumlah Artikel dan Berita Per Bulan Tahun 2023	66
Grafik III.A.2.1	Persuratan Per Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	75
Grafik III.A.2.2	Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perbulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	83
Grafik III.A.2.3	Distribusi Penerimaan PNBP KKP Kelas I Makassar Tahun 2017 – 2023	84
Grafik III.A.2.4	Trend Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2018–2023	85
Grafik III.B.1.1	Distribusi Jumlah Kedatangan Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	87
Grafik III.B.1.2	Distribusi Kedatangan Penumpang Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023...	88
Grafik III.B.1.3	Distribusi Kedatangan Personel Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023...	89
Grafik III.B.1.4	Distribusi Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	90
Grafik III.B.1.5	Distribusi Keberangkatan Penumpang Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	91
Grafik III.B.1.6	Distribusi Keberangkatan Personel Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	92
Grafik III.B.1.7	Distribusi Kedatangan Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	92
Grafik III.B.1.8	Kedatangan Kapal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	93

Grafik III.B.1.9	Distribusi Kedatangan Penumpang Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	95
Grafik III.B.1.10	Distribusi Kedatangan Awak Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	95
Grafik III.B.1.11	Distribusi Keberangkatan Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	97
Grafik III.B.1.12	Keberangkatan Kapal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	97
Grafik III.B.1.13	Distribusi Jumlah Keberangkatan Penumpang Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023.....	98
Grafik III.B.1.14	Distribusi Jumlah Keberangkatan Awak Kapal Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023.....	99
Grafik III.B.1.15	Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Alat Angkut Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	101
Grafik III.B.1.16	Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Barang Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	103
Grafik III.B.2.1	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Lappade Wilker Pelabuhan Parepare Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023.....	104
Grafik III.B.2.2	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Madising Na Mario Wilker Pelabuhan Parepare Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023.....	105
Grafik III.B.2.3	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Pontap Wilker Pelabuhan Palopo Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	105
Grafik III.B.2.4	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Malili Wilker Pelabuhan Malili Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	106
Grafik III.B.2.5	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Mangkoso Wilker Pelabuhan Awerange Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	106
Grafik III.B.2.6	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Padongko Wilker Pelabuhan Awerange Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023.....	107

Grafik III.B.2.7	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Bowong Cindea Wilker Pelabuhan Biringkassi Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	107
Grafik III.B.2.8	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Bajoe Wilker Pelabuhan Bone Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	108
Grafik III.B.2.9	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Caile Wilker Pelabuhan Bira Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023	109
Grafik III.B.2.10	Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Buffer KKP Induk Bandara Mgg 1 s/d 52 Tahun 2023.....	109
Grafik III.B.2.11	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Kelompok Umur di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	120
Grafik III.B.2.12	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Jenis Kelamin di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	121
Grafik III.B.2.13	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	121
Grafik III.B.2.14	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Jenis Pekerjaan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	122
Grafik III.B.2.15	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Berdasarkan Tujuan Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	123
Grafik III.B.2.16	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Riwayat Menderita Malaria di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	123
Grafik III.C.1.1	Trend Pemakaian Larvasida KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 –2023	147

Grafik III.C.2.1	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	159
Grafik III.C.2.2	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	162
Grafik III.C.2.3	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	164
Grafik III.C.2.4	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Sarana Air Bersih Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	167
Grafik III.C.2.5	Distribusi Hasil Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi TPP Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	170
Grafik III.D.1.1	Jumlah Kunjungan Poliklinik dari Tahun 2019 – 2023.....	174
Grafik III.D.1.2	Jumlah Pemberian Vaksinasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	176
Grafik III.D.1.3	Persentase dan Jumlah Pemberian Vaksinasi Berdasarkan Jenis Vaksin KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	177
Grafik III.D.1.4	Jumlah Penerbitan ICV KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	181
Grafik III.D.1.5	Distribusi Penerbitan Surat Keterangan Laik, Tidak Laik Terbang dan Izin Angkut Orang Sakit KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	182
Grafik III.D.1.6	Distribusi Penggunaan Ambulans Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	185
Grafik III.D.1.7	Distribusi Pemeriksaan/Penerbitan Dokumen Jenazah/ Abu Jenazah/ Kerangka KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	186
Grafik III.D.2.1	Jumlah Pelayanan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	188
Grafik III.D.2.2	Distribusi Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan Berdasarkan Wilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	190
Grafik III.D.2.3	Distribusi Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	190

Grafik III.D.2.4	Distribusi Penerbitan Sertifikat P3K Alat Angkut Berdasarkan Wilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	193
Grafik III.D.2.5	Distribusi Pemeriksaan Laboratorium (Plano tes) KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Wilker Tahun 2023	194
Grafik III.D.2.6	Distribusi Pemeriksaan Laboratorium (Plano tes) KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	195
Grafik III.D.2.7	Disribusi Pelaksanaan VCT Mobile KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	196
Grafik III.D.2.8	Cakupan Pelaksanaan VCT Mobile Berdasarkan Penggunaan Aplikasi SIHA.....	197
Grafik III.D.2.9	Jumlah Hasil Pemeriksaan VCT Mobile KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	198
Grafik III.D.2.10	Distribusi Pelaksanaan Deteksi Dini TB KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	200
Grafik III.D.2.11	Jumlah Hasil Pemeriksaan Mikroskopik BTA Deteksi Dini TB KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	200
Grafik III.D.2.12	Jumlah Pengambilan Sampel (Swab nasofaring) Pemeriksaan PCR Covid-19 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	202
Grafik III.D.2.13	Jumlah Hasil Pemeriksaan Antigen Covid-19 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	202
Grafik III.D.2.14	Distribusi Pengukuran Kebugaran Metode Rockport ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	207
Grafik III.D.2.15	Distribusi Pengukuran Kebugaran Metode Rockport ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	207
Grafik III.D.2.16	Distribusi Pemeriksaan Medical Check Up (MCU) ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	209
Grafik III.D.2.17	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah	209
Grafik III.D.2.18	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visus	210
Grafik III.D.2.19	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Gula Darah.....	211
Grafik III.D.2.20	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Profil Lipid	212
Grafik III.D.2.21	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fungsi Liver	213

Grafik III.D.2.22	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fungsi Ginjal	214
Grafik III.D.2.23	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asam Urat	215
Grafik III.D.2.24	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter	216
Grafik III.D.2.25	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan HBsAg.....	216
Grafik III.D.2.26	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Antistreptolysin O (ASTO)	217
Grafik III.D.2.27	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Darah Lengkap	218
Grafik III.D.2.28	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisa	218
Grafik III.D.2.29	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)	219
Grafik III.D.2.30	Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Rekomendasi Dokter	220
Grafik III.E.1	Distribusi Pemeriksaan Kesehatan Akhir Jemaah Calon Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Per Provinsi di Embarkasi Makassar Tahun 1444	225
Grafik III.E.2	Distribusi Penyakit Terbanyak pada Jemaah Calon Haji dan Petugas Kloter Yang Berangkat di Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/ 2023 M.....	226
Grafik III.E.3	Distribusi Jemaah Calon Haji Yang Risti Berdasarkan Provinsi di Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023	227
Grafik III.E.4	Distribusi Layanan Rujukan Jemaah Calon Haji Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	230
Grafik III.E.5	Distribusi Jemaah Haji Berdasarkan Daerah Asal dan Jenis Kelamin Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	235
Grafik III.E.6	Distribusi Jemaah Haji Wafat Berdasarkan Penyebab Kematian Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	236

Grafik III.E.7	Distribusi Jemaah Haji Demam dan Ada Riwayat Demam Berdasarkan Tempat Pengukuran Suhu Debarkasi Makassar 1444 H/2023 M.....	237
Grafik III.E.8	Distribusi Jemaah Haji Observasi Berdasarkan Asal Daerah dan Jenis Kelamin Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	238
Grafik III.E.9	Distribusi Jemaah Haji Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Asal Daerah Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	238
Grafik III.E.10	Distribusi Rawat Jalan Jemaah Haji Berdasarkan Klasifikasi Penyakit Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	239
Grafik III.E.11	Distribusi Rujukan Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Penyakit Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	240

DAFTAR TABEL

Tabel III.A.1.1	Revisi Anggaran KKP Kelas I Makassar Selama Tahun 2023	52
Tabel III.A.1.2	Rekapan Artikel dan Berita yang Tayang di Website KKP Makassar Tahun 2023	64
Tabel III.A.2.1	Jabatan Struktural KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	69
Tabel III.A.2.2	Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	69
Tabel III.A.2.3	Jabatan Fungsional Administrasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	70
Tabel III.A.2.4	Jabatan Pelaksana Teknis KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	71
Tabel III.A.2.5	Jabatan Pelaksana Administrasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	71
Tabel III.A.2.6	Distribusi Pegawai Berdasarkan Substansi dan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	72
Tabel III.A.2.7	Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan KKP Kelas I Makassar Tahun 2017-2023	73
Tabel III.A.2.8	Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan KKP Kelas I Makassar Tahun 2017-2023	73
Tabel III.A.2.9	Distriibusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2017-2023	74
Tabel III.A.2.10	Tata Persuratan Perbulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	75
Tabel III.A.2.11	Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	77
Tabel III.A.2.12	Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	78
Tabel III.A.2.13	Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	79
Tabel III.A.2.14	Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Penggunaan PNBP Perbulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	81
Tabel III.A.2.15	Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perbulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	83

Tabel III.A.2.16	Distribusi Penerimaan PNPB KKP Kelas I Makassar Tahun 2017-2023	84
Tabel III.A.2.17	Distribusi Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL KKP Kelas I Makassar Tahun 2018–2023	85
Tabel III.B.1.1	Distribusi Kedatangan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	87
Tabel III.B.1.2	Jumlah Kedatangan Penumpang Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	88
Tabel III.B.1.3	Jumlah Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	90
Tabel III.B.1.4	Distribusi Keberangkatan Penumpang Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	91
Tabel III.B.1.5	Distribusi Kedatangan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	93
Tabel III.B.1.6	Distribusi Kedatangan Penumpang Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	94
Tabel III.B.1.7	Distribusi Keberangkatan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	96
Tabel III.B.1.8	Distribusi Keberangkatan Penumpang Kapal Perbulan Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	97
Tabel III.B.1.9	Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Alat Angkut Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	100
Tabel III.B.1.10	Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Barang Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023	102
Tabel III.B.2.1.1	Distribusi Hasil Surveilans Migrasi Malaria Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	118

Tabel III.B.2.1.2	Distribusi Surveilans Migrasi Malaria Berdasarkan Waktu Pelaksanaan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	119
Tabel III.B.2.1.1	Distribusi Penyelidikan Epidemiologi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023.....	125
Tabel III.C.1.1	Hasil Pengamatan Tikus dan Pinjal Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	127
Tabel III.C.1.2	Distribusi Hasil Survei Kepadatan Lalat Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	132
Tabel III.C.1.3	Distribusi Hasil Survei Kepadatan Lalat setelah Pengendalian Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	133
Tabel III.C.1.4	Distribusi Hasil Survei Kepadatan Kecoak Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	136
Tabel III.C.1.5	Distribusi Hasil Survei Kepadatan Kecoak Setelah Tindakan Pengendalian Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	138
Tabel III.C.1.6	Distribusi Hasil Survei Aedes aegypti (Perimeter Area) Perwilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	141
Tabel III.C.1.7	Distribusi Hasil Survei Aedes aegypti (Perimeter Area) setelah Pengendalian Perwilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	143
Tabel III.C.1.8	Distribusi Hasil Survei Aedes aegypti (Buffer Area) Perwilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	144
Tabel III.C.1.9	Distribusi Hasil Survei Aedes aegypti (Buffer Area) setelah Pengendalian Perwilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	145
Tabel III.C.1.10	Luas Area Fogging Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	148
Tabel III.C.1.11	Hasil Survei jentik Anopheles sp. KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	150
Tabel III.C.1.12	Hasil Uji Resistensi Nyamuk Aedes aegypti Terhadap Insektisida Malathion dan Alpachypermethrin Tahun 2023	152

Tabel III.C.1.13	Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal/Pesawat) Tahun 2023	153
Tabel III.C.1.14	Hasil konfirmasi bakteri leptospira pada sampel ginjal tikus tertangkap di perimeter area Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar	156
Tabel III.C.2.1	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	158
Tabel III.C.2.2	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Pesawat Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	160
Tabel III.C.2.3	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	162
Tabel III.C.2.4	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	163
Tabel III.C.2.5	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Sarana Air Bersih Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	166
Tabel III.C.2.6	Distribusi Hasil Pengujian Kualitas Air Bersih Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	167
Tabel III.C.2.7	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi TPP Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	171
Tabel III.C.2.8	Distribusi Hasil Pemeriksaan Sampel Makanan/Minuman Berdasarkan Jenis Pemeriksaan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	172
Tabel III.D.1.1	Distribusi Jenis Pelayanan Kesehatan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023	175
Tabel III.D.1.2	Distribusi Pemberian Vaksinasi Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	177
Tabel III.D.1.3	Distribusi Pemberian Vaksinasi Meningitis Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	178
Tabel III.D.1.4	Distribusi Pemberian Vaksinasi Yellow Fever Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	179

Tabel III.D.1.5	Distribusi Pemberian Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	179
Tabel III.D.1.6	Distribusi Penerbitan ICV Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	181
Tabel III.D.1.7	Distribusi Penerbitan SIAOS Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	183
Tabel III.D.1.8	Distribusi Penerbitan SKLT Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	183
Tabel III.D.1.9	Distribusi Penerbitan SKTLT Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	184
Tabel III.D.1.10	Distribusi Pemeriksaan/Penerbitan DokumenJenazah/ Abu Jenazah/ Kerangka Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	187
Tabel III.D.2.1	Penerbitan Sertifikat P3K di KKP Kelas I Makassar Tahun 2019-2023	192
Tabel III.D.2.2	Penerbitan Sertifikat P3K di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023	193
Tabel III.E.1	Distribusi Jamaah Calon Haji dan Petugas Kloter Yang Berangkat Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	224
Tabel III.E.2	Distribusi Jamaah Calon Haji dan Petugas Kloter Yang Berangkat Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	224
Tabel III.E.3	Distribusi Jamaah Calon Haji Risiko Tinggi Berdasarkan Asal Provinsi dan Jenis Kelamin Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	226
Tabel III.E.4	Distribusi Jamaah Calon Haji Yang Risti Berdasarkan Asal Provinsi Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M.....	227

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar ditetapkan menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Penggunaan nomenklatur Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dimulai tanggal 1 Januari 2024.

Karantina berasal dari bahasa latin “Quadraginta” yang berarti 40. Angka 40 berasal dari peristiwa isolasi yang dilakukan terhadap penderita penyakit menular selama 40 hari agar tidak menyebar ke orang lain. Tahun 1911 di Indonesia penyakit pest muncul di Surabaya, tahun 1916 muncul pest di Semarang dan tahun 1923 pest muncul dengan masuk melalui Pelabuhan Cirebon. Pada waktu itu regulasi yang berlaku adalah Quarantine Ordonantie (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911), penanganan kesehatan di Pelabuhan dilaksanakan oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) dibawah Haven Master (Syahbandar). Pada waktu itu Haven Art hanya ada dua yaitu di Pulau Rubiah (Sabang) dan di Pulau Onrust di Teluk Jakarta. Tahun 1949 pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan Karantina yaitu Pelabuhan Karantina Kelas I Tanjung Priok dan Sabang, Pelabuhan Karantina Kelas II Surabaya dan Semarang serta Pelabuhan Karantina Kelas III Cilacap.

Inilah awal keberadaan Kesehatan Pelabuhan di Indonesia. Tahun 1959 Indonesia mengeluarkan PP No. 53 tentang penyakit Karantina dan tahun 1962 dibuat UU Karantina No. 1 tentang Karantina Laut dan No. 2 tentang Karantina Udara. Tahun 1970 terbit SK Menteri Kesehatan No.1025/DD/Menkes/78 tentang pembentukan Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi Kantor Kesehatan Pelabuhan, dengan Eselon IIIB, yakni 10 KKP Kelas A dan 34 KKP Kelas B. Tahun 1985 terbit SK Menkes No.630/Menkes/XII/85 menggantikan SK No. 147/Menkes/IV/78, Jumlah KKP Kelas B bertambah 2 yaitu Bengkulu dan Dilli sehingga jumlah seluruh KKP menjadi 46. Tahun 2004 terbit SK Menkes No.265/Menkes/SK/III/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, bahwa klasifikasi KKP berubah menjadi KKP Kelas I, II dan III.

Kemudian pada tahun 2007, terbit Permenkes nomor 167 merupakan perbaikan Kepmenkes No. 265 yakni penambahan KKP kelas III menjadi 32 KKP sekaligus wilayah kerjanya dan pada tahun 2008 perubahan Permenkes menjadi No. 356 yang didalamnya

terdapat beberapa perubahan. Pada tahun 2011 terjadi lagi perubahan Permenkes menjadi nomor 2348 dengan penambahan satu kelas KKP Kelas IV, yaitu Yogyakarta. Aturan tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan terus mengalami perubahan. Tahun 2020 terbit Permenkes nomor 77 dimana struktur organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan mengalami perubahan dengan menyederhanakan jabatan struktural menjadi Kepala Kantor dan Subbagian Administrasi Umum sedangkan Eselon III dan IV lainnya disetarakan menjadi jabatan fungsional. Terakhir tahun 2021 terbit Permenkes nomor 33 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan struktur organisasi masih sama seperti sebelumnya dan penambahan dua KKP baru yakni KKP Kelas IV Entikong di Kalimantan Barat dan KKP Kelas IV Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur sedangkan KKP Kelas IV Yogyakarta berubah menjadi KKP Kelas III Yogyakarta. KKP Kelas I Makassar masih mencapai nilai klasifikasi sebagai KKP Kelas I berdasarkan Permenkes No. 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat negara. Tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus berupaya membuat kebijakan untuk menanggulangi serta mencegah penyebaran Covid-19. Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit juga meningkatkan peran dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mencegah penyebaran Covid-19 melalui pintu masuk Bandara dan Pelabuhan. Nama Kantor Kesehatan Pelabuhan menjadi lebih dikenal oleh masyarakat terutama oleh pengguna jasa Pelabuhan dan Bandara terkait peningkatan pengawasan keluar masuknya orang melalui pintu masuk Pelabuhan dan Bandara.

Penyusunan Profil KKP Kelas I Makassar dilakukan setiap tahun untuk memperbarui informasi dan kegiatan yang dilaksanakan serta dapat melihat perbandingan data hasil kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam penyusunan profil ini diperlukan upaya perbaikan dari segi materi, analisis maupun tampilan data, karena profil menjadi salah satu bahan monitoring dan evaluasi program selanjutnya. Dalam profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar ini data disajikan dalam bentuk narasi, tabel, grafik dan analisis.

Data berasal dari hasil kegiatan masing-masing Substansi yaitu Substansi Tata Usaha, Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Pengendalian Risiko Lingkungan, serta Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah. Kegiatan di wilayah kerja Kantor

Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah dituangkan melalui pembahasan kegiatan tiap substansi. Beberapa kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama tahun 2023 di KKP Kelas I Makassar juga dibahas dalam profil ini.

Pada tahun 2023 pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir dengan terbitnya Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia. Keppres tersebut mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023. Pada saat Keppres mulai berlaku sejumlah Keppres sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan tersebut adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19, Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, dan Keppres Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Penyusunan profil ini diharapkan dapat memberikan gambaran KKP Kelas I Makassar kepada masyarakat luas terutama dari segi tugas pokok dan fungsi KKP sehingga dapat dikenal lebih baik. Selain itu dapat menjadi bahan evaluasi dan monitoring kepada pimpinan terkait pelaksanaan kegiatan.

B. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
3. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;
4. UU Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
5. UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 Tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501 tahun 2010 Tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah & Upaya penganggulangnya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitas (FAL) Udara;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi internasional;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
22. Kepmenkes Nomor 424 Tahun 2007 Tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina Kesehatan;
23. Keputusan Menkes Nomor 612/MENKES/SK/V/2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia;
24. Keputusan Menkes Nomor 1314/MENKES/SK/IX/2010 tentang Pedoman Standarisasi SDM, Sarana dan Prasarana di Lingkungan KKP;
25. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan KKP di Pintu Masuk Negara.
26. International Health Regulation Tahun 2005;

BAB II

GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI. KKP secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Klasifikasi KKP meliputi KKP kelas I, kelas II, kelas III dan kelas IV. Berdasarkan klasifikasi KKP, Makassar masih mendapat klasifikasi sebagai kelas I. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP, dapat dibentuk Wilker KKP yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal.

Terbit Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan di tahun 2023 dimana mengubah nama KKP Menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan, dimulai tanggal 1 Januari 2024. Dari segi pelaksanaan tupoksi masih sama dengan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan.

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok

Berdasarkan PMK Nomor : 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, KKP mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Berdasarkan Permenkes Nomor : 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Berdasarkan kedua Permenkes tersebut di atas, pada dasarnya tugas pokok Kantor Kesehatan Pelabuhan yang berubah nama menjadi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan masih tetap sama.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, KKP menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi KKP

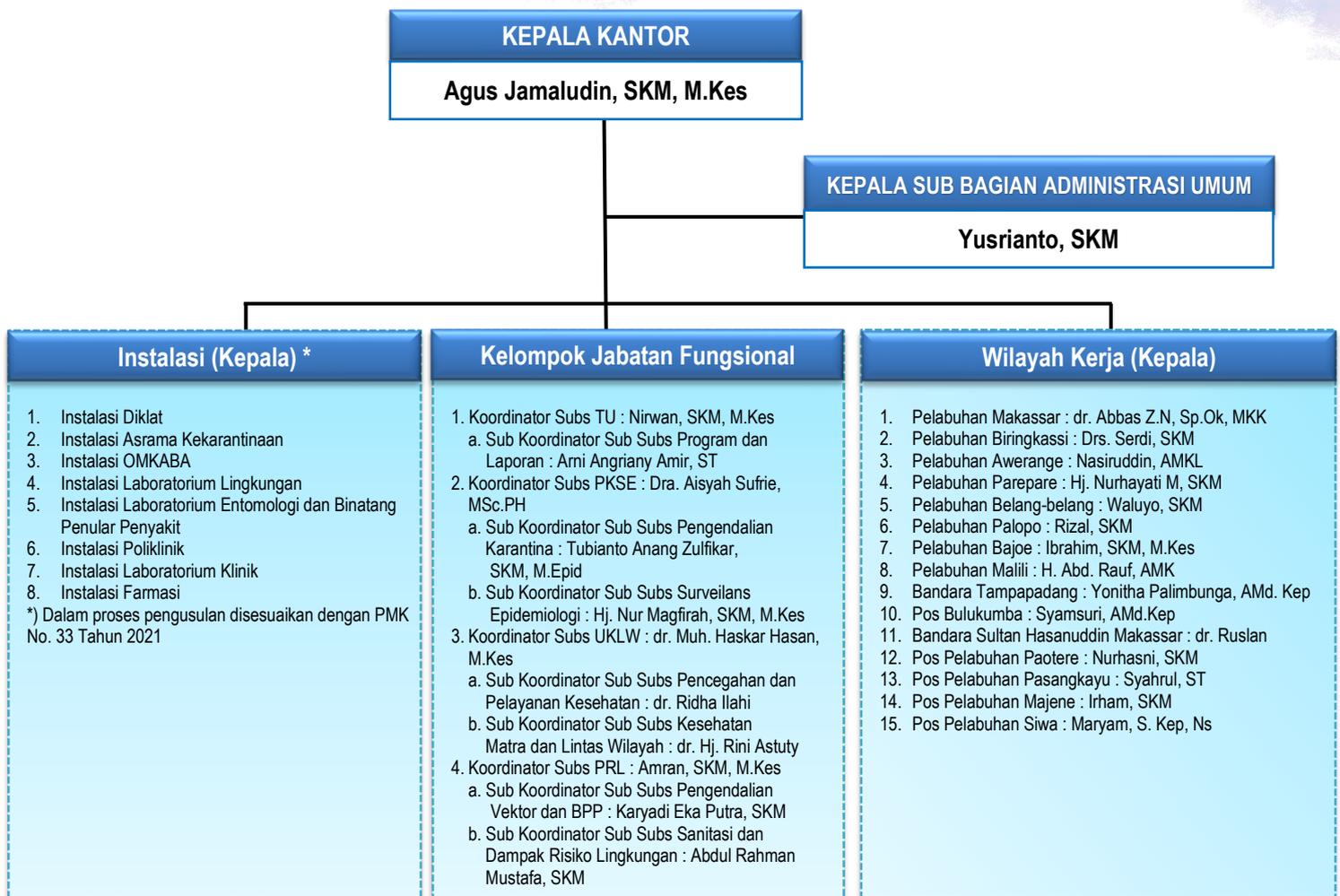
B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi dan tata kerja KKP Kelas I Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 2 November 2021. Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar terdiri atas :

1. Kepala Kantor
2. Sub Bagian Administrasi Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi

Kepala KKP Kelas I Makassar Agus Jamaludin, SKM, M.Kes dilantik pada 2 September 2022 dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Yusrianto, SKM dilantik pada 2 Oktober 2023 dan menjabat hingga saat ini.

Struktur organisasi KKP Kelas I Makassar tahun 2023 lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar II.1 berikut.



Gambar II.B.1 Struktur Organisasi KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

C. VISI DAN MISI

Visi Presiden 2020-2024 yaitu : “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui sembilan misi Presiden yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa ;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja
2. Perbaiki Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
4. Pemberdayaan GERMAS
5. Memperkuat sistem Kesehatan

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni :

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko
4. Penguatan sistem tata kelola Kesehatan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi yakni :

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara
2. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

D. URAIAN TUGAS, PROGRAM, SASARAN DAN KEGIATAN

1. Uraian Tugas

1) Subbagian Administrasi Umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KKP kelas I.

2) Instalasi

- a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala KKP.
- b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KKP.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi.

3) Wilayah Kerja

- 1) Memberikan pelayanan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KKP.
- 2) Dipimpin oleh kepala Wilker, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala KKP.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

4) Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KKP sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Koordinator dan Sub Koordinator.
- 3) Koordinator dan Sub Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 4) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 5) Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- 6) Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. WILAYAH KERJA

Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar adalah Pelabuhan dan Bandara yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yakni :

1. Wilayah Kerja Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar



Gambar II.D.1
Tempat Pelayanan Kesehatan di Terminal Keberangkatan Domestik (Kiri) Dan Terminal Kedatangan Internasional (Kanan) Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar

Kantor Induk KKP Kelas I Makassar berada di kompleks Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, dimana sebelumnya berlokasi di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar. Kantor dan tempat pelayanan Wilker Bandara berada di dalam gedung Bandara (ruangan disediakan oleh pihak PT. Angkasa Pura I). Jarak yang dekat antara kantor induk dan Wilker Bandara sehingga petugas yang melaksanakan pelayanan adalah petugas dari kantor induk secara shift selama 24 jam.

Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar adalah bandar udara internasional di Sulawesi Selatan yang terletak di antara Kabupaten Maros dan Kota Makassar. Secara geografis terletak di 5.3.29,71 Lintang Selatan dan 119.33.17,65 Bujur Timur yang mana lokasi terminal penumpang berada di Kab. Maros dan sebagian area landasan pesawat berada di wilayah Administrasi Kota Makassar. Berjarak 20 km (12 mi) timur laut dari pusat kota Makassar dan dioperasikan oleh PT. Angkasa Pura I. Terminal saat ini dibuka pada tanggal 20 Agustus 2008. Bandara ini merupakan pintu gerbang utama untuk penerbangan ke bagian timur Indonesia serta menjadi salah satu bandara Internasional di kawasan Tengah dan Timur Indonesia.

Saat ini Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar melayani rute domestik dan internasional. Untuk rute domestic dilayani oleh 10 Maskapai

Penerbangan Nasional sementara untuk penerbangan Internasional dilayani oleh 4 Maskapai yakni Air Asia, Batik Air, Lion Air, dan Scoot.

Terminal ini memiliki kapasitas untuk menangani 7 juta penumpang dan saat ini masih dalam proses pengembangan dengan target peningkatan penumpang menjadi 15.5 juta penumpang per tahun jika semua terminal telah difungsikan.



Gambar II.D.2
Pengawasan Suhu pada Pelaku Perjalanan Internasional (Jamaah Umrah)



Gambar II.D.3
Kegiatan Evakuasi Penumpang dari Pesawat



Gambar II.D.4
Kegiatan Pengawasan Makanan dan Minuman serta Pengendalian Vektor di Tempat Pengolahan Pangan

2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar



Gambar II.D.5
Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Makassar

KKP Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Makassar terletak di dalam Kompleks Pelabuhan Laut Makassar tepatnya di Jalan Hatta No 3, Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar, dengan jumlah personil 19 Orang Aparatur Sipil Negara, 3 Orang Driver, 2 Orang Cleaning Service dan Kader Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan. Wilker Pelabuhan Makassar sebelumnya merupakan kantor induk KKP Kelas I Makassar dimana terdapat bangunan milik Kementerian Kesehatan namun tanah yang ditempati merupakan tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (PT. Pelindo) sehingga tanah yang digunakan tersebut dikenakan biaya sewa setiap tahun dengan perjanjian kontrak.

Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar menghadle Pelabuhan Soekarno, Pelabuhan Hatta dan Makassar New Port, Jetty Pertamina, dan Jetty Bosowa. Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dikategorikan sebagai pelabuhan kelas utama oleh Pemerintah Indonesia, bersama dengan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya, dan Pelabuhan Belawan di Medan. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Bagian Tengah dan Timur dan memiliki lalu lintas penumpang yang tinggi.

Kegiatan di Pelabuhan Laut Makassar berupa pengawasan Kedatangan kapal, penumpang dan awak kapal dari luar negeri dan domestic serta pengawasan keberangkatan kapal, penumpang dan awak kapal ke luar negeri dan domestic, Pemberian SSCEC, SSCC, Sailing Permit, Buku Kesehatan Kapal dan dokumen kesehatan atau sertifikat lainnya, layanan poliklinik dan pengobatan, system

kewaspadaan dini KLB, pemantauan kedatangan orang sakit dan izin angkut orang sakit, pengujian kesehatan, pengawasan dan penerbitan sertifikat Obat dan P3K Kapal, Pemeriksaan dan Screening Laboratorium, pengawasan dan penerbitan izin angkut jenazah, Penanganan Kegawat Daruratan dan Sistem Rujukan, Pelayanan Vaksinasi, Pengamatan dan pemberantasan nyamuk, pemberantasan tikus pinjal, pengendalian Lalat, Pengendalian Kecoa, Pengawasan penyediaan air, Pengamanan Makanan dan Minuman, Hygiene sanitasi Gedung dan Bangunan, Higiene dan Sanitasi Tempat tempat umum, Higiene sanitasi Alat Angkut dan kegiatan lainnya.



Gambar II.D.6
Kegiatan Pengendalian, Identifikasi Dan Menghitung Kepadatan Lalat Di Pelabuhan Makassar



Gambar II.D.7
Pemeriksaan Air Oleh Petugas Wilker Pelabuhan Makassar



Gambar II.D.8
Pengawasan Sanitasi Alat Angkut Oleh Petugas Wilker Pelabuhan Makassar

3. Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi



Gambar II.D.9
Kantor Wilker Pelabuhan Biringkassi

Pelabuhan Khusus Biringkassi Merupakan Pelabuhan khusus milik PT. Semen Tonasa, terletak di Kabupaten Pangkep, Wilayah kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi sebagai salah satu wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar bertanggungjawab kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Wilayah kewenangan Pelabuhan Khusus Biringkassi adalah Pelabuhan Khusus Biringkassi dan Pelabuhan Maccinibaji.

Pelabuhan Khusus Biringkassi berjarak 60 Km dari kota Makassar ditempuh dalam waktu 1 jam 30 menit dari kota Makassar terletak di Kecamatan Bungoro di sebelah Utara Kota Pangkep.

Pelabuhan Khusus Biringkassi memiliki dermaga sepanjang 2000 meter Pelabuhan ini hanya melayani kebutuhan lalu lintas barang milik PT. Semen Tonasa baik untuk kepentingan ekspor impor maupun untuk perdagangan interseluler dalam negeri. Letak pelabuhan jauh dari permukiman penduduk dan merupakan area khusus yang dibuka untuk kepentingan lalu lintas kapal / pelabuhan. Beberapa instansi yang melakukan tugas pokok dan fungsinya adalah unsur QIC dan keagenan PT. Tonasa Lines dan instansi terkait lainnya.

Pelabuhan Maccinibaji adalah pelabuhan milik kementerian perhubungan dengan jarak dari pelabuhan biringkassi sekira 14 km yang terletak disebelah Barat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep memiliki dermaga sepanjang 800 meter yang melayani lalulintas orang dan barang. Pelabuhan ini khusus melayani kapal penumpang antar pulau dan kapal kayu dengan muatan semen tonasa.

Adapun kegiatan yang dilakukan di Pelabuhan Biringkassi dan Pelabuhan Maccini Baji mewakili semua kegiatan substansi di kantor induk adalah sebagai berikut :

a. Kekarantinaan



Gambar II.D.10
Pengawasan Kapal Dari Dalam Dan Luar Negeri

Pengawasan kapal dari dalam negeri dan luar negeri di pelabuhan biringkassi dan pelabuhan maccinibaji dengan pemeriksaan suhu, saturasi, sanitasi kapal, pemeriksaan, pemeriksaan tanda-tanda kehidupan tikus, pemeriksaan tanda-tanda kecoa dan serangga penular penyakit menular lainnya, pemeriksaan personal hygiene penjamah makanan, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan obat dan P3K dan pemeriksaan air bersih.

b. Surveilans Epidemiologi

Surveilans migrasi dilakukan di Pelabuhan Maccini Baji pada kapal yang datang dari daerah terjangkit. Adapun kegiatan surveilans migrasi sebagai berikut :



Gambar II.D.11
Surveilans Migrasi Malaria di Wilker Biringkassi

Untuk cegah tangkal penyakit yang masuk dari negara atau daerah terjangkit dilakukan surveilans epidemiologi terhadap Penyakit PHEIC pada awak dan penumpang yang datang di Pelabuhan Biringkassi dan Maccini Baji :



Gambar II.D.12
Surveilans Epidemiologi di Wilker Biringkassi

c. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah

1) Evakuasi Pasien



Gambar II.D.13
Evakuasi Pasien oleh Petugas Wilker Biringkassi

2) Posko Nataru



Gambar II.D.14
Posko Terpadu Pelabuhan Maccini Baji

Pelaksanaan Posko Natal dan Tahun Baru (Nataru) bekerja sama dengan lintas sektor dan lintas program dalam posko terpadu.

d. Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan

1) Pemeriksaan Sanitasi Kapal



Gambar II.D.15
Pemeriksaan Sanitasi Kapal oleh Petugas Wilker Biringkassi

2) Pemeriksaan Vektor

Pemeriksaan vektor yang dilaksanakan yakni pemeriksaan jentik, lalat, pemasangan perangkap tikus, pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), dan pemeriksaan air bersih.



Gambar II.D.16
Pemeriksaan Jentik dan Lalat oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi



Gambar II.D.17
Pemeriksaan Jentik oleh Petugas dan Kader Wilker Biringkassi



Gambar II.D.18
Pemeriksaan TPM dan Air Bersih di Wilker Biringkassi

4. Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare



Gambar II.D.19
Kunjungan Dirjen P2P di Kantor Wilker Pelabuhan Parepare

Pelabuhan Parepare terletak di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 170 KM sebelah utara Kota Makassar. Merupakan pelabuhan alam yang terbagi atas 3 lokasi pelabuhan, yaitu : Pelabuhan Nusantara, Cappa Ujung dan Lontange ditambah Pelabuhan Khusus Pertamina. Luas Pelabuhan Nusantara 11.987 M2, sedangkan Cappa Ujung seluas 11.552 M2 dan Lontange seluas 10.160 M2. Panjang dermaga Pelabuhan Nusantara adalah 325 meter, sedangkan panjang dermaga Cappa Ujung 275 meter dan Lontange adalah 75 meter.

Fungsi Pelabuhan Nusantara adalah sebagai pelabuhan penumpang, sedangkan Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai pelabuhan barang/kontainer dan Pelabuhan Lontange sebagai pelabuhan rakyat.

Pelabuhan ini sangat ramai karena menjadi pelabuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tujuan Tawau, Malaysia. Beberapa perusahaan pelayaran memiliki akses langsung ke Nunukan-Tawau, Malaysia. Sejak beberapa tahun lalu telah ditetapkan sebagai pelabuhan TKI bermasalah dari Malaysia.

Wilker Pelabuhan Parepare telah memiliki gedung milik Kemenkes yang dibangun tahun 2014 berlokasi di Desa/Kec. Cappa Galung Kec. Bacukiki Parepare. Pelabuhan di wilayah Kerja Parepare sebagai salah satu Point of Entry Negara harus diawasi secara terus menerus dan berkesinambungan dari aspek kesehatan. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugasnya cegah tangkal Penyakit maupun kejadian kesehatan yang dapat menimbulkan PHEIC menempatkan personilnya dengan komposisi yang lengkap untuk melaksanakan tugas tersebut selama 24 Jam penuh. Program Kegiatan yang di laksanakan antara lain :

- a. Kegiatan Tata Usaha : Kegiatan Monitoring dan evaluasi, Bimtek serta Pembimbingan Mahasiswa Magang.



Gambar II.D.20
Pembimbingan Mahasiswa Magang di Wilker Pelabuhan Parepare

- b. Kegiatan pengendalian karantina dan surveilans epidemiologi yaitu meningkatkan pengawasan alat angkut khususnya yang berasal dari negara atau wilayah terjangkit melalui pemeriksaan dokumen kesehatan alat angkut, pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan memastikan alat angkut tersebut bebas dari faktor risiko kesehatan penularan penyakit kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan antara lain : pemeriksaan dokumen kapal (MDH, Crew List, Port of Call/ Voyage memo, Vaccination list, General Nill List, Certificate of Medicine, Ship Particular, Port Clearance, General Declration, PHQC, SSCEC/SSCC, Health Book, Certificate Of Pratique, OMKABA dan Penerbitan Setifikat Izin angkut jenazah. serta melakukan pengamatan keluar dan atau masuknya orang sakit melalui terminal penumpang baik pelabuhan maupun bandara, pemberian /pemantauan kartu kewaspadaan (HAC), melakukan pengamatan penyakit menular di daerah buffer pelabuhan/ bandara melalui analisis data laporan (W1,W2 dan sumber informasi lainnya) dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi masyarakat Pelabuhan dari sumber penularan penyakit karantina dan penyakit menular tertentu potensial wabah.
- c. Kegiatan Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah yakni kunjungan poliklinik dengan pelayanan yang di berikan yaitu pelayanan kesehatan terbatas dan sistem rujukan, penerbitan sertifikat pengujian kesehatan, surat keterangan ijin angkut orang sakit, dan pemberian vaksinasi, pengawasan / pemeriksaan jenazah, pelayanan kesehatan pada situasi khusus arus mudik lebaran, natal

dan tahun baru dan layanan VCT Mobile HIV/AIDS

- d. Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan, yakni pengendalian vektor dan binatang penular penyakit antara lain : pengamatan tikus dan pinjal, pengendalian vektor diare, pengamatan dan pengendalian nyamuk Aedes aegypti serta tindakan penyehatan alat angkut. Untuk kegiatan sanitasi lingkungan dan dampak risiko lingkungan antara lain : Pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan Hygiene dan sanitasi TTU, Gedung dan Bangunan, pengawasan penyediaan air bersih dan pengawasan makanan dan minuman serta pelaksanaan Program Pelabuhan Sehat, dimana Pelabuhan parepare sudah terbentuk "FORUM PELABUHAN SEHAT".



Gambar II.D.21
Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Parepare

5. Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange



Gambar II.D.22
Kantor Wilker Pelabuhan Awerange

Merupakan pelabuhan rakyat yang terletak di Awerange, Kabupaten Barru. Pelabuhan ini memiliki riwayat sebagai pelabuhan pengangkutan kayu dan Sembako dari dan ke Kalimantan sekaligus pelabuhan rakyat antar pulau yang menghubungkan dengan daerah Kalimantan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Barru, Pelabuhan Awerange tidak menjadi prioritas pengembangan, melainkan pembangunan pelabuhan di lokasi lainnya yaitu Pelabuhan Garongkong yang terletak di Ibukota Kabupaten Barru. Yang kini melayani berbagai kegiatan Bongkar Muat, baik dari dalam maupun Luar Negeri seperti Bongkar Batu Bara untuk keperluan Semen Bosowa, Ekspor Clinker (semen setengah jadi) ke berbagai Negara. Pelabuhan garongkong melayani tujuan Garongkong – Batulicin, dan garongkong – Paciran (Jawa Timur).

Volume alat angkut yang masuk ke Pelabuhan Awerange menunjukkan kecenderungan yang menurun sejalan berkembangnya Pelabuhan Garongkong. Wilker Pelabuhan Awerange belum memiliki gedung milik sendiri sehingga untuk pelayanan dengan menyewa tempat yang dijadikan sebagai kantor berlokasi tidak jauh dari Pelabuhan.

6. Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-belang



Gambar II.D.23
Foto Bersama Posko Terpadu Wilker Pelabuhan Belang-belang

Pelabuhan Laut Belang-Belang merupakan salah satu Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang terletak pada daerah Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju), dan jarak antara Kantor Induk (Makassar) dengan Pelabuhan Laut Belang-Belang kurang lebih 545 km, dan jarak dari Kota Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju) kurang lebih 45 km. Wilker Pelabuhan Belang-belang belum memiliki Gedung milik sendiri, saat ini masih berkantor bersama KUPP Belang-belang.

Pelabuhan Laut Belang-Belang merupakan salah satu sarana yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk kegiatan Transportasi Laut antar Pulau. Adapun kegiatan yang dilakukan seperti pembongkaran semen dari Tarjun (Batulicin), Makassar (Semen Bosowa) dan dari Pelabuhan Biringkassi (Semen Tonasa), pembongkaran pupuk dari Bontang dan pemuatan material bangunan ke Balikpapan, sesekali pelabuhan ini juga menjadi tempat pemuatan inport Aspal dan bahan bangunan yang berasal dari China dan Singapura. Volume kapal yang datang dan berangkat di Pelabuhan Laut Belang-Belang, Pelabuhan Babana tiap bulannya masing-masing antara 30 – 50 kapal per bulan, Pelabuhan Khusus Bonemanjeng tiap bulannya antara 5 – 10 kapal per bulan sementara kapal asing di Pelabuhan Khusus Tanjung Bakau berkisar antara 30 – 50 kapal dan kapal lokal berkisar antara 10 – 30 kapal setiap bulannya.

Wilker Pelabuhan Belang-belang mengakomodir pelayanan beberapa Pelabuhan yakni :

a. Pelabuhan Sampaga

Pelabuhan Sampaga \pm 30 km ke utara Pelabuhan Belang-Belang, ini merupakan pelabuhan kecil yang melayani rute ke Kalimantan dengan muatan hasil pertanian. Kapal yang berlabuh di pelabuhan ini adalah antara Gross Tonnage 10 – 200.

b. Pelabuhan Khusus Cinoki

Pelabuhan Khusus Cinoki merupakan pelabuhan milik Perusahaan Astra Group, merupakan pelabuhan di wilayah Mamuju Utara yang jarak tempuh dari Pelabuhan Belang-Belang \pm 210 km ke arah utara. Pelabuhan ini melayani rute Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera dengan muatan hasil produk dari kelapa sawit dari perusahaan Astra Group. Kapal yang berlabuh di pelabuhan ini adalah antara Gross Tonnage 50 – 7.000.

c. Pelabuhan Khusus Bonemanjeng

Pelabuhan Khusus Bonemanjeng merupakan pelabuhan milik Perusahaan Astra Group, merupakan pelabuhan di wilayah Mamuju Utara yang jarak tempuh dari Pelabuhan Belang-Belang \pm 220 km ke arah utara. Pelabuhan ini melayani rute Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan Sumatera dengan muatan hasil produk dari kelapa sawit dari perusahaan Astra Group. Kapal yang berlabuh di pelabuhan ini adalah antara Gross Tonnage 50 – 7.000.

d. Pelabuhan Lariang

Pelabuhan Lariang merupakan pelabuhan tambang pasir berada di wilayah Mamuju Utara yang jarak tempuh dari Pelabuhan Belang-Belang \pm 260 km ke arah utara. Pelabuhan ini melayani rute Nusantara dengan muatan pasir dan batu koral, Kapal yang berlabuh di pelabuhan ini adalah antara Gross Tonnage 50 – 4.000.

e. Pelabuhan Randomayang

Pelabuhan Randomayang merupakan pelabuhan rakyat, merupakan pelabuhan di wilayah Mamuju Utara yang jarak tempuh dari Pelabuhan Belang-Belang \pm 300 km ke arah utara. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang paling utara diperbatasan Sulawesi Barat dengan Sulawesi Tengah. Pelabuhan ini melayani rute Nusantara dengan muatan hasil pertanian dan bahan tambang (Pasir dan Batu koral). Kapal yang berlabuh di pelabuhan ini adalah antara Gross Tonnage 50 – 4.000.

Pelabuhan disekitar Wilker Belang-Belang saat ini ditangani dengan tenaga yang ada dengan pelayanan *calling by phone* jika ada perlu pelayanan yang kedatangan dan keberangkatan kapal baik kapal barang maupun kapal penumpang.



Gambar II.D.4
Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Belang-belang

7. Wilayah Kerja Bandara Tamba Padang



Gambar II.D.25
Gedung Kantor Wilker Bandara Tamba Padang

Kantor Wilayah Kerja Tamba Padang terletak di Lombang-Lombang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dengan jarak ± 37 KM dari kota Mamuju dan ± 496 KM dari Kantor Induk Makassar. Wilayah Kerja Bandara Tamba Padang melayani Bandara Tamba Padang dan dua Pos yaitu Pos Pelabuhan Simboro, yang melayani Pelabuhan Laut Simboro dan Pelabuhan Mamuju, serta Pos Pelabuhan Majene yang melayani Pelabuhan Passarang, Pelabuhan Palipi (Majene) dan Pelabuhan Tanjung Silopo (Polewali Mandar).

Bandara Tamba Padang terletak di Provinsi Sulawesi Barat, dengan jarak ± 30 KM dari kota Mamuju. Bandara ini merupakan bandara utama di Provinsi ini. Bandara ini mulai difungsikan sejak berdirinya Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini Bandara Tamba Padang melayani rute dengan tujuan Makassar. Pos Pelabuhan Laut Mamuju terletak di Kabupaten Mamuju dengan jarak ± 37 KM dari Kantor Wilker.

Pos Pelabuhan Majene terletak di Kabupaten Majene dengan jarak ± 188 km dari kantor Wilker. Beberapa kegiatan di Wilayah Kerja Bandara Tamba Padang dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.D.26
Pemasangan Perangkat Tikus, Survey Lalat Dan Survey Kecoa



Gambar II.D.27
Survey Anopheles dan survey jentik Aedes



Gambar II.D.28
Pemeriksaan Air dan Pemeriksaan Makanan



Gambar II.D.29
Pemeriksaan Sanitasi Pesawat dan Sanitasi Kapal



Gambar II.D.30
Pemeriksaan kesehatan untuk Kier, rujukan ke RS, dan pelaksanaan vaksinasi



Gambar II.D.31
Pengawasan PHEIC, pengawasan keberangkatan kapal luar negeri, pemeriksaan P3K kapal dan pesawat

8. Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo



Gambar II.D.32
Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Palopo

Pelabuhan Laut Palopo adalah salah satu pelabuhan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di pantai timur Sulawesi Selatan, bagian utara dari Teluk Bone.

Pelabuhan Palopo merupakan pelabuhan utama, di samping beberapa pelabuhan lain seperti Pelabuhan Khusus Pertamina, Pelabuhan Pabrik Plywood di Bua dan Pelabuhan Bonepute yang menjadi area kerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Palopo.

Luas Perimeter Wilayah Pelabuhan Laut Palopo adalah 4 (Empat) Ha sedangkan Wilayah Buffernya adalah 20 (Dua Puluh) Ha. Hinterland Pelabuhan Palopo meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja dimana Kabupaten Luwu dan Luwu Utara merupakan daerah agraris penghasil kakao, kelapa sawit dan beras. Sehingga muatan / bongkar kapal antar pulau melalui Pelabuhan Palopo antara lain beras, CPO (Minyak Sawit Mentah), Plywood (Kayu Lapis), Kayu Logs, Kernel (Biji Kelapa Sawit) dan Kakao. Begitu pula Kabupaten Tana Toraja yang menjadi tujuan wisatawan mancanegara menjadikan Pelabuhan Palopo sebagai salah satu pelabuhan transit kapal yang mengangkut wisatawan mancanegara.

Selain dari keempat pelabuhan tersebut di atas, terdapat satu bandar udara bertaraf domestik yang menjadi area kerja dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Palopo yakni Bandar Udara Ilagaligo atau dikenal juga dengan Bandar Udara Bua. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi selatan dengan jarak kurang lebih 15 km dari pusat Kota Palopo. Bandar Udara Bua sangatlah potensial karena melayani penumpang dari 4 kabupaten yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo. Saat ini sudah ada dua maskapai yang melayani rute Makassar – Luwu dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit dengan kapasitas seat masing masing ± 70 kursi.

Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo melaksanakan kegiatan mewakili semua substansi yang ada di kantor induk yakni :

- a. Kegiatan substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah yakni pemeriksaan kesehatan pelaut, pemberian Vaksinasi Meningitis Meningococcus, pemberian Vaksinasi Yellow Fever dan pemeriksaan P3K di Kapal



Gambar II.D.33
Kegiatan Susbtansi UKLW Wilker Pelabuhan Palopo

- b. Kegiatan substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi yakni Penerbitan Dokumen Kapal, Surveilans Imigrasi Malaria, dan Pengawasan Pelaku Perjalanan



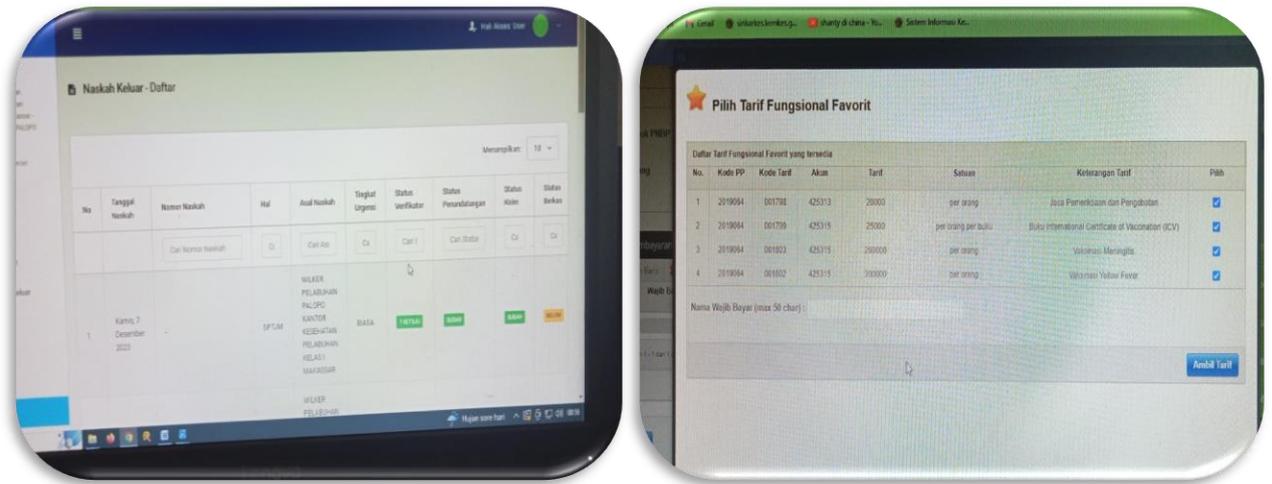
Gambar II.D.34
Kegiatan Susbtansi PKSE Wilker Pelabuhan Palopo

- c. Kegiatan substansi Pengendalian Risiko Lingkungan yakni Survey Jentik DBD, Survey Lalat dan Kecoak, Pemasangan Perangkap Tikus (Trapping), Pengawasan TPM dan TTU, Pengawasan Sanitasi Kapal, Fogging dan Uji Resistensi Nyamuk.



Gambar II.D.35
Kegiatan Susbtansi PRL Wilker Pelabuhan Palopo

- d. Kegiatan substansi Tata Usaha yakni Pembuatan Billing PNBP, Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar, Pembuatan Surat Tugas di Srikandi dan Pembuatan Laporan.



Gambar II.D.36
Pembuatan surat Srikandi dan Billing PNBP Wilker Pelabuhan Palopo

9. Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe



Gambar II.D.37
Gedung Wilker Pelabuhan Bajoe

Pelabuhan Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan merupakan pelabuhan penyeberangan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pelabuhan.

Pelabuhan Penyeberangan Bajoe dengan luas 94,735 Hektar melayani kapal dalam negeri baik kapal ferry yang mengangkut barang dan penumpang melayani penyeberangan dari Pelabuhan Bajoe Kabupaten Bone ke Pelabuhan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dan kapal antar pulau yang mengangkut barang.

KKP Kelas I Makassar Wilker Bajoe mempunyai kantor yang dibangun pada tahun 2016 merupakan milik Kementerian Kesehatan dan terletak di Kelurahan Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang berjarak \pm 1 km dari pelabuhan Bajoe.

Pegawai KKP Wilker Bajoe tahun 2023 sebanyak 5 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh Wilker Pelabuhan Bajoe diantaranya :

a. Pengawasan lalu lintas kapal dan penumpang

Wilker Bajoe yang terletak di Kabupaten Bone melayani pelabuhan penyeberangan Bajoe dan pelabuhan Rakyat Bajoe. Pelabuhan penyeberangan Bajoe yang dilayani alat angkut berupa kapal Ferry menuju Kolaka dan sebaliknya yang memuat barang dan penumpang sedangkan pelabuhan rakyat Bajoe dengan alat angkut kapal non Ferry mengangkut

logistic antar pulau daerah bagian timur Indonesia. Jumlah kapal yang datang dan berangkat di Pelabuhan Bajoe yakni sebanyak 1.856 kapal terdiri dari 1.070 kapal Ferry dan 786 Non Ferry. Penumpang kapal sebanyak 361.570 orang terdiri dari 170.381 orang yang datang dan 191.189 orang yang berangkat selama tahun 2023.

b. Penerbitan dokumen kesehatan kapal

Penerbitan dokumen kesehatan kapal di Wilker Pelabuhan Bajoe yakni COP, SSCEC/SSCC, P3K, PHQC, Healthbook, ICV dan Keur.

c. Pengawasan lalu lintas jenazah dan orang sakit

Pengawasan lalu lintas jenazah dan orang sakit yang dilaksanakan di Pelabuhan Bajoe berasal dari Pelabuhan Kolaka Sulawesi Tenggara.

d. Pengawasan faktor risiko lingkungan di Pelabuhan dan Alat Angkut

Pengawasan faktor risiko lingkungan pada bangunan dan container wilayah perimeter dan buffer.

e. Pemasangan perangkap tikus

Pemasangan perangkap tikus di Wilker Pelabuhan Bajoe sebanyak 400 perangkap per bulan, kecuali pada bulan Maret dan Juni. Tikus tertangkap paling banyak sebelas ekor pada bulan Januari. Pemasangan perangkap tikus sebagai salah satu kegiatan pengendalian vektor.

f. Pelayanan vaksinasi

Pelayanan vaksinasi yang dilaksanakan di Pelabuhan Bajoe yakni vaksinasi *Meningitis Meningococcus* bagi jamaah umrah. Paling banyak pada bulan Januari sebanyak 94 orang.

g. Penerimaan PNBP

Beberapa kegiatan di Wilker Pelabuhan Bajoe menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang dihasilkan oleh Wilker Pelabuhan Bajoe paling banyak di Bulan Mei sebesar Rp.33.220.000,-.



Gambar II.D.38
Pelaksanaan Kegiatan di Wilker Pelabuhan Bajoe

10. Wilayah Kerja Pelabuhan Malili



Gambar II.D.39
Kantor Wilker Pelabuhan Malili

Pelabuhan Laut Malili terletak di Kabupaten Luwu Timur tepatnya berada di wilayah paling timur Provinsi Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, berjarak 650 KM dari Kota Makassar, yang memiliki beberapa pelabuhan yang masuk pengawasan Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar, adapun beberapa pelabuhan yang menjadi tugas pengawasan oleh Wilker Pelabuhan Malili adalah sebagai berikut :

a. Pelabuhan Umum Syahbandar Lampia

Pelabuhan umum Syahbandar Lampia merupakan salah satu pelabuhan yang baru dibuka pada tahun 2020 yang terletak di daerah lampia kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pelabuhan ini berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.



Gambar II.D.40
Pelabuhan Umum Syahbandar Lampia

b. Pelabuhan/Terminal khusus PT. Vale Balantang Port

Pelabuhan Balantang merupakan pelabuhan khusus PT. Inco (Sekarang bernama PT. Vale) dimana Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale adalah pelabuhan yang terletak di daerah Balantang yang merupakan pelabuhan khusus PT. Vale yang bersebagai pelabuhan bongkar muat khusus logistik dan material seperti batubara, sulfur, kerikil silika dan terminal kountainer serta digunakan untuk mengangkut/pemuatan biji nikel yang akan diekspor ke luar negeri.

c. Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri (PT. CLM)

Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Citra Lampia Mandiri terletak didaerah lampia kecamatan malili jetty PT. CLM sangat berdekatan dengan pelabuhan umum syabandar lampia dipelabuhan ini khusus melakukan kegiatan pengangkutan Nickle Ord yang di didistribusikan kebeberapa perusahaan simelter diwilayah sulawesi

d. Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale Mangkasa Point

Pelabuhan/Terminal Khusus PT. Vale Mangkasa Point juga merupakan terminal khusus PT. Vale sebagai pelabuhan khusus tempat tangki timbun bahan bakar minyak [BBM] dimana pelabuhan ini hanya khusus melakukan kegiatan pembongkaran BBM untuk perusahaan PT. Vale

e. Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara

Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara adalah pelabuhan umum yang merupakan pelabuhan yang menjadi wilayah kerja syahbandar malili pelabuhan ini terletak didaerah Munte Kabupaten Luwu Utara di pelabuhan ini juga melakukan kegiatan bongkar muat seperti BBM Industri dan pengiriman minyak CPO



Gambar II.D.41
Pelabuhan Munte Kabupaten Luwu Utara

11. Pos Pelabuhan Bulukumba



Gambar II.D.42
Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Bira Bulukumba

Pelabuhan Bulukumba belum memiliki Gedung milik Kemenkes sehingga untuk pelayanan kekarantinaan dilakukan dengan menyewa ruangan milik UPT ASDP Pelabuhan Penyeberangan Bira tiap tahun.

Pelabuhan Bira merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di desa Bira, Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Luas pelabuhan tersebut mencapai 24,5 ha. Pelabuhan ini dibuat untuk memenuhi aktivitas orang lain bepergian. Pelabuhan tersebut juga memiliki peran yang besar dalam kelancaran lalu lintas antar pulau. Pelabuhan ini juga menjadi tempat bongkar muat barang dan komoditas hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok lain. Dengan adanya pelabuhan inilah, prasarana desa Bira serupa jalan, listrik, dan drainase meningkat yang menunjukkan adanya pengaruh pelabuhan, yang juga ditunjukkan pada adanya peningkatan sektor jasa dan perdagangan.

12. Pos Pelabuhan Paotere



Gambar II.D.43
Kantor Pelayanan Pos Pelabuhan Paotere

Pelabuhan Paotere adalah salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, yang merupakan warisan dari Kerajaan Gowa-Tallo, pada abad ke-14. Pelabuhan Paotere terletak di Kec. Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. berjarak 5 km dari pusat Kota Makassar.

Pelabuhan ini merupakan tempat persinggahan berbagai kapal layar masyarakat Sulawesi yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain sebagai pelabuhan perahu-perahu rakyat, seperti Phinisi dan Lambo, pelabuhan ini juga masih dipakai untuk bongkar muat barang dan pusat niaga para nelayan.

13. Pos Pelabuhan Siwa

Pelabuhan Bangsalae Laut Siwa menjadi satu-satunya jalur laut yang ada di Kec. Pitumpanua yang merupakan interkoneksi antar wilayah melalui jalur laut yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara dan Indonesia Bagian Timur. Pelabuhan Bangsalae seringkali dijadikan sebagai wisata pantai bagi masyarakat. Pelabuhan Bangsalae Siwa yaitu pelabuhan dengan fungsi sebagai pelabuhan penyebrangan dimana keadaan lautnya sangat tenang karena berada di dalam alur sungai.

Pada pelabuhan Penyeberangan Siwa digunakan oleh kapal Roro Ferry yang lintasan pengeberangan Siwa Tobaku. Sedangkan untuk Pelabuhan laut Siwa melayani Kapal Fiber dengan Lintasan Siwa Tobaku. Untuk pelayanan yang dilaksanakan di Pos Pelabuhan Siwa yakni :

- a. PKSE : kegiatan penerbitan dokumen kesehatan, pengawasan penumpang, Survey Malaria.



Gambar II.D.44
Pengawasan Penumpang Pelabuhan Siwa



Gambar II.D.45
Surveilans Migrasi Malaria Pelabuhan Siwa

- b. UKLW : Ijin Angkut Orang Sakit, Ijin Angkut Jenazah, Pemeriksaan P3K, Pemeriksaan HIV dan ILI.



Gambar II.D.46
Pemeriksaan P3K Kapal Pelabuhan Siwa



Gambar II.D.47
Pemeriksaan HIV dan ILI Pelabuhan Siwa

- c. PRL : Survey Jentik, Survey Lalat, Pemasangan Trapping, Penyehatan Alat angkut, Pengendalian Lalat/Spraying, Pemeriksaan Kadaluarsa Makanan pada situasi Khusus, Pemeriksaan Sample Air.



Gambar II.D.48
Pemasangan Perangkap Tikus Pelabuhan Siwa



Gambar II.D.49
Survey Lalat dan Jentik Pelabuhan Siwa



Gambar II.D.50
Pemeriksaan Kadaluarsa Makanan, Pemeriksaan Sampel Air, dan Penyehatan Alat Angkut Pelabuhan Siwa

14. Pos Pelabuhan Majene



Gambar II.D.51
Pelaksanaan Kegiatan di Pos Pelabuhan Majene

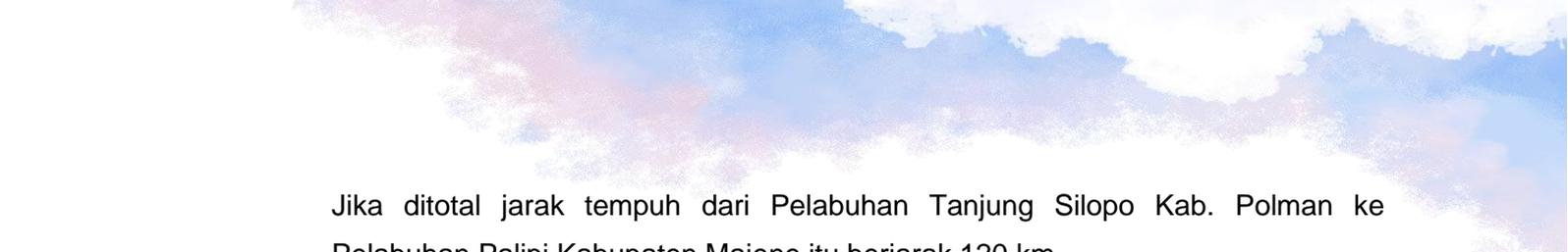
Pelabuhan Majene terletak di kecamatan Banggae kelurahan Majene Sulawesi Barat Indonesia yang merupakan salah satu pelabuhan yang hanya dapat dimasuki oleh perahu tradisional atau kapal kapal kecil nelayan, sehingga kapal yang berukuran besar seperti kapal Pelni tidak memungkinkan untuk berlabuh atau bersandar. Pelabuhan Majene digunakan untuk menopang kehidupan masyarakat sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan.

Pos pelabuhan Majene melayani 3 (tiga) pelabuhan, dua diantaranya berada di Kabupaten Majene dan satunya berada di Kabupaten Polewali Mandar.

Pelabuhan pertama adalah pelabuhan Passarang yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Deteng Deteng sekitar 5 km dari pusat kota Majene kearah utara. Adapun kapal yang masuk dipelabuhan ini KMN, KLM dan Kapal Perintis.

Pelabuhan kedua adalah pelabuhan Palipi yang berada di desa Sendana Kec. Sendana Kab. Majene dengan jarak tempuh sekitar 45 km kearah utara dari kota Majene. Sama dengan pelabuhan Passarang di pelabuhan Palipi juga melayani KMN, KLM dan Kapal Perintis.

Pelabuhan ketiga adalah pelabuhan Tanjung Silopo yang berada di desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang berjarak 75 km dari Majene. Dipelabuhan ini melayani KMN, KLM, Kapal Perintis, Kapal Cargo dan Kapal Luar Negeri (Sabah Malaysia).



Jika ditotal jarak tempuh dari Pelabuhan Tanjung Silopo Kab. Polman ke Pelabuhan Palipi Kabupaten Majene itu berjarak 120 km.

Petugas di Pos Pelabuhan Majene melaksanakan kegiatan PRL pada ketiga pelabuhan diatas, diantaranya: Pemeriksaan Air Bersih, Sanitasi Gedung, Pengawasan Tempat Tempat Umum, Pengawasan Tempat Makanan Jajanan, Survey Jentik Aedes, Survey Kepadatan Lalat, Pemasangan Perangkap Tikus, Survey Kecoak.

15. Pos Pelabuhan Pasangkayu



Gambar II.D.52
Survey Lalat dan Jentik Pelabuhan Siwa

Pos Pelabuhan Pasangkayu terletak Jalan Imam Bonjol Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pelabuhan Pasangkayu merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-Belang dan tahun 2023 Pos Pelabuhan Pasangkayu menjadi sebuah Pos Pelabuhan , Pos Pelabuhan Pasangkayu berjarak sekitar 276 KM dari Ibukota Provinsi Sulawesi Barat dan jarak dari Kantor Induk Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sekitar 700 KM. Pos Pelabuhan Pasangkayu mempunyai 4 Pelabuhan yang terdiri dari :

- a. Pelabuhan Umum Tanasa terletak di Desa Pangieng Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu yang berjarak sekitar 15 KM dari Kantor Pos Pelabuhan Pasangkayu. Saat ini Pelabuhan Umum Tanasa baru melayani kapal pengangkut CPO dari Kabupaten Pasangkayu ke Kab. Balikpapan Kalimantan Timur, belum melayani kapal Penumpang .
- b. Pelabuhan Khusus (Tersus) Tanjung Bakau terletak di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Pelabuhan tersebut merupakan Pelabuhan Khusus milik PT ASTRA AGRO LESTARI yang merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan dan Pabrik Kepala Sawit, Pelabuhan Tanjung Bakau selain melayani Kapal bongkar muat Pengangkut CPO dalam Negeri juga melayani kegiatan pengangkutan Minyak Goreng Sawit keluar Negeri sehingga menjadi Pelabuhan Internasional, kapal Internasional yang dilayani di Pelabuhan Khusus Tanjung Bakau berasal dari berbagai Negara di Asia yaitu dari Negara China, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Korea, Philipina, Thailand, Malaysia dan Singapore dan

pada tahun 2023 ini kapal Luar negeri yang dilayani di Pelabuhan Khusus Tanjung Bakau sebanyak 57 Kapal

- c. Pelabuhan Khusus Sungai Lariang terletak di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya dan Desa Bambakoro Kecamatan Lariang jarak dari Ibukota Kabupaten Pasangkayu sekitar 50 KM untuk Pelabuhan di Desa Lariang dan sekitar 60 KM untuk Pelabuhan yang terletak di Desa Bambakoro Kecamatan Lariang, Pelabuhan tersebut merupakan Pelabuhan yang melayani Kapal Pengangkut Pasir, area layanan pengangkutan Pasir dari Pelabuhan Sungai Lariang mayoritas ke Kota Balikpapan untuk mensuplai material pembangunan IKN,
- d. Pelabuhan Khusus Bonemanjeng terletak di Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu, jarak Pelabuhan Bonemanjeng dari Ibukota Kabupaten Pasangkayu sekitar 87 Km, Pelabuhan ini khusus melayani kapal yang memuat Minyak CPO dan Cangkang Kernel yang diangkut ke Kabupaten Gresik Jawa Timur juga ke Kotabaru Kalimantan Selatan

Pos Pelabuhan Pasangkayu melaksanakan kegiatan rutin baik pemeriksaan alat angkut maupun kegiatan Pengendalian risiko lingkungan di area Pelabuhan baik di area Perimeter maupun di Area Buffer, kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan difokuskan di Pelabuhan Tanjung Bakau dan Pelabuhan Bonemanjeng, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pemasangan Perangkap Tikus (Trapping) rutin dilaksanakan setiap 40 Hari, kegiatan Pemeriksaan Jentik Aedes Baik di Area Perimeter maupun Area Buffer, juga kegiatan Pemeriksaan tempat-tempat Umum (TTU), kegiatan ini difokuskan di Pelabuhan Khusus Tanjung Bakau, dan Kegiatan Pengukuran Kepadatan Lalat difokuskan dilaksanakan di Pelabuhan Khusus Bonemanjeng, kegiatan tersebut dilaksanakan Bersama kader Kesehatan Pos Pelabuhan Pasangkayu, dan dilaksanakan setiap bulan.

Pasangkayu itu sendiri merupakan ibukota dari Kabupaten Pasangkayu (sebelumnya Kabupaten Mamuju Utara). Jarak Pasangkayu dengan ibukota provinsi Sulawesi Barat yaitu Mamuju sekitar 276 km. Pelabuhan Pasang Kayu merupakan pelabuhan yang memiliki akses ke luar negeri dalam rangka ekspor kelapa sawit.



Gambar II.D.53
Pemeriksaan Sanitasi Kapal



Gambar II.D.54
Pemeriksaan Suhu/Body Temperatur Crew



Gambar II.D.55
Trapping, Survey Jentik dan Pengukuran Kepadatan Lalat

BAB III HASIL KEGIATAN

A

SUBSTANSI TATA USAHA

1. Sub Substansi Program dan Laporan

Sub Substansi Program dan Laporan melaksanakan tugas dan fungsi yakni melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, evaluasi, laporan, serta informasi, dengan dikoordinir oleh Sub Koordinator Sub Substansi Program dan Laporan.

a. Proses Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran dimulai dari mengumpulkan usulan anggaran dari semua substansi yang kemudian dikompilasi kedalam satu usulan anggaran KKP Kelas I Makassar. Usulan anggaran disertai dengan data dukung yakni Term Of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Tambahan data dukung lainnya disesuaikan dengan usulan. Kegiatan pengadaan, maka dibutuhkan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Kegiatan pelatihan yang akan diikuti membutuhkan data dukung brosur penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Serta beberapa usulan kegiatan membutuhkan justifikasi.

Data dukung sangat penting dalam proses desk usulan anggaran untuk menjadi dasar penentuan anggaran yang diusulkan. Jika memiliki data dukung yang memadai maka dapat mempertahankan usulan anggaran yang telah disusun. Apabila data dukung tidak lengkap maka anggaran yang diusulkan akan diblokir sehingga tidak dapat digunakan. Usulan anggaran memperhatikan petunjuk teknis penyusunan perencanaan (Jukren). Petunjuk teknis ini selalu diperbarui setiap tahun.

Aplikasi yang digunakan dalam penyusunan anggaran yakni aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Berikut tampilan aplikasi SAKTI :



Gambar III.A.1.1
Tampilan Aplikasi SAKTI

Akses penggunaan aplikasi SAKTI ini terbagi atas tiga yakni Admin, Operator dan Approval. Admin bertugas untuk melakukan administrasi user, pejabat dan penandatanganan. Operator anggaran bertanggungjawab dalam kegiatan operasional perencanaan anggaran dan revisi anggaran. Approval yakni Kuasa Pengguna Anggaran selaku approval anggaran apabila terjadi revisi anggaran yang perlu pengesahan oleh KPA.

1) Desk Usulan Kegiatan dan Anggaran Awal Tahun 2024

Proses perencanaan anggaran untuk tahun 2024 disusun pada tahun 2023. Pada tahun sebelumnya, desk awal ini disebut desk e-renggar karena usulan anggaran diinput melalui aplikasi e-renggar. Desk ini dilakukan untuk penentuan anggaran awal yang akan diberikan. Pada tahun 2023, pelaksanaan desk anggaran awal ini dilakukan secara luring pada tanggal 20 - 24 Februari 2023 di Hotel Santika Mega City Bekasi. Anggaran awal yang disusun diupload kedalam link yang disediakan oleh eselon I. Pada tahun sebelumnya, semua usulan diupload kedalam aplikasi e-renggar termasuk TOR RAB per Rincian Output (RO), namun untuk usulan anggaran 2024 tidak lagi menggunakan aplikasi e-renggar tersebut. Desk dilakukan secara tatap muka dengan eselon I.



Gambar III.A.1.2
Proses Desk Usulan Anggaran Awal Tahun 2024

2) Desk, Penelitian, Review RKAKL 2024 Pagu Anggaran Indikatif

Desk anggaran selanjutnya adalah desk pagu Indikatif. Usulan anggaran disesuaikan dengan pembagian pagu indikatif. Desk anggaran selesai dibuktikan dengan keluarnya Catatan Hasil Desk (CHD) oleh tim dari Bagian Program dan Informasi Ditjen P2P, Catatan Hasil Penelitian (CHP) dari Biro Perencanaan dan Catatan Hasil Review (CHR) dari Inspektorat Jenderal Kemenkes RI.

Pelaksanaan desk anggaran pagu indikatif 2024 dengan pembukaan secara online pada tanggal 26 Juli 2023 dan luring atau tatap muka pada tanggal 27 Juli – 2 Agustus 2023. Desk dilaksanakan dengan eselon I yakni :

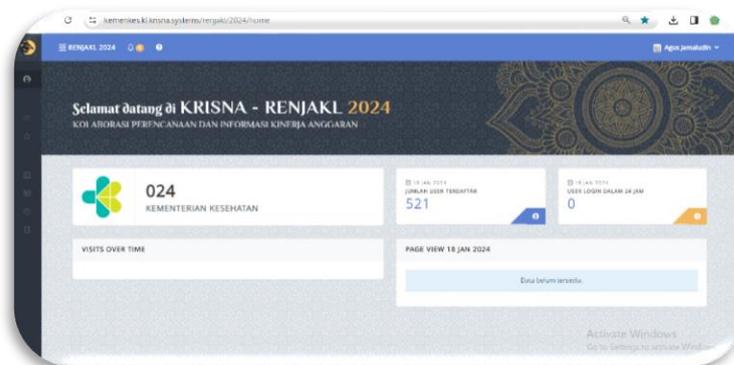
- a) desk anggaran gaji
- b) desk tunjangan kinerja dengan kepegawaian termasuk anggaran keperluan perkantoran dan kearsipan
- c) desk anggaran terkait hukum, organisasi dan humas dengan tim Hukormas
- d) desk anggaran terkait keuangan dan BMN dengan tim Keuangan dan BMN
- e) desk anggaran terkait pengendalian risiko lingkungan dengan Tim Kesling
- f) desk anggaran terkait penyakit menular dengan Tim HIV dan TB
- g) desk anggaran terkait kegiatan kekarantinaan kesehatan dengan Tim SKK.

Setelah desk eselon I dengan semua tim, kemudian desk dengan penanggungjawab Satker oleh Tim Program dan Informasi. Selanjutnya desk dengan Biro Perencanaan dan Anggaran yang dapat dilakukan paralel dengan desk Itjen.



Gambar III.A.1.3
Desk, Penelitian, Reviu RKAKL Pagu Anggaran Indikatif 2024

Tahun 2023, Satker dilibatkan dalam penyusunan Renja KL melalui aplikasi KRISNA. Penginputan anggaran dan lokus dilakukan per Rincian Output dan komponen, hal ini berkaitan dengan RO yang akan terbuka pada aplikasi SAKTI.



Gambar III.A.1.4
Aplikasi KRISNA

3) Desk, Penelitian, Reviu RKAKL 2024 Pagu Anggaran Alokasi

Pelaksanaan desk terakhir dilaksanakan secara hybrid. Desk online pada tanggal 9 – 15 Oktober 2023 dan desk offline pada tanggal 17 - 20 Oktober 2023. Desk menggunakan mekanisme yang sama dengan desk pagu indikatif, dilaksanakan setelah pagu alokasi anggaran telah diberikan. Desk terakhir membandingkan CHD, CHP dan CHR dari desk sebelumnya dengan usulan RKAKL terakhir. Usulan anggaran sudah harus sesuai dengan pagu anggaran dan Petunjuk Penyusunan Perencanaan yang ada.

Pagu anggaran disahkan melalui Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) yang dapat didownload di Satudja dan sudah terkoneksi dengan aplikasi SAKTI untuk rincian RKAKLnya.



Gambar III.A.1.5
Desk, Penelitian, Reviu RKAKL Pagu Anggaran Alokasi 2024

b. Proses Revisi Anggaran

Tata cara revisi anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Aturan revisi anggaran ini tidak lagi menetapkan tahun dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 hingga ada peraturan baru yang menggantikan. Pada tahun 2023 dilakukan 12 kali revisi DIPA sebagai berikut :

Tabel III.A.1.1
Revisi Anggaran KKP Kelas I Makassar Selama Tahun 2023

No	Revisi Anggaran	Tanggal Pengesahan DIPA	Anggaran		Total	Keterangan
			RM	PNBP		
1	DIPA Awal	30 November 2022	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	
2	Revisi DIPA 1	26 Desember 2022	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp4.313.797.000 pada belanja pegawai (51)
3	Revisi DIPA 2	16 Februari 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan I
4	Revisi DIPA 3	17 April 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan II
5	Revisi DIPA 4	23 Juni 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi DJA Perbaikan Halaman IV.b
6	Revisi DIPA 5	13 Juli 2023	34.228.241.000	2.073.884.000	36.302.125.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan III
7	Revisi DIPA 6	18 Juli 2023	29.914.444.000	2.073.884.000	31.988.328.000	Buka Blokir Automatic Adjustment sebesar Rp4.313.797.000 pada belanja pegawai (51) (dikembalikan ke BA BUN)
8	Revisi DIPA 7	20 Agustus 2023	30.394.172.000	2.073.884.000	32.468.056.000	Penambahan anggaran belanja mengikat sebesar Rp479.728.000 (001 sebesar Rp284.397.000 dan 002 sebesar Rp195.331.000
9	Revisi DIPA 8	12 Oktober 2023	30.394.172.000	2.073.884.000	32.468.056.000	Revisi Kanwil Halaman III DIPA Triwulan IV
10	Revisi DIPA 9	30 Oktober 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Penambahan Pagu belanja pegawai sebesar Rp1.420.100.000
11	Revisi DIPA 10	13 November 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Pemutakhiran POK - KPA

12	Revisi 11	DIPA	21 November 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Kanwil Pemenuhan Belanja Pegawai melalui pergeseran internal
13	Revisi 12	DIPA	27 Desember 2023	31.814.272.000	2.073.884.000	33.888.156.000	Revisi Pemutakhiran POK - KPA

Sumber : Data Primer, 2023

Tahun 2023 dilakukan dua belas kali revisi DIPA sesuai dengan tabel III.1, revisi yang dilakukan baik ditingkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kanwil DJPb, dan DJA. Revisi yang dilakukan pada tingkat DJA yakni revisi blokir *Automatic Adjustment* (AA), revisi perbaikan Halaman IV.b, buka blokir dengan mengembalikan anggaran ke BA BUN, dan revisi penambahan anggaran dari Eselon I. Revisi pada tingkat Kanwil DJPb, selain revisi halaman III DIPA yang dilakukan tiap triwulan juga dilakukan revisi pergeseran anggaran internal antar jenis belanja untuk pemenuhan belanja pegawai.

Revisi dengan terbitnya DIPA baru sebanyak 12 kali, namun dalam proses revisi sepanjang tahun, terjadi rencana revisi yang pada akhirnya tidak mendapat persetujuan oleh DJA. Bulan Maret 2023 terbit Surat Dirjen P2P Nomor : PR.04.02/C/1055/2023 tanggal 17 Maret 2023 Hal : Penetapan Distribusi Pagu Revisi Efisiensi dan Refocusing Anggaran Ditjen P2P TA. 2023, dalam surat tersebut KKP Kelas I Makassar mendapat nilai efisiensi sebesar Rp4.501.242.000,- bersumberdana Rupiah Murni. Proses penginputan revisi pada aplikasi SAKTI dan desk revisi dilakukan secara bertahap dengan eselon I, Roren, Itjen dan beberapa kali dikembalikan ke satker sebelum diajukan ke tingkat DJA. Namun setelah proses revisi ke DJA melalui eselon I telah dilakukan oleh semua satker yang termasuk dalam pembagian revisi efisiensi dan refocusing, terbit Surat Sesditjen P2P Nomor : PR.04.02/C.I/6665/2023 tanggal 27 Juni 2023 Hal : Penyampaian Informasi Usulan Revisi Tahap-3 Satker di Lingkungan Ditjen P2P TA 2023 yang menyatakan salah satunya bahwa revisi belum disetujui. Sehingga anggaran yang rencananya akan diefisiensi tertahan dan tidak direalisasikan harus segera disesuaikan kembali dengan kebutuhan serta direalisasikan anggarannya mengingat perjanjian kinerja Satker yang mengharuskan realisasi anggaran minimal 95%.

Proses revisi anggaran tahun 2023 menggunakan aplikasi SAKTI dan upload data melalui Satudja sedangkan arsip *hardcopy* disimpan oleh satker. Semua pelaksanaan revisi dilaksanakan secara online tanpa tatap muka langsung.

c. Monitoring dan Evaluasi

Anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA, maka monitoring dan evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap anggaran yang telah diberikan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan menggunakan system elektronik. Monitoring dan evaluasi dari eselon I Ditjen P2P melalui aplikasi Pemantik, dari Biro Perencanaan dan Anggaran melalui e-Performance, dari Kementerian Keuangan melalui SMART DJA dan dari Bappenas melalui aplikasi e-Monev Bappenas.

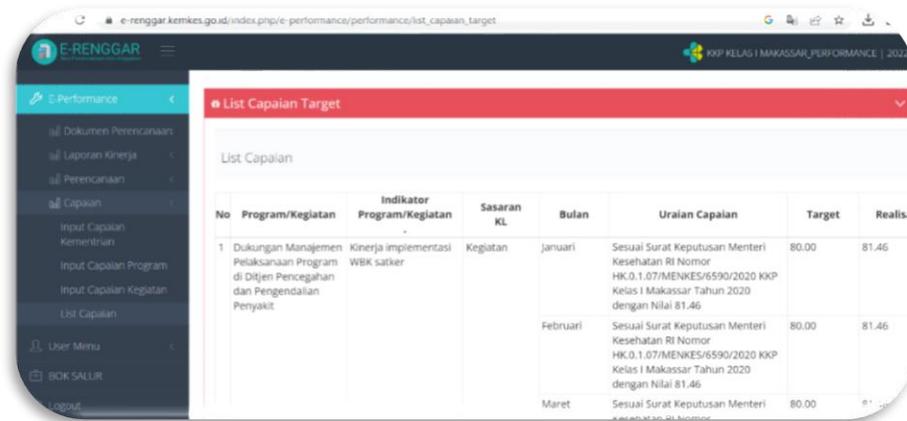
1) Pemantik



Gambar III.A.1.6
Aplikasi Pemantik

Pemantik adalah Sistem Pelaporan, Evaluasi dan Monitoring berbasis Sistem Informasi dan Komunikasi. Tujuan adanya aplikasi Pemantik adalah melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan transformasi kesehatan agar sesuai dengan perencanaan, melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan kegiatan transformasi kesehatan dari sisi efisiensi dan efektivitas kinerja, memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses pencapaian target dan indikator kegiatan sebagai bahan perbaikan, mengidentifikasi kendala-kendala serta intervensi yang diperlukan dalam upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan transformasi kesehatan, melakukan pemantauan terhadap strategi, kegiatan, waktu dan penggungjawab penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan secara berkala, memberikan bahan pertimbangan kepada Pimpinan untuk memberikan arahan terhadap permasalahan yang tidak tercapai, sebagai acuan dalam melakukan monitoring Kegiatan Transformasi Kesehatan baik di tingkat Pusat dan Unit Pelaksana Teknis. Aplikasi ini diisi ditingkat Satker.

2) e-Performance



The screenshot shows the 'List Capaian Target' page in the E-RENGGAR application. The table displays performance data for the year 2022, with columns for No, Program/Kegiatan, Indikator Program/Kegiatan, Sasaran KL, Bulan, Uraian Capaian, Target, and Realisasi.

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Sasaran KL	Bulan	Uraian Capaian	Target	Realisasi
1	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Kinerja implementasi WBK saliker	Kegiatan	Januari	Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.0.1.07/MENKES/6590/2020 KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 dengan Nilai 81.46	80.00	81.46
				Februari	Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.0.1.07/MENKES/6590/2020 KKP Kelas I Makassar Tahun 2020 dengan Nilai 81.46	80.00	81.46
				Maret	Sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor	80.00	81.46

Gambar III.A.1.7
Aplikasi E-Performance

Aplikasi ini digunakan untuk penginputan data program dan kegiatan serta target dan capaian dari indikator program dan kegiatan per bulan selama satu tahun yang menjadi indikator dalam perjanjian kinerja.

Pengisian e-performance dilakukan tiap bulan untuk setiap indikator dari data yang dikumpulkan oleh penanggungjawab e-monev. Data capaian dikumpulkan dari substansi yang bertanggungjawab terhadap indikatornya masing-masing.

3) SMART DJA

Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran (SMART DJA) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

SMART DJA ini mencakup informasi tentang Pagu Anggaran, Target Volume Keluaran, Realisasi Anggaran dan Realisasi Volume Keluaran yang telah dilaksanakan. Tahun 2023 capaian realisasi output (CRO) sudah otomatis terisi dari koneksi dengan aplikasi SAKTI. Aplikasi ini mampu meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam hal penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta pencapaian keluaran di tahun mendatang. Di bawah ini merupakan tampilan dari Aplikasi SMART DJA.



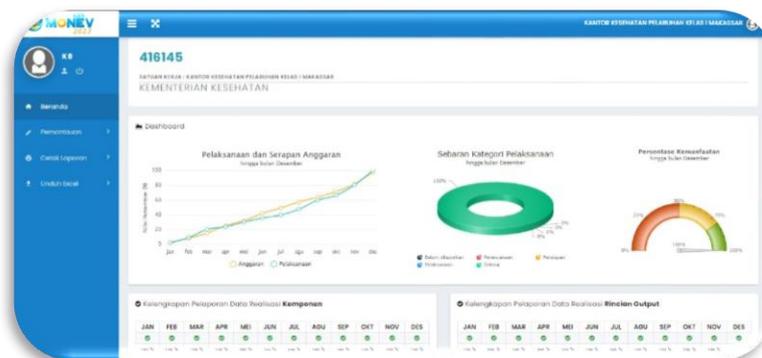
Gambar III.A.1.8
Tampilan Aplikasi SMART DJA

4) e-Monev Bappenas

e-Monev Bappenas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Laporan Monev Bappenas sebagai gambaran kegiatan, penyerapan anggaran dan realisasi fisik yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang dilakukan setiap akhir triwulan selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan e-Monev Bappenas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam hal penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi serta pencapaian keluaran di tahun mendatang.



Gambar III.A.1.9
Aplikasi Monev Bappenas

d. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja, Profil dan Laporan Tahunan

Laporan rutin yang disusun setelah tahun berjalan telah dilewati adalah Laporan Kinerja, Profil, dan Laporan Tahunan. Dokumen ini disusun bersama oleh Tim yang telah dibentuk dan disahkan melalui SK Kepala Kantor yang terdiri dari Kepala Kantor, Kasubbag Administrasi Umum, Koordinator Substansi, Sub Koordinator Sub Substansi

dan perwakilan masing-masing substansi.

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar disusun sebagai pertanggungjawaban Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian program-program kegiatan dalam satu tahun. Laporan Kinerja ini merupakan evaluasi kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja selanjutnya.

Profil merupakan salah satu sarana untuk memberikan gambaran perkembangan kemajuan program, pencapaian kinerja media informasi yang mencakup kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar. Profil dijadikan salah satu media pertukaran data, informasi, umpan balik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

Laporan Tahunan merupakan salah satu sarana untuk memberikan gambaran dari berbagai hasil kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada periode tahun sebelumnya yang berisi data dan informasi dan dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan dapat dijadikan referensi guna penyusunan rencana kegiatan yang akan datang.



Gambar III.A.1.10
Dokumen Laporan Kinerja, Profil dan Laporan Tahunan 2022
Disusun Tahun 2023

e. Evaluasi Penilaian SAKIP

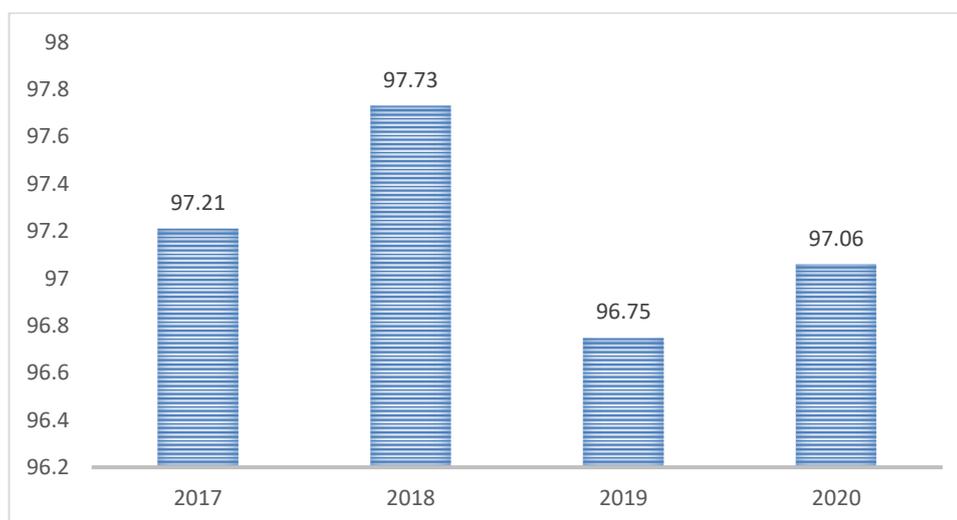
Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi.

Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja.

Hasil penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mendapat predikat AA (nilai >90-100) dengan kategori Sangat memuaskan. Secara angka, nilai SAKIP KKP Kelas I Makassar mengalami fluktuatif namun tetap dalam kategori AA, lebih jelasnya nilai SAKIP terlihat pada grafik III.1 :

Grafik III.A.1.1
Trend Hasil Penilaian SAKIP KKP Kelas I Makassar
Tahun 2017 – 2020



Hasil penilaian SAKIP mengalami peningkatan untuk penilaian tahun 2020 karena KKP Kelas I Makassar telah mendapat sertifikat sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2022, evaluasi SAKIP masih dilaksanakan melalui daring. Evaluasi SAKIP awal dilaksanakan pada bulan Maret 2022 dengan eselon I dan pada bulan April 2022 dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal untuk menilai pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Pedoman evaluasi SAKIP tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat perubahan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2021 dengan tahun sebelumnya sehingga dokumen yang dibutuhkan juga mengalami

beberapa perubahan. Hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar III.7 :

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KKP Kelas I Makassar TAHUN 2021				
No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot		Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	25,20	84,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7,2	80,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12	80,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	20,70	69,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	7,5	50,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	12,30	82,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2,7	90,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	3,6	80,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6	80,00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	18,50	74,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4	80,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	4,5	60,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat			76,70	BB

Gambar III.A.1.11
Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2021 KKP Kelas I Makassar

Hasil penilaian evaluasi SAKIP Tahun 2021 KKP Kelas I Makassar mendapat nilai 76,70 dengan predikat BB (sangat baik). Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya perubahan format Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Pemberian bobot nilai sangat dipengaruhi dengan ada tidaknya inovasi yang dilakukan di tahun 2021 dan data dukung yang lengkap. Sebagai contoh pada penilaian Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (1.c), jika seluruh kriteria terpenuhi tanpa inovasi maka nilai maksimal BB.

Berdasarkan hasil penilaian SAKIP tahun 2021 yang mengalami penurunan, Penilaian SAKIP tahun 2022 lebih ditingkatkan dengan menyesuaikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam kertas kerja evaluasi serta menambah inovasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai.

Tahun 2023 dilakukan penilaian SAKIP 2022 dengan Lembar Kerja Evaluasi sama dengan tahun sebelumnya. Hasil penilaian LKE KKP Kelas I Makassar tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021. Berikut hasil LKE tahun 2022.

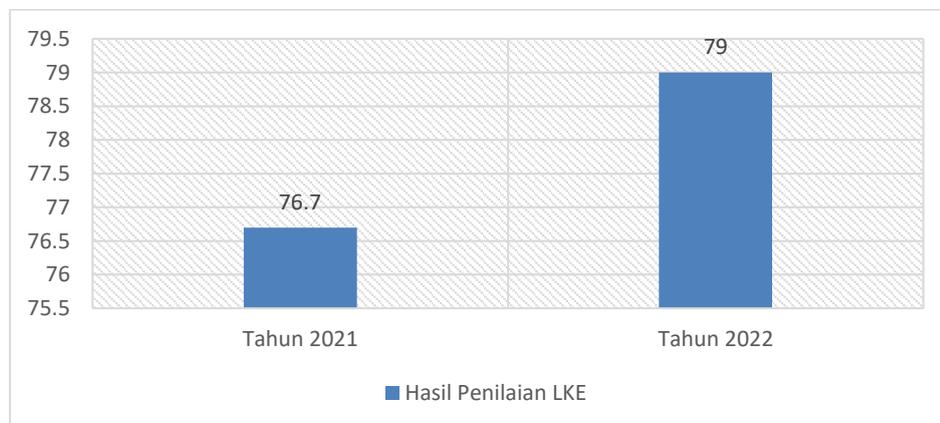
**LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KKP KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2022**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	24.60	82.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.4	90.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9.00	7.2	80.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12	80.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	23.10	77.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.4	90.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.2	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	10.5	70.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	10.80	72.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.7	90.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan	4.50	3.6	80.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	4.5	60.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	20.50	82.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	4.5	90.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	10	80.00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat			79.00	BB

Gambar III.A.1.12
Lembar Kerja Evaluasi AKIP Tahun 2022 KKP Kelas I Makassar

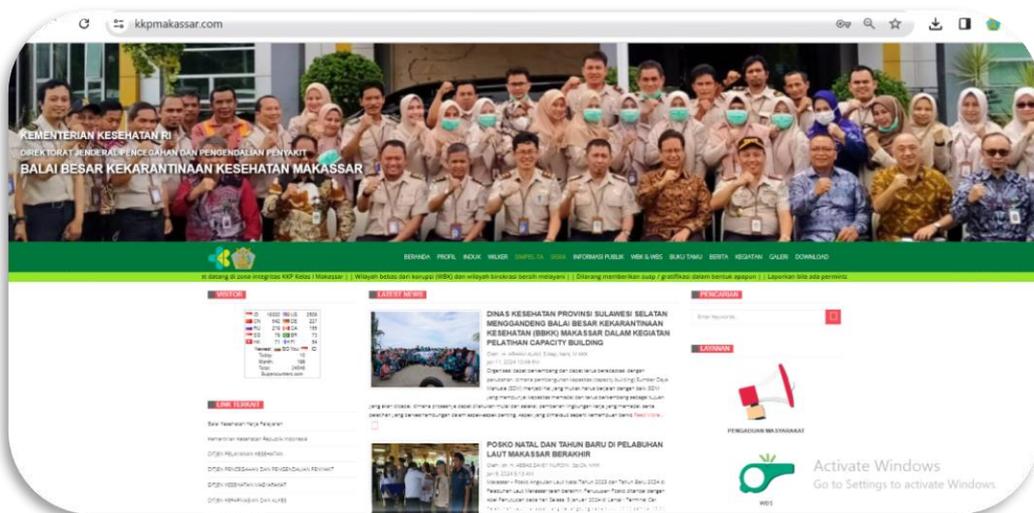
Beberapa komponen mengalami perbaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 yakni pada pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Nilai Akuntabilitas Kinerja KKP Kelas I Makassar tahun 2022 adalah 79 dengan predikat BB.

**Grafik III.A.1.2
Trend Hasil Penilaian AKIP KKP Kelas I Makassar
Tahun 2021 – 2022**



f. Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik

Kegiatan pengelolaan informasi publik di KKP Kelas I Makassar yang dimaksud adalah informasi yang disampaikan secara resmi melalui website KKP Kelas I Makassar di link : kkpmakassar.com. Adapun pengelola website dibuat SK Kepala KKP Kelas I Makassar yang terdiri dari penganggungjawab, redaktur, editor dan web admin.

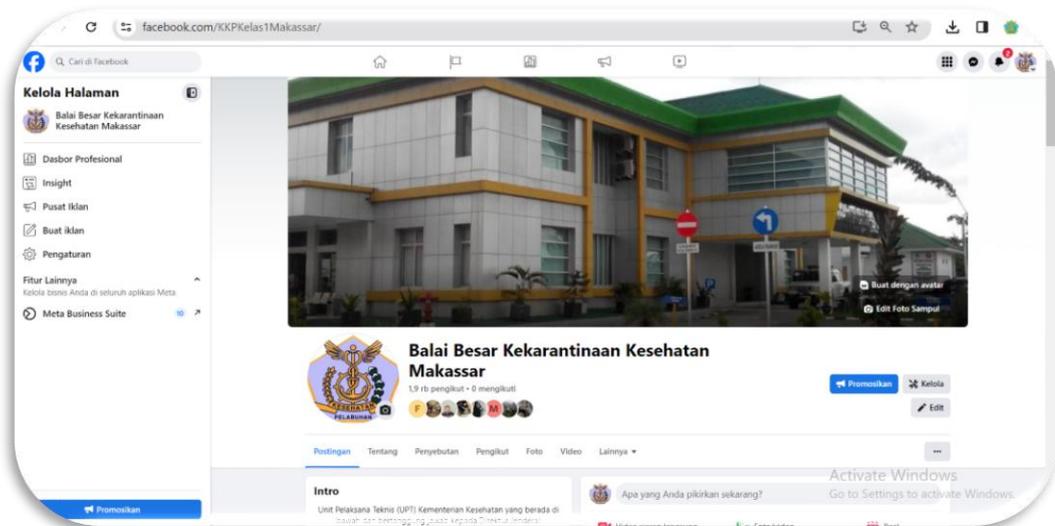


Gambar III.A.1.13
Tampilan Website KKP Makassar

Penulis artikel mendapatkan honor perhalaman artikel atau berita yang dibuat setelah diproses melalui editing oleh editor, disetujui oleh redaktur kemudian dipublish ke website oleh web admin. Selain melalui website, KKP Kelas I Makassar memiliki akun sosial media di facebook, instagram, twitter (x), tik tok dan youtube. Media sosial sebagai sarana untuk mengenalkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KKP Kelas I Makassar kepada masyarakat, termasuk memberikan informasi pelayanan maupun aturan-aturan terkait tugas pokok dan fungsi KKP. Sosial media ini juga sebagai media untuk menerima saran dan aduan oleh masyarakat.

Tahun 2022 postingan sosial media dikelola oleh pihak ketiga dan tahun 2023 kembali dikelola sendiri oleh Tim KKP Kelas I Makassar. Terkait dengan perubahan nomenklatur KKP Kelas I Makassar menjadi Balai Besar Kekearifan Kesehatan Makassar, sehingga per tanggal 1 Januari 2024 semua sosial media resmi menyesuaikan dengan nama baru tersebut, sebagai langkah awal sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan nama KKP menjadi BBKK.

1) Facebook

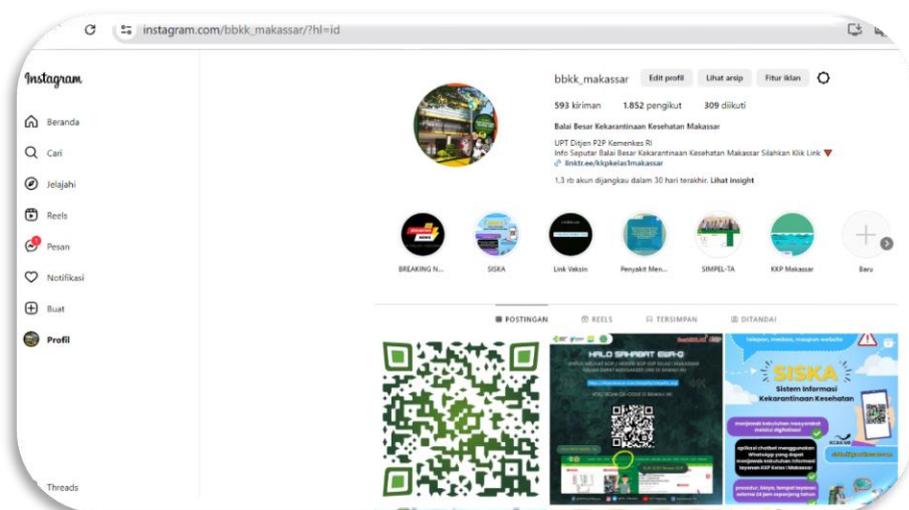


Gambar III.A.1.14
Tampilan Fanpage Facebook KKP Makassar

Facebook merupakan sosial media yang memiliki cukup banyak pengguna aktif. Fanpage Facebook KKP Kelas I Makassar hingga tahun 2023 telah memiliki pengikut sebanyak 1.900 akun.

Link fanpage facebook <https://www.facebook.com/KKPKelas1Makassar> dan aktif memuat postingan. Berdasarkan ringkasan halaman fanpage facebook, jangkauan postingan sebanyak 607, interaksi postingan 114, dan pengikut halaman baru 7 akun dalam 28 hari terakhir.

2) Instagram



Gambar III.A.1.15
Tampilan Instagram KKP Makassar

Instagram KKP Kelas I Makassar memiliki follower sebanyak 1.335 di tahun 2021, naik menjadi 1.679 di tahun 2022, dan naik lagi menjadi 1.852 di tahun 2023. Instagram merupakan sosmed paling aktif dikomentari maupun menerima *direct message* atau pesan masuk untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Selama akun Instagram dibuat hingga tahun 2023 telah diposting sebanyak 593 kiriman. Link akun Instagram https://www.instagram.com/bbkk_makassar/?hl=id

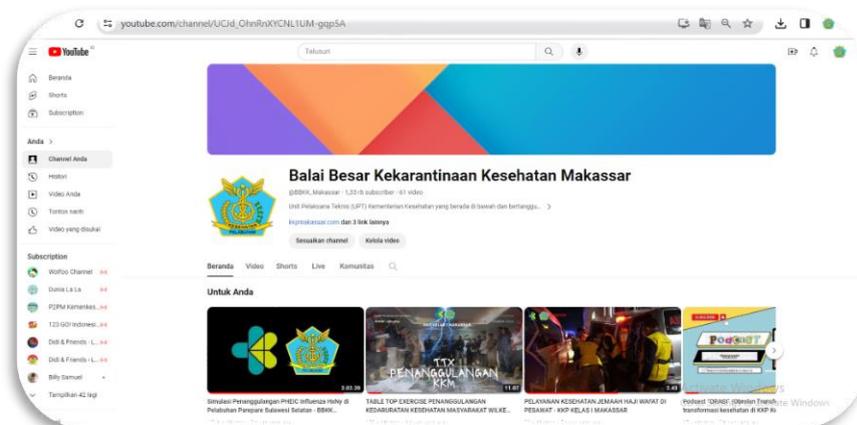
3) Twitter (x)



Gambar III.A.1.16
Tampilan Twitter KKP Makassar

Twitter mengalami transformasi menjadi x dengan logo twitter sebelumnya adalah burung biru menjadi huruf x. KKP Kelas I Makassar hanya memiliki 60 pengikut dan paling kurang mendapat tanggapan apabila memuat postingan. Namun tetap memuat postingan yang sama dengan sosial media lainnya.

4) Youtube



Gambar III.A.1.17
Tampilan Youtube KKP Makassar

Youtube KKP Makassar telah memiliki 1.336 subscriber di tahun 2023 sejak dibuat dari tahun 2020. Jumlah video yang telah diupload sebanyak 23 dan 2 video shorts.

Media sosial membantu dalam publikasi kegiatan yang dilaksanakan di KKP Kelas I Makassar agar lebih dikenal oleh masyarakat. Beberapa artikel dan berita telah diterbitkan selama tahun 2023 di website yang juga dishare melalui akun media sosial KKP Makassar. Berikut data rekapan artikel dan berita yang tayang di website KKP Makassar selama tahun 2023.

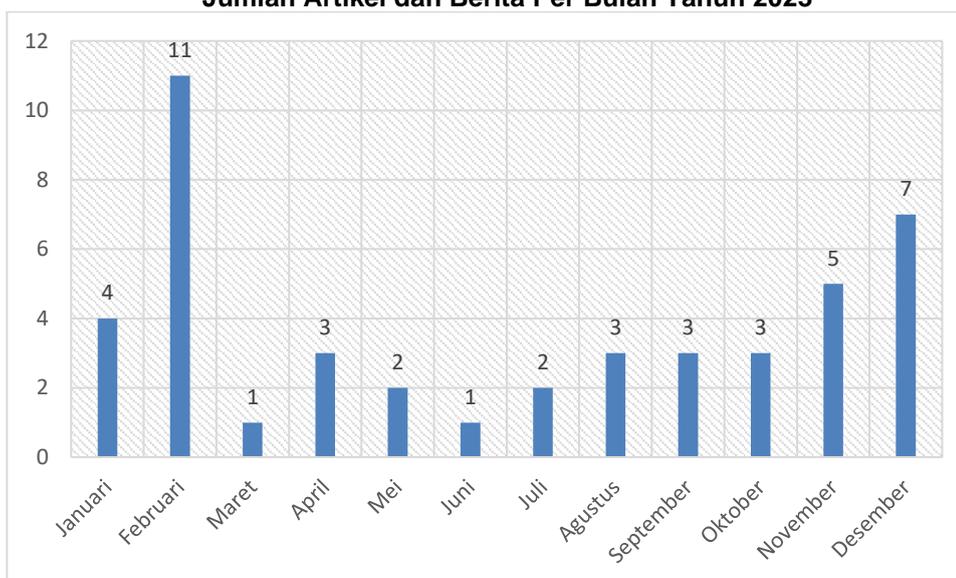
Tabel III.A.1.2
Rekapan Artikel dan Berita yang Tayang di Website KKP Makassar
Tahun 2023

No	Tanggal Publikasi	Judul
1	8 Januari 2023	Penutupan Posko Nataru 2022/2023 di Pelabuhan Makassar, Transportasi Laut Mengalami Peningkatan
2	20 Januari 2023	Momentum Hari Karantina Kesehatan Nasional Serta Bulan K3 Nasional : KKP Kelas I Makassar Lakukan Tes Kebugaran Kardiorespirasi Metode Rockport
3	30 Januari 2023	KKP Kelas I Makassar Adakan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Bagi Petugas Pemberangkatan Dan Kedatangan Kapal Di Pelabuhan Laut Makassar
4	31 Januari 2023	Kunjungan Kerja Bapak Menteri Kesehatan RI Ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
5	1 Februari 2023	Deteksi Dini HIV/AIDS Dan Surveilans Migrasi Malaria Pada ABK KM. Gunung Dempo Di Wilker Pelabuhan Laut Makassar
6	7 Februari 2023	Giat Sehat dan Bugar Bersama Stakeholder, KKP Kelas I Makassar Wilker Parepare Lakukan Rockport
7	7 Februari 2023	Deteksi Dini TB, HIV dan PTM di Pelabuhan Parepare KKP Kelas I Makassar Gandeng Dinas Kesehatan dan Puskesmas
8	9 Februari 2023	Peringati Bulan K3, PT Angkasa Pura I Lakukan Sosialisasi Automated External Defibrillator (AED)
9	10 Februari 2023	Lakukan Vaksinasi Booster 2, Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Gandeng KKP Kelas I Makassar
10	11 Februari 2023	Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) KKP Kelas I Makassar melaksanakan Musyawarah Komisariat Tahun 2023
11	16 Februari 2023	Pentingnya Deteksi Dini HIV AIDS dan TB di Wilker Tampa Padang Mamuju
12	16 Februari 2023	Pentingnya Bantuan Hidup Dasar Bagi Orang Awam Di Bandara Tampa Padang Mamuju
13	17 Februari 2023	KKP Makassar Hadirkan Narasumber dari Biro OSDM Kementerian Kesehatan RI dalam Rangka Pembimbingan Penyusunan SKP Tahun 2023
14	27 Februari 2023	Tujuh Fakultas di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Gelar MoU dengan KKP Kelas I Makassar
15	28 Februari 2023	Bimbingan Teknis Ditjen P2P Pangkalan Saka Bakti Husada "Arung Palakka" KKP Kelas I Makassar
16	15 Maret 2023	Kunjungan ke Rumah Duka Mawartih Susanty, Menteri Kesehatan RI Sempatkan Rapat Koordinasi di KKP Kelas I Makassar
17	16 April 2023	Pertemuan Lintas Sektor Pelabuhan Bajoe Dalam Rangka Membangun Sinergitas
18	17 April 2023	Menyambut Arus Mudik Lebaran, KKP Kelas I Makassar Ikut Serta Apel Pembukaan Posko
19	27 April 2023	Mewaspada Penyakit DBD Saat Mudik, Tim Surveilans Vektor Melakukan Survey Jentik Nyamuk
20	19 Mei 2023	Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Dengan Institusi Pendidikan

21	23 Mei 2023	Pemeriksaan Kesehatan Kloter 1 Embarkasi Hasanuddin Makassar (UPG) Tahun 2023 M /1444 H
22	29 Juni 2023	Penyelenggaraan Kesehatan Haji Di Embarkasi Hasanuddin Makassar (UPG) Tahun 2023 Dan Kesiapan Pelaksanaan Debarkasi
23	12 Juli 2023	Peran Lalat dalam Penularan Penyakit dan Keperluan Forensik
24	16 Juli 2023	Kunjungan Tim Evaluator CQI (Continuous Quality Improvement) FETP Maros, 13 Juli 2023
25	12 Agustus 2023	Pemusnahan Arsip Di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
26	17 Agustus 2023	Memperingati Ulang Tahun Ri Ke 78 Tanggal 17 Agustus 2023 di KKP Kelas I Makassar Dilaksanakan Upacara Bendera Dan Lomba Perayaan
27	24 Agustus 2023	Laksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Kesehatan Haji, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Puji KKP Kelas I Makassar
28	6 September 2023	Penyelenggaraan Table Top Exercise (TTX) Sebagai Upaya Kesiapan Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Oleh KKP Kelas I Makassar
29	7 September 2023	Berperan Aktif Dalam Upaya Menekan Angka Kejadian Dan Penularan Penyakit Menular, Kkp Kelas I Makassar Gelar Kegiatan Deteksi Dini Penyakit HIV-AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan ILI di Pelabuhan Bira Bulukumba
30	28 September 2023	Perkemahan Bakti Nasional Saka Bakti Husada VI Tahun 2023 di Bumi Perkemahan Dan Graha Wisata Cibubur-Jakarta Timur "Satyaku Kudarmakan Darmaku Kubaktikan" Tanggal, 18 – 21 September 2023
31	7 Oktober 2023	Kunjungan Kerja Menteri PANRB Dalam Rangka Peninjauan Kawasan Zona Integritas, Kepala KKP Kelas I Makassar Sosialisasikan Inovasi Baru "LANGSAT DIGITAL"
32	14 Oktober 2023	Studi Banding KKP Kelas II Padang, Banyak Inspirasi dari Instalasi Diklat KKP Kelas I Makassar
33	20 Oktober 2023	Pembinaan Kesehatan Di Pondok Pesantren/Panti Asuhan An-Nashar
34	1 November 2023	Peringatan HKN Ke-59, KKP Kelas I Makassar Laksanakan Donor Darah dan Screening TB
35	2 November 2023	Peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2023, Dharma Wanita Persatuan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Melaksanakan Bakti Sosial
36	10 November 2023	Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke 59 Pelabuhan Laut Makassar
37	20 November 2023	Tingkatkan Skill Petugas Pelabuhan Parepare, KKP Kelas I Makassar Laksanakan Pelatihan BHD
38	22 November 2023	Tekan Faktor Risiko Lingkungan, KKP Kelas I Makassar Laksanakan Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Di Pelabuhan Bira
39	5 Desember 2023	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Hal Baru Bagi Petugas Pelabuhan Bira Bulukumba
40	7 Desember 2023	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar Di Pelabuhan Bajoe, Bone
41	8 Desember 2023	Lakukan Penilaian Kapasitas Inti Pelabuhan Khusus Biringkassi, KKP Kelas I Makassar Laksanakan Pertemuan Dengan Lintas Sektor
42	11 Desember 2023	On the Job Trining ke BTKL Surabaya, Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Petugas KKP Kelas I Makassar
43	11 Desember 2023	KKP Kelas I Makassar Adakan Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekekarantinaan Kesehatan
44	15 Desember 2023	Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tingkatkan Pengetahuan Tanggap Darurat Melalui Kegiatan Refresing Tim Gerak Cepat Dan Basic Sea Survival Bersama Dengan Lintas Sektor
45	19 Desember 2023	Apel Kesiagaan Pembukaan Posko Penyelenggaraan Angkutan Natal 2023 dan tahun Baru 2024 di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar

Sumber : Data Primer, 2023

**Grafik III.A.1.3
Jumlah Artikel dan Berita Per Bulan Tahun 2023**



Berdasarkan grafik III.A.1.3 jumlah artikel/berita yang diposting selama tahun 2023 sebanyak 45 artikel/berita. Terbanyak diposting pada bulan Februari sebanyak 11 artikel/berita.

g. KKP Kelas I Makassar Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Tahun 2020, KKP Kelas I Makassar menjadi salah satu dari 33 Satker yang diusulkan untuk mendapat pembinaan dan penilaian Satker menuju WBK. Selama proses pendampingan menuju WBK maupun pelaksanaan penilaian WBK dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada bulan Juli 2020 dilaksanakan pendampingan oleh Tim Inspektorat Jenderal Kemenkes RI Wilayah 3 (IR 3) melalui zoom meeting. Berdasarkan hasil pre Assessment WBK, KKP Kelas I Makassar berhasil masuk menjadi salah satu satker yang memenuhi untuk dilakukan penilaian oleh TPI Kemenkes di bulan Oktober 2020. Penilaian dilakukan secara virtual melalui zoom meeting ditengah pandemi Covid-19.

Predikat sebagai Satker Wilayah Bebas dari Korupsi diharapkan bukan hanya sekedar dalam bentuk hitam di atas putih namun menjadi budaya kerja di KKP Kelas I Makassar. Penetapan unit kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan menuju wilayah bebas dari korupsi tahun 2020 dan yang mengalami peningkatan dalam memenuhi persyaratan menuju wilayah bebas dari korupsi selama tiga tahun berturut-turut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/6590/2020 yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2020. Pengumuman Satker WBK juga dilakukan pada peringatan Hari Kesehatan

Nasional tahun 2020. Tahun 2021, KKP Kelas I Makassar diusulkan untuk mendapat predikat WBK Nasional dan telah dilakukan assessment oleh Menpan, namun belum berhasil lolos untuk mendapat predikat WBK Nasional.



Gambar III.A.1.18
Piagam WBK KKP Kelas I Makassar

Tahun 2022, KKP Kelas I Makassar kembali diusulkan sebagai Satker menuju WBK/WBBM oleh unit utama. Telah dilaksanakan self assesment menuju WBK/WBBM Nasional oleh Tim Penilai Internal (TPI) secara daring pada bulan April 2022, namun KKP Kelas I Makassar belum lolos untuk diusulkan sebagai satker WBK/WBBM Nasional ke Kementerian PAN dan RB tahun 2022.

Tahun 2023 menjadi batas akhir berlakunya sertifikat WBK KKP Kelas I Makassar tepatnya pada bulan November 2023. KKP Kelas I Makassar merupakan salah satu satker yang belum memiliki sertifikat WBK Nasional dalam kawasan Pelabuhan dan Bandara, sehingga terus diusulkan untuk meraih predikat WBK Nasional. Salah satu syarat Kawasan Pelabuhan dan Bandara meraih predikat WBK Kawasan adalah semua Satker dalam kawasan tersebut harus meraih WBK Nasional.

h. Resertifikasi ISO

Penilaian ISO rutin dilakukan tiap tahun di KKP Kelas I Makassar. Tahun 2021 dilaksanakan audit ISO secara virtual. Pelaksanaan audit ISO ini dilakukan secara virtual karena masa pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk dilaksanakan audit secara langsung. Tahun 2022 dilaksanakan audit ISO dengan tatap muka langsung. Tahun 2023 dilaksanakan resertifikasi ISO karena masa berlaku sertifikat ISO sebelumnya hanya sampai 22 Februari 2023.

Sebelum pelaksanaan audit resertifikasi, terlebih dahulu dilakukan pendampingan penilaian ISO 9001:2015 oleh PT Inkuailiti Sinergi Utama. Ruang lingkup yang dilakukan audit resertifikasi ISO 9001:2015 adalah pelayanan vaksinasi internasional, pelayanan terpadu penerbitan dokumen Kesehatan kapal, pelayanan sertifikat laik terbang dan pelayanan pemeriksaan pelaut di Kantor Induk Bandara Sultan Hasanuddin dan Wilker Pelabuhan Makassar. Prinsip manajemen mutu adalah fokus pada pelanggan, kepemimpinan, pelibatan orang, pendekatan proses, peningkatan, bukti berdasarkan keputusan yang dibuat dan manajemen relasi. Standar ISO 9001 : 2015 ini menerapkan pendekatan proses yang menggabungkan siklus *Plan – Do – Check – Act* (PDCA) dan pemikiran berbasis risiko (*risk-based thinking*).

Audit resertifikasi ISO dilaksanakan oleh auditor eksternal dari PT Mutuagung Lestari pada tanggal 20 – 23 Maret 2023 di Kantor induk, terminal Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar. Manfaat penerapan dan sertifikasi ISO ini antara lain standar ini diakui oleh dunia internasional, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta memberi panduan untuk perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan hasil audit eksternal ISO, ditemukan beberapa ketidaksesuaian namun dilakukan upaya perbaikan sehingga permasalahan tersebut dapat dinyatakan close dan KKP Kelas I Makassar Kembali mendapatkan sertifikat ISO 9001 : 2015.



Gambar III.A.1.19 Sertifikat ISO

2. Sub Substansi Keuangan dan Umum

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 127 orang terdiri dari jabatan struktural, fungsional teknis, fungsional administrasi dan jabatan pelaksana teknis.

Tabel III.A.2.1
Jabatan Struktural KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No	Pejabat Struktural	Jumlah (Orang)
1	Kepala KKP Kelas I Makassar	1
2	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jumlah		2

Sumber : Data SIMKA, 2023

Tahun 2023, sesuai struktur organisasi yang tertuang dalam PMK No. 33 Tahun 2021 dan PMK No. 10 Tahun 2023, jabatan struktural hanya ada 2 yakni Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Jabatan struktural lain yang ada sebelumnya disetarakan menjadi pejabat fungsional.

Tabel III.A.2.2
Jabatan Fungsional Teknis KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter Ahli Madya (JF)	4
2	Dokter Gigi Ahli Madya (JF)	1
3	Dokter Ahli Muda (JF)	10
4	Dokter Ahli Pertama (JF)	2
5	Perawat Ahli Muda (JF)	4
6	Perawat Ahli Pertama (JF)	2
7	Perawat Penyelia (JF)	3
8	Perawat Mahir (JF)	4
9	Perawat Terampil (JF)	10
10	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama (JF)	1
11	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir (JF)	2
12	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	4
13	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	10

No.	Fungsional Teknis	Jumlah (Orang)
14	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	2
15	Epidemiolog Kesehatan Mahir (JF)	1
16	Entomolog Kesehatan Ahli Madya (JF)	2
17	Entomolog Kesehatan Ahli Muda (JF)	3
18	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama (JF)	2
19	Entomolog Kesehatan Penyelia (JF)	1
20	Entomolog Kesehatan Mahir (JF)	3
21	Entomolog Kesehatan Terampil (JF)	2
22	Sanitarian Ahli Madya (JF)	1
23	Sanitarian Ahli muda (JF)	4
24	Sanitarian Ahli Pertama (JF)	5
25	Sanitarian Mahir (JF)	2
Jumlah		85

Sumber : Data SIMKA, 2023

Tabel III.A.2.3
Jabatan Fungsional Administrasi KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No.	Fungsional Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya (JF)	1
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (JF)	2
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama (JF)	1
4	Pranata Keuangan APBN Penyelia (JF)	1
5	Pranata Keuangan APBN Mahir (JF)	2
6	Pranata Keuangan APBN Terampil (JF)	2
7	Perencana Ahli Muda (JF)	1
8	Perencana Ahli Pertama (JF)	1
9	Arsiparis Ahli Muda	1
Jumlah		12

Sumber : Data SIMKA, 2023

Jabatan fungsional teknis sebanyak 89 orang dan fungsional administrasi sebanyak 12 orang termasuk pejabat struktural yang disetarakan kedalam jabatan fungsional.

Tabel III.A.2.4
Jabatan Pelaksana Teknis KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No.	Pelaksana Teknis	Jumlah (Orang)
1	Dokter (JP)	4
2	Perawat Ahli (JP)	3
3	Perawat / Pengelola Keperawatan (JP)	4
4	Epidemiolog Kesehatan Ahli (JP)	2
	Epidemiolog Kesehatan Terampil (JF)	1
5	Epidemiolog Kesehatan / Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi (JP)	1
6	Entomolog Kesehatan / Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (JP)	2
7	Sanitarian Ahli / Pemeriksa Sanitasi (JP)	2
8	Sanitarian / Pengelola Penyehatan Lingkungan (JP)	1
9	Pranata Laboratorium Kesehatan (JP)	1
Jumlah		21

Sumber : Data SIMKA, 2023

Tabel III.A.2.5
Jabatan Pelaksana Administrasi KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No.	Pelaksana Administrasi	Jumlah (Orang)
1	Perencana / Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan (JP)	1
2	Arsiparis Ahli / Penyuluh Kearsipan (JP)	1
3	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara / Analisis Barang Milik Negara (JP)	1
4	Pengelola Barang Milik Negara (JP)	3
5	Pranata Keuangan APBN Terampil (JP)	1
Jumlah		7

Sumber : Data SIMKA, 2023

Jabatan Pelaksana sebelumnya bernama jabatan fungsional umum. Jabatan pelaksana terbagi atas jabatan pelaksana teknis sebanyak 18 orang dan jabatan pelaksana administrasi sebanyak 6 orang.

Berikut distribusi pegawai berdasarkan Substansi yang bertugas pada kantor induk dan wilayah kerja.

Tabel III.A.2.6
Distribusi Pegawai Berdasarkan Substansi dan Wilayah Kerja
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No	Substansi/Wilayah kerja	2023
1	Kepala Kantor	1
2	Substansi Tata Usaha	17
3	Substansi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi	13
4	Substansi Pengendalian Risiko Lingkungan	13
5	Substansi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah	28
6	Wilayah kerja Pelabuhan Laut Makassar	19
7	Wilayah Kerja Pelabuhan Khusus Biringkassi	3
8	Wilayah kerja Pelabuhan Parepare	6
9	Wilayah Kerja Pelabuhan Awerange	2
10	Wilayah Kerja Bandara Tampapadang	5
11	Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-belang	1
12	Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo	3
13	Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe	3
14	Wilayah Kerja Pelabuhan Malili	3
15	Pos Pelabuhan Bulukumba	2
16	Pos Pelabuhan Rakyat Paotere	4
17	Pos Pelabuhan Siwa	2
18	Pos Pelabuhan Pasangkayu	1
19	Pos Pelabuhan Majene	1
Jumlah		127

Sumber : Data SIMKA, 2023

Dari tabel III.A.2.6 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai terbanyak terdapat pada Kantor Induk (Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar) yang terdiri dari Kepala Kantor, Substansi Tata Usaha, Substansi PKSE, Substansi UKLW dan Substansi PRL sebanyak 72 orang (56,69%).

Tabel III.A.2.7
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan
KKP Kelas I Makassar Tahun 2017–2023

Golongan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
II	29	27	20	19	17	18	12
III	81	80	93	93	91	91	92
IV	16	22	21	21	22	21	21
VII	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah	126	129	134	133	130	130	127

Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan tabel III.A.2.7, terlihat bahwa pegawai golongan III yang terbanyak di KKP Kelas I Makassar yakni 92 orang (72,44%).

Tabel III.A.2.8
Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2017–2023

Tingkat Pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
S2	36	44	46	44	45	24	20
S1	43	41	45	47	45	65	64
DIV	0	2	3	5	6	6	6
DIII	42	37	36	33	31	32	34
SMA	5	5	4	4	3	3	3
Jumlah	126	129	134	133	130	130	127

Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan tabel III.A.2.8 terlihat bahwa ada perubahan pada data SIMKA untuk tingkat Pendidikan, dimana pada tahun sebelumnya pendidikan dokter dan ners masuk tingkat pendidikan S2, namun pada akhir tahun 2022, berubah menjadi S1, sehingga terlihat perubahan drastis pada data tingkat Pendidikan tahun 2021 ke 2022. Tahun 2023, tingkat pendidikan terbanyak pegawai adalah S1 sebanyak 63 orang (49,61%). Beberapa pegawai juga sedang menempuh pendidikan kembali melalui tugas belajar tahun 2023 yakni empat orang pegawai melanjutkan S1 dan dua orang melanjutkan S2.

Tabel III.A.2.9
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Mutasi
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2017–2022

Jenis Mutasi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pensiun	0	2	1	1	1	4	3
Mutasi Masuk	4	5	4	2	3	0	0
Mutasi Keluar	4	1	1	2	0	2	0
Meninggal	0	1	1	0	1	2	0
CPNS	0	0	1	1	0	2	0
PPPK	0	0	0	0	0	0	2
Jumlah	8	9	8	6	5	10	4

Sumber : Data SIMKA, 2023

Berdasarkan tabel III.A.2.9, Tahun 2023 ada tiga orang pensiun dan dua orang PPPK yang masuk. Salah satu pegawai yang pensiun adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Umum. Formasi PPPK sebanyak dua orang yang lulus dan masuk tahun 2023 yakni satu orang tenaga perawat terampil dan satu orang tenaga entomolog kesehatan terampil.

Tahun 2022 sebanyak empat orang pegawai pensiun, salah satu diantara yang pensiun selain karena umur juga ada satu pegawai yang mengajukan pensiun dini dengan alasan sakit. Tidak ada mutasi masuk ke KKP Kelas I Makassar di tahun 2022. Ada dua pegawai mutasi keluar yakni satu pegawai dipromosikan ke Direktorat Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan satu pegawai diberhentikan sebagai ASN. Dua pegawai meninggal dunia yakni satu orang Sanitarian Ahli Madya yang menjabat sebagai Koordinator Pengendalian Risiko Lingkungan dan satu orang Sanitarian Ahli Pertama.

Tahun 2021 dibuka sebanyak tiga formasi CPNS untuk penempatan di KKP Kelas I Makassar yakni Epidemiolog Kesehatan Terampil, Pranata Keuangan APBN Terampil dan Pranata Komputer Terampil. Namun hanya dua orang yang lulus masuk tahun 2022 yakni Epidemiolog Kesehatan Terampil dan Pranata Keuangan APBN Terampil. Selain CPNS, juga dibuka formasi CPPPK yakni Entomolog Kesehatan Terampil dan Epidemiolog Kesehatan Terampil, namun tidak ada yang lulus.

b. Tata Persuratan

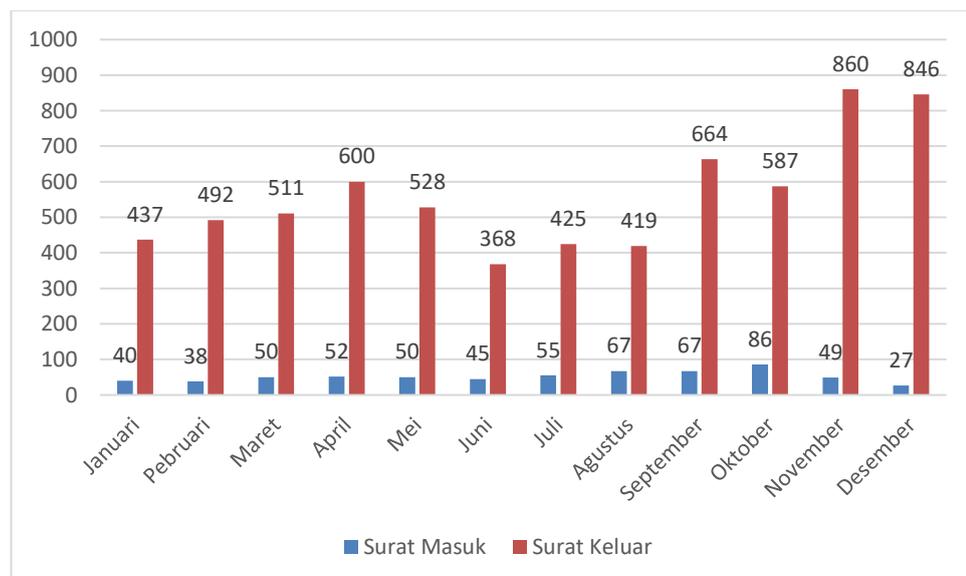
Berdasarkan tabel III.A.2.10, dapat dilihat persuratan tahun 2023 yang terdiri dari jumlah surat masuk dan surat keluar per bulan.

Tabel III.A.2.10
Tata Persuratan Perbulan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Bulan	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari	46	600
Februari	80	544
Maret	45	538
April	37	418
Mei	60	538
Juni	29	314
Juli	54	352
Agustus	48	562
September	36	657
Oktober	59	598
November	44	850
Desember	53	767
Total	591	6738

Sumber : Data Kearsipan, 2023

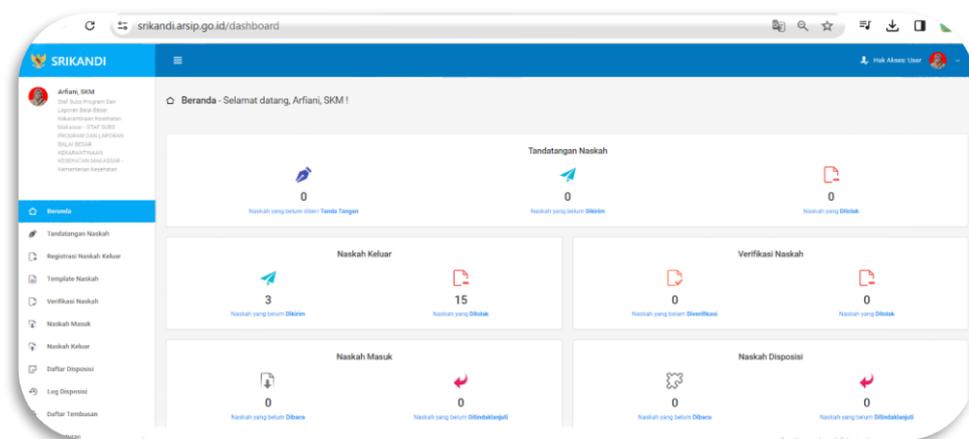
Grafik III.A.2.1
Persuratan Per bulan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Kearsipan, 2023

Berdasarkan tabel dan grafik Tata Persuratan Per Bulan Tahun 2023 terlihat jumlah surat keluar lebih banyak dibandingkan surat masuk. Surat keluar adalah semua surat yang berasal dari dalam Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang ditujukan kepada pihak atau instansi lain, baik pemerintah maupun swasta. Surat masuk adalah surat yang diterima dari luar Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar baik dari instansi pemerintah maupun swasta yang kemudian diregister dan didisposisi oleh pimpinan.

Tahun 2023 telah mulai menggunakan aplikasi SRIKANDI untuk membuat surat serta mengirimkan langsung kepada tujuan surat serta penggunaan tanda tangan elektronik. Hal ini mempermudah dalam pengarsipan serta disposisi surat keluar dan masuk tanpa perlu lagi menggunakan lembar disposisi manual maupun tanda tangan manual. Namun aplikasi SRIKANDI ini masih baru digunakan pada akhir tahun 2023 dan hanya kepala kantor yang memiliki tanda tangan elektronik sehingga untuk pembuatan surat dengan tanda tangan manual masih menggunakan cara lama seperti sebelumnya.



Gambar III.A.2.1 Tampilan Dashboard Aplikasi Srikandi

c. Sarana dan Prasarana

Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023 terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak.

1. Barang Bergerak

Data barang bergerak berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan kendaraan bermotor lainnya tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.A.2.11
Rekapitulasi Kendaraan Roda 4 KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
1	Station Wagon	Mitsubishi Pajero	1	Kendaraan Kepala Kantor	Rusak Berat
2	Mini Bus	Toyota Inova	1	Kendaraan Boarding	Baik
3	Kendaraan Penumpang Lainnya	Hino	1	Mobil Jemputan Pegawai	Baik
4	Mobil Ambulance	Mitshubishi L200	1	Ambulance Pos Majene	Rusak Ringan
5	Mobil Ambulance	Mitshubishi L300	1	Ambulance Eks Awerange	Rusak Berat
6	Mobil Ambulance	Izusu NHR55	1	Ambulance Eks Bulukumba	Rusak Berat
7	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Kantor Induk	Baik
8	Mobil Ambulance	Suzuki APV Arena	1	Ambulance Pos Siwa	Baik
9	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Bandara	Baik
10	Mobil Ambulance	Toyota HI ACE	1	Ambulance Pelabuhan Makassar	Baik
11	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Bajoe	Baik
12	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Wilker Awerange	Baik
13	Mobil Ambulance	Suzuki APV Luxury	1	Ambulance Mamuju	Baik
14	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Pos Paotere	Baik
15	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Pos Bulukumba	Baik
16	Mobil Ambulance	Suzuki APV	1	Ambulance Palopo	Baik
17	Mobil Ambulance	Mitshubishi Expander	1	Ambulance Parepare	Baik
18	Mobil Ambulance	Mitshubishi Expander	1	Ambulance Biringkassi	Baik
19	Kendaraan Klinik	Izusu 120 PS	1	Kendaraan Rongen	Rusak Berat
20	Kendaraan Taktis	Ford Ranger 2.9	1	Kendaraan Operasional	Rusak Ringan
21	Kendaraan Taktis	Daihatsu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik
22	Kendaraan Taktis	Daihatsu Terios MT	1	Kendaraan Operasional	Baik

No	Nama Barang	Merek/Type	Jumlah	Keterangan	Status
23	KendaraanTaktis	Toyota Rush GM	1	Kendaraan Operasional	Baik
24	KendaraanTaktis	Nissan Evalia	1	Kendaraan Operasional	Baik
25	KendaraanTaktis	Toyota Rush 7-Seater	1	Kendaraan Operasional	Baik
26	KendaraanTaktis	Toyota Rush 7-Seater	1	Kendaraan Operasional	Baik
27	Mobil Pick Up	Toyota Hilux 4x4	1	Kendaraan Vektor Kantor Induk	Baik
Jumlah			27	Unit	

Sumber : Laporan BMN, 2023

Berdasarkan tabel rekapitulasi kendaraan roda 4 terlihat dari 27 kendaraan roda 4 yang dimiliki KKP Kelas I Makassar, terdapat 4 kendaraan dalam kondisi rusak berat yakni 1 unit station wagon, 2 unit ambulance dan 1 unit kendaraan klinik. 2 unit kendaraan dalam kondisi rusak ringan yakni 1 ambulance dan kendaraan taktis. Semua kendaraan yang dalam kondisi rusak berat tersebut telah dilakukan lelang untuk penghapusan barang. Tahun 2023 terdapat penambahan 1 unit kendaraan mini bus untuk peruntukan kendaraan boarding.

Tabel III.A.2.12
Rekapitulasi Kendaraan Roda 2 KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No	NamaBarang	Merek/Type	Jumlah	Status
1	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2	Baik
2	Sepeda Motor	Honda Supra D125	1	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter	2	Baik
4	Sepeda Motor	Honda Revo	2	Baik
5	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	2	Baik
6	Sepeda Motor	Suzuki Axelo	1	Rusak Berat
7	Sepeda Motor	Honda Beat	3	Baik
Jumlah			13	Unit

Sumber : Laporan BMN, 2023

Tabel rekap kendaraan roda 2 menunjukkan dari 13 unit sepeda motor yang dimiliki KKP Kelas I Makassar tahun 2023, 11 Kendaraan yang status Baik dan 2 dalam kondisi rusak berat. Tidak ada penambahan kendaraan roda dua di tahun 2023. Tahun 2023 juga diikuti lelang kendaraan motor sepaket dengan

kendaraan roda empat yang dalam kondisi rusak berat. Kendaraan roda dua yang dilelang adalah Suzuki Axelo 125.

2. Barang tidak bergerak

Berikut data rekapitulasi tanah dan bangunan KKP Kelas I Makassar tahun 2023:

Tabel III.A.2.13
Rekapitulasi Tanah dan Bangunan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No	Nama Barang	Kondisi	Kuantitas	Alamat
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol.II	Baik	120 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
2	Tanah Pemerintah	Baik	204 M ²	Jl. Perumnas Toddopuli V No.9 Makassar
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	4000 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec.Baji Mangngai Maros
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1230 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec. Bacukiki Parepare
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1360 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
6	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	2531 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
7	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	800 M ²	Kel. Mangempang Kec.Barru Kab.Barru
8	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Baik	1000 M ²	Jl. Pelabuhan Bira Kab. Bulukumba
9	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	12,160 M ²	Jl. Poros Mamuju - Pasangkayu Sulawesi Barat
10	Bangunan Gudang Lainnya	Baik	197 M ²	Jl. Bandara Lama Kab. Maros
11	Bangunan Gudang Lainnya	Baik	123 M ²	Jl. Puang Midding Kota Parepare
12	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1000 M ²	Jl. Hatta No.3 Makassar (Pelabuhan Makassar)
13	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1718 M ²	Dusun Baddo- Baddo Kec. Baji Mangngai Maros
14	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	500 M ²	Desa/Kec. Cappa Galung Kec.Bacukiki Parepare
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	850 M ²	Desa Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
16	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	200.16 M ²	Jl. Yos Sudarso Kel. Cellu Kec. Tanete Riattang Timur
17	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	750 M ²	Jl. Poros Mamuju - Kalukku Sulawesi Barat
18	Rumah Negara Golongan II Type D	Baik	36 M ²	Jl. Kebun Sayur Utara Kota Parepare
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	999 M ²	Jl. Bowong Cindea Kec. Bungoro Kab Pangkep

Sumber : Laporan BMN, 2023

Tahun 2023 KKP Kelas I Makassar tidak terdapat anggaran belanja modal pengadaan tanah. Tahun 2022 terdapat hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang status Berita Acara telah di serahkan per 10 Oktober 2023 dengan luas 1.200 m² yang masih dalam proses pengesahan nomor register hibah.

d. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berasal dari kegiatan pelayanan jasa alat angkut, pelayanan kesehatan/medik, pelayanan kesehatan lingkungan dan pelayanan jasa penggunaan alat/fasilitas kegiatan Pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan yang dapat dilaksanakan oleh KKP Kelas I Makassar (air, makanan dan substansi lingkungan lainnya), pemeriksaan laboratorium medik dalam pelayanan upaya kesehatan pelabuhan, ketersediaan vaksin meningitis bantuan dari Kementerian Kesehatan RI terus meningkat dari tahun ketahun. Ada pun Jenis kegiatan sumber PNBP sesuai PP No. 64 Tahun 2019 yang sering digunakan dalam pelayanan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

1. Jasa Pemeriksaan Kapal dalam karantina (Certificate of Pratique)
2. Jasa Pengawasan Tindakan Sanitasi Kapal (SSCEC / SSCC)
3. Penerbitan Buku Kesehatan Kapal (Health Book)
4. Jasa Pemeriksaan Kesehatan Keberangkatan Kapal (PHQC)
5. Jasa Pemeriksaan Obat – obatan dan Alat Kesehatan dalam rangka Penerbitan Sertifikat (P3K)
6. Penerbitan International Certificate of Vaccination (ICV)
7. Jasa Pemberian Surat Keterangan *Medical Contraindication of Vaccination*
8. Vaksinasi
9. Pemakaian Ambulance
10. Jasa Pelayanan Pemeriksaan OMKABA di kapal dan Pesawat.
11. Jasa Pelayanan Sertifikasi Izin Penyelenggara Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal dan Pesawat).
12. Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan Surat Izin Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga di lingkungan Pelabuhan/Bandar Udara/Pos Lintas Batas Darat (PLBD).
13. Jasa Pemeriksaan/Pengawasan dalam rangka Penerbitan Sertifikat Kualitas Air di Pelabuhan, Bandar Udara dan Pos Lintas Batas Darat (PLBD) untuk Keperluan Alat Angkut

Dengan dilaksanakan Kegiatan sesuai dengan Tupoksi dan menerima penyetoran PNBP sesuai dengan PP No. 64 Tahun 2019, KKP Kelas I Makassar berpotensi meningkatkan PNBP sejalan dengan pengembangan tugas pokok dan fungsi serta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, dimana dari realisasi PNBP dapat digunakan sebesar 86% , sehingga seluruh penerimaan yang di hasilkan dan disetor ke Negara dapat dilaksanakan dengan baik serta dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan taraf hidup orang banyak, sehingga kedepannya pembangunan lebih maju setiap tahunnya.

PNBP KKP Kelas I Makassar pada Tahun 2022 sebesar Rp. 13.226.251.398,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) melebihi 143% dari target PNBP sebesar Rp. 9.244.750.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan tahun 2023 sebanyak Rp. 3.493.203.769,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Juga melebihi target 144% yaitu sebesar Rp. 2.411.510.000 (Dua Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), namun data realisasi PNBP menurun antara Tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar (278%), hal ini dikarenakan perubahan kebijakan yaitu mengenai tidak wajib penyelenggaraan Vaksinasi meningitis bagi jamaah umroh serta kebijakan dalam pelayanan kapal, adapun realisasi PNBP dan penggunaan PNBP Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel III.A.2.14
Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) dan Penggunaan PNBP Perbulan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

BULAN	TARGET DALAM DIPA	REALISASI PENERIMAAN PNBP MENURUT SIMPONI	REALISASI PENERIMAAN PNBP HASIL REKON DENGAN KPPN	PAGU DALAM DIPA	REALISASI PENGGUNAAN PNBP
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JANUARI	2.411.510.000	525.340.000	525.340.244	2.073.884.000	0
FEBRUARI	2.411.510.000	294.361.000	294.361.012	2.073.884.000	3.490.000
MARET	2.411.510.000	297.819.000	297.819.000	2.073.884.000	10.622.000
APRIL	2.411.510.000	179.384.000	179.384.000	2.073.884.000	8.521.790
MEI	2.411.510.000	463.658.332	463.658.332	2.073.884.000	97.890.500
JUNI	2.411.510.000	179.238.832	179.238.832	2.073.884.000	32.410.640

BULAN	TARGET DALAM DIPA	REALISASI PENERIMAAN PNBP MENURUT SIMPONI	REALISASI PENERIMAAN PNBP HASIL REKON DENGAN KPPN	PAGU DALAM DIPA	REALISASI PENGGUNAAN PNBP
JULI	2.411.510.000	193.435.000	193.435.000	2.073.884.000	0
AGUSTUS	2.411.510.000	283.502.750	283.502.750	2.073.884.000	96.540.500
SEPTEMBER	2.411.510.000	226.486.084	226.486.084	2.073.884.000	192.829.350
OKTOBER	2.411.510.000	287.744.002	287.744.002	2.073.884.000	325.373.750
NOVEMBER	2.411.510.000	386.344.999	386.344.999	2.073.884.000	352.834.799
DESEMBER	2.411.510.000	174.376.000	175.889.514	2.073.884.000	837.783.123
TOTAL	2.411.510.000	3.491.689.999	3.493.203.769	2.073.884.000	1.958.296.452

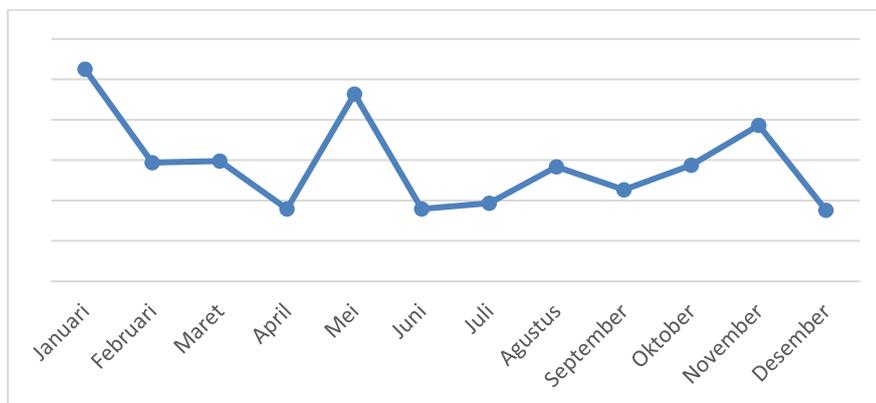
Sumber : Aplikasi SIMPONI PNBP, SSD PNBP DAN SPANT, 2023

Berdasarkan tabel distribusi PNBP per bulan menggambarkan bahwa realisasi PNBP terdiri dari PNBP Fungsional dan PNBP Umum, dimana perolehan PNBP tertinggi pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 525.340.244,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) adalah 21,78% dari Target PNBP Tahun 2023, sedangkan realisasi terendah pada Bulan Desember 2023 sebesar Rp. 175.889.514,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Empat Belas Rupiah) 7,29 % ,disebabkan hal yang sama seperti tahun 2022 yaitu karena adanya Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 tentang Pelaksanaan vaksin meningitis bagi jamaah haji dan umrah , tanggal 11 Nov 2022, dimana tertera bahwa Jamaah umroh tidak lagi wajib melakukan vaksinasi meningitis, penurunan PNBP juga telah terjadi sejak Adanya kebijakan vaksinasi di klinik / RS.

Penggunaan PNBP Tahun 2023 sebesar Rp. 1.958.296.452,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dari Target Penggunaan sebesar Rp.2.073.884.000 (Dua Milyar Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 94,42 %

Grafik dan tabel distribusi penerimaan PNBP per bulan selama tahun 2023 dapat digambarkan dalam grafik III.4 berikut :

Grafik III.A.2.2
Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perbulan
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Aplikasi SIMPONI, SAKTI, SSD PNBP dan SPANT, 2023

Tabel III.A.2.15
Distribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perbulan
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Januari	525.340.244
2	Februari	294.361.012
3	Maret	297.819.000
4	April	179.384.000
5	Mei	463.658.332
6	Juni	179.238.832
7	Juli	193.435.000
8	Agustus	283.502.750
9	September	226.486.084
10	Oktober	287.744.002
11	November	386.344.999
12	Desember	175.889.514
	Jumlah	3.493.203.769

Sumber : Aplikasi SIMPONI, SAKTI, SSD PNBP dan SPANT, 2023

Berdasarkan grafik dan tabel di atas terlihat penerimaan PNBP fluktuatif. Bulan Januari penerimaan PNBP tertinggi dan terendah di bulan Desember.

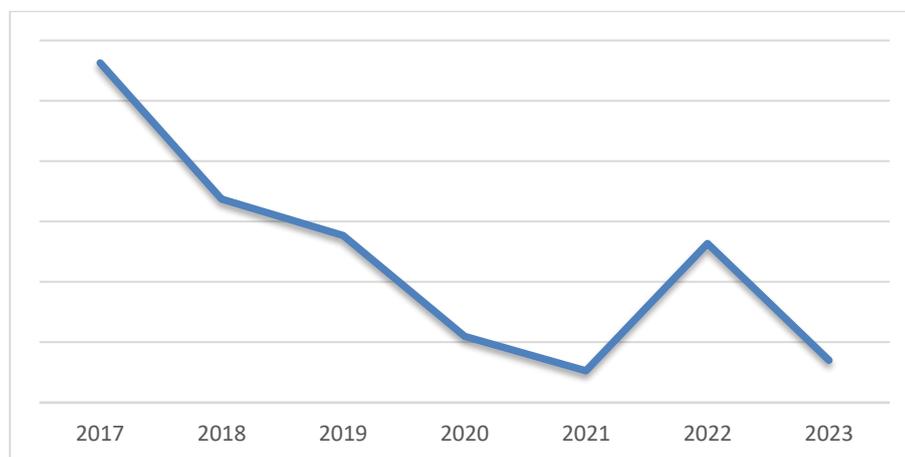
Tabel III.A.2.16
Distribusi Penerimaan PNBP KKP Kelas I Makassar
Tahun 2017 – 2023

No.	Tahun	Jumlah (Rp)
1	2017	28.142.406.001
2	2018	16.866.159.002
3	2019	13.845.401.008
4	2020	5.473.590.001
5	2021	2.631.385.001
6	2022	13.170.885.001
7	2023	3.493.203.769

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan tabel III.19 penerimaan PNBP selama tahun 2017-2021 menunjukkan trend penurunan penerimaan PNBP, namun tahun 2022 kembali mengalami kenaikan yang sangat signifikan selanjutnya di Tahun 2023 penerimaan PNBP turun kembali , lebih jelasnya terlihat pada grafik III.5.

Grafik III.A.2.3
Distribusi Penerimaan PNBP KKP Kelas I Makassar
Tahun 2017 – 2023



Sumber : Data Primer, 2023

2) Keuangan

Penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang tertuang dalam realisasi anggaran belanja DIPA/RKAKL (daftar isian pelaksanaan anggaran), bersumber dari Rupiah Murni dan PNBP. Dalam tabel III.A.2.17 dapat dilihat distribusi Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKA-K/L tahun 2018-2023.

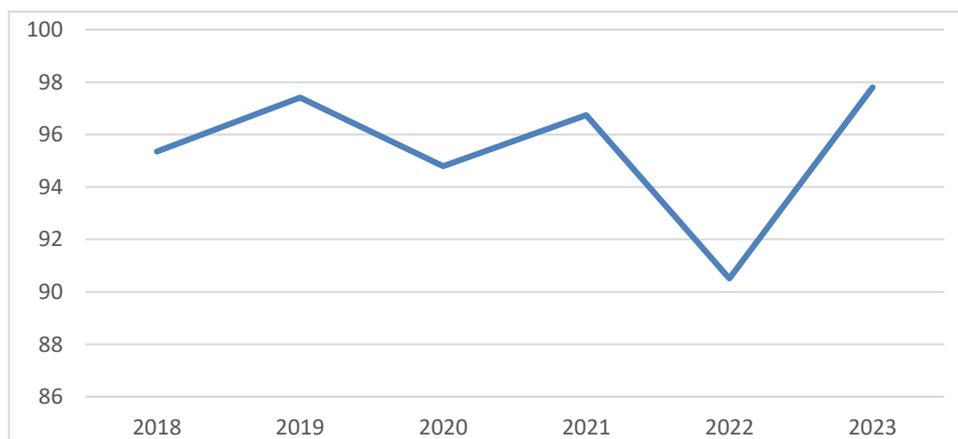
Tabel III.A.2.17
Distribusi Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2018–2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
2018	31.786.112.000	30.307.277.235	1.478.834.765	95,35
2019	30.351.307.000	29.565.479.751	785.827.249	97,41
2020	27.997.490.000	26.540.114.971	1.457.375.029	94,79
2021	31.513.432.000	30.485.601.899	1.027.830.101	96,74
2022	37.268.131.000	33.730.982.190	3.537.148.810	90,51
2023	33.888.156.000	33.141.972.269	746.183.731	97,80

Sumber : Data Realisasi SAS dan SAKTI

Dari tabel III.A.2.17, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja DIPA/RKAKL pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar mengalami fluktuatif, turun di tahun 2020, naik di tahun 2021, namun kembali turun di tahun 2022 dan naik kembali di tahun 2023. Hal ini dapat dilihat pada grafik III.A.2.4 berikut :

Grafik III.A.2.4
Trend Realisasi Anggaran Belanja DIPA/RKAKL
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2018–2023



Sumber : Data Realisasi SAS dan SAKTI

1. Sub Substansi Pengendalian Karantina

Salah satu kegiatan Sub Substansi Pengendalian Karantina adalah melakukan pengawasan terhadap kedatangan kapal/pesawat dalam karantina dari luar negeri dan dalam negeri. Pengawasan ini dilakukan di seluruh Wilayah Kerja dan Pos KKP Kelas I Makassar yaitu Pelabuhan Makassar, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Pelabuhan Paotere, Biringkassi, Awerange, Parepare, Siwa, Palopo, Malili, Bira, Bajoe, Majene, Belang-Belang, Pasangkayu dan Bandara Tamba Padang. Kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan antara lain:

- a. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan kapal antara lain: *Maritime Declaration of Health/MDH, Crew List, Port of Call/Voyage Memo, Vaccination List, General Nil List, Certificate of Medicine, Ship Particular, Port Clearance, Manifest, Port Health Quarantine Clearance (PHQC), Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC)/Ship Sanitation Control Certificate (SSCC), Health Book, Certificate of Pratique (COP), OMKABA, Sailing Permit/OMEK, dan Izin Angkut Jenazah.*
- b. Pemeriksaan dan penerbitan dokumen kesehatan pesawat antara lain : *General Declaration/GENDEC, Passenger List, Cargo List, Sertifikat P3K dan penerbitan Sertifikat Izin Angkut Jenazah.*

Berdasarkan UU No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 362 bahwa setiap kapal, pesawat udara dan kendaraan darat yang datang dari atau berangkat ke luar negeri, atau datang dari daerah terjangkit berada dalam pengawasan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan Pasal 366 bahwa setiap alat angkut orang, dan atau yang datang dari atau berangkat keluar negeri, atau datang dari atau berangkat ke daerah atau negara endemis atau terjangkit harus dilengkapi dengan dokumen karantina Kesehatan.

Kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan alat angkut khususnya yang datang dari negara atau daerah terjangkit melalui pemeriksaan dokumen kesehatan dan faktor risiko kesehatan alat angkut.

Jika dalam pemeriksaan dokumen kesehatan lengkap, tidak ditemukan penyakit atau faktor risiko kesehatan terhadap alat angkut dapat diberikan persetujuan bebas karantina dan jika dokumen tidak lengkap dan/atau ada faktor risiko kesehatan diberikan persetujuan karantina terbatas dan dilakukan kekarantinaan kesehatan yang diperlukan. Adapun data kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan alat angkut, orang dan barang ini dapat dilihat pada tabel dan grafik :

a. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan pesawat

1) Kedatangan pesawat

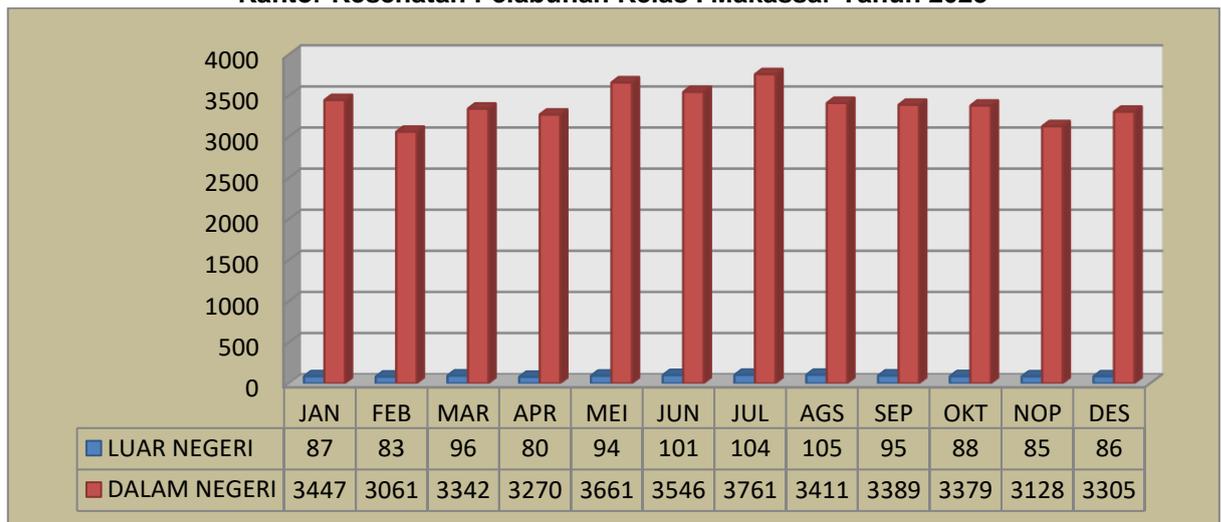
Tabel III.B.1.1
Distribusi Kedatangan Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	HASANUDDIN	TAMPA PADANG	PALOPO	JML
LUAR NEGERI	1.104	0	0	1.104
DALAM NEGERI	40116	562	22	40.700
TOTAL	41.220	562	22	41.804

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.1 jumlah pesawat yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri selama Tahun 2023 sebanyak 41.804 pesawat. Pesawat yang tiba dari luar negeri sebanyak 1.104 pesawat (2,64%), yang terdiri dari pesawat *Medical Evacuation*, *Charter Flight* maupun Cargo, dan Penerbangan Internasional regular termasuk penerbangan haji dan Umroh. Sedangkan pesawat yang tiba dari dalam negeri sebanyak 40.700 pesawat (97,35%), Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 41.220 pesawat (98,40%), Bandara Tampa Padang Mamuju sebanyak 562 pesawat (1,54%) dan Bandara Palopo (I Lagaligo Bua) sebanyak 22 pesawat (0,05%) dari total keseluruhan kedatangan pesawat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik III.B.1.1

Grafik III.B.1.1
Distribusi Jumlah Kedatangan Pesawat Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.1 menunjukkan bahwa jumlah kedatangan pesawat dari luar negeri tertinggi di bulan Agustus sebanyak 105 pesawat (9,51%), dan terendah di bulan April sebanyak 80 pesawat (7,24%). Sedangkan kedatangan pesawat dalam negeri tertinggi di bulan Juli sebanyak 3.761 pesawat (9,24%) dan terendah di bulan Februari sebanyak 3.061 pesawat (7,52%)

a) Kedatangan penumpang pesawat

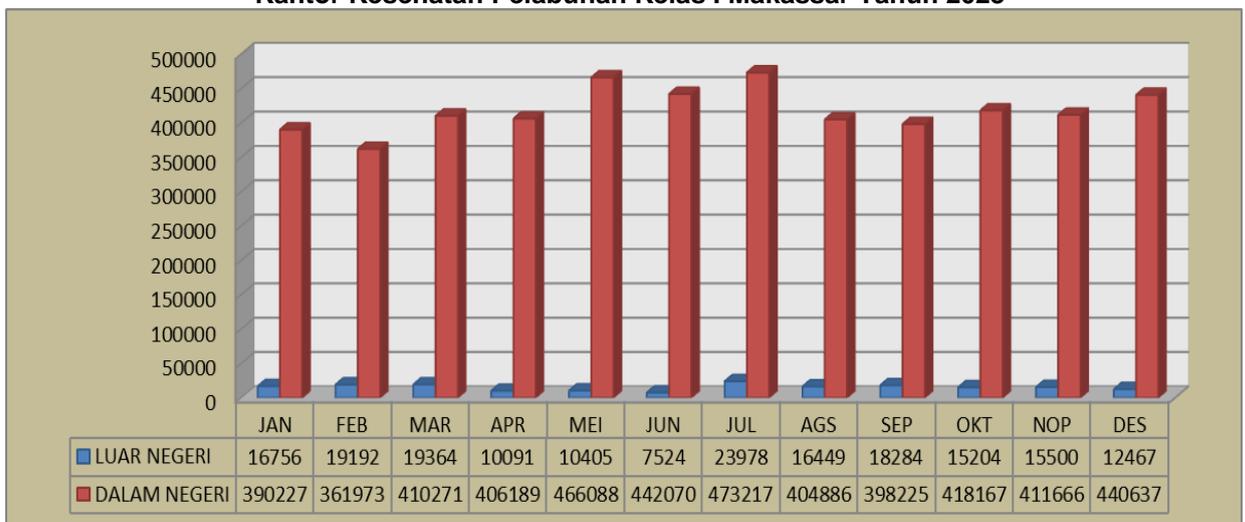
Tabel III.B.1.2
Jumlah Kedatangan Penumpang Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	HASANUDDIN	TANPA PADANG	PALOPO	JML
LUAR NEGERI	185.214	0	0	185.214
DALAM NEGERI	4.995.126	27.328	1.162	5.023.616
TOTAL	5.180.340	27.328	1.162	5.208.830

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan table III.B.1.2 dapat dilihat bahwa jumlah kedatangan penumpang pesawat sebanyak 5.208.830 penumpang terdiri dari Bandara Hasanuddin sebanyak 5.180.340 penumpang (99,45%), Wilker Tampa Padang sebanyak 27.328 penumpang (0,52%) dan Wilker Palopo sebanyak 1.162 penumpang (0,02%). Wilker Palopo dan Tampa Padang belum ada penerbangan dari luar negeri, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik III.B.1.2.

Grafik III.B.1.2
Distribusi Kedatangan Penumpang Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



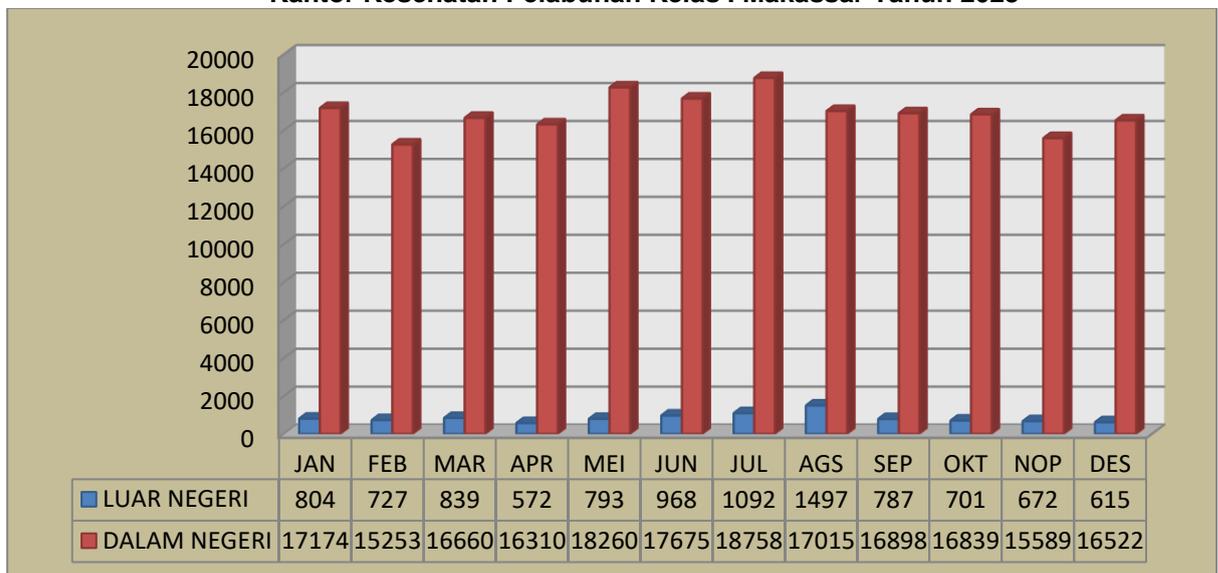
Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.2, menunjukkan bahwa jumlah kedatangan penumpang dari Luar Negeri tertinggi di bulan Juli sebanyak 23.978 penumpang (12,94%) dan terendah di bulan April sebanyak 10.091 penumpang (5,44%).

Sedangkan kedatangan penumpang dari Dalam Negeri sepanjang Tahun 2023 terbanyak yaitu pada Juli sebanyak 473.217 penumpang (9,41%) dan terendah terjadi pada Februari sebanyak 361.973 penumpang (7,20%). Dari jumlah kedatangan penumpang tahun 2023 sebanyak 5.208.830 penumpang, jika dibandingkan dengan jumlah kedatangan penumpang tahun 2022 yaitu sebesar 4.789.727 penumpang, di tahun ini ada peningkatan arus kedatangan penumpang, kenaikan jumlah penumpang ini menandakan bahwa penerbangan domestik sudah mulai membaik seiring menurunnya kasus kejadian Covid-19 di Indonesia.

b) Kedatangan personel pesawat

Grafik III.B.1.3
Distribusi Kedatangan Personel Pesawat Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Dari grafik III.B.1.3, jumlah kedatangan personel pesawat dari luar negeri sebanyak 10.067 personel (4,72%) dan dalam negeri sebanyak 202.953 personel (95,27%). Hal ini disebabkan karena Bandara Hasanuddin sudah ditetapkan sebagai pintu masuk internasional.

2) Keberangkatan pesawat

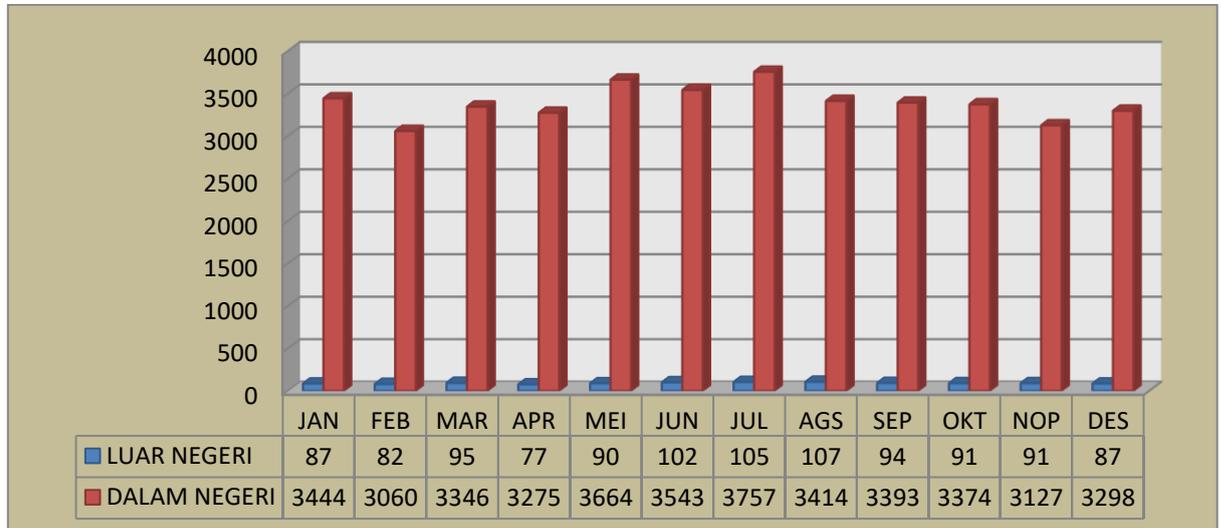
Tabel III.B.1.3
Jumlah Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	HASANUDDIN	TANPA PADANG	PALOPO	JML
LUAR NEGERI	1.108	0	0	1.108
DALAM NEGERI	40.111	562	22	40.695
TOTAL	41.219	562	22	41.803

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.3 jumlah pesawat yang berangkat ke luar negeri maupun dalam negeri selama Tahun 2023 sebanyak 41.803 pesawat. Pesawat yang berangkat ke luar negeri sebanyak 1.108 pesawat (2,65%). Sedangkan pesawat yang ke dalam negeri sebanyak 40.695 pesawat (97,34%), Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 41.219 pesawat (98,60%), Bandara Tamba Padang Mamuju sebanyak 562 pesawat (1,34%) dan Bandara I Lagaligo Bua' (Wilker Palopo) sebanyak 22 pesawat (0,05%) dari total keseluruhan keberangkatan pesawat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik

Grafik III.B.1.4
Distribusi Keberangkatan Pesawat Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.4 menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan pesawat luar negeri tertinggi di bulan Agustus sebanyak 107 pesawat (9,65%) terendah di bulan Februari sebanyak 82 pesawat (7,40%). Untuk keberangkatan ke dalam negeri tertinggi dibulan Juli sebanyak 3.757 pesawat (9,23%) dan terendah di bulan februari sebanyak 3.060 pesawat (7,51%).

a) Keberangkatan penumpang pesawat

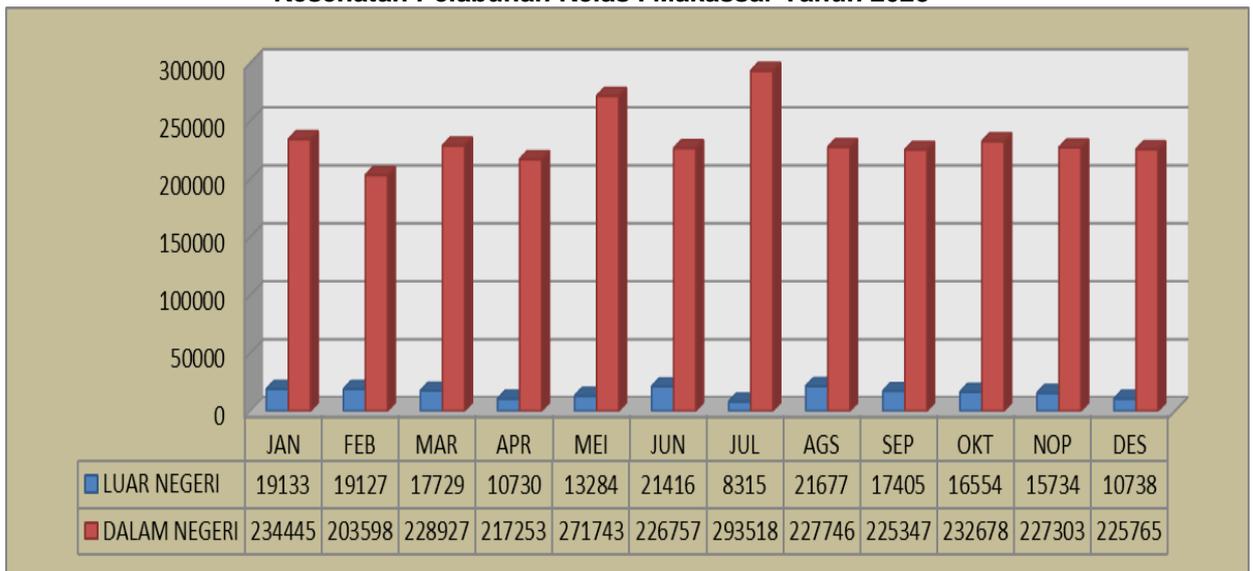
Tabel III.B.1.4
Distribusi Keberangkatan Penumpang Pesawat Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	HASANUDDIN	TANPA PADANG	PALOPO	JML
LUAR NEGERI	191.842	0	0	191.842
DALAM NEGERI	2.786.001	28.039	1.040	2.815.080
TOTAL	2.977.843	28.039	1.040	3.006.922

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan table III.B.1.4, dapat dilihat bahwa jumlah keberangkatan penumpang pesawat sebanyak 3.006.922 penumpang pada Bandara Hasanuddin sebanyak 2.977.843 penumpang (99%), Wilker Tampa padang sebanyak 28.039 penumpang (0,93%) dan Wilker Palopo sebanyak 1.040 penumpang (0,03%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik III.B.1.5

Grafik III.B.1.5
Distribusi Keberangkatan Penumpang Pesawat Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



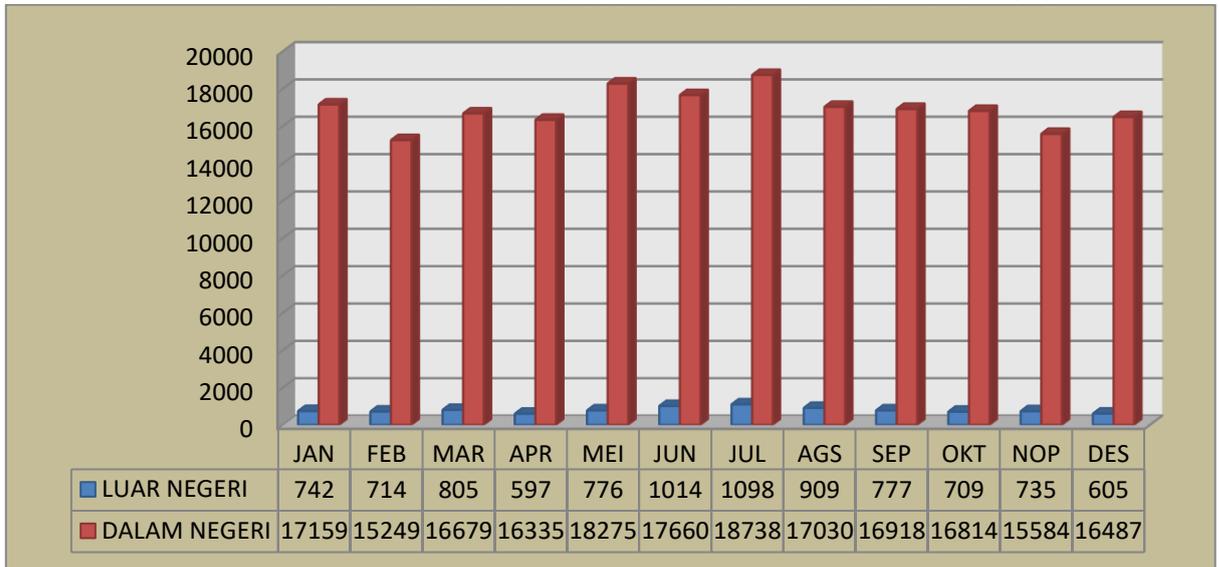
Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.5, menunjukkan bahwa jumlah keberangkatan penumpang ke luar negeri tertinggi pada bulan Agustus sebanyak 21.677 penumpang (11,29%) terendah di bulan Desember sebanyak 10.738 penumpang (5,59%).

Keberangkatan penumpang dalam negeri tertinggi pada bulan Juli sebanyak 293.518 penumpang (10,42%), sedangkan terendah pada bulan Februari sebanyak 203.598 penumpang (7,23%).

b) Keberangkatan personel pesawat

Grafik III.B.1.6
Distribusi Keberangkatan Personel Pesawat Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



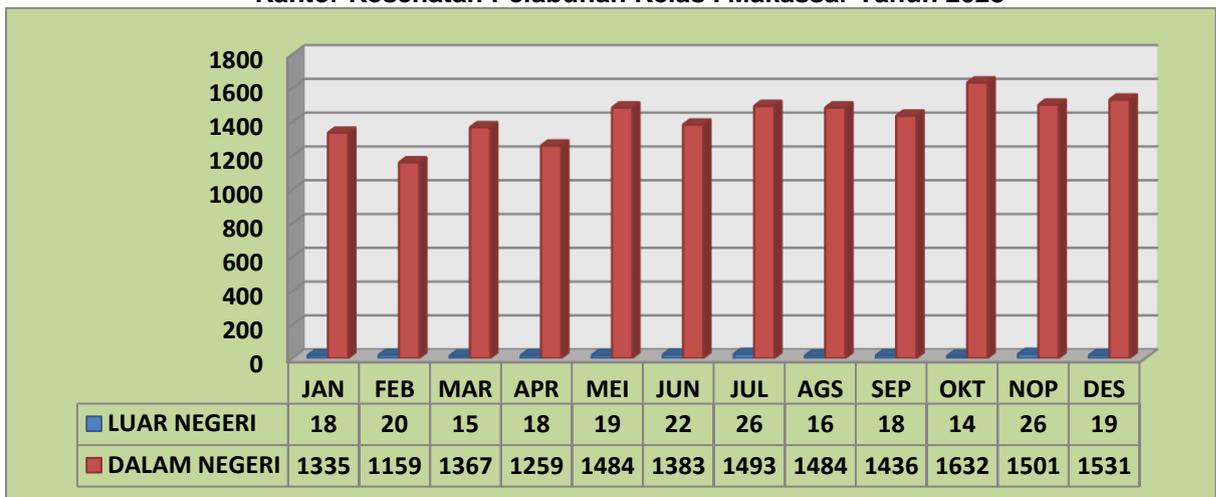
Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.b.1.6, jumlah personel pesawat yang berangkat ke luar negeri sebanyak 9.481 personel (4,46%) yang terdiri dari *Charter Flight*, *Cargo* dan Penerbangan Internasional Reguler, sedangkan Personel Pesawat yang berangkat ke dalam negeri sebanyak 202.928 personel (95,53%).

b. Pengawasan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal

1) Kedatangan Kapal

Grafik III.B.1.7
Distribusi Kedatangan Kapal Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.7, jumlah kedatangan kapal Luar negeri

sebanyak 231 kapal (1.33%) dan dalam negeri sebanyak 17.064 kapal (98,66%). Kapal yang datang dari luar negeri tertinggi di bulan Juli dan Nopember masing-masing sebanyak 26 Kapal (11,25%), sedangkan kapal yang datang dari dalam negeri tertinggi di bulan Oktober sebanyak 1.632 kapal (9,56%) dan terendah di bulan Februari sebanyak 1.159 Kapal (6,79%).

Pengawasan kapal dalam karantina khususnya kapal yang datang dari Luar Negeri dan Dalam Negeri (Daerah terjangkau) dengan diterbitkan *Certificate of Pratique* sebanyak 806 kapal. Kedatangan kapal berdasarkan wilayah kerja selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

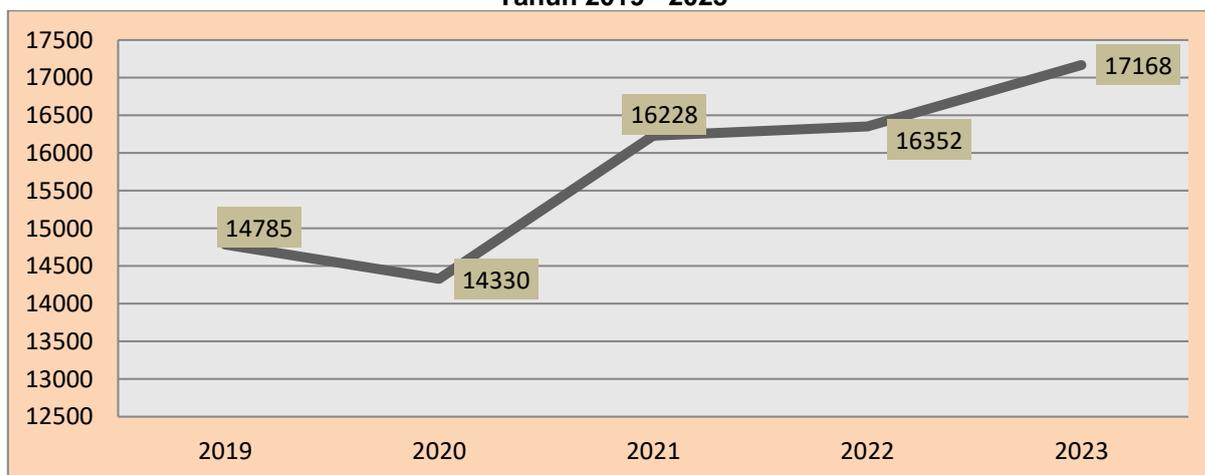
Tabel III.B.1.5
Distribusi Kedatangan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	AWERAN GE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRING KASSI	MAKA SSAR	MALILI	PAL OPO	PAREP ARE	TANPA PADANG	BULUK UMBA	MAJE NE	PAOT ERE	PASANG KAYU	SIWA	JML
LUAR NEGERI	21	0	7	53	67	12	2	4	0	12	1	0	52	0	231
DALAM NEGERI	872	1.860	521	2.490	4.423	740	185	1.298	183	1.406	115	837	760	1.374	17.064
TOTAL	893	1.860	528	2.543	4.490	752	187	1.302	183	1.418	116	837	812	1.374	17.295

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.5, kedatangan kapal berdasarkan wilayah kerja tertinggi di Pelabuhan Makassar sebanyak 4.490 kapal (25,96%), terendah pada Pos Pelabuhan Majene sebanyak 116 kapal (0,67%).

Grafik III.B.1.8
Kedatangan Kapal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.8, kedatangan kapal selama tahun 2019 sampai

dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif dan meningkat dibanding tahun 2022. Hal ini disebabkan transportasi laut sudah mulai membaik seiring menurunnya kasus kejadian Covid-19 di Indonesia.

a) Kedatangan Penumpang Kapal

Pengawasan terhadap pelaku perjalanan khususnya yang berasal dari negara atau wilayah terjangkit dilakukan skrining dengan menggunakan *Thermal scanner* maupun *Thermometer infra red* dan pengamatan visual. Adapun data penumpang dapat dilihat pada tabel III.B.1.6

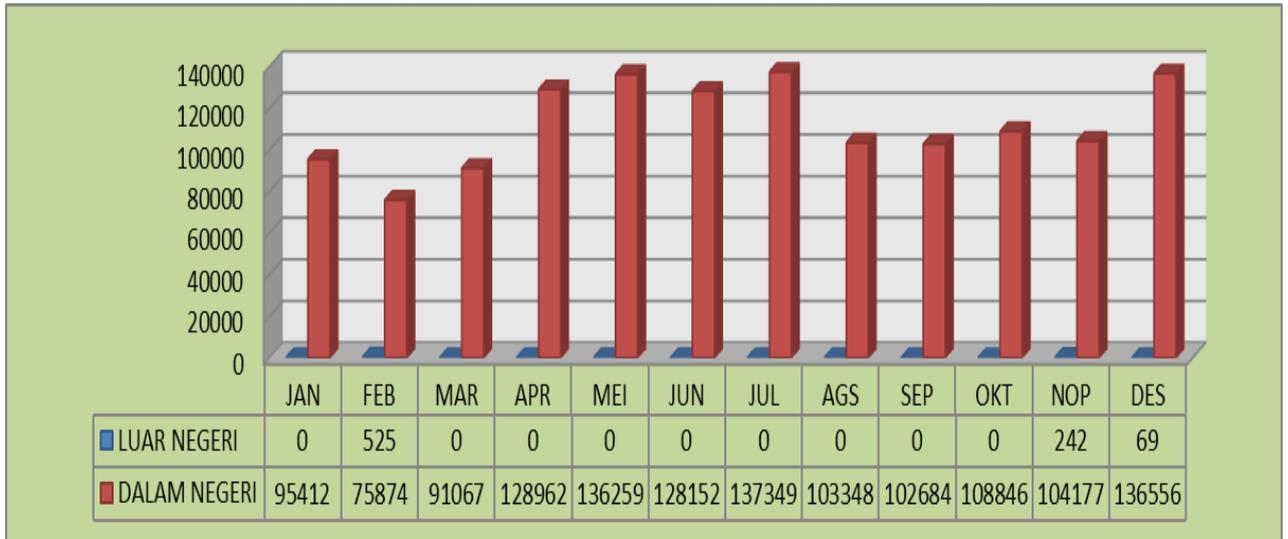
Tabel III.B.1.6
Distribusi Kedatangan Penumpang Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	AWERAN GE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRING KASSI	MAKASSAR	MALILI	PALO PO	PAREPARE	TANPA PADANG	BULUKU MBA	MAJENE	PAOTERE	PASANG KAYU	SIWA	JML
LUAR NEGERI	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0	69	0	0	0	836
DALAM NEGERI	43.369	170.381	1.676	8.532	472.059	0	0	368.767	26.175	114.084	10.640	4.954	0	128.049	1.348.686
TOTAL	43.369	170.381	1.676	8.532	472.826	0	0	368.767	26.175	114.084	10.709	4.954	0	128.049	1.349.522

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.6, kedatangan penumpang kapal selama Tahun 2023 sebanyak 1.349.522 orang atau naik sebanyak 65.726 orang (4,87%) dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1.283.796 penumpang. Jumlah kedatangan penumpang tertinggi pada Pelabuhan Makassar sebanyak 472.826 orang (35,03%) dan terendah Pelabuhan Belang-belang sebanyak 1.676 orang (0,12%). Untuk pelabuhan malili dan palopo tidak ada kapal penumpang. Kenaikan jumlah penumpang yang datang menandakan bahwa transportasi laut sudah mulai membaik seiring menurunnya kasus kejadian Covid-19 di Indonesia

Grafik III.B.1.9
Distribusi Kedatangan Penumpang Kapal Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

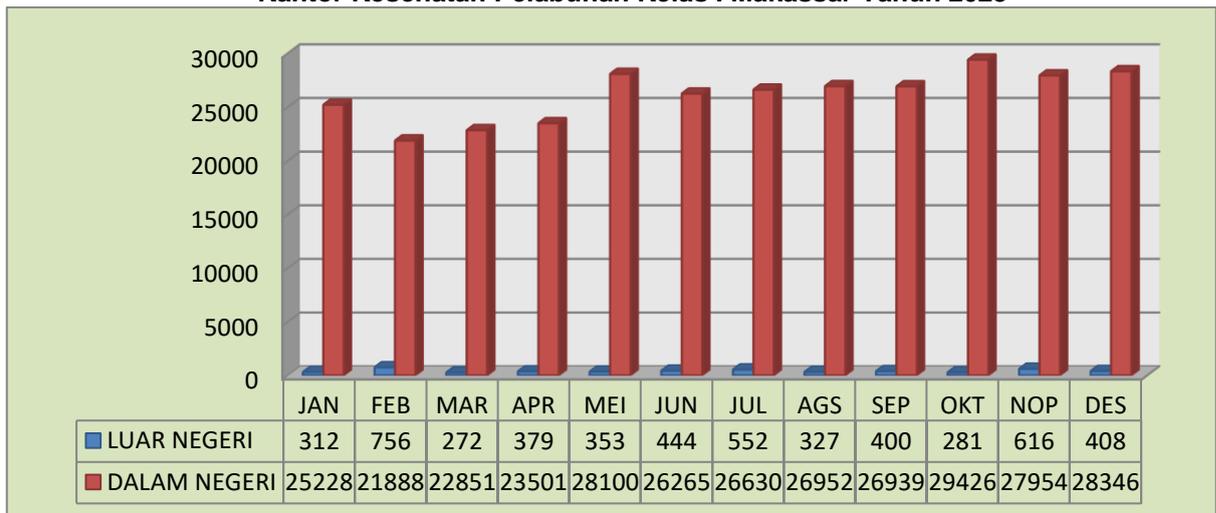


Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.9, distribusi penumpang dalam negeri tertinggi di Bulan Juli sebanyak 137.349 penumpang (10,18%), dan terendah di Bulan Februari sebanyak 75.874 penumpang (5,62%). Untuk kedatangan penumpang kapal dari luar negeri sebanyak 836 penumpang (0,06%), yaitu pada bulan Februari, Nopember dan Desember.

b) Kedatangan Awak Kapal

Grafik III.B.1.10
Distribusi Kedatangan Awak Kapal Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.10, dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan (awak kapal) khususnya yang berasal dari negara atau daerah terjangkau yaitu dengan melakukan pengamatan suhu dan pemeriksaan dokumen kesehatan. Adapun jumlah kedatangan awak kapal selama Tahun 2023 sebanyak 319.180 awak kapal, yang datang dari luar negeri sebanyak 5.100 awak kapal (1,59%) dan dari dalam negeri sebanyak 314.080 awak kapal (98,40%)

Pengawasan kedatangan awak kapal yang datang dari luar negeri tertinggi di bulan Februari sebanyak 756 awak (14,82%) dan terendah di bulan Maret sebanyak 272 awak (5,4%), sedangkan awak kapal yang datang dari dalam negeri tertinggi di bulan Oktober sebanyak 29.426 awak kapal (9,36%) dan terendah di bulan Februari sebanyak 21.888 awak kapal (6,96%).

2) Keberangkatan Kapal

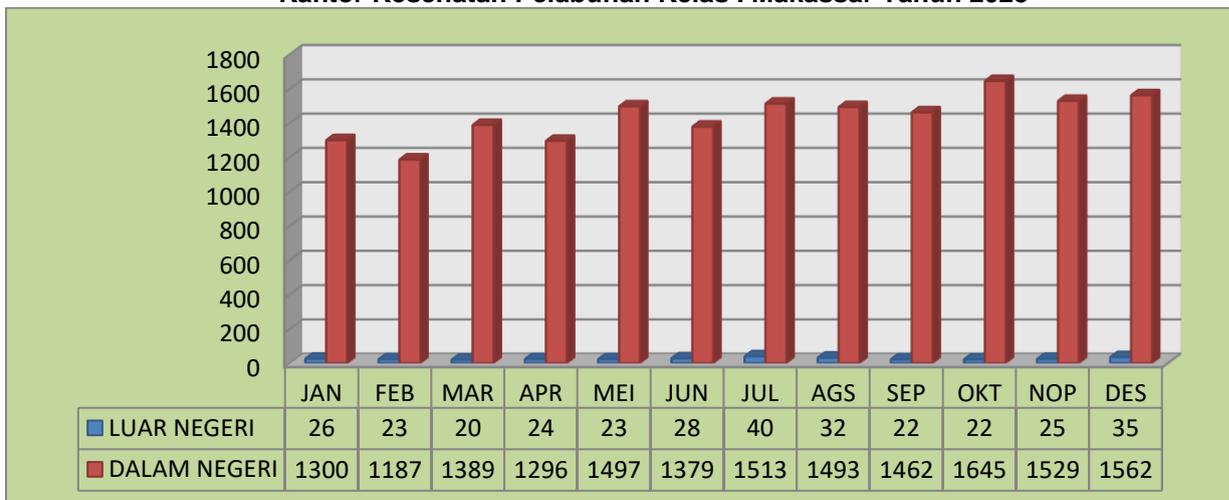
Tabel III.B.1.7
Distribusi Keberangkatan Kapal Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

KEGIATAN	AWERAN GE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRINGK ASSI	MAKASSAR	MALILI	PALO PO	PAREPARE	TANPA PADANG	BULUKU MBA	MAJENE	PAOTERE	PASANG KAYU	SIWA	JML
LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88
DALAM NEGERI	45.414	191.301	2.080	15.135	482.395	0	0	375.454	23.048	130.561	14.146	3.774	0	160.316	1.443.624
TOTAL	45.414	191.301	2.080	15.135	482.395	0	0	375.454	23.048	130.561	14.146	3.862	0	160.316	1.443.712

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.7, keberangkatan kapal berdasarkan Wilayah Kerja tertinggi di Pelabuhan Makassar sebanyak 4.457 kapal (25,36%), dan terendah pada Wilker Pos Pelabuhan Majene sebanyak 116 kapal (0,66%). Hal ini disebabkan adanya Pos Pelabuhan Majene yang baru beroperasi di tahun 2022.

Grafik III.B.1.11
Distribusi Keberangkatan Kapal Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

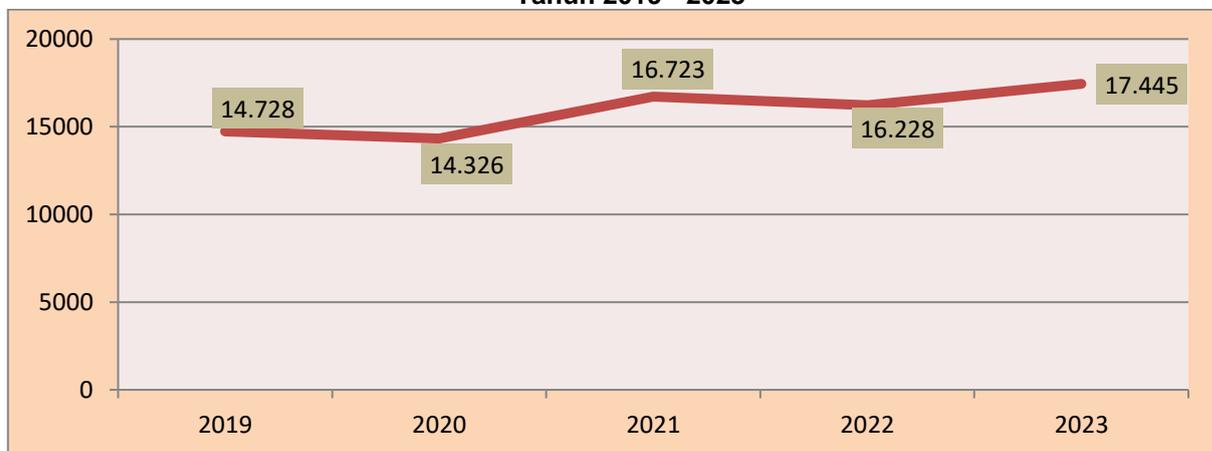
Berdasarkan grafik III.B.1.11, total keberangkatan kapal sebanyak 17.572 kapal, kapal ke luar negeri sebanyak 320 kapal (1,82%) dan dalam negeri sebanyak 17.252 kapal (98,17%).

Kapal yang berangkat ke luar negeri tertinggi di bulan Juli sebanyak 40 Kapal (12,5%) dan terendah di bulan Maret sebanyak 20 Kapal (6,25%).

Sedangkan Kapal yang berangkat ke dalam negeri tertinggi di bulan Oktober sebanyak 1.645 kapal (9,53%) dan terendah di bulan Februari sebanyak 1.187 kapal (6,88%).

Jumlah keberangkatan kapal atau penerbitan *Port Health Quarantine Clearance* (PHQC) berdasarkan Wilker selengkapnya dapat dilihat pada tabel III.B.1.9

Grafik III.B.1.12
Keberangkatan Kapal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.12, distribusi keberangkatan kapal selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan, di tahun 2023 sebanyak 17.445 kapal di bandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 16.228 kapal jika dibandingkan dengan tahun 2021.

a) Keberangkatan Penumpang Kapal

Tabel III.B.1.8
Distribusi Keberangkatan Penumpang Kapal Perbulan Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

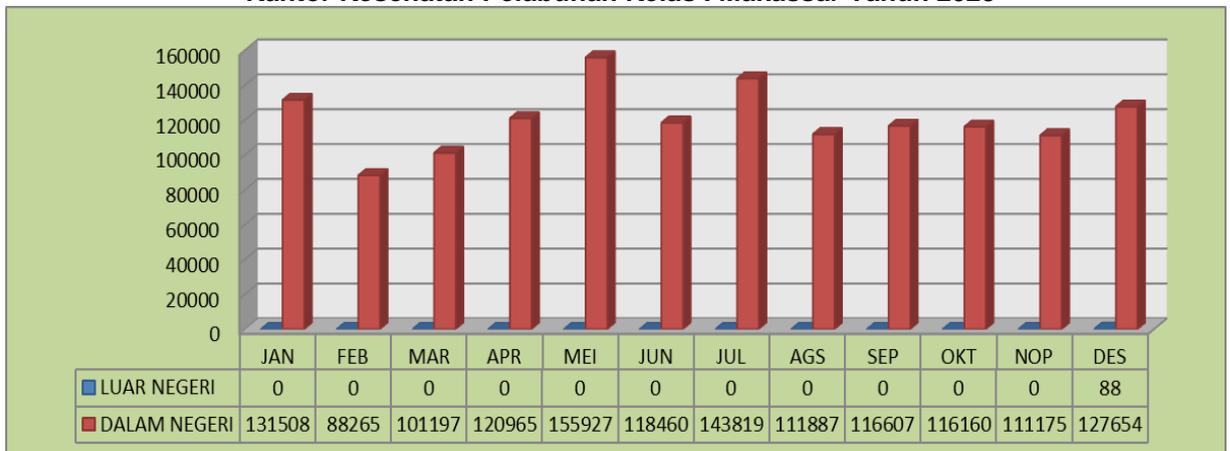
KEGIATAN	AWERA NGE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRINGK ASSI	MAKASS AR	MALILI	PAL OPO	PAREPAR E	TANPA PADANG	BULUKU MBA	MAJENE	PAOTE RE	PASANG KAYU	SIWA	JML
LUAR NEGERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	88
DALAM NEGERI	45.414	191.301	2.080	15.135	482.395	0	0	375.454	23.048	130.561	14.146	3.774	0	160.316	1.443.624
TOTAL	45.414	191.301	2.080	15.135	482.395	0	0	375.454	23.048	130.561	14.146	3.862	0	160.316	1.443.712

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.B.1.8, Jumlah keberangkatan penumpang kapal selama Tahun 2023 sebanyak 1.443.712 penumpang atau naik sebanyak 2.186 penumpang (0,15%) dibandingkan tahun 2022 sebanyak 1.441.526 penumpang.

Jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada Pelabuhan Makassar sebanyak 482.395 penumpang (33,41%), dan terendah Pelabuhan Belangbelang sebanyak 2.080 penumpang (0,14%). Terdapat dua wilayah kerja yakni Palopo dan Malili tidak ada keberangkatan penumpang kapal.

Grafik III.B.1.13
Distribusi Jumlah Keberangkatan Penumpang Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

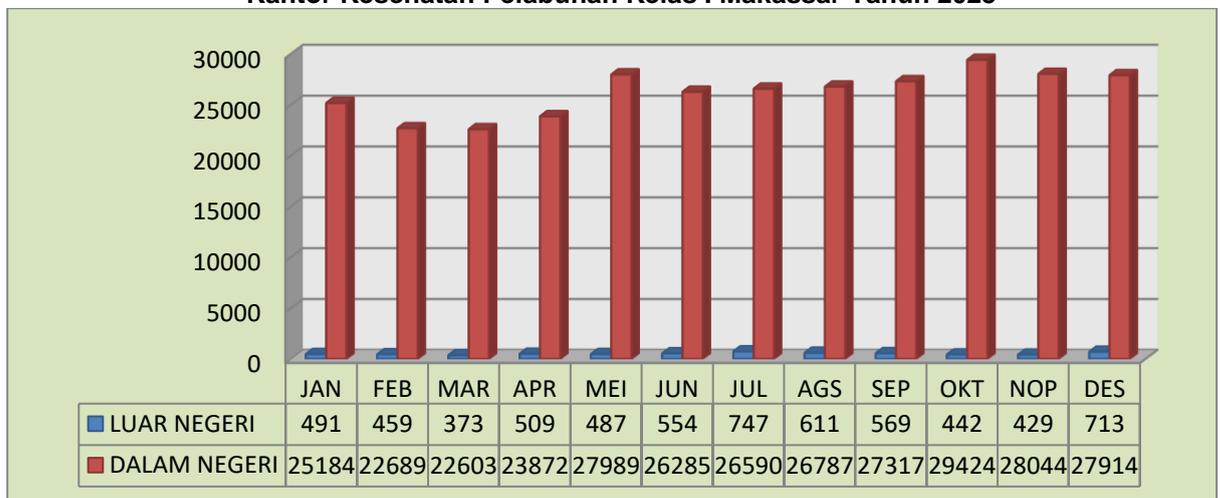


Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.13, Keberangkatan penumpang dalam negeri tertinggi di bulan Mei sebanyak 155.927 penumpang (10,80%), dan terendah di bulan Februari sebanyak 88.265 penumpang (6,11%). Kenaikan jumlah penumpang ini menandakan bahwa transportasi laut sudah mulai membaik seiring menurunnya kasus kejadian Covid-19 di Indonesia. Adapun jumlah keberangkatan penumpang kapal ke luar negeri di bulan Desember sebanyak 88 penumpang (100%) di Wilayah Kerja Pos Pelabuhan Majene (Pelabuhan Tanjung Silopo).

b) Keberangkatan Awak Kapal

Grafik III.B.1.14
Distribusi Jumlah Keberangkatan Awak Kapal Berdasarkan Bulan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.B.1.14, jumlah keberangkatan awak kapal selama Tahun 2023 sebanyak 321.082 awak kapal, yang berangkat ke luar negeri sebanyak 6.384 awak kapal (1,98%) dan ke dalam negeri sebanyak 314.698 awak kapal (98,01%).

Pada pengawasan keberangkatan menunjukkan bahwa jumlah awak kapal yang berangkat ke luar negeri tertinggi di bulan Juli sebanyak 747 awak kapal (11,70%) dan terendah di bulan Maret sebanyak 373 awak kapal (5,84%). Awak kapal yang berangkat ke dalam negeri tertinggi di bulan Oktober sebanyak 29.424 awak kapal (9,34%) dan terendah di bulan Maret sebanyak 22.603 awak kapal (7,18%).

c. Penerbitan Dokumen Sertifikat Kesehatan Alat Angkut

Setiap alat angkut orang, dan atau barang harus dilengkapi dengan dokumen karantina kesehatan sesuai UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 366 yaitu : Kapal (*Maritime Declaration of Health/MDH, Crew List, Port of Call/Voyage Memo, Vaccination List, General Nil List, Certificate of Medicine, Ship Particular, Port Clearance*), Pesawat (*General Declaration, Manifested*). Adapun jumlah penerbitan dokumen karantina kesehatan pada alat angkut sebagai berikut :

Tabel III.B.1.9
Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Alat Angkut Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

DOKUMEN	AWER ANGE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRING KASSI	MAKASS AR	MALILI	PAL OPO	PAREP ARE	TANPA PADANG	BULUKU MBA	MAJE NE	PAO TERE	PASANG KAYU	SIWA	JML
SSCC	4	0	0	0	24	0	0	2	0	0	0	0	0	0	30
SSCEC	88	158	29	172	223	60	11	63	6	132	12	161	51	7	1.173
HEALTH BOOK	32	51	23	89	114	8	4	17	6	85	2	43	15	28	517
FREE PRATIQUE	39	0	24	404	170	30	2	38	4	12	6	16	61	0	806
PHQC	1.156	1.860	528	2.541	4.457	745	190	1.306	183	1.415	116	885	811	1.379	17.572

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

1) Penerbitan SSCC/SSCEC

SSCEC adalah dokumen kapal yang menerangkan kondisi sanitasi kapal yang bebas tindakan sanitasi. SSCEC berlaku selama 6 bulan, jika dalam pemeriksaan ditemukan faktor risiko maka dilakukan tindakan penyehatan alat angkut dengan diterbitkan SSCC. Jumlah dokumen SSCEC yang dikeluarkan Tahun 2023 sebanyak 1.173 sertifikat dan dokumen SSCC sebanyak 30 sertifikat (Tindakan fumigasi sebanyak 20 kapal dan desinseksi sebanyak 10 kapal).

2) Penerbitan *Health Book*/Buku Kesehatan Kapal

Setiap kapal yang melakukan pelayaran wajib mempunyai buku kesehatan kapal (*Health Book*) sebagai alat koordinasi antar Kantor Kesehatan Pelabuhan dengan nakhoda. Apabila dalam pemeriksaan dokumen kesehatan kapal ditemukan kapal yang tidak mempunyai buku kesehatan kapal maupun lembaran buku kesehatan tersebut telah habis, maka diharuskan membuat buku kesehatan baru yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat, jumlah *Health Book* yang di keluarkan sebanyak 517 buku.

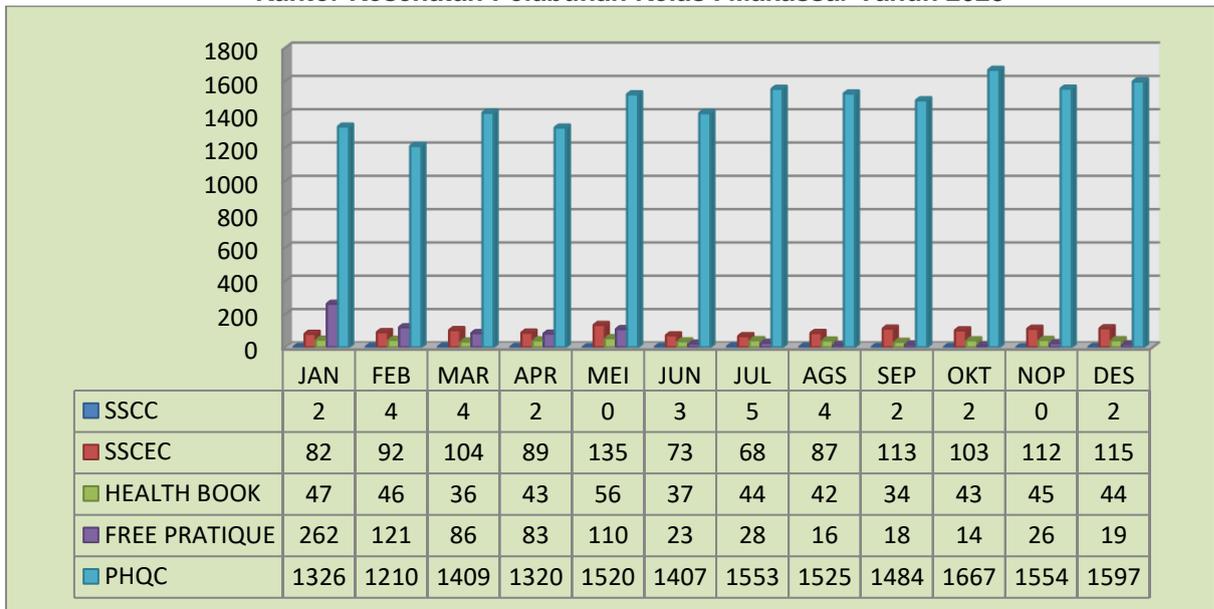
3) Penerbitan *Certificate of Pratique* (COP)

COP adalah dokumen kesehatan yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri atau daerah terjangkit. COP diberikan setelah pemeriksaan faktor risiko kesehatan terhadap kapal dan awaknya oleh tim Karantina Kesehatan dan dinyatakan bebas dari faktor risiko penyakit menular dan penyakit potensial wabah. Adapun jumlah COP yang diterbitkan Tahun 2023 sebanyak 806 sertifikat.

4) Penerbitan *Port Health Quarantine Clearance/ (PHQC)*

Setiap kapal yang akan berlayar kedalam maupun luar negeri diberikan surat ijin berlayar (SIB). SIB akan diberikan jika memenuhi persyaratan kesehatan seperti SSCEC/SSCC yang masih berlaku dan buku kesehatan yang valid. Jumlah dokumen PHQC yang dikeluarkan Tahun 2023 sebanyak 17.572 sertifikat. Setelah dokumen kesehatan dinyatakan lengkap dan tidak ditemukan faktor risiko dapat diberikan Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan (*Port Health Quarantine Clearance*) pada kapal yang melakukan perjalanan baik ke dalam negeri maupun keluar negeri. Jika dokumen tidak lengkap atau ditemukan penyakit atau faktor risiko kesehatan terhadap alat angkut, diberikan persetujuan karantina terbatas dan selanjutnya dilakukan tindakan kekarantinaan kesehatan yang diperlukan

Grafik III.B.1.15
Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Alat Angkut Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Sedangkan jumlah penerbitan dokumen karantina kesehatan pada barang sebagai berikut :

1) Penerbitan *Health Certificate* (OMKABA)

Dari hasil pemeriksaan dokumen serta pengawasan, jika dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat kesehatan maka diterbitkanlah sertifikat kesehatan, jumlah yang diterbitkan sebanyak 75 dokumen yaitu 74 sertifikat dan 1 surat keterangan. Sebagaimana berdasarkan hasil permintaan negara-negara yang membutuhkan *Health Certificate*, dan tidak semua negara mewajibkan sertifikat tergantung permintaan

2) Penerbitan sertifikat ijin angkut jenazah

Setiap jenazah yang diangkut melalui Pelabuhan dan Bandara harus dilengkapi dengan Surat Ijin Angkut Jenazah. Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah dengan persyaratan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit / Dinas Kesehatan, urut Keterangan Pengawetan Jenazah dengan Formalin dari Rumah Sakit, Surat Keterangan Krematorium (Abu Jenazah), Surat Keterangan Pemetian / Pengepakan Jenazah dan Surat Keterangan dari Kepolisian. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 871 sertifikat.

Untuk lebih jelasnya penerbitan dokumen kesehatan alat angkut dapat di lihat pada tabel III.B.1.10 dan grafik III.B.1.16

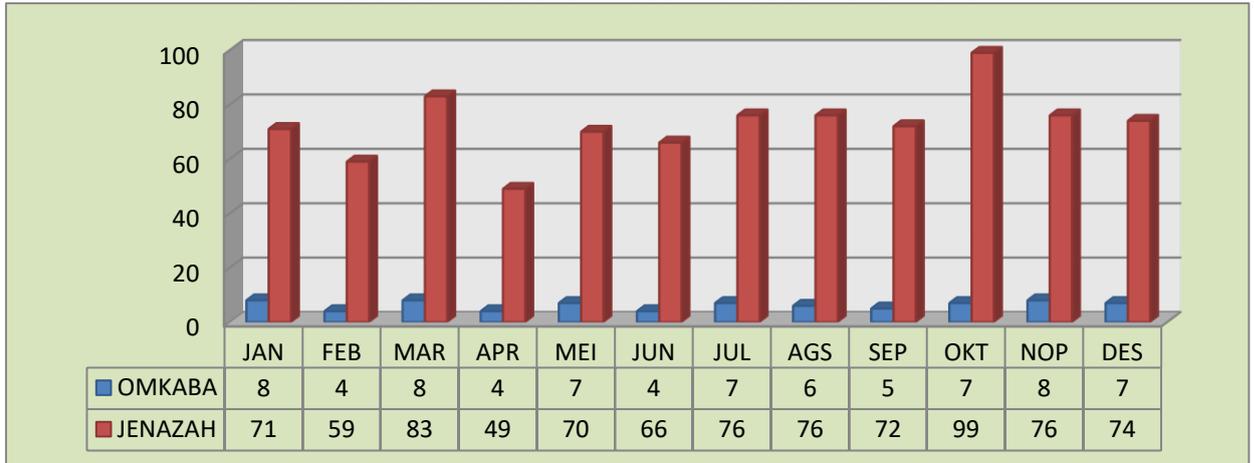
Tabel III.B.1.10
Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Barang Berdasarkan Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023

DOKUMEN	AWERA NGE	BAJOE	BELANG BELANG	BIRING KASSI	MAKA SSAR	VALIL	PAL OPO	PAREP ARE	HASAN UDDIN	TANPA PADANG	BULU KUM BA	MAJEN E	PAOTER E	PASAN G KAYU	SIWA	JML
OMKABA	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	75
JENAZAH	0	35	0	0	4	0	0	1	763	0	65	0	0	0	3	871

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan Tabel III.B.1.10 menunjukkan bahwa jumlah penerbitan dokumen OMKABA sebanyak 75 dokumen yaitu 74 sertifikat dan 1 surat keterangan Embrio. Sedangkan penerbitan Sertifikat Ijin Angkut Jenazah hanya pada Wilker Bandara Hasanuddin, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Bira, Pelabuhan Siwa dan Pelabuhan Parepare.

Grafik III.B.1.16
Distribusi Penerbitan Dokumen / Sertifikat Barang Berdasarkan Bulan
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

2. Sub Substansi Surveilans Epidemiologi

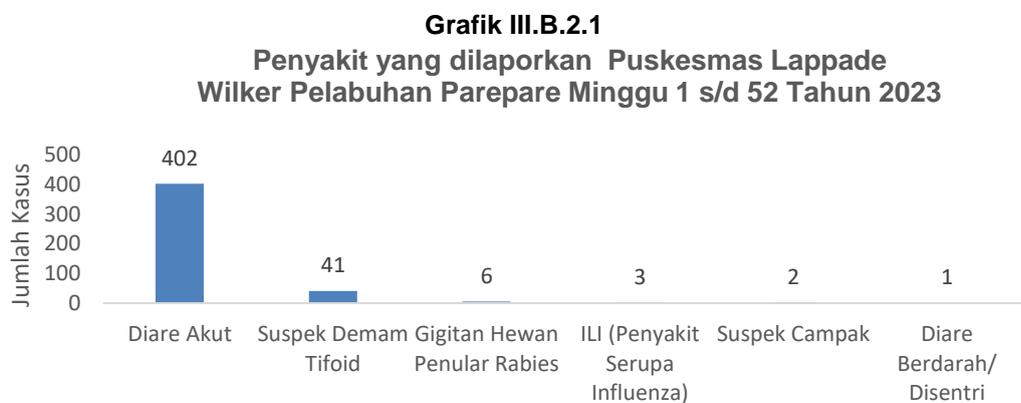
Salah satu kegiatan Sub Substansi Surveilans Epidemiologi adalah melakukan pengamatan keluar dan atau masuknya pelaku perjalanan melalui pelabuhan maupun bandara, melakukan pengamatan penyakit menular di daerah perimeter/buffer pelabuhan/bandara melalui analisis data laporan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) melalui *website* skdr.surveilans.org

Tujuan dari Sub Substansi Surveilans Epidemiologi adalah menjaga dan melindungi masyarakat dari sumber penularan penyakit karantina dan penyakit menular tertentu potensial wabah, yaitu terawasinya penumpang yang sakit melalui pelabuhan/bandara, terlaksananya sistem kewaspadaan dini KLB bidang kesehatan dan tersedianya akses informasi tentang penyakit (sumber Permenkes No. 33 Tahun 2021 Tentang Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan)

b. Analisis Situasi Puskesmas Buffer di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar

Analisis SKDR Puskesmas Buffer dilakukan setiap minggu oleh Epidemiolog untuk melihat kecenderungan atau trend peningkatan kasus sebagai kewaspadaan bagi petugas KKP di Wilayah Kerja.

- 1) Puskesmas Buffer di Wilayah Kerja Parepare (Puskesmas Lappade dan Puskesmas Madising)



Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Selama tahun 2023 kasus yang dilaporkan dari Puskesmas Lappade Wilker Pelabuhan Parepare terdapat 6 kasus / penyakit, turun bila dibandingkan pada tahun 2022 yang melaporkan 7 kasus / penyakit. Jika dilihat Berdasarkan jumlah kasus yang dilaporkan maka terbanyak adalah kasus Diare akut sebanyak 42 kasus turun bila dibandingkan pada tahun 2022 dan yang terjadi penurunan secara signifikan adalah kasus gigitan hewan penular rabies yakni dari 23 kasus turun menjadi 6 kasus pada tahun 2023.

Grafik III.B.2.2
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Madising Na Mario Wilker Pelabuhan Parepare Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

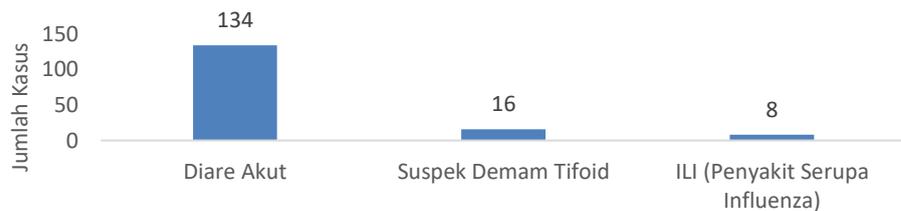


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Selama tahun 2023 terdapat 4 kasus/ penyakit yang dilaporkan Puskesmas Madising Na Mario yakni Diare akut sebanyak 187 kasus, ILI 180 kasus, GHPR 4 kasus dan Suspek Campak 1 kasus. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan jumlah kasus / penyakit yakni kasus ILI turun bila dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 40,18 %, namun terdapat peningkatan kasus untuk penyakit Diare akut dari 161 kasus pada tahun 2022 menjadi 187 kasus pada tahun 2023.

2) Puskesmas Pontap di Wilker Palopo

Grafik III.B.2.3
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Pontap Wilker Pelabuhan Palopo Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

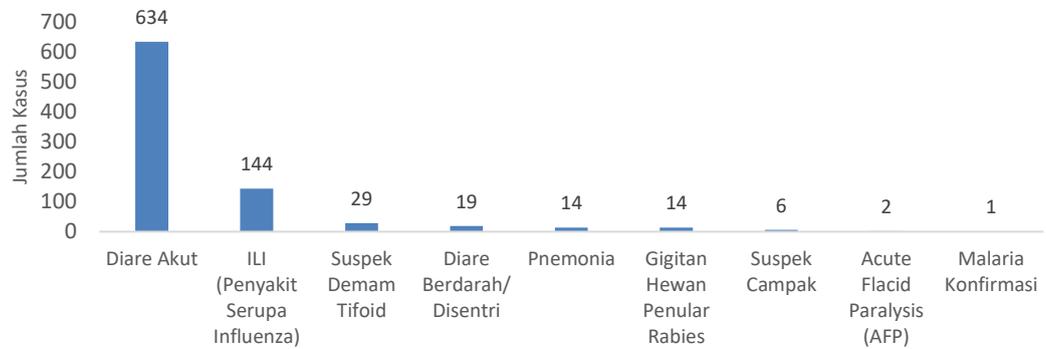


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Selama tahun 2023 terdapat 3 jenis kasus / penyakit yang dilaporkan Puskesmas Pontap Wilker Pelabuhan Palopo yakni Diare akut, Suspek Demam Typhoid dan Influenza Like Illness (ILI). Adapun kasus terbanyak yakni Diare akut sebanyak 134 kasus. Bila dibandingkan tahun 2022 lalu terjadi peningkatan kasus Diare akut sebanyak 28 kasus (26,41 %). Sedangkan kasus Demam typhoid terjadi penurunan kasus dari 40 kasus pada tahun 2022 menjadi 16 kasus pada tahun 2023.

3) Puskesmas Malili di Wilker Malili

Grafik III.B.2.4
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Malili
Wilker Pelabuhan Malili Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

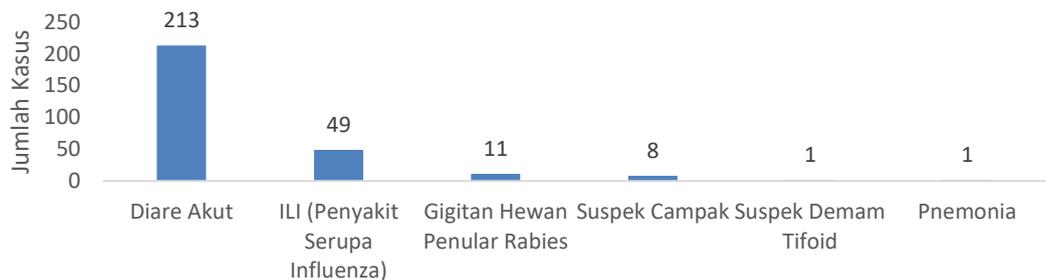


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Tahun 2023 terdapat 9 jenis penyakit yang dilaporkan dengan kasus Diare akut terbanyak dilaporkan yakni 634 kasus turun bila dibandingkan tahun 2022 yang melaporkan 1.145 kasus Diare akut dan terendah kasus Malaria konfirmasi sebanyak 1 kasus.

4) Rekapitulasi Puskesmas Buffer di Wilker Awerange (Puskesmas Mangkoso dan Puskesmas Padongko)

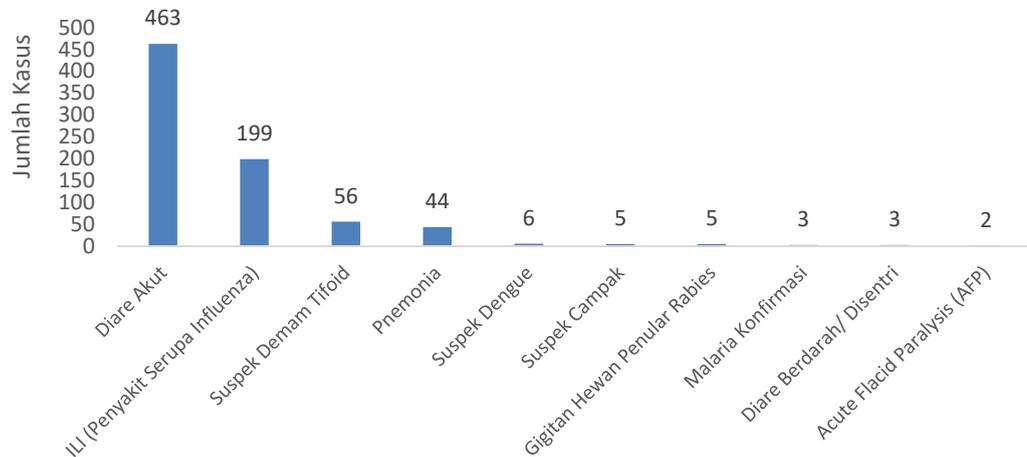
Grafik III.B.2.5
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Mangkoso
Wilker Pelabuhan Awerange Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023



Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Kasus penyakit di Puskesmas Mangkoso Wilker Awerange pada minggu 1 sampai 52 tahun 2023 tertinggi adalah Diare sebanyak 213 kasus turun bila dibandingkan tahun 2022. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh cakupan air bersih dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat yang semakin baik. Sedangkan terendah Pneumonia sebanyak 1 kasus dari total 283 kasus.

Grafik III.B.2.6
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Padongko
Wilker Pelabuhan Awerange Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

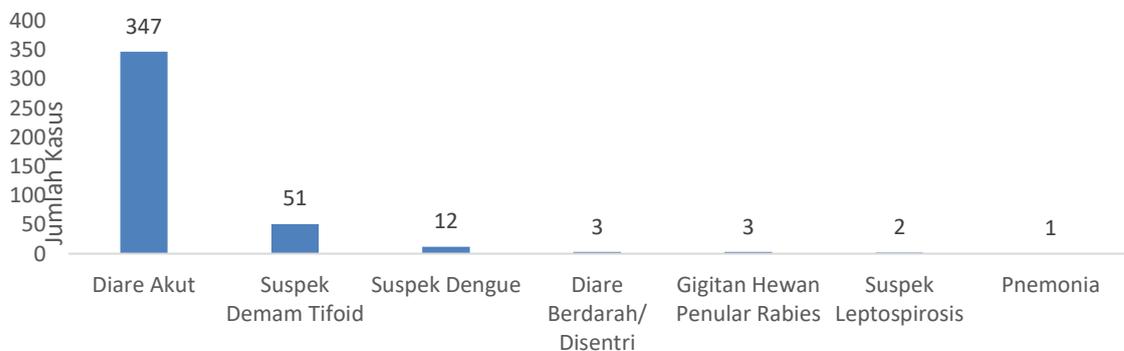


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Selama tahun 2023 Puskesmas Padongko yang merupakan puskesmas daerah buffer dari Wilker Pelabuhan Awerange melaporkan 10 jenis penyakit dengan Diare akut menjadi penyakit terbanyak yang dilaporkan yakni 463 kasus naik bila dibandingkan tahun 2022 yang melaporkan 299 kasus. dan terendah adalah kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) sebanyak 2 kasus dan total keseluruhan kasus baru yang dilaporkan sebanyak 786 kasus.

5) Puskesmas Bowong Cindea di Wilker Biringkassi

Grafik III.B.2.7
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Bowong Cindea
Wilker Pelabuhan Biringkassi Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

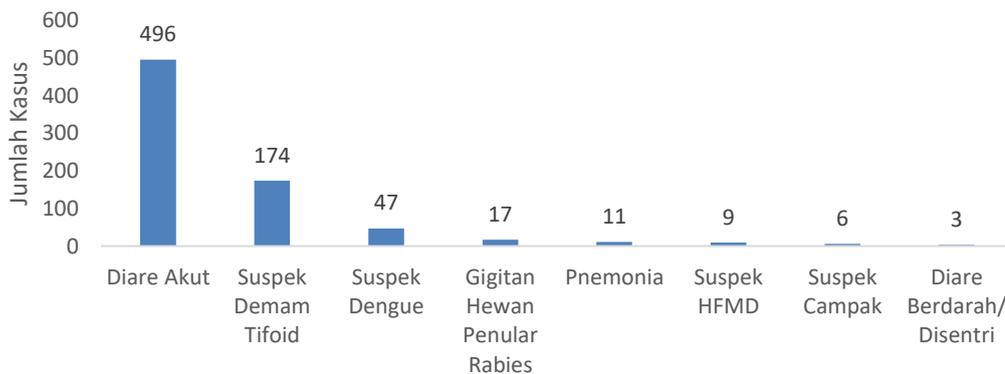


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Kasus penyakit di Puskesmas Bowong Cindea Wilker Biringkassi pada minggu 1 sampai 52 tahun 2023 yang dilaporkan ada 7 penyakit dan tertinggi adalah diare akut sebanyak 347 kasus meningkat bila dibandingkan tahun 2022 sebanyak 225 kasus. Sedangkan terendah Pneumonia sebanyak 1 kasus dari total 419 kasus.

6) Puskesmas Bajoe di Wilker Bajoe

Grafik III.B.2.8
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Bajoe
Wilker Pelabuhan Bone Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

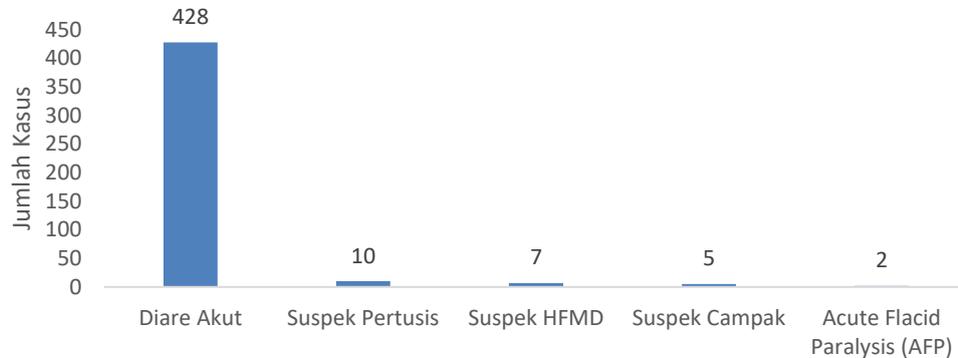


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Selama tahun 2023 di Puskesmas Bajoe yang merupakan Puskesmas buffer Wilker Pelabuhan Bajoe melaporkan 8 penyakit dengan total kasus sebanyak 763 kasus. Kasus tertinggi adalah Diare akut sebanyak 496 kasus dan terendah adalah Diare berdarah. Bila dibandingkan tahun 2022 maka tahun 2023 ini kasus yang dilaporkan meningkat secara signifikan. Seperti kasus Diare akut pada tahun 2022 dilaporkan 352 kasus meningkat pada tahun 2024 sebanyak 496 kasus. Hal ini bisa disebabkan beberapa hal yakni pencatatan dan pelaporan yang meningkat dari sisi kelengkapan laporan.

7) Puskesmas Caille di Pos Pelabuhan Bira

Grafik III.B.2.9
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas Caile
Wilker Pelabuhan Bira Minggu 1 s/d 52 Tahun 2023

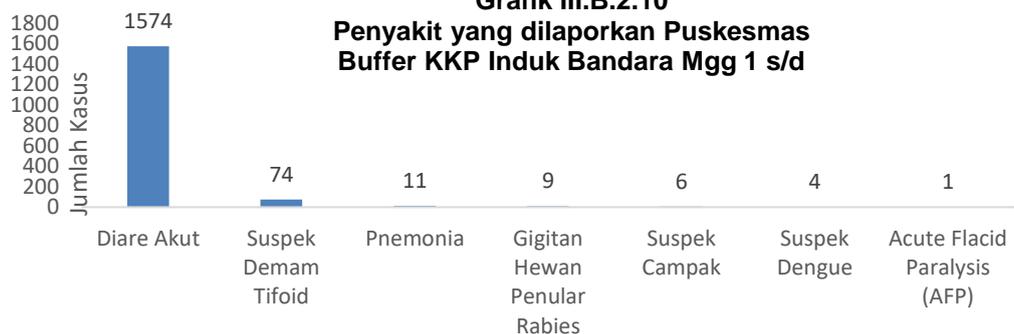


Sumber : Data SKDR Tahun 2023

Kasus penyakit di Puskesmas Caille Pos Bulukumba pada minggu 1 sampai 52 tahun 2023 adalah yang terbanyak Diare Akut sebanyak 420 kasus (92,92 %) dari total 452 kasus.. Hal ini disebabkan karena banyak di daerah pesisir yang kurang bagus sanitasinya. Adapun terkecil adalah kasus AFP sebanyak 2 kasus.

8) Rekapitulasi penyakit Puskesmas Buffer KKP Induk Bandara (Puskesmas Mandai, Sudiang dan Sudiang Raya)

Grafik III.B.2.10
Penyakit yang dilaporkan Puskesmas
Buffer KKP Induk Bandara Mgg 1 s/d



Sumber : Data SKDR 2023

Kasus penyakit di Puskesmas Buffer Pelabuhan Makassar pada minggu 1 sampai 52 tahun 2023 adalah tertinggi Diare Akut sebanyak 1.574 kasus (93,75 %) naik bila dibandingkan pada tahun 2022 dari total kasus keseluruhan sebanyak 1679 kasus. Hal ini disebabkan karena banyak di daerah pesisir kondisi sanitasi yang kurang baik. Adapun terendah adalah kasus AFP sebanyak 1 kasus..

c. Pertemuan Reviu Rencana Kontinjensi (Renkon) dan Table Top Exercise (TTX)

World Health Organization (WHO) telah mencabut status *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) untuk Covid-19 seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 secara global, termasuk di Indonesia. Presiden RI secara resmi telah mengumumkan pencabutan status pandemi COVID-19 di Indonesia melalui Keppres No. 17 Tahun 2023. Pencabutan status pandemi Covid-19 bukan berarti kewaspadaan terhadap potensi pandemi yang disebabkan oleh penyakit potensial PHEIC menurun, tetapi justru perlu terus ditingkatkan melihat beberapa penyakit yang berpotensi PHEIC saat ini sedang terjadi di beberapa negara. Potensi penyakit tersebut untuk masuk di Indonesia sangat besar karena Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara lain serta mudahnya akses melalui moda transportasi udara maupun transportasi laut.

Langkah antisipasi dalam cegah tangkal penyakit maupun semua potensi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri maka penyusunan suatu rencana kontinjensi kedaruratan di pintu masuk sangat diperlukan mengingat tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai penjaga pintu masuk dan keluar. Keterlibatan aparat yang terkait (Lintas Sektor) yang berada di pintu masuk bandara dan pelabuhan sangat diperlukan dalam pelaksanaan cegah tangkal yang tertuang dalam penyusunan rencana kontinjensi kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan dan respon terhadap KKMMMD/PHEIC di Bandara dan pelabuhan dalam rangka cegah tangkal penyebaran penyakit KLB/Wabah/KKMMMD yang masuk atau keluar melalui bandara dan pelabuhan berdasarkan dokumen rencana kontinjensi yang telah tersusun dan reviu dokumen. Kegiatan ini terdiri dari:

- 1) Penyusunan Reviu Renkon dan TTX Pelabuhan Makassar dilaksanakan di Hotel Aryaduta Makassar pada tanggal 4 – 5 September 2023.
- 2) Jumlah peserta yang hadir sebanyak 42 orang.



Gambar III.B.2.1
Penyusunan Reviu Renkon dan TTX Pelabuhan Makassar

d. Pertemuan Assessment Core Capacity dan Evaluasi Layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar memiliki wilayah kerja sebanyak 11 lokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dari semua wilayah tersebut 2 (dua) diantaranya termasuk designated point of entry dalam assessment implementasi IHR 2005 yaitu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Laut Makassar. Dalam implementasi IHR berbagai upaya peningkatan core capacity telah dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas SDM, pengadaan sarana dan prasarana, sosialisasi dan jejaring dengan lintas sektor serta melakukan self assessment. Core Capacity dilaksanakan di beberapa wilayah kerja:

1. Wilker Biringkassi

- Pertemuan Core Capacity di Wilker Biringkassi dilaksanakan pada tanggal 4-5 Desember 2023
- Jumlah peserta yang hadir sebanyak 23 orang
- Kesimpulan pertemuan masih perlu adanya koordinasi dan komunikasi antar lintas sektor terkait dalam menghadapi masalah di pintu masuk negara.

2. Wilker Awerange

- Pertemuan Core Capacity di Wilker Awerange dilaksanakan pada tanggal 26-27 Oktober 2023
- Peserta yang hadir dari LS/LP (KSOP Kelas IV Garongkong, DINKES Kab.Barru, RSUD LAPATARAI, Kab.Barru, PUSKESMAS Padongko Kab. Barru, BPTD Pelabuhan Garongkong, dan Pimpinan Perusahaan Pelayaran di Pelabuhan Garongkong
- Hasil Assessment Pelabuhan Garongkong dengan jumlah **Skor Final 71 % (Koordinasi dan Komunikasi 67 %, Kapasitas Inti Rutin 71 % dan KapasitasInti Respon PHEIC 77%)**
- Untuk Pelaksanaan Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan Di Wilker Awerange 100 % menggunakan Aplikasi SINKARKES Interkoneksi SIMPONI.

3. Wilker Malili

- Pertemuan Core Capacity di Wilker Malili dilaksanakan pada tanggal 29-31 Oktober 2023
- Peserta yang hadir pada pertemuan Assessment core capacity dan Evaluasi layanan penerbitan dokumen kesehatan sebanyak 30 orang.
- Dalam Assessment core capacity Pelabuhan Malili perlu adanya koordinasi

dan komunikasi antar lintas sektor terkait dalam menghadapi masalah di pintu masuk negara.

- Wilker Pelabuhan Malili, telah melaksanakan penerbitan dokumen kesehatan melalui aplikasi Sinkarkes (*online*) secara menyeluruh (100%). Semua Dokumen Kesehatan sudah diterbitkan secara online, kecuali Health book masih manual tetapi penerbitan sudah online

4. Wilker Mamuju

- Pertemuan Core Capacity di Wilker Belang-Belang Mamuju dilaksanakan pada tanggal 21-23 Desember 2023
- Peserta dari lintas sektor yang hadir sebanyak 13 orang yang berasal dari komunitas / Lintas sektor lingkup Pelabuhan Belang Belang seperti Agen Pelayaran, UPP Kelas II Belang Belang, TNI / POLRI, dan Lintas Sektor di Wilayah seperti Camat Kalukku, Puskesmas dan Bazarnas.
- Hasil penilaian core capacity masih rendah yakni baru mencapai 66 %.

5. Wilker Parepare

- Pertemuan Core Capacity di Wilker Parepare dilaksanakan pada tanggal 23-25 Oktober 2023
- Peserta yang hadir dari KSOP Pelabuhan Parepare, Pelindo, Dinas Kesehatan Kota Parepare, RS Kota Parepare dan lintas sektor lainnya
- Hasil **assessment core capacity** Pelabuhan Pare-Pare didapatkan nilai sebesar 87 % yang berarti Pelabuhan Parepare mempunyai kemampuan dalam menghadapi dan merespon ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kasus PHEIC.



Core Capacity Biringkassi



Core Capacity Awerange



Core Capacity Malili



Core Capacity Belang-Belang Mamuju



Core Capacity Parepare

Gambar III.B.2.2
Pertemuan Assessment Core Capacity dan Evaluasi Layanan Penerbitan Dokumen Kesehatan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar

e. Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan Kesehatan

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Makassar melakukan pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan Kesehatan yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 6-8 Desember 2023 di Swiss Bellin Hotel Makassar. Peserta pertemuan koordinasi yang hadir sebanyak 70 orang berasal dari lintas sektor lingkup Pelabuhan Makassar, lintas sektor lingkup Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Dinas Kesehatan Kab/Kota serta wilayah kerja KKP Kelas I Makassar.

Pertemuan dibuka oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar, Agus Jamaludin, SKM,M.Kes. Dalam sambutannya sesuai dengan Instruksi Presiden no. 4 tahun 2019 tentang Peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon wabah penyakit pandemi global dan kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia (NUBIKA), serta International Health Regulation (IHR) 2005 yang seluruhnya menjadi dasar yang kuat untuk penyelenggaraan kekeantinaan kesehatan baik di pintu masuk dan di wilayah”, maka perlu dilakukan upaya peningkatan pengawasan dan penguatan fungsi *detect, prevent* serta *response* terhadap penyakit maupun faktor risiko kesehatan masyarakat lainnya yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).



Gambar III.B.2.3
Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kekeantinaan Kesehatan

f. Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Mobilitas manusia di era milenial bukan hanya berdampak terhadap kecepatan penyampaian informasi ancaman kesehatan global menjadi sisi lain dunia tanpa batas yang mengantarkan penyakit-penyakit yang berisiko menyerang manusia serta ancaman bioterorisme. Secara nasional terdapat 14 designated point of entry yang telah dinilai oleh Joint external evaluation dalam assessment implementasi IHR 2005 dengan nilai 4 yang berarti pintu masuk negara tersebut mempunyai kemampuan dalam menghadapi dan merespon ancaman kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kasus PHEIC. 14 designated point of entry termasuk Bandara

Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar memiliki wilayah kerja sebanyak 14 lokasi tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Makassar sebagai designated point of entry dalam assessment implementasi IHR 2005, diharapkan semua wilker KKP Kelas I Makassar mempunyai kemampuan dalam menghadapi dan merespon ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan PHEIC salah satunya adalah Wilker Pelabuhan Parepare sebagai wujud penerapan International Health Regulation (IHR) 2005 yang mengamanatkan core capacities setiap negara dalam mencegah (prevent), mendeteksi (detect), dan merespon (respond) terhadap seluruh ancaman kedaruratan kesehatan, khususnya dalam kesiapsiagaan menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) atau Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare mengawasi tiga pangkalan pelabuhan yaitu Pangkalan Nusantara, Pangkalan Cappa Ujung dan Pangkalan Lontangnge di tambah Pelabuhan Khusus Pertamina

Fungsi Pelabuhan Nusantara adalah sebagai pelabuhan penumpang, sedangkan Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai pelabuhan barang/kontainer dan Pelabuhan Lontange sebagai pelabuhan rakyat. Pelabuhan parepare juga menjadi entry point pelabuhan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tujuan Tawau, Malaysia dan juga sebagai pelabuhan internasional.

Sebagai bentuk uji Rencana Kontinjensi yang telah dipersiapkan dan akan diimplementasikan bersama dengan seluruh LS/LP serta Stakeholder, di Pelabuhan maupun di Wilayah Kota Parepare sebagai kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi potensi bahaya yang dapat terjadi, demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya khususnya di Kota Parepare Maka di laksanakan "Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Penyakit berpotensi wabah "Influenza (A) HxNy" di Pelabuhan Parepare".

- Kegiatan dilaksanakan tanggal 14 s/d 16 Nopember 2023 di Hotel Bukit Kenari dan Pelabuhan Cappa Ujung
- Jumlah peserta yang hadir sebanyak 55 orang yang berasal dari KSOP Kelas III Parepare, Imigrasi, Pelindo, Agen Kapal, Pos AL, Polsek KPN Parepare, Bea Cukai, Dinas Sosial, Pol PP, Kominfo,RS Andi Makassar, Call Center 112, Stasiun Radio Pantai, Stasiun Karantina Pertanian, Dinas Kesehatan Kota

Parepare, Puskesmas Madising NaMario, BPBD Kota Parepare dan TKBM Pelabuhan Parepare.

- Simulasi dihadiri oleh Bapak Dirjen P2P Kementerian Kesehatan beserta rombongan dari Tim Kementerian Kesehatan serta dihadiri oleh Bapak Pejabat Walikota Parepare serta pimpinan instansi lintas sektor dan stake holder lingkup kota Parepare serta undangan dari luar wilayah kota Parepare seperti beberapa peserta KKP lain (KKP Tanjung Priuk, KKP Surabaya, KKP Palu, KKP Gorontalo, KKP Banjarmasin, KKP Probolinggo, KKP Palangkaraya, KKP Manokwari di Indonesia. Total undangan sebanyak 150 orang.



Gambar III.B.2.4
Simulasi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

g. Surveilans Migrasi Malaria

Kegiatan surveilans migrasi malaria dilaksanakan dengan metode survei menggunakan kuesioner, yaitu melakukan wawancara pada pelaku perjalanan/penumpang dan awak/ABK di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Makassar. Survei menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) dengan waktu pembacaan hasil sekitar 20 menit. Teknik penarikan sampel dilakukan secara *random sampling* pada penumpang dan awak kapal yang tiba pada hari itu dari daerah endemis malaria. Metode survei yang digunakan adalah *Mass Fever Survey*, yaitu semua penumpang yang mengalami demam (suhu $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$), ada riwayat demam ± 2 minggu terakhir dan memiliki riwayat malaria. Jika dalam survei ditemukan kasus positif RDT malaria maka dilakukan rujukan pengobatan ke fasyankes terdekat, dilakukan penyelidikan epidemiologi dan penerbitan notifikasi yang ditujukan ke wilayah tujuan maupun asal pelaku perjalanan tersebut. Pemberian notifikasi bertujuan untuk tindak lanjut pemeriksaan ulang dengan menggunakan mikroskopis sebagai goal standar pemeriksaan malaria dan penanggulangan kasus dengan pemberian terapi pengobatan (minum obat DHP dan Primaquin) berjalan dengan baik. Pelaksanaan surveilans migrasi malaria bertujuan untuk mencegah penularan malaria di pintu masuk dan wilayah (kasus impor dan *indigenous*).

Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagai *health authority* di pelabuhan dan bandara berperan aktif dalam melakukan pengawasan kasus penyebaran malaria pada pelaku perjalanan yang datang dan berangkat ke daerah endemis. Surveilans migrasi malaria dilaksanakan di Wilayah Sulawesi Selatan meliputi: Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Maccini Baji, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Garongkong, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Siwa, Pelabuhan Bira, Pelabuhan Tanjung Ringgit Palopo, Bandara Bua, Bandara Sultan Hasanuddin dan Asrama Haji Sudiang. Wilayah Sulawesi Barat meliputi : Pelabuhan Belang-belang, Pelabuhan Simboro dan Bandara Tampa Padang.

Tabel III.B.2.1.1
Distribusi Hasil Surveilans Migrasi Malaria
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Jenis Kelamin		Total Responden	Hasil RDT		Total RDT
	L	P		Positif	Negatif	
Pelabuhan Makassar	931	73	1004	0	550	550
Pelabuhan Paotere	97	19	116	0	32	32
Pelabuhan Bira	126	6	132	0	56	56
Pelabuhan Bajoe	134	13	147	0	63	63
Pelabuhan Siwa	95	35	130	0	32	32
Pelabuhan Parepare	199	24	223	0	142	142

Wilayah Kerja	Jenis Kelamin		Total Responden	Hasil RDT		Total RDT
	L	P		Positif	Negatif	
Pelabuhan Laut Palopo	35	2	37	0	4	4
Pelabuhan Biringkassi	42	1	43	0	7	7
Pelabuhan Awerange	29	22	51	0	5	5
Tampapadang	60	20	80	0	9	9
Bandara SHIAM	2	0	2	2	0	2
Asrama Haji	0	1	1	1	0	1
Jumlah	1750	217	1967	3	900	903

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.B.2.1.1 menunjukkan ada 1967 orang yang diwawancarai dan dilakukan pemeriksaan rapid tes (RDT malaria) dalam rangka surveilans migrasi malaria. Jumlah tertinggi di Pelabuhan Makassar sebanyak 1004 orang dan yang di RDT sebanyak 550. Pelaksanaan di Pelabuhan Laut Makassar dilaksanakan sebanyak 18 kali dengan pendampingan petugas dari KKP Induk. Pelabuhan Makassar merupakan Pelabuhan Internasional dan tempat singgah serta transit kapal-kapal dari wilayah timur yang masih merupakan dari daerah endemis malaria. Terdapat 3 orang kasus positif RDT malaria 1 orang pada Jamaah Haji asal Sorong yang ditemukan di Asrama Haji Sudiang saat akan berangkat ke Arab Saudi (Embarkasi). Setelah diberikan terapi pengobatan selama 2 hari maka jamaah tersebut diberangkatkan ke Arab Saudi. 2 orang yang ditemukan positif malaria di Bandara SHIAM melalui penemuan surveilans malaria secara pasif.

Tabel III.B.2.1.2
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Berdasarkan Waktu Pelaksanaan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

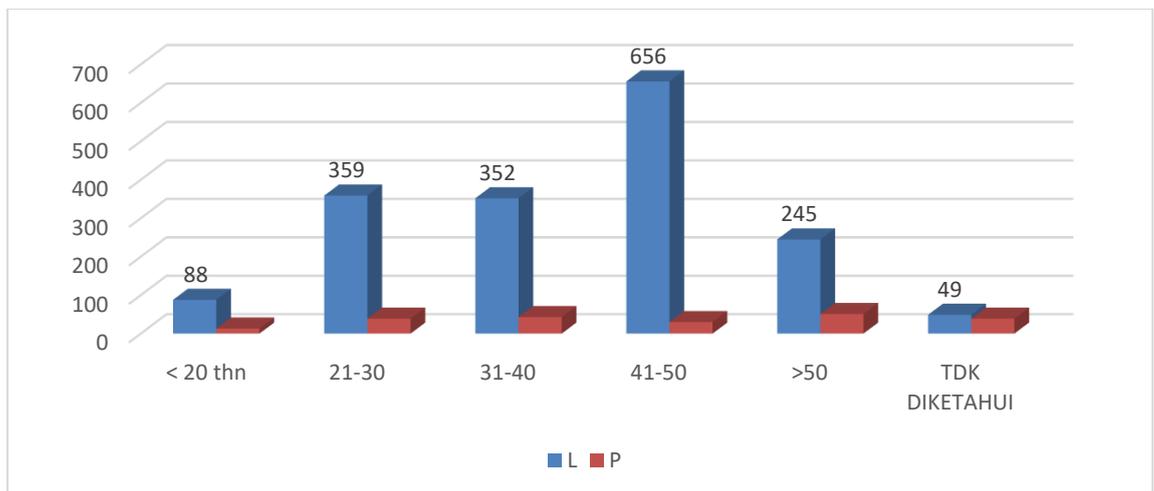
Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Jumlah Responden	Hasil RDT		Ket
		Positif	Negatif	
Januari	0	0	0	
Pebruari	164	0	104	
Maret	1	1	0	Penumpang Domestik
April	0	0	0	
Mei	0	0	0	
Juni	0	0	0	
Juli (Emb/Deb Haji)	0	0	0	
Agustus (Emb/Deb Haji)	140	2	54	Penumpang Domestik dan Jamaah Haji
September	574	0	378	
Oktober	174	0	21	
Nopember	285	0	209	

Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Jumlah Responden	Hasil RDT		Ket
		Positif	Negatif	
Desember	629	0	134	
Total	1967	3	900	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.B.2.1.2 menunjukkan pelaksanaan surveilans migrasi paling tinggi dilaksanakan pada Desember 2023 sebanyak 629 orang, Surveilans migrasi malaria terbanyak dilakukan pada periode Desember karena merupakan masa liburan natal dan tahun baru anak sekolah dimana banyak yang bepergian pada akhir tahun.

Grafik III.B.2.11
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Kelompok Umur
di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.11 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei dan diperiksa menggunakan RDT malaria di Wilayah Kerja Pelabuhan KKP Kelas I Makassar terbanyak pada kelompok umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 656 orang (33,40%), hal ini disebabkan karena kebanyakan pelaku perjalanan dan awak kapal yang tiba adalah kelompok usia dewasa yang sering bepergian. Sedangkan paling sedikit pada kelompok umur tidak diketahui yaitu sebanyak 49 orang (2,49%), hal ini disebabkan karena ada pelaku perjalanan saat dilakukan survei terburu-buru sehingga tidak tercatat umurnya dan ada beberapa pelaku perjalanan yang lupa tanggal kelahirannya.

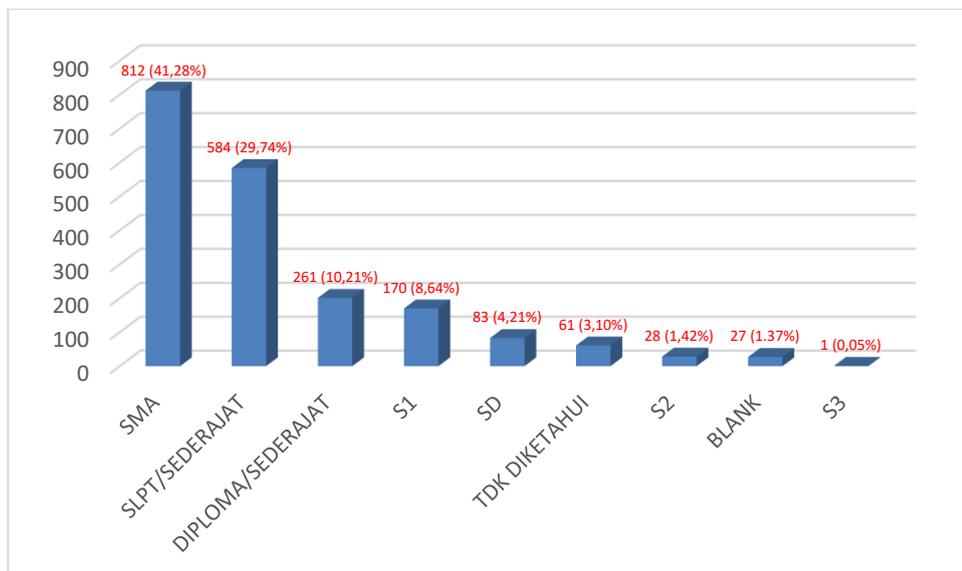
Grafik III.B.2.12
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Jenis Kelamin
di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.12 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal yang dilakukan survei dan pemeriksaan RDT malaria terbanyak dari kelompok laki-laki yaitu sebanyak 1750 orang (88,96%). sedangkan kelompok perempuan sebanyak 217 orang (11,03%). Hal ini disebabkan karena kebanyakan laki-laki yang sering keluar rumah untuk mencari nafkah sebagai kepala keluarga.

Grafik III.B.2.13
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Wilayah
Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

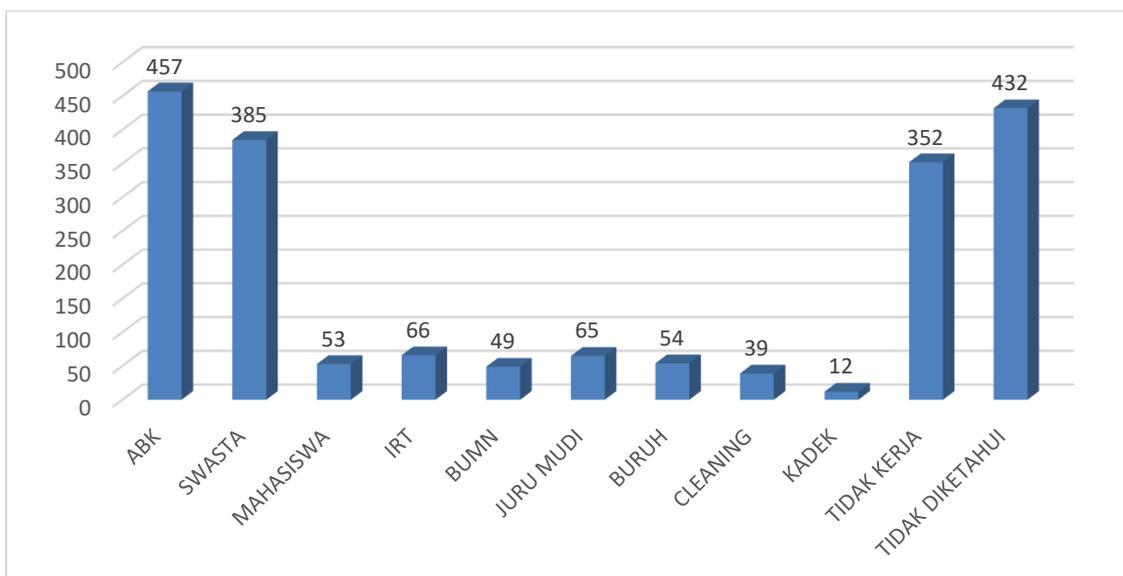


Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.13 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei dan diperiksa menggunakan RDT malaria di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terbanyak pada tingkatan pendidikan SLTA/SMK/ sederajat yaitu sebanyak 812 orang (41,28 %) dan paling sedikit pada tingkat pendidikan S3 yaitu sebanyak 1 orang (0,05%).

Grafik III.B.2.13 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei dan diperiksa menggunakan RDT malaria di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terbanyak pada tingkatan pendidikan SLTA/SMK/ sederajat yaitu sebanyak 201 orang (10,55%) dan paling sedikit pada tingkat pendidikan S2 yaitu sebanyak 1 orang (0,05%).

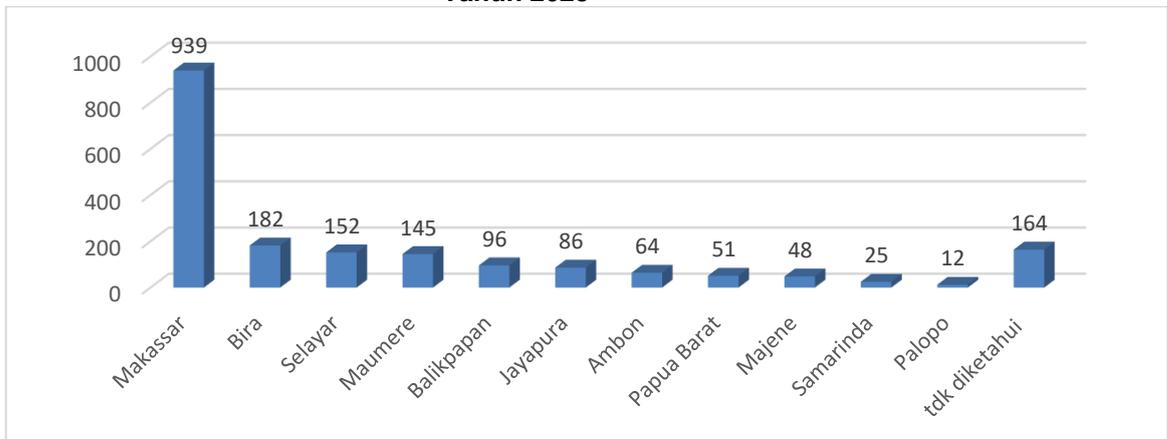
Grafik III.B.2.14
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.14 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terbanyak pada kategori pekerjaan adalah ABK 457 (23,26%) yang tidak bekerja/tidak diketahui yaitu sebanyak 432 (21,99%), hal ini disebabkan karena pada umumnya pelaku perjalanan saat dilakukan survei tidak mengisi apa pekerjaannya. Sedangkan yang paling sedikit pada jenis pekerjaan Kadek yaitu sebanyak 12 orang (0,61%).

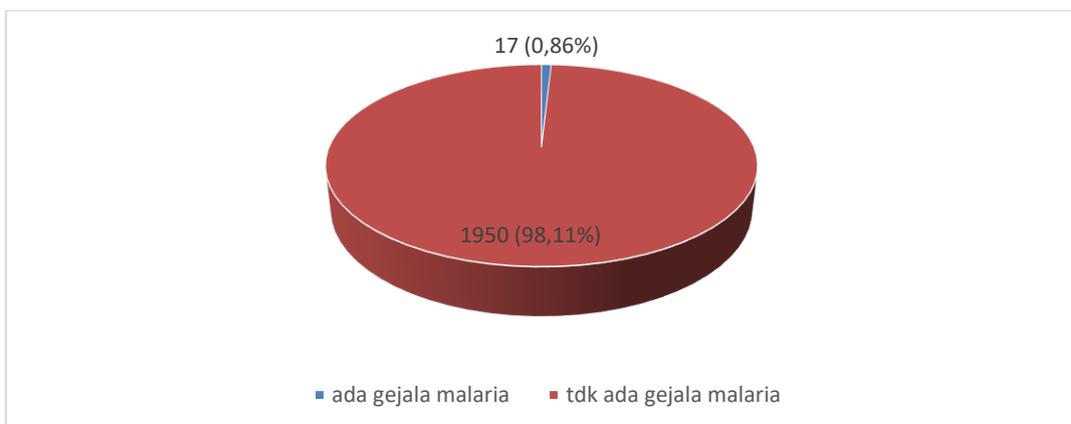
Grafik III.B.2.15
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Berdasarkan Tujuan Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal
di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.15 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar terbanyak dengan tujuan Makassar dan terendah adalah Palopo 12 (0,61%). Terbanyak tujuan Makassar karena pada umumnya kapal yang diperiksa sandar dan bongkar muat di Pelabuhan Makassar dan juga merupakan daerah tujuan pelaku perjalanan. Yang tidak diketahui tujuannya juga terbanyak karena ada beberapa pelaku perjalanan tidak mengisi daerah tujuannya saat dilakukan survei.

Grafik III.B.2.16
Distribusi Surveilans Migrasi Malaria
Pada Pelaku Perjalanan dan Awak Kapal
Berdasarkan Riwayat Menderita Malaria
di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber: Data Primer

Grafik III.B.2.16 menunjukkan bahwa dari 1967 orang pelaku perjalanan dan awak kapal pada kegiatan surveilans migrasi malaria yang disurvei di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang tidak memiliki riwayat penyakit malaria sebanyak 1950 orang (99,13%). Sedangkan yang memiliki riwayat penyakit malaria sebanyak 17 orang (0,86%). Ditemukan 2 kasus positif malaria di Bandara SHIAM (Penemuan secara pasif), 1 kasus positif malaria yang ditemukan di Asrama Haji berasal dari Sorong memiliki riwayat penyakit malaria. Hal ini berarti besar kemungkinan yang pernah menderita malaria kemungkinan besar bisa menderita ulang (kambuh). Jadi penemuan kasus positif selama tahun 2023 sebanyak 3 orang jika dibandingkan tahun 2022 lebih banyak ditemukan positif karena pada tahun 2022 ada even PON. Namun karena pemeriksaan RDT tidak dilakukan sehari-hari/rutin hanya dilakukan secara berkala menggunakan metode *random sampling* (acak sederhana). Harapan ke depan kegiatan surveilans migrasi malaria dilakukan secara intens dan rutin di semua wilayah kerja KKP Kelas Makassar mengingat banyak kapal yang tiba dan sandar berasal dari wilayah timur Indonesia dengan endemisitas tinggi.



Gambar III.B.2.5
Kegiatan Surveilans Migrasi Malaria

h. Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi (PE)

Pelaksanaan verifikasi rumor / PE bertujuan untuk memperoleh gambaran epidemiologi suatu kasus dan penanggulangannya. Verifikasi rumor/PE dilaksanakan

sebanyak 13 kali. Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid -19, kasus Mers-Cov dan kasus DBD dilakukan pada :

Tabel III.B.2.1.1
Distribusi Penyelidikan Epidemiologi Berdasarkan Waktu Pelaksanaan
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Waktu Pelaksanaan (Bulan)	Jumlah	Ket
Januari	0	
Pebruari	0	
Maret	2	
April	1	
Mei	0	
Juni	0	
Juli	0	
Agustus	0	
September	3	
Oktober	1	
Nopember	5	
Desember	1	
Total	13	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.B.2.1.1 menunjukkan pelaksanaan Penyelidikan Epidemiologi (PE) dilakukan sebanyak 13 kali selama satu tahun. Tertinggi pelaksanaan PE pada Bulan Nopember yaitu sebanyak 5 kali (38,46%), hal ini disebabkan terjadinya peningkatan kasus Covid-19 pada bulan tersebut. Kasus yang di lakukan verifikasi/penyelidikan epidemiologi adalah kasus covid-19 sebanyak 10 kali, kasus DBD sebanyak 1 kali dan Mers-Cov sebanyak 2 kali.

Tabel III.B.2.1.3
Distribusi Penyelidikan Epidemiologi Berdasarkan Tempat
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Tempat Pelaksanaan PE	Jumlah	Ket
Kota Makassar	6	
Kabupaten Pinrang	1	
Kabupaten Lutim	1	
Kabupaten Sidrap	1	
Kabupaten Maros	3	
Kabupaten Sinjai	1	
Total	13	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.B.2.1.2 menunjukkan Penyelidikan Epidemiologi (PE) paling banyak dilakukan di Kota Makassar yaitu 6 kali (46.15%). Tertinggi pelaksanaan PE di Kota Makassar karena sebagian besar pelaku perjalanan dirujuk ke Rumah Sakit yang ada di Kota Makassar.



Gambar III.B.2.6 PE Kabupaten Sidrap



Gambar III.B.2.7 PE RS Pertamina



Gambar III.B.2.8 PE RS Wahidin

1. Sub Substansi Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

a) Pengamatan Tikus dan Pinjal

Tikus merupakan satwa liar yang seringkali berhubungan dengan kehidupan manusia. Tingginya populasi tikus akan berdampak pada kerugian di berbagai bidang kehidupan manusia. Tikus juga memberikan dampak yang besar di bidang kesehatan yaitu tikus dapat menjadi reservoir untuk beberapa patogen penyebab penyakit. Maka dari itu wilayah pelabuhan/bandara harus bebas dari vektor tikus, dimana tikus dapat menyebabkan penyakit pes yang merupakan salah satu penyakit karantina. Di beberapa negara penyakit ini masih menjadi masalah dan perlu diwaspadai penularannya sehingga masih dikategorikan sebagai penyakit karantina.

Keberadaan tikus dan ektoparasitnya di wilayah pelabuhan merupakan faktor risiko terjadinya penularan penyakit terutama yang bersumber dari binatang pembawa penyakit sehingga diperlukan upaya pengendalian tikus yang efektif. Pengamatan tikus dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian dalam rangka kewaspadaan dini terhadap penyakit menular terutama penyakit yang ditularkan oleh tikus sebagai reservoir di pelabuhan dan bandara.

Kegiatan pengamatan berupa pemasangan perangkap tikus (*life trap*) serta identifikasi ektoparasit pada tikus tersebut untuk mengetahui tingkat kepadatan tikus dan *sukses trap*. Kegiatan pengamatan dan pemberantasan harus dilaksanakan untuk membebaskan pelabuhan dan bandara dari kehidupan tikus penular penyakit, guna mencegah keluar masuknya penyakit yang ditularkan oleh tikus. Hasil pengamatan tikus dan pinjal berdasarkan wilayah kerja dapat dilihat pada Tabel III.C.1.1 berikut ini :

Tabel III.C.1.1
Hasil Pengamatan Tikus dan Pinjal Berdasarkan Wilayah Kerja
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Kegiatan	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Makassar	Perangkap Terpasang	400	400	400	0	400	400	400	0	400	400	0	400	3600
	Tikus Tertangkap (Ekor)	4	9	3	0	3	6	5	0	2	1	0	3	36

Bandara Sultan Hasanuddin	Succes Trap (Ratio)	1	2,25	0,75	0	0,75	1,5	1,25	0	0,5	0,25	0	0,75	
	Indeks Pinjal (Ratio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perangkap Terpasang	0	400	400	0	400	400	404	400	400	0	400	400	3604
	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	2	4	0	0	1	0	0	1	0	2	2	12
Biringkassi	Succes Trap (Ratio)	0	0,5	1	0	0	0,25	0	0	0,25	0	0,5	0,5	
	Indeks Pinjal (Ratio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800
	Tikus Tertangkap (Ekor)	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4
Awerange	Succes Trap (Ratio)	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	400	400	400	0	400	400	0	400	0	400	0	0	2800
	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3
Parepare	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	0	0	0,25	0	0,5	0	0	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perangkap Terpasang	0	0	0	400	400	0	400	0	400	400	0	0	2400
	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	5	7	0	7	0	6	0	0	0	30
Bajoe	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	1,25	1,75	0	1,75	0	1,5	0	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perangkap Terpasang	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400	400	400	4000
	Tikus Tertangkap (Ekor)	11	8	0	3	9	0	7	3	1	3	2	2	49
Palopo	Succes Trap (Ratio)	2,8	2	0	0,75	2,25	0	1,75	0,75	0,25	0,75	0,5	0,5	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perangkap Terpasang	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	400	400	3600

Malili	Tikus Tertangkap (Ekor)	1	0	3	2	0	3	2	0	1	2	1	2	17
	Succes Trap (Ratio)	0,25	0	0,75	0,5	0	0,75	0,5	0	0,25	0,5	0,25	0,5	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	100	100	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	1500
Belang-belang	Tikus Tertangkap (Ekor)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Succes Trap (Ratio)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	600
Bira	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
	Succes Trap (Ratio)	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	160	0	0	160	0	0	400	0	400	0	400	400	1920
Paotere	Tikus Tertangkap (Ekor)	3	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	5	12
	Succes Trap (Ratio)	1,9	0	0	1	0	0	0,5	0	0,25	0	0	1,25	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	0	400	400	0	400	400	400	0	400	400	400	400	3600
Tampa Padang	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	5	6	0	3	2	5	0	4	2	3	2	32
	Succes Trap (Ratio)	0	1,25	1,5	0	0,75	0,5	1,25	0	1	0,5	0,75	0,5	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	400	0	1200
Majene	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	5
	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0,5	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	80	80	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4160

Siwa	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	800
Pasangkayu	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,25	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Perangkap Terpasang	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	3200
	Tikus Tertangkap (Ekor)	0	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0	0	5
	Succes Trap (Ratio)	0	0	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0	0,5	0	0	
	Indeks Pinjal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 pemasangan perangkap terbanyak di Wilayah Kerja Pelabuhan Biringkassi yaitu 4.800 perangkap dengan jumlah tikus tertangkap sebanyak 4 ekor dengan rata-rata *success trap* 0,08 % dan yang terendah di Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-Belang sebanyak 600 perangkap dengan jumlah tikus tertangkap sebanyak 3 ekor dengan rata-rata *success trap* 0,5 %. Dari seluruh wilayah kerja diperoleh Indeks Pinjal 0 % sudah memenuhi syarat sesuai dengan standar baku mutu yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yaitu < 2.

Faktor yang menentukan pergerakan dan perkembangan tikus yaitu sumber makanan, air, dan tempat bersembunyi bagi tikus itu sendiri. Tingkat keberhasilan penangkapan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kualitas perangkap yang baik dan umpan yang tepat. Sanitasi lingkungan yang kurang baik sangat berperan terhadap indeks pinjal dan kepadatan tikus di suatu wilayah. Bertambahnya populasi penduduk meningkatkan volume sampah yang dihasilkan apabila tidak diikuti pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan yang baik dapat dijadikan sarang oleh tikus. Dengan banyaknya sarang tikus maka semakin banyak pula tempat bagi pinjal untuk melangsungkan kehidupannya.



Gambar III.C.1.1 Pemasangan Perangkat Tikus

b) Pengamatan dan Pengendalian Vektor Diare

Kegiatan pengamatan vektor diare yang dilakukan dengan pengukuran tingkat kepadatan lalat pada tempat yang berpotensi menjadi perindukan lalat menggunakan alat *flygrill* dan survey kehidupan kecoak pada bangunan/gedung menggunakan *sticky trap* yang berada di wilayah pelabuhan/bandara.

Metode pengendalian lalat dan kecoak untuk mencegah perindukannya yang dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan manusia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepadatan lalat dan kecoak serta tempat berkembangbiaknya. Untuk mewujudkan pelabuhan/bandara yang bebas vektor khususnya lalat dan kecoa maka perlu dilakukan pengamatan sebagai data awal untuk tindakan pengendalian untuk menurunkan indeks kepadatan lalat dan kecoa. Pengendalian lalat dan pengendalian kecoak yang dilaksanakan setiap bulan. Tindakan pengendalian lalat dengan melakukan *spraying* dan pengendalian kecoak dengan menggunakan *sticky trap*.

Tabel III.C.1.2
Distribusi Hasil Survei Kepadatan Lalat Berdasarkan Wilayah Kerja
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Hasil Pengukuran	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Makassar	Tingkat kepadatan (ekor)	1	1,3	0,48	1	1	8	25,16	9,16	5,48	3,3	23,48	25,3
Bandara Sultan Hasanuddin	Tingkat kepadatan (ekor)	3	10	12	4	3	6	8	10	7	12	15	19
Biringkassi	Tingkat kepadatan (ekor)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Awerange	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parepare	Tingkat kepadatan (ekor)	2,4	3,2	1,3	1,6	0	0	0	0	0	0	0	2,4
Bajoe	Tingkat kepadatan (ekor)	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1,05	1,6
Palopo	Tingkat kepadatan (ekor)	0	9,4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Belang-belang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tampa Padang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,9	0,6	0
Malili	Tingkat kepadatan (ekor)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Bira	Tingkat kepadatan (ekor)	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1
Paotere	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Majene	Tingkat kepadatan (ekor)	0,6	0,8	1,2	1,4	0,8	1,2	0,8	0,8	1,8	1,6	1,2	1
Siwa	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	Tingkat kepadatan (ekor)	3	1	1	2	2	1	2	1	1	1	1	2

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.2 menunjukkan tingkat kepadatan lalat di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 yang melebihi standar baku mutu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan rata-rata populasi lalat nilai baku mutu <2 yaitu di Wilayah Pelabuhan Makassar (Bulan Juni sampai dengan Desember), Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (Bulan Januari sampai dengan Desember), Pelabuhan Parepare (Bulan Januari, Februari dan Desember), Pelabuhan Bajoe (Bulan Februari dan Mei), Pelabuhan Palopo (Bulan Februari dan April), Pos Pelabuhan Bira (Bulan Januari sampai dengan Juli), Pos Pelabuhan Pasangkayu (Bulan Januari, April, Mei, Juli dan Desember) Sedangkan pada Wilayah kerja lainnya tingkat kepadatan lalatnya masih pada kategori rendah.

Kehidupan lalat sangat tergantung pada kondisi lingkungan sekitar seperti pada tempat perkembangbiakan (tempat perindukan) lalat. Tingginya populasi kepadatan lalat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang kurang baik dan penyediaan sarana tempat sampah serta sanitasi lingkungan yang kurang baik Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya tempat sampah yang terpisah antara sampah organik dan anorganik. Konstruksi tempat sampah harus memenuhi syarat yaitu kedap air, mudah dibersihkan, memiliki pegangan dan memiliki penutup. Wilayah Kerja yang menunjukkan hasil pengamatan yang melebihi baku mutu yang disyaratkan, maka perlu dilakukan pengendalian lalat secara kimiawi dengan penyemprotan lalat atau *spraying*.

Tabel III.C.1.3
Distribusi Hasil Survei Kepadatan Lalat setelah Pengendalian
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Fe/b	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Makassar	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	Insektisida (ltr)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Bandara Sultan Hasanuddin	Tingkat kepadatan (ekor)	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	1200	1500	1400	1200	1200	1600	1500	1200	1200	1200	1300	1600
	Insektisida (ltr)	0,3	0,4	0,375	0,25	0,25	0,35	0,3	0,25	0,25	0,25	0,3	0,4

Biringkassi	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Awerange	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parepare	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajoe	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palopo	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belang-belang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tampa Padang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Malili	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bira	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025
Paotere	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	600	600	600	400	400	400	600	600	600	600	600	0
	Insektisida (ltr)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Majene	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siwa	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	Insektisida (ltr)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.3 menunjukkan wilayah kerja yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diantaranya di Wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Pelabuhan Makassar, Pos Pelabuhan Paotere, Pos Pelabuhan Bira dan Pos Pelabuhan Pasangkayu, setelah dilakukan pengendalian indeks kepadatan lalat menjadi < 2 .

Tindakan pengendalian lalat dilakukan dengan menyemprotkan insektisida dengan bahan aktif *lambda cyhalothrin 25g/l* pada tempat-tempat yang diduga

menjadi tempat perkembangbiakan lalat untuk mencegah perindukan lalat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Pemakaian insektisida pada tahun 2023 yaitu sebanyak 43 liter dengan luas 22.880 m².



Gambar III.C.1.2 Survei Kepadatan Lalat

Tabel III.C.1.4
Distribusi Hasil Survei Kepadatan Kecoak Berdasarkan Wilayah Kerja
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Makassar	Tingkat kepadatan (ekor)	2	2	0	4	0	0	0	0	0	3	1	0
Bandara Sultan Hasanuddin	Tingkat kepadatan (ekor)	17,3	81,4	12,5	52,5	10,6	33,6	7,8	26	6,7	49	1,52	30,8
Biringkassi	Tingkat kepadatan (ekor)	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
Awerange	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parepare	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	1,3	0	0	0	1	1	1	1
Bajoe	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Palopo	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Belang-belang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tampa Padang	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malili	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bira	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	3	6	2	2	0	2	2	2	2
Paotere	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Majene	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siwa	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasang Kayu	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.4 menunjukkan hasil pengamatan Kecoak di Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar pada Tahun 2023. Hasil pengamatan kepadatan kecoak yang melebihi standar baku mutu Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan yang disyaratkan < 2 yaitu Wilayah Pelabuhan Makassar Bulan Januari, Februari, April dan Oktober, Wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan Desember). Wilayah Pos Pelabuhan Bira (Bulan April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, November dan Desember). Sedangkan pada Wilayah kerja lainnya tingkat kepadatan kecoak masih pada kategori rendah. Lokasi pengamatan dilakukan di TPM (Tempat Pengolahan Makanan) pada Wilayah kerja tersebut.

Salah satu faktor penyebab tingginya kepadatan kecoak yaitu kondisi sanitasi TPM yang kurang baik. Sehingga diberikan penyuluhan kepada pemilik dan staf TPM tentang pencegahan dan pengendalian kecoa di TPM sehingga terwujud kondisi sanitasi TPM yang baik.

Berikut hasil pengamatan setelah dilakukan tindakan pengendalian pada Wilayah Kerja dengan kepadatan < 2.

Tabel III.C.1.5
Distribusi Hasil Survei Kepadatan Kecoa Setelah Tindakan Pengendalian
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Pelabuhan Makassar	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bandara Sultan Hasanuddin	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biringkassi	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Awerange	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parepare	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajoe	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palopo	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Belang-belang	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tampa Padang	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Malili	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bira	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paotere	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Majene	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siwa	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pasangkayu	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tingkat kepadatan (ekor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Luas yang disemprot (M2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Insektisida (ltr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.5 menunjukkan wilayah kerja yang sebelumnya tidak memenuhi syarat diantaranya di Wilayah Pelabuhan Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin Makassa dan Pos Pelabuhan Bira setelah dilakukan pengendalian indeks kepadatan kecoak menjadi < 2 sudah sesuai standar baku mutu yang disyaratkan Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan.

Tujuan pengendalian dapat mencegah perindukan lalat yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia. Pengendalian dilakukan dengan cara pemasangan perangkap lem (*sticky trap*) selain pengendalian secara fisik dilakukan juga pengendalian secara sanitasi serta dilakukan pengendalian dengan cara *spraying* yang dilaksanakan oleh *pest control*.



Gambar III.C.1.3 Survei Kepadatan Kecoak

c) Pengamatan dan Pengendalian Nyamuk *Aedes aegypti*

1) Survei Jentik *Aedes aegypti*

Nyamuk merupakan salah satu vektor penular penyakit, baik yang terbawa oleh alat angkut maupun yang sudah ada di pelabuhan/ bandara yang kemungkinan membawa bibit penyakit oleh penderita yang datang dari luar. Kegiatan pengendalian vector merupakan salah satu bentuk upaya kewaspadaan dini terhadap factor risiko timbulnya wabah penyakit yang diakibatkan oleh vektor. Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus Dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes aegypti*.

Aedes aegypti adalah vektor penyakit Demam berdarah dengue. Nyamuk ini mempunyai empat setadium dalam siklus hidupnya yaitu: telur, larva, pupa, dan dewasa. Populasi nyamuk ini akan meningkat pada waktu musim hujan, dimana terdapat genangan air bersih yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk *aedes aegypti*.

Salah satu usaha pencegahan penularan penyakit demam kuning, demam berdarah dengue dan penyakit tular vektor lainnya adalah dengan membebaskan daerah pelabuhan/ bandara dari kehidupan nyamuk *Aedes aegypti*. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian vektor DBD, dilaksanakan pengendalian kepadatan nyamuk *Aedes aegypti* tiap bulan meliputi survei jentik dan larvasidasi di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar. Adapun hasil survei jentik *Aedes aegypti* di perimeter dan *buffer area* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.C.1.6
Distribusi Hasil Survei *Aedes aegypti* (Perimeter Area) Perwilker
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Makassar	Bangunan	21	22	13	26	28	11	15	14	11	16	11	12	200
	Hi (%)	14,2	31,8	0,23	13	7,1	0,22	0,27	28,57	0	37	0	0	
Bandara Sultan Hasanuddin	Bangunan	55	55	55	55	55	54	55	55	55	55	51	51	651
	Hi (%)	3,6	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biringkassi	Bangunan	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Awerange	Bangunan	18	15	16	15	17	18	15	16	17	19	14	15	195
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parepare	Bangunan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bajoe	Bangunan	24	24	24	28	28	26	27	23	23	23	23	23	296
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palopo	Bangunan	12	13	13	15	14	13	15	14	15	15	15	15	169
	Hi (%)	0,16	0,15	0,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belang-belang	Bangunan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tampa Padang	Bangunan	4	2	2	7	7	0	7	8	23	13	22	22	117
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malili	Bangunan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bira	Bangunan	42	39	40	36	34	31	30	39	35	30	37	33	426
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paotere	Bangunan	76	76	76	50	60	76	76	76	76	76	76	76	870
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Majene	Bangunan	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	27
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
Siwa	Bangunan	21	23	22	22	22	21	23	23	23	23	23	23	269
	Hi (%)	28	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasangkayu	Bangunan	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	162
	Hi (%)	20	13,3	0	7,69	0	0	0	7,69	0	0	0	0	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.6 menunjukkan jumlah pemeriksaan jentik pada bangunan/ rumah pada *Perimeter Area* yang tertinggi di Wilayah Pos Pelabuhan Paotere sebanyak 870 bangunan. Sedangkan pemeriksaan jentik pada bangunan/rumah yang terendah yaitu di Wilayah Kerja Pos Pelabuhan Majene yaitu 27 bangunan. *House Indeks (Hi)* = 0 ditemukan di beberapa wilayah kerja yaitu wilayah kerja Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Biringkassi, Pelabuhan Belang-Belang, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe, Bandara Tampa Padang, Pelabuhan Malili dan Pos Pelabuhan Paotere. Sedangkan wilayah kerja lainnya menunjukkan hasil fluktuatif setiap bulannya yang melebihi baku mutu yang disyaratkan. Berdasarkan Kepmenkes nomor 431 tahun 2007 menyatakan bahwa untuk menciptakan pelabuhan yang sehat, ditetapkan bahwa *House index (HI)* sama dengan 0% pada daerah *Perimeter* dan *House index (HI)* pada daerah *Buffer* <1 %. Tingginya *House indeks* dipengaruhi oleh banyaknya kontainer yang menjadi tempat *breeding site*/tempat perkembangbiakan nyamuk. Berikut hasil pengamatan setelah dilakukan tindakan pengendalian pada Wilayah Kerja :

Tabel III.C.1.7
Distribusi Hasil Survei *Aedes aegypti* (Perimeter Area) setelah Pengendalian Perwilker
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Makassar	Bangunan	21	22	13	26	28	11	15	14	11	16	11	12	200
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bandara Sultan Hasanuddin	Bangunan	55	55	55	55	55	54	55	55	55	55	51	51	651
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biringkassi	Bangunan	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Awerange	Bangunan	18	15	16	15	17	18	15	16	17	19	14	15	195
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parepare	Bangunan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bajoe	Bangunan	24	24	24	28	28	26	27	23	23	23	23	23	296
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palopo	Bangunan	12	13	13	15	14	13	15	14	15	15	15	15	169
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belang-belang	Bangunan	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tampa Padang	Bangunan	4	2	2	7	7	0	7	8	23	13	22	22	117
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malili	Bangunan	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	228
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bira	Bangunan	42	39	40	36	34	31	30	39	35	30	37	33	426
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paotere	Bangunan	76	76	76	50	60	76	76	76	76	76	76	76	870
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Majene	Bangunan	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	3	2	27
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siwa	Bangunan	21	23	22	22	22	21	23	23	23	23	23	23	269
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasangkayu	Bangunan	15	15	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	162
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.7 menunjukkan hasil survei setelah dilakukan pengendalian di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023. Hasil *House Indeks* (Hi) = 0 di semua wilayah kerja setelah dilakukan tindakan pengendalian dengan larvasidasi pada kontainer yang ditemukan genangan air, melakukan kegiatan

pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan penyemprotan (*fogging*) untuk pengendalian nyamuk dewasa.

Tabel III.C.1.8
Distribusi Hasil Survei *Aedes aegypti* (Buffer Area) Perwilker
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Makassar	Bangunan	15	12	10	5	5	10	35	12	22	12	9	9	156
	Hi (%)	0	0,08	0	0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	
Bandara Sultan Hasanuddin	Bangunan	40	40	50	67	50	45	50	50	50	40	40	40	562
	Hi (%)	20	20	16	0	0	4,4	0	0	0	0	0	0	
Biringkassi	Bangunan	25	27	30	35	40	41	43	45	47	48	49	50	480
	Hi (%)	0,04	0,04	0,03	0,028	0,025	0,024	0,023	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	
Awerange	Bangunan	22	20	23	21	22	23	20	21	22	25	20	22	261
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parepare	Bangunan	38	37	37	37	50	41	41	40	40	40	41	41	483
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bajoe	Bangunan	112	112	111	110	110	109	110	100	100	100	100	100	1274
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palopo	Bangunan	27	25	26	36	34	35	29	30	32	34	25	32	365
	Hi (%)	0,05	0,04	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belang-belang	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tampapadang	Bangunan	0	0	0	12	12	0	12	9	18	16	48	42	169
	Hi (%)	0	0	0	8,33	0	0	0	0	0	6,25	0	0	
Malili	Bangunan	51	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	216
	Hi (%)	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	
Bira	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Paotere	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	500
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Majene	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siwa	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasangkayu	Bangunan	10	8	8	8	10	10	9	11	14	12	12	12	124
	Hi (%)	10	0	12,5	0	0	1,25	0	0	0	8,3	0	0	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.8 menunjukkan jumlah pemeriksaan jentik pada bangunan/ rumah pada *Buffer Area* yang tertinggi di Wilayah Pelabuhan Bajoe pada sebanyak 1.274 bangunan. Sedangkan pemeriksaan jentik pada bangunan/rumah yang terendah yaitu di Wilayah Pos Pelabuhan Pasangkayu yaitu 124 bangunan. *House Indeks (Hi)* pada *Buffer Area* umumnya tinggi setiap bulan. Berdasarkan Kepmenkes nomor 431 tahun 2007 menyatakan bahwa untuk menciptakan pelabuhan yang sehat, ditetapkan bahwa *House index (HI)* pada daerah *Buffer* <1 %. Faktor risiko tingginya *House indeks* karena kurangnya perhatian dari masyarakat terhadap kebersihan tempat penampungan air dan kebersihan lingkungan sekitar. yang dapat menjadi tempat breeding site/tempat perkembangbiakan nyamuk *aedes sp.*

Tabel III.C.1.9
Distribusi Hasil Survei *Aedes aegypti* (*Buffer Area*) setelah Pengendalian Perwilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

Wilayah Kerja	Indikator	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Makassar	Bangunan	15	12	10	5	5	10	35	12	22	12	9	9	156
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bandara Sultan Hasanuddin	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biringkassi	Bangunan	27	30	35	40	41	43	45	47	48	49	50	27	480
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Awerange	Bangunan	22	20	23	21	22	23	20	21	22	25	20	22	261
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Parepare	Bangunan	38	37	37	37	50	41	41	40	40	40	41	41	483
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bajoe	Bangunan	112	112	111	110	110	109	110	100	100	100	100	100	1274
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Palopo	Bangunan	27	25	26	36	34	35	29	30	32	34	25	32	365
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belang-belang	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tampapadang	Bangunan	0	0	0	12	12	0	12	9	18	16	48	42	169
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Malili	Bangunan	51	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	216
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bira	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Paotere	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	125	125	125	125	500
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Majene	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Siwa	Bangunan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pasangkayu	Bangunan	10	8	8	8	10	10	9	11	14	12	12	12	124
	Hi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.9 merupakan hasil survey setelah dilakukan pengendalian di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar Tahun 2023. Hasil *House Indeks* (Hi) = 0 di semua wilayah kerja setelah dilakukan tindakan pengendalian memenuhi syarat berdasarkan Kepmenkes nomor 431 tahun 2007, ditetapkan bahwa *House indeks* (HI) pada daerah *Buffer* <1 %. Kegiatan yang dilakukan dengan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serta tindakan pengendalian yang dilakukan yaitu larvasidasi pada kontainer yang ditemukan genangan air ataupun wadah penampungan air dan penyemprotan (*fogging*) untuk pengendalian nyamuk dewasa.

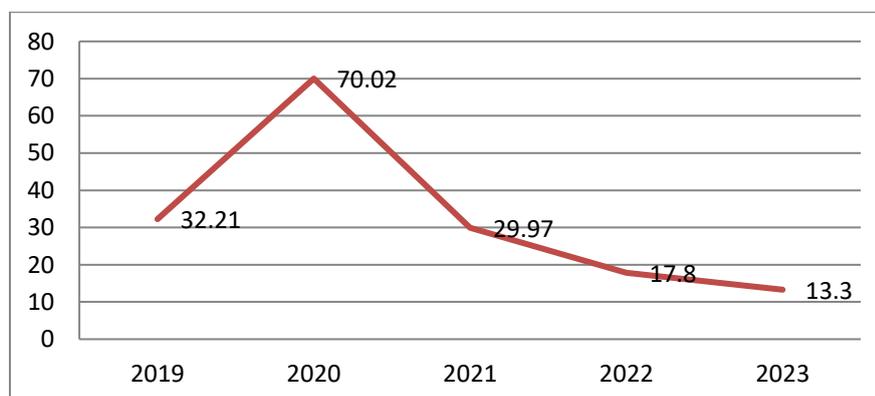


Gambar III.C.1.4 Survey Jentik *Aedes aegypti*

2) Pemakaian Larvasida

Kegiatan dalam pengendalian vektor DBD meliputi pengendalian larva dan pengendalian nyamuk. Kegiatan pengendalian larva dengan insektisida disebut sebagai larvasidasi yang bertujuan untuk membunuh stadium larva sehingga dapat menekan kepadatan populasi vektor untuk jangka waktu yang relatif lama, sehingga transmisi virus dengan selama waktu yang relatif lama, sehingga transmisi virus dengue selama waktu itu dapat diturunkan atau di cegah. Sehingga faktor risiko dapat dicegah dan masyarakat pengguna di area pelabuhan/bandara terhindar dari risiko penularan penyakit DBD. Kegiatan Larvasidasi pada Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik III.40 berikut ini :

Grafik III.C.1.1
Trend Pemakaian Larvasida KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019 –2023



Sumber : Data Primer, 2023

Grafik III.C.1.1 menunjukkan hasil kegiatan larvasidasi di *perimeter area* dan *buffer area* Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar. Pada Tahun 2023 pemakaian bubuk larvasida dengan jumlah yang digunakan sebanyak 13,3 kg. Angka ini menunjukkan adanya penurunan pemakaian larvasida dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan penggunaan larvasida (temephos) dengan dosis yang digunakan tidak sesuai dengan volume air yang ditaburkan di setiap container sehingga penggunaan larvasida berkurang serta pengendalian juga dilakukan dengan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk). Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan larvasida karena beranggapan tidak aman karena menggunakan bahan kimia yang dapat membawa dampak buruk bagi kesehatan.



Gambar III.C.1.5 Kegiatan Larvasidasi

3) Tindakan Fogging

Penyakit tular vektor dapat dicegah dengan baik apabila vektor penular penyakit dapat dikendalikan dengan baik. Salah satu upaya pengendalian vektor adalah dengan cara fogging (pengasapan). Fogging (pengasapan) adalah pengendalian vektor yang menggunakan bahan kimia, yang bertujuan untuk mematikan nyamuk dewasa dalam waktu cepat. Pelaksanaan fogging harus memperhatikan dan memahami peralatan mesing fogging, jenis dan dosis insektisida yang digunakan serta prosedur pelaksanaan fogging. Adapun luas area Fogging yang dilaksanakan di Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel III.C.1.10
Luas Area Fogging Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Luas yang disemprot (Ha)												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Pelabuhan Makassar	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	10
Bandara Sultan Hasanuddin	0	0	0	0	5	4	6	0	16	0	0	0	31
Biringkassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Awerange	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajoe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palopo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Belang-belang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Tampapadang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
Malili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bulukumba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Paotere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	6

Majene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasangkayu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Siwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Total	0	0	0	0	0	0	6	0	21	7	0	0	56

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.10 menunjukkan pelaksanaan fogging di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 dilaksanakan di Wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar bulan September dengan total luas area yang di semprot adalah 16 Ha serta di Asrama Haji Makassar pada saat Embarkasi dan Debarkasi Haji luas area yang di semprot adalah 16 Ha, Pelabuhan Makassar 10 Ha, Pos Pelabuhan Paotere 6 Ha, Pelabuhan Palopo 2 Ha, Bandara Tamba Padang 4 Ha, Pelabuhan Belang-Belang 1 Ha dan Pos Pelabuhan Siwa 2 Ha. Adapun dasar pelaksanaan fogging berdasarkan hasil survey larva *Ae. aegypti*. Luas seluruh wilayah yang di semprot seluas 56 Ha. Jumlah insektisida yang digunakan selama tahun 2023 yaitu sebanyak 56 liter dengan menggunakan bahan insektisida Cynoff 50 EC.



Gambar III.C.1.6 Kegiatan Fogging

d) Pengamatan Nyamuk *Anopheles sp.*

Kegiatan pengendalian vektor merupakan salah satu bentuk upaya kewaspadaan dini terhadap faktor risiko timbulnya wabah penyakit tular vektor. Salah satu penyakit yang berpotensi wabah yaitu Malaria. Malaria adalah penyakit infeksi

yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang ditularkan melalui vektor nyamuk yaitu dari gigitan nyamuk *Anopheles*. Untuk mendukung hal tersebut maka perlu dilakukan pengamatan pada larva *Anopheles*. *Sp* di area perimeter dan buffer sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit di Wilayah Pelabuhan dan Bandar Udara. Hasil survei larva di Wilayah KKP Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.C.1.11
Hasil Survei jentik *Anopheles sp.* KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Lokasi	Indeks Habitat (%)											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Bandara Sultan Hasanuddin	Perimeter	0	0	33,3	16	0	20	0	14,28	0	0	0	0
	Buffer	0	0	4,2	16	0,13	16,6	0	0	0	0	0	0
Bajoe	Perimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buffer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,2
Tampa Padang	Perimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
	Buffer	0	0	0	10	0	0	0	0	0	16,27	0	66,7
Bira	Perimeter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Buffer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.11 menunjukkan indeks habitat jentik *Anopheles sp* selama tahun 2023. Nilai indeks habitat bulan Januari sampai dengan Desember menunjukkan hasil fluktuatif setiap bulannya yaitu di Wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada area *perimeter dan buffer*. Sedangkan Wilayah Kerja lainnya yang melakukan Survey jentik *Anopheles sp.* yaitu Pelabuhan Bajoe di bulan Desember pada wilayah *buffer* diperoleh indeks habitat 18,2%, Bandara Tampa Padang pada wilayah *buffer* bulan Oktober 16,27 % wilayah *perimeter* 10 % dan bulan Desember 66,7% pada wilayah *buffer*, tidak sesuai dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan indeks habitat <1. Pelabuhan Bira pada wilayah *perimeter dan buffer* bulan Desember diperoleh indeks habitat 0% sesuai dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan.

Kondisi pH air, salinitas, suhu, kondisi air, keberadaan vegetasi dan predator sangat mempengaruhi keberadaan larva *Anopheles sp.* Pada lokasi yang ditemukan larva *Anopheles* dilakukan larvasidasi dengan menggunakan larvasida *bacillus thuringiensis israelensis* (BTI). BTI merupakan larvasida biologi yang aman terhadap

lingkungan dan tidak bersifat patogen terhadap hewan dan manusia. BTI bekerja sebagai toksin pencernaan pada larva yang dapat menyebabkan kematian, namun bersifat aman terhadap hewan bukan sasaran dan manusia, serta aman bagi lingkungan.



Gambar III.C.1.7 Survei Jentik *Anopheles sp.*

e) **Uji Efikasi Bahan Kimia**

Pengendalian nyamuk dewasa di wilayah perimeter dan buffer dengan system Fogging/Pengasapan. Penggunaan insektisida dalam pengendalian vektor DBD dalam waktu lama menyebabkan terjadinya peningkatan daya tahan vektor terhadap insektisida. Uji Efikasi bertujuan untuk menilai status resistensi vektor DBD *Aedes aegypti* terhadap *Malathion* dan *Alphachypermethrin*. Sebagai upaya deteksi dan monitoring resistensi terhadap insektisida yang digunakan pada dua wilayah kerja yaitu Pelabuhan Palopo dan Pelabuhan Awerange. Penentuan resistensi didapat berdasarkan hasil pengujian menggunakan *impregnated paper* sesuai standar WHO. *Impregnated paper* yang digunakan yaitu *Malathion* 0,8% dan *Alphachypermethrin* 0,05% sesuai dengan insektisida yang digunakan di wilayah tersebut. Status resistensi ditentukan berdasarkan persentase kematian nyamuk uji setelah periode pengamatan/pemeliharaan 24 jam, yang dikelompokkan menjadi rentan, toleran, dan

resisten. Dinyatakan rentan apabila kematian nyamuk uji 99%-100%, dinyatakan toleran apabila kematian nyamuk uji 80%-98%, dinyatakan resisten apabila kematian nyamuk uji <80%.

Tabel III.C.1.12
Hasil Uji Resistensi Nyamuk *Aedes aegypti*
Terhadap Insektisida *Malathion* dan *Alpachypermethrin*
Tahun 2023

Wilayah Kerja	Hasil Pengujian				Status
	Insektisida	Jumlah Nyamuk Uji (ekor)	Jumlah Mati (ekor)	% Mati	
Pelabuhan Palopo	Malathion 0,8%	23	18	78%	Resisten
	Alphacypemethrin 0,05%	20	20	100%	Rentan
Pelabuhan Awerange	Malathion 0,8%	25	25	100%	Rentan
	Alphacypemethrin 0,05%	27	27	100%	Rentan

Tabel III.C.1.12 menunjukkan hasil uji resistensi di Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo setelah di kontakkan dengan insektisida *Malathion* 0,8% persentase kematian sebanyak 78% masuk dalam kategori resisten dimana presentase kematian <80% sedangkan untuk insektisida *Alphacypermethrin* 0,05 % persentase kematian sebanyak 100% masuk dalam kategori rentan dimana persentase kematian 99%-100%. Pelabuhan Awerange menunjukkan bahwa Wilayah Kerja dikategorikan rentan terhadap insektisida *Malathion* dan *Alphachypermethrin* dimana persentase kematian 100%.

Faktor penyebab resistensi adalah penggunaan dosis yang rendah atau dosis yang tidak mematikan. Variabel yang mempengaruhi tingkat resistensi nyamuk terhadap insektisida antara lain konsentrasi pestisida, frekuensi penyemprotan dan luas penyemprotan. Pelaksanaan fogging seharusnya pada pagi/sore hari, bertujuan tepat pada saat puncak aktivitas vektor, partikel/droplet insektisida tidak mengalami pengenceran udara yang panas (-28°C), kecepatan angin juga mempengaruhi efisiensi fogging.



Gambar III.C.1.8 Kegiatan Uji Resistensi

f) Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut

Tindakan penyehatan alat angkut di Wilayah Pelabuhan/Bandara bertujuan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit potensial wabah melalui disinfeksi, desinfeksi, deratisasi, dan dekontaminasi. Ketentuan penyehatan alat angkut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan adanya tanda-tanda kehidupan tikus dan kecoak, hasil pemeriksaan terhadap kapal yang doking , serta permintaan dari pihak kapal (nahkoda/pemilik kapal).

**Tabel III.C.1.13
Pengawasan Tindakan Penyehatan Alat Angkut (Kapal/Pesawat)
Tahun 2023**

Pengawasan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
Disinfeksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disinseksi	62	60	52	48	47	56	61	56	59	51	40	40	632
Deratisasi (Fumigasi)	1	4	4	1	0	1	3	3	1	1	0	1	20

Dekontaminasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	2	4	4	2	0	2	5	3	3	1	0	2	28

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.C.1.13 menunjukkan pada Tahun 2023, pengawasan disinseksi sebanyak 8 kapal dan pengawasan disinseksi 624 pada pesawat dan pengawasan fumigasi dilaksanakan sebanyak 20 kapal. Pengawasan disinseksi pesawat di wilayah Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dilakukan oleh personil pesawat khususnya pada penerbangan internasional. Disinseksi dilakukan pada area cabin menggunakan *pre-spray* dengan bahan aktif *Permethrin* dan pada cargo dengan menggunakan *hold spray* dengan bahan aktif *d-phenothrin* dan *permethrin*.

Pelaksanaan pengawasan penyehatan alat angkut (kapal) berlokasi di Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar dan Pelabuhan Awerange. Penyelenggara fumigasi dilakukan oleh Badan Usaha Swasta (BUS) dan diawasi oleh pihak KKP. Adapun fumigan yang digunakan yaitu *Methyl Bromide* (CH₃Br) sebanyak 279,3 kg. Kegiatan disinseksi merupakan tindakan penyehatan untuk membasmi serangga vektor penular penyakit sebagai upaya kewaspadaan terhadap faktor risiko yang muncul pada alat angkut (kapal) yang dapat menyebabkan penularan penyakit. Bahan yang digunakan untuk disinseksi yaitu insektisida organofosfat dengan total pemakaian sebanyak 21.200 ml.



Gambar III.C.1.9 Tindakan Penyehatan Alat Angkut

g) **Surveilans Kepadatan Tikus dan Deteksi Leptospirosis**

Leptospirosis adalah penyakit zoonosa yang menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri *Leptospira* yang ditularkan melalui kencing tikus. Sebagaimana Permenkes Nomor 1501 Tahun 2010 bahwa leptospirosis merupakan salah satu jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendaliannya. Leptospirosis menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Leptospirosis disebabkan oleh infeksi bakteri genus *Leptospira* yang dapat menyerang hewan dan manusia, yang ditularkan melalui urin tikus. Leptospirosis ditularkan melalui kontak dengan air, lumpur, tanaman yang telah dicemari oleh urine tikus.

Surveilans ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan populasi tikus, deteksi bakteri leptospira pada tikus, melakukan analisis data dan penyusunan rekomendasi dalam rangka pengendalian tikus dan pencegahan penyakit leptospirosis. Saat ini, terdapat 160 spesies tikus di Indonesia, dan telah dilaporkan 9 spesies diketahui sebagai reservoir penyakit tular langsung ke manusia, seperti leptospirosis dan hanta virus. Tikus juga telah dilaporkan sejak lama sebagai hospes atau inang perantara penyakit pes di Indonesia. Kesembilan spesies itu adalah *Bandicota indica* (wirok besar), *B. bengalensis* (wirok kecil), *Rattus norvegicus* (tikus riul), *R. tanezumi* (tikus rumah), *R. tiomanicus* (tikus pohon), *R. argentiventer* (tikus sawah), *R. exulans* (tikus ladang), *Mus musculus* (mencit rumah) dan *M. caroli* (mencit ladang). Upaya membangun sistem surveilans binatang pembawa penyakit di pintu masuk memerlukan kerjasama dan komitmen dari beberapa sektor terkait

Untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit leptospirosis pada manusia yang ditularkan oleh tikus (rodent) dilakukan penangkapan tikus di beberapa wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Dengan tujuan untuk mendeteksi bakteri leptospira pada tikus. Hasil pengujian leptospirosis di wilayah kerja KKP Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.C.1.14
Hasil konfirmasi bakteri leptospira pada sampel ginjal tikus tertangkap di *perimeter area*
Wilayah Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

No	Wilayah Kerja	Jumlah trap terpasang	Jumlah trap positif	Sukses Trap %	Kepadatan Pinjal		Jumlah sampel diperiksa	Hasil PCR	
					Indeks Pinjal khusus	Indeks Pinjal umum		Sampel positif	Sampel Negatif
1	Bandara Int. Sultan Hasanuddin Makassar	800	3	0,40%	0	0	2 (<i>R. tanezume, R. norvegicus</i>)	1 (<i>Rattus norvegicus</i>)	1 (<i>R. tanezume</i>)
2	Pelabuhan Makassar	400	4	1%	0	0	4 (<i>R. norvegicus</i>)	3 (<i>R. norvgicus</i>)	1 (<i>R. norvgicus</i>)
3	Pelabuhan Paotere	400	3	0,75%	0	0	3 (<i>R. tanezume</i>)	0	3 (<i>R. tanezume</i>)
4	Pelabuhan Bira	400	5	1,25%	0	0	3 (<i>R. tanezume, R. norvegicus</i>)	0	3 (<i>R. tanezume, R. norvegicus</i>)
5	Bandara Tampa Padang	800	3	0,75%	0	0	3 (<i>R. tanezume, R. norvegicus</i>)	0	3 (<i>R. tanezume, R. norvegicus</i>)
Jumlah		2800	18		0	0	15	4	11

Tabel III.C.1.14 menunjukkan hasil penangkapan dan pemasangan perangkap ditemukan 18 tikus tertangkap. Dari 18 tikus yang tertangkap yang diambil sampel sebanyak 15 tikus untuk dilakukan pemeriksaan sampel ginjal yang dilakukan dengan metode PCR yang dilaksanakan di Laboratorium BBTCLPP Surabaya di Nongkojajar Pasuruan Jawa Timur dan Laboratorium BTKLPP Makassar. Pemasangan perangkap di Wilayah Kerja Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dengan success trap 0,4 %, Pelabuhan Makassar 1 %, Pelabuhan Paotere 0,75 %, Bandara Tampa Padang 0,75 %, Pelabuhan Bira 1,25 %. Jenis tikus yang tertangkap yakni jenis *Ratus tanezumi* dan *Rattus norvegicus*. Tidak ditemukan pinjal baik pinjal umum ataupun pinjal jenis *Xenopsylla cheopis* dengan *indeks* pinjal umum 0 dan *indeks* pinjal khusus 0.

Dari total 15 sampel dilakukan pemeriksaan konfirmasi leptospira dengan metode PCR RT diperoleh proporsi sampel yang positif sebanyak 4 sampel dan 11 sampel negatif. Dengan rincian 12 ginjal tikus dikirim ke BBTCL Surabaya yang terdiri dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar 2 Sampel dengan jumlah sampel 2 positif/ (100%), Pelabuhan Makassar 4 sampel dengan jumlah sampel 3 positif (75%) dan 1 sampel negatif, Pelabuhan Paotere 3 sampel dengan jumlah sampel 0 positif/ (0%), Bandara Tampa Padang 3 sampel dengan jumlah sampel 0 positif/ (0%). BTKLPP

Makassar sebanyak 3 sampel yang terdiri Pelabuhan Bira 3 sampel dengan jumlah sampel 0 positif/ (0%).

Penentuan status kevektoran adalah kegiatan untuk mengetahui atau menentukan apakah spesies tertentu merupakan vektor atau bukan vektor yang berada pada masing-masing wilayah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara pembedahan maupun pemeriksaan laboratorium dengan tujuan untuk melihat dan menganalisis ada tidaknya agen penyebab penyakit seperti virus, parasit, bakteri, dan agen lainnya. Jika ditemukan agen penyebab penyakit pada spesies tertentu maka status kevektorannya positif.



Gambar III.C.1.10 Pembedahan dan Pengambilan Sampel Ginjal Tikus

2. Sub Substansi Sanitasi dan Dampak Risiko Lingkungan

a. Hygiene Sanitasi Alat Angkut

1) Pemeriksaan Sanitasi Kapal

Sanitasi kapal mencakup seluruh aspek penilaian kompartemen kapal diantaranya dapur, ruang penyediaan makanan, palka, gudang, kamar awak kapal, penyediaan air bersih dan penyajian makanan serta pengendalian vektor penular penyakit yang bertujuan untuk menilai faktor risiko lingkungan di kapal dan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung pengawasan kesehatan masyarakat, sehingga setiap orang yang berada di kapal harus menjaga sanitasi dan kesehatan kapal untuk memutus mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Sanitasi kapal berlaku untuk semua jenis kapal, baik kapal penumpang maupun kapal barang.

Tabel III.C.2.1
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

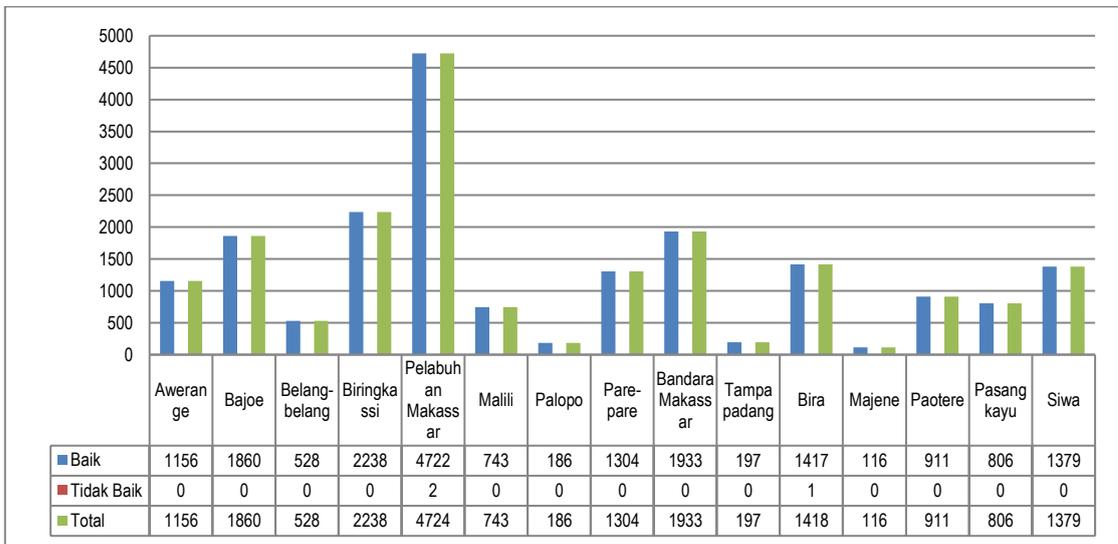
Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Baik	1472	1166	1407	1340	1513	1408	1540	1492	1458	1660	1521	1572	17549
Tidak Baik	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	1472	1166	1407	1341	1515	1408	1540	1492	1458	1660	1521	1572	17.552

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan Tabel III.C.2.1 dari total 17.552 hasil pemeriksaan sanitasi kapal dari Januari sampai Desember Tahun 2023, menunjukkan bahwa 17.549 kapal dengan hasil baik dan 3 kapal yaitu pada bulan April 1 kapal dan bulan Mei 2 kapal dengan hasil tidak baik.

Kapal dengan hasil tidak baik telah dilakukan tindakan pengendalian berupa disinfeksi.

Grafik III.C.2.1
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Grafik III.C.2.1 menunjukkan hasil Pemeriksaan Sanitasi Kapal untuk wilayah kerja KKP Kelas I Makassar. Dari total 17.552 kapal yang diperiksa, kapal dengan hasil pemeriksaan tidak baik pada pelabuhan Makassar sebanyak 2 kapal dan 1 kapal pada pelabuhan bira.



Gambar III.C.2.1 Pemeriksaan Sanitasi Kapal

2) Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

Salah satu Indikator Penilaian bandar udara sehat diantaranya adanya hasil pemeriksaan sanitasi pesawat. Sanitasi pesawat merupakan suatu upaya pengendalian yang dilakukan sebagai tindakan penyehatan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran penyakit atau kontaminasi.

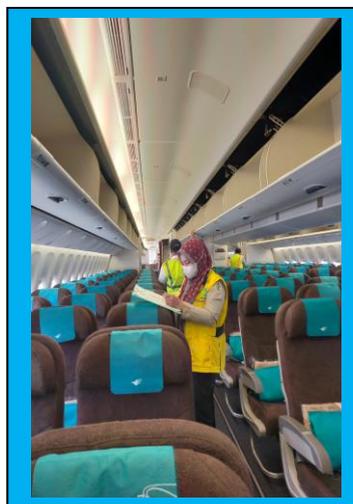
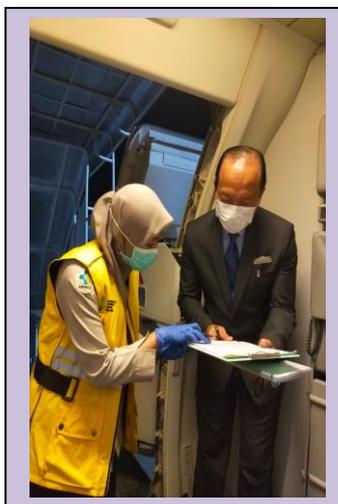
Pemeriksaan sanitasi pesawat meliputi kebersihan kabin penumpang, kompartemen toilet, pengawasan persediaan makan dan air, serta pemeriksaan keberadaan serangga dan vektor.

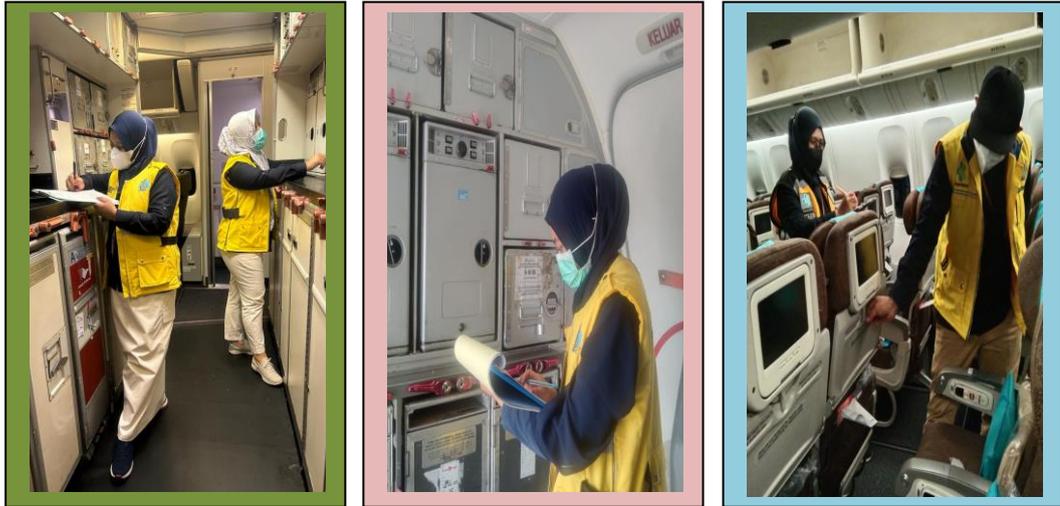
Tabel III.C.2.2
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Pesawat
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Baik	188	134	145	165	189	199	187	168	149	156	136	131	1947
Tidak Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	188	134	145	165	189	199	187	168	149	156	136	131	1947

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan Tabel III.C.2.2, menunjukkan dari bulan Januari sampai Desember Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan sanitasi pesawat sebanyak 1.947 pesawat yaitu pada wilayah kerja Bandara Sultan Hasanuddin sebanyak 1.933 pesawat yang terdiri dari pesawat domestic dan internasional, dan Bandara Tampa Padang sebanyak 14 pesawat. Hasil pemeriksaan sanitasi pesawat semuanya baik sesuai dengan formulir pemeriksaan sanitasi pesawat.





Gambar III.C.2.2 Pemeriksaan Sanitasi Pesawat

b) Pengawasan Sanitasi Gedung/Bangunan/Perkantoran dan TTU

1) Gedung/Bangunan/Perkantoran

Salah satu upaya penyehatan lingkungan dalam mencegah penyebaran penyakit menular dan penyakit potensial wabah melalui pengawasan dan perbaikan sarana kesehatan, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan adalah kegiatan pengendalian risiko lingkungan, dalam hal ini pengawasan sanitasi gedung/ bangunan.

Pengawasan gedung/bangunan di bandar udara maupun pelabuhan adalah pengawasan kondisi dari bangunan serta fasilitas pendukungnya dari kemungkinan timbulnya masalah kesehatan. Item pengawasan gedung/bangunan meliputi kondisi fisik bangunan/gedung dan halaman, penyediaan air bersih, penanganan sampah, sarana pembuangan air limbah dan keberadaan vektor. Pemenuhan persyaratan tersebut ditujukan untuk melindungi pengguna bangunan/gedung dari gangguan kesehatan dan penurunan kinerja. Bangunan akan dinyatakan layak fungsi jika telah memenuhi semua persyaratan kesehatan beserta dengan persyaratan dari aspek lainnya seperti dari aspek kemudahan, kenyamanan dan keselamatan.

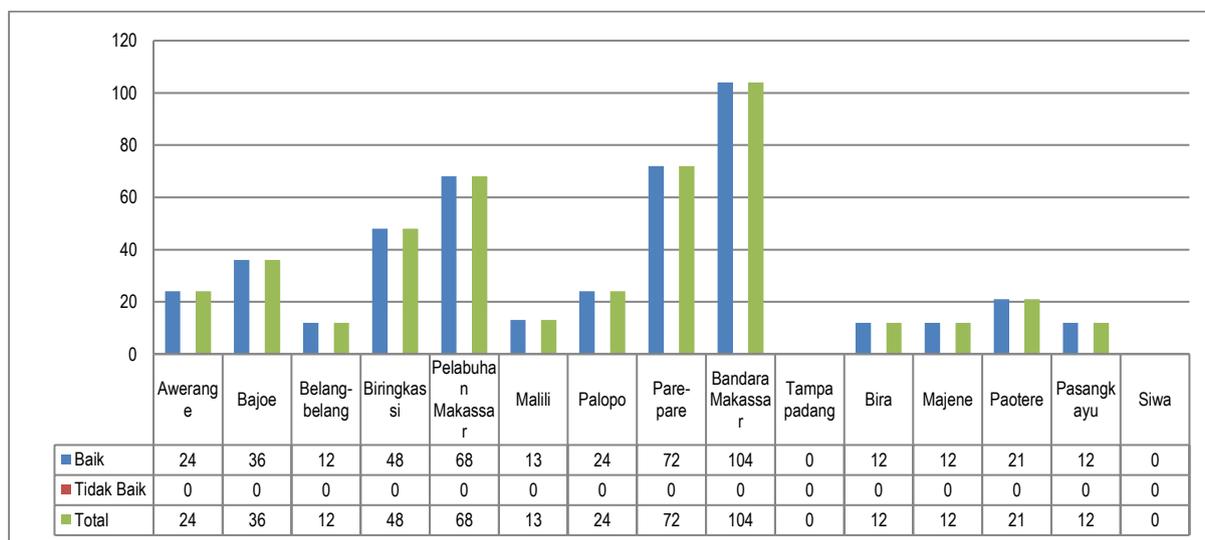
Tabel III.C.2.3
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Baik	30	30	29	30	56	60	58	35	30	31	40	29	458
Tidak Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	30	30	29	30	56	60	58	35	30	31	40	29	458

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan Tabel III.C.2.3, distribusi pemeriksaan sanitasi gedung pada tahun 2023 sebanyak 458 kali pemeriksaan yang tersebar di semua wilayah kerja. Hasil pemeriksaan bernilai baik sebanyak 458 kali (100%) dimana meningkat di banding tahun lalu yang hanya 99,7 %, hal ini menandakan bahwa ada peningkatan kondisi kesehatan lingkungan dari gedung tersebut.

Grafik III.C.2.2
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Grafik III.C.2.2, menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sanitasi gedung baik dan terbanyak dilaksanakan di Bandara Makassar yaitu sebanyak 104 kali, hal ini karena di wilayah kerja Bandara Makassar lebih banyak Gedung dan bangunan

dibandingkan dengan wilayah kerja yang lain. Pengawasan sanitasi gedung untuk wilker Bandara Makassar selain dalam kawasan Bandara juga melakukan pengawasan rutin pada Asrama Haji Embarkasi Makassar yang dilaksanakan pada pra embarkasi dan juga pemeriksaan rutin pada saat embarkasi haji berlangsung.

2) Tempat-Tempat Umum

Tempat berinteraksinya banyak orang yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya merupakan defenisi dari tempat-tempat umum, untuk itu diperlukan upaya sanitasi pada tempat-tempat umum tersebut.

Tujuan pengawasan dan pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum adalah untuk memantau kondisi sanitasi secara berkala, membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat guna melindungi kesehatan masyarakat dari kemungkinan penularan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum wilayah pelabuhan dan bandara dilaksanakan pada area terminal dan masjid/musholla.

Kriteria sanitasi tempat-tempat umum diantaranya :

- Tempat tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum
- Terdapat tempat atau gedung yang bersifat permanen, dimana dalam tempat tersebut dilakukan kegiatan atau aktivitas yang dapat menimbulkan risiko terjadinya penularan penyakit
- Memiliki fasilitas atau perlengkapan umum seperti Sarana Air Bersih (SAB), Water-closet (WC), Urinoir, tempat sampah dll.

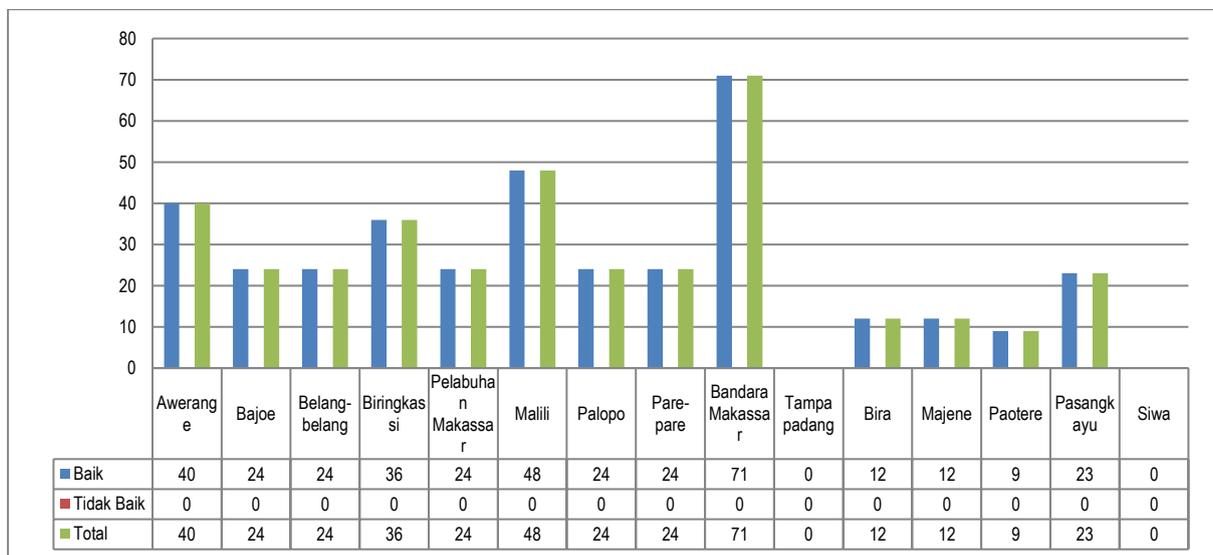
Tabel III.C.2.4
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Baik	45	27	27	26	45	46	26	27	25	25	27	25	371
Tidak Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	45	27	27	26	45	46	26	27	25	25	27	25	371

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Tabel III.C.2.4 menunjukkan distribusi pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum pada Tahun 2023 sebanyak 371 kali pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan seluruhnya bernilai baik dan meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana masih ada pemeriksaan dengan hasil tidak baik. Jumlah pemeriksaan pada bulan Januari, Mei dan Juni lebih banyak dibandingkan bulan lainnya karena pelaporan pada bulan tersebut sudah termasuk hasil pemeriksaan untuk asrama haji embarkasi Makassar.

Grafik III.C.2.3
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Tempat-Tempat Umum
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Simkespel, 2023

Grafik III.C.2.3, menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum secara keseluruhan yang bernilai baik dengan pemeriksaan terbanyak dilaksanakan di wilker Bandara Sultan Hasanuddin sebanyak 71 kali.

Pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum untuk wilker Bandara Makassar juga bukan hanya di area Bandara tetapi juga di asrama haji embarkasi Makassar yang menjadi lokus pengawasan yang rutin dilaksanakan pada pra embarkasi dan selama embarkasi berlangsung. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Kepmenkes 288/MENKES/SK/ III/ 2003 Tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum, dilihat dari aspek lingkungan dan bangunan, fasilitas sanitasi dan juga fasilitas pendukung lainnya.



Gambar III.C.2.3 Pemeriksaan Sanitasi Gedung/Bangunan dan TTU

c. Pengawasan Penyediaan Air Bersih

1) Pengawasan Sarana Air Bersih

Tujuan pengawasan sanitasi sarana air bersih adalah untuk mengetahui tingkat risiko pencemaran yang ada. Pengawasan sanitasi sarana air bersih merupakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kondisi lingkungan, perlengkapan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air bersih dan sanitasi.

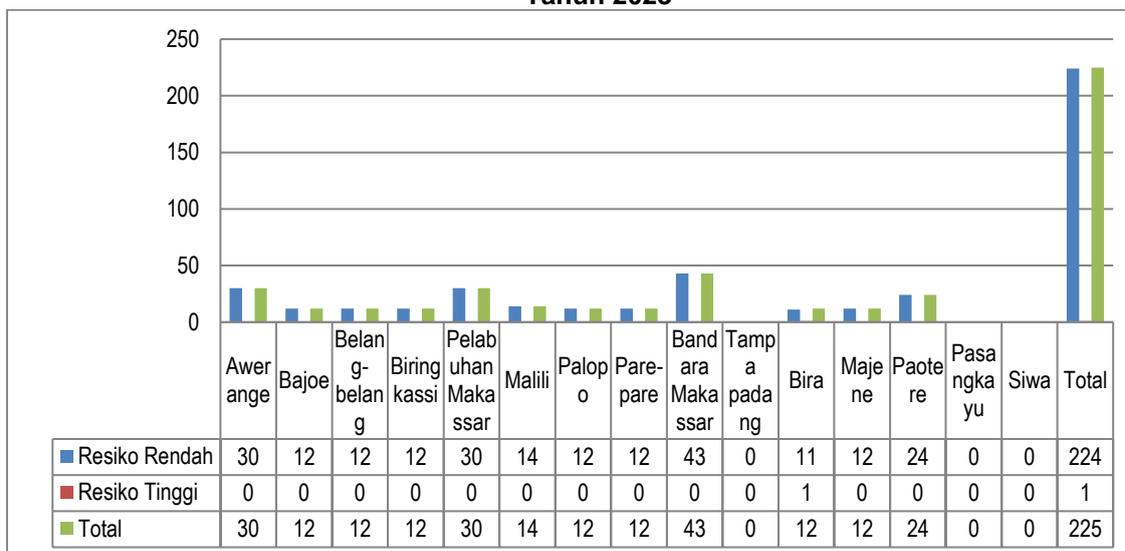
Tabel III.C.2.5
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Sarana Air Bersih
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Resiko Rendah	20	17	20	14	21	17	16	18	19	23	20	20	225
Resiko Tinggi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Total	20	17	21	14	21	17	16	18	19	23	20	20	226

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Tabel III.C.2.5 menunjukkan hasil pemeriksaan sanitasi sarana air bersih pada Tahun 2023 yaitu sebanyak 226 kali pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan 225 dalam kategori tingkat risiko pencemaran rendah dan 1 sarana pada bulan Maret dalam kategori resiko tinggi. Sarana dengan hasil pemeriksaan kategori resiko tinggi telah dilakukan intervensi dengan cara pendekatan dan memberikan penyuluhan secara persuasive kepada pihak pengelola sarana air bersih yang dimaksud.

Grafik III.C.2.4
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi Sarana Air Bersih
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Grafik III.C.2.4, menunjukkan hasil pemeriksaan sanitasi sarana air bersih berdasarkan wilayah kerja di KKP Kelas I Makassar Tahun 2023 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) sarana dengan tingkat risiko pencemaran tinggi pada wilker pos pelabuhan Bira berdasarkan form inspeksi sanitasi sarana air bersih.

2) Pengujian Kualitas Air Bersih

Maksud dan tujuan pengujian kualitas air untuk mengetahui ada tidaknya mikroorganisme *pathogen* dalam air yang ditunjukkan dengan indikator ada tidaknya bakteri *coliform* sesuai dengan Permenkes No. 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.

Tabel III.C.2.6
Distribusi Hasil Pengujian Kualitas Air Bersih
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Bulan	Fisik			Kimia			Mikrobiologi		
	Jumlah	Baik	Tidak baik	Jumlah	Baik	Tidak baik	Jumlah	Baik	Tidak baik
Januari	26	26	0	14	14	0	10	6	4
Februari	27	27	0	16	15	1	3	2	1
Maret	27	27	0	15	15	0	12	7	5
April	27	27	0	17	17	0	3	3	0
Mei	29	28	1	18	17	1	10	8	2
Juni	27	27	0	20	20	0	10	8	2

Juli	17	17	0	7	7	0	3	3	0
Agustus	31	31	0	4	4	0	0	0	0
September	36	36	0	26	26	0	3	1	2
Oktober	32	32	0	23	23	0	20	20	0
November	38	38	0	28	28	0	24	24	0
Desember	26	26	0	15	15	0	15	15	0
Jumlah	343	342	1	203	201	2	113	97	16

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Tabel III.C.2.6, menunjukkan hasil pemeriksaan sampel air yang dilakukan di laboratorium yang terakreditasi yaitu BTKLPP Kelas I Makassar dan BBLK Makassar, dengan sampel air berasal dari reservoir baik inlet ataupun outlet yang mendistribusi air ke TPP, bangunan/gedung, terminal dan *water car* yang mensuplay air ke pesawat.

Pemeriksaan sampel air bersih tahun 2023 sebanyak 343 sampel dengan hasil pemeriksaan kualitas air bersih secara fisik pada bulan Mei ada yang tidak baik berasal dari wilker Bandara Makassar ditemukan pada gedung Wisma 15 asrama haji embarkasi Makassar dengan kondisi air yang sangat keruh.

Untuk pemeriksaan dengan parameter kimia sebanyak 203 sampel dengan hasil 201 sampel baik dan 2 sampel tidak baik yang berasal dari wilker Bandara Makassar dan wilayah kerja Pelabuhan Makassar.

Pemeriksaan dengan Parameter uji mikrobiologi dilakukan 2 (dua) parameter, yaitu *E.coli* dan Total *Coliform*. Sampel air bersih yang diperiksa sebanyak 113 sampel dengan hasil 97 sampel baik dan 16 sampel tidak baik. Sampel dengan hasil tidak baik berasal dari wilayah pengawasan Bandara Makassar, dengan lokasi WTP AP, PT. ACS, PT. Menara Angkasa, dan juga dari asrama haji embarkasi Makassar, dengan hasil total coliform yang melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.. Sebagai tindak lanjut diberikan rekomendasi untuk pengolahan air bersih dengan perlakuan pemberian zat desinfektan dan pengurasan bak penampungan.



Gambar III.C.2.5 Pengawasan, pengambilan & pemeriksaan sampel air bersih

d) Pengawasan, Pemeriksaan Makanan dan Minuman

1) Pengawasan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)

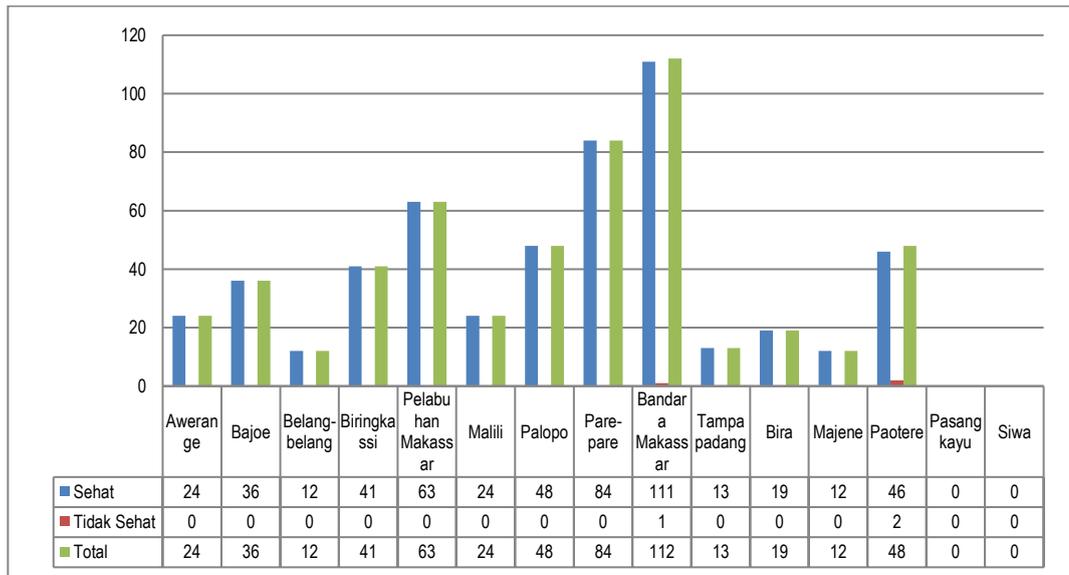
Dalam melakukan pengawasan terhadap tempat pengelolaan pangan diperlukan adanya kesadaran dari pelaku usaha terhadap kebersihan tempat pengelolaan pangan yang mereka miliki. Semakin tinggi tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kebersihan maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pelanggan terhadap makanan dan minuman yang mereka jual.

Inspeksi tempat Pengelolaan Pangan (TPP) di pintu masuk merupakan salah satu bagian penting yang dilakukan setiap bulan dengan tujuan agar TPP tetap baik (laik hygiene) untuk mengelola makanan serta memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan karena adanya

kemungkinan terjadinya penularan penyakit ataupun keracunan akibat pangan.

Pemeriksaan kelayakan fisik TPP mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.

Grafik III.C.2.5
Distribusi Hasil Pemeriksaan Inspeksi Sanitasi TPP
Berdasarkan Wilayah Kerja KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Grafik III.C.2.5 menunjukkan hasil pemeriksaan sanitasi TPP yang dilakukan berdasarkan wilayah kerja KKP Kelas I Makassar selama Tahun 2023. Dari total 536 TPP yang diperiksa, sebanyak 533 dengan hasil sehat dan 3 TPP dinyatakan tidak sehat sesuai form pemeriksaan. TPP dengan hasil tidak sehat terdapat pada wilker bandara Makassar dan pos pelabuhan Paotere.

TPP dengan hasil pemeriksaan yang tidak sehat diberikan penyuluhan secara persuasive dan rekomendasi agar memperbaiki beberapa item yang belum terpenuhi dengan harapan kondisi TPP lebih meningkat sehingga penyakit yang dapat menular melalui makanan (*Food Borne Disease*) dapat dicegah.

Tabel III.C.2.7
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sanitasi TPP
Berdasarkan Bulan KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Hasil Pemeriksaan	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
Sehat	40	38	38	45	49	67	38	44	41	43	42	48	533
Tidak Sehat	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	41	39	38	46	49	67	38	44	41	43	42	48	536

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Tabel III.C.2.7 menunjukkan hasil pemeriksaan sanitasi TPP setiap bulan selama Tahun 2023. Hasil pemeriksaan pada bulan Januari dan Februari terdapat 2 TPP yang tidak sehat yaitu pada Pos Pelabuhan Paotere dan pada bulan April terdapat 1 TPP yang tidak sehat yang berasal dari Bandara Makassar

Jumlah pemeriksaan sanitasi tempat pengolahan pangan pada bulan Juni mengalami kenaikan disbanding bulan lainnya disebabkan karena adanya pemeriksaan tempat pengolahan pangan pada masa embarkasi haji.

2) Pengawasan makanan dan minuman

Makanan dinyatakan laik konsumsi apabila telah dilakukan uji secara organoleptik, kimia dan uji mikrobiologi pada laboratorium. Makanan dan minuman yang baik dihasilkan dari pengolahan yang memenuhi kaidah prinsip hygiene dan sanitasi makanan.

Pengawasan Makanan dan Minuman juga dilaksanakan pada situasi khusus arus mudik, yaitu arus mudik lebaran dan arus mudik nataru. Pengawasan dilakukan secara serentak di semua wilayah kerja. Untuk wilayah kerja Bandara Hasanuddin disamping pengawasan dan pemeriksaan makanan dan minuman di area bandara juga dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada Catering Penyedia Jasa Makanan Embarkasi Haji. Sebelum memasuki masa embarkasi kepada Catering pemenang tender terlebih dahulu dilakukan penyuluhan dan pelatihan penjamah pangan serta Pemeriksaan Kesehatan khususnya kepada Penjamah Makanan.

Kursus Higiene Sanitasi Pangan bagi penjamah pangan catering CV. Arky Jaya selaku penyedia konsumsi Jemaah Calon Haji Embarkasi/ Debarkasi Haji Tahun 2023 dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang, sedangkan untuk pengawasan pangan di pesawat dilakukan pemeriksaan dokumen

kesehatan penjamah melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada Dapur Katering PT. Aeroprima Food Service.

Pada masa embarkasi Pengambilan dan Pemeriksaan sampel makanan dilakukan secara rutin pada Dapur Asrama Haji dan juga pada sampel Flight Catering Haji.

Dalam pengawasan makanan dan minuman beberapa faktor yang menjadi tolak ukur diantaranya tanggal produksi, tanggal kadaluarsa, izin usaha dan kemasan dari makanan dan minuman itu sendiri.

Tabel III.C.2.8
Distribusi Hasil Pemeriksaan Sampel Makanan/Minuman
Berdasarkan Jenis Pemeriksaan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Bulan	Organoleptik			Kimia			Mikrobiologi		
	Jumlah	Baik	Tidak baik	Jumlah	Baik	Tidak baik	Jumlah	Baik	Tidak baik
Januari	249	249	0	235	235	0	0	0	0
Februari	283	283	0	269	269	0	4	4	0
Maret	159	159	0	145	145	0	0	0	0
April	100	100	0	86	86	0	0	0	0
Mei	573	573	0	559	559	0	210	210	0
Juni	1723	1723	0	1709	1709	0	727	727	0
Juli	1172	1172	0	1158	1158	0	875	875	0
Agustus	177	177	0	173	173	0	0	0	0
September	123	123	0	173	173	0	3	3	0
Oktober	75	75	0	61	61	0	0	0	0
November	78	78	0	64	64	0	0	0	0
Desember	49	49	0	30	30	0	17	15	2
Jumlah	4761	4761	0	4662	4662	0	1836	1834	2

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Tabel III.C.2.8 menunjukkan hasil pemeriksaan sampel makanan dan minuman pada Tahun 2023. Pemeriksaan sampel pangan pada bulan Juni dan Juli mengalami kenaikan hal ini karena pada bulan tersebut adalah masa embarkasi dimana pengawasan pangan bukan hanya dilakukan pada sampel pangan dari TPP bandara tapi juga dengan melakukan pengambilan sampel produk pangan siap saji di asrama haji dan sampel yang akan *loading* ke pesawat yang diambil berdasarkan kloter yang akan berangkat.

Untuk pemeriksaan organoleptik sebanyak 4.761 sampel dan pemeriksaan kimia sebanyak 4.662 sampel dengan hasil Baik. Untuk

pemeriksaan bakteriologis sebanyak 1.836 sampel dengan hasil 1.834 jenis sampel hasilnya baik dan 2 jenis sampel dengan hasil tidak baik positif mengandung e. Coli berasal dari Pelabuhan Pare-pare.

Untuk parameter uji secara kimia merupakan senyawa kimia yang berpotensi dapat mengakibatkan keracunan, seperti arsen, sianida, formalin, borax, nitrat dan nitrit. Sedangkan untuk parameter uji mikrobiologi adalah uji keberadaan mikroba *E. coli* dengan melakukan penanaman dengan masa inkubasi 1 x 24 jam. Pemeriksaan sampel pangan dilakukan dengan metode cepat (*rapid test*) menggunakan *food detection kit* dan ada pula yang dirujuk ke BTKL PP Kelas I Makassar dan BBLK Makassar sebagai laboratorium rujukan yang terakreditasi.



Gambar III.C.2.6 Pengawasan, Pemeriksaan Makanan dan Minuman

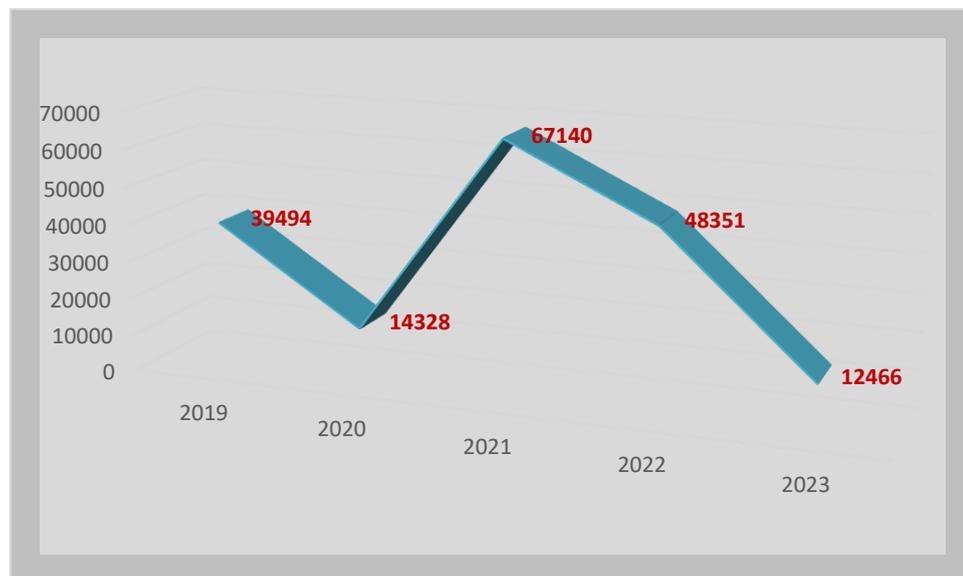
1. Sub Substansi Kesehatan Matra dan Lintas Wilayah

a. Kunjungan Poliklinik

Jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar yaitu pelayanan kesehatan terbatas, surat keterangan laik/tidak laik terbang, surat keterangan izin angkut orang sakit, pelayanan ambulance (rujukan dan evakuasi) dan pemberian vaksinasi. Sasaran pelayanan meliputi penumpang kapal, awak kapal, taruna/calon taruna, pengguna jasa pelabuhan/bandara, karyawan instansi pemerintah, BUMN dan swasta yang ada di lingkungan pelabuhan/bandara, masyarakat pelabuhan/bandara, dan orang yang akan melaksanakan perjalanan dengan menggunakan pesawat dan kapal laut.

Adapun gambaran jumlah kunjungan poliklinik lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.D.1.1
Jumlah Kunjungan Poliklinik dari Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2019-2023

Berdasarkan Grafik III.D.1.1 kunjungan poliklinik di KKP Kelas I Makassar mengalami penurunan, jumlah kunjungan poliklinik di tahun 2023 yaitu 12.466 kunjungan.

Jenis pelayanan poliklinik yang dilaksanakan di KKP Kelas I Makassar dapat dilihat pada tabel III.D.1.1 berikut ini :

Tabel III.D.1.1
Distribusi Jenis Pelayanan Kesehatan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019 - 2023

Jenis Pelayanan Kesehatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Surat Izin Angkut Orang Sakit	85	48	52	131	272
Surat Keterangan Laik terbang	6.734	3.103	2.877	5.412	5.671
Surat Keterangan Tidak Laik Terbang	279	122	89	140	200
Pelayanan Ambulance	496	119	145	309	293
Pemberian Vaksinasi (Vaksinasi Meningitis, Vaksinasi Yellow Fever dan Vaksinasi Covid-19)	39.121	10.866	63.977	46.323	6.030

Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2019-2023

Berdasarkan tabel III.D.1.1, pada tahun 2023 terdapat beberapa peningkatan pada jenis pelayanan kesehatan meliputi Surat Izin Angkut Orang Sakit (SIAOS) serta Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT). Pelayanan vaksinasi mengalami penurunan karena sebagian besar pengguna jasa sudah selesai di vaksin Covid-19 tahun 2021 dan 2022, serta adanya surat edaran dengan nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 tanggal 11 November 2022 tentang pelaksanaan vaksinasi Meningitis bagi jamaah haji dan umrah. Dalam edaran ini disebutkan bahwa tidak menjadi keharusan bagi jamaah umrah untuk melakukan vaksinasi meningitis.

b. Pemberian Vaksinasi dan Penerbitan ICV

1) Pemberian Vaksinasi

Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi/ penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*) dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi jika dinilai dari sisi ekonomi, akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan dengan upaya pengobatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai UPT Kementerian Kesehatan turut berperan aktif dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Sehubungan dengan PMK No. 7 tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik *corona virus disease* 2019 (Covid-19), bekerjasama dengan instansi lain baik pusat maupun daerah maka KKP Kelas I Makassar terlibat langsung dalam proses pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Pemberian vaksinasi Meningitis Meningokokus (MM) dan Yellow Fever (YF) didasarkan pada permintaan konsumen yang akan melaksanakan perjalanan internasional khususnya ke negara-negara endemik penyakit MM dan YF serta negara-negara yang mempersyaratkan. Terhadap masyarakat yang telah divaksinasi MM dan YF diberikan *International Certificate of Vaccination (ICV)*.

Adapun gambaran jumlah pemberian vaksinasi lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik III.D.1.2
Jumlah Pemberian Vaksinasi
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2019 - 2023

Berdasarkan grafik III.D.1.2 jumlah pemberian vaksinasi pada tahun 2023 sebanyak 6.030 orang. Hal ini mengalami penurunan dikarenakan pelaksanaan vaksinasi internasional dilakukan berdasarkan permintaan dari negara tujuan pelaku perjalanan.

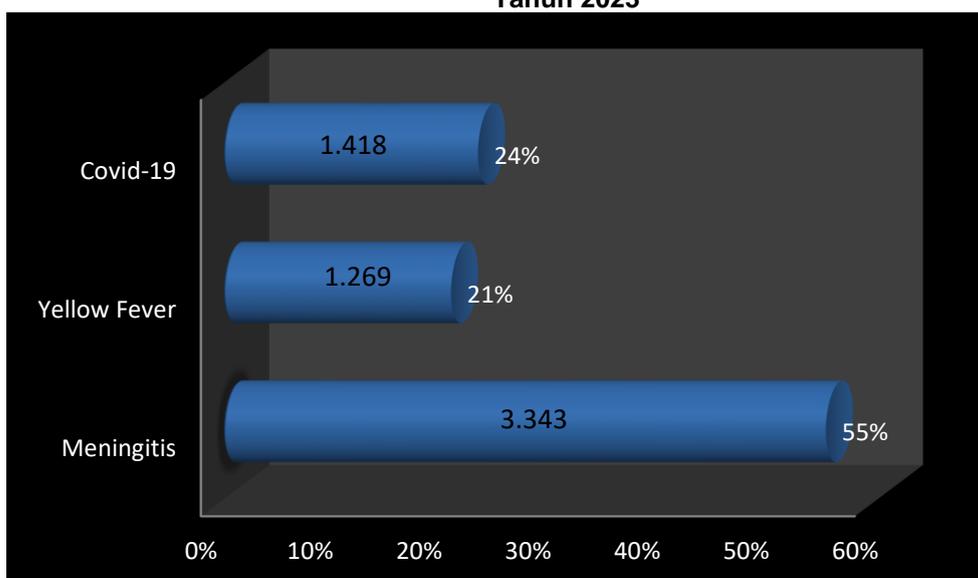
Tabel III.D.1.2
Distribusi Pemberian Vaksinasi Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi Pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Bajoe	94	79	59	10	86	3	12	23	17	2	18	10	413
2	Kantor Induk	832	332	285	48	482	55	25	45	17	35	31	53	2240
3	Wilker Palopo	128	61	55	24	52	14	47	32	14	50	23	32	532
4	Wilker Parepare	137	99	127	35	223	45	26	103	27	25	10	13	870
5	Wilker Mamuju	62	20	12	4	15	2	0	15	8	1	0	0	139
6	Wilker Pelabuhan Makassar	265	283	294	219	99	52	129	188	34	69	145	59	1836
TOTAL		1518	874	832	340	957	171	239	406	117	182	227	167	6030

Sumber : Data Primer dan Primer, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.2 pemberian vaksinasi terbanyak terdapat di kantor induk, pemberian vaksinasinya terdiri dari vaksin Meningitis, Yellow Fever dan Covid-19, dimana pelayanan vaksinasi Covid-19 bukan hanya dilaksanakan di kantor induk saja tetapi juga dilaksanakan di Terminal Keberangkatan Bandara SHIAM Makassar, Pelabuhan Laut Makassar, Jamaah Haji saat Embarkasi serta adanya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, Kementerian Keuangan dan PT Pertamina - DPPU Hasanuddin.

Grafik III.D.1.3
Persentase dan Jumlah Pemberian Vaksinasi Berdasarkan Jenis Vaksin
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.D.1.3 pemberian vaksinasi terbanyak adalah vaksinasi Meningitis sebanyak 3.343 Orang (55%).

Tabel III.D.1.3
Distribusi Pemberian Vaksinasi Meningitis Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi Pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Bajoe	94	79	59	10	86	3	12	23	17	2	18	10	413
2	Kantor Induk	377	69	135	15	103	34	13	34	10	25	18	44	877
3	Wilker Palopo	116	61	41	20	35	4	35	15	4	19	4	18	372
4	Wilker Parepare	137	91	122	35	217	35	21	97	19	17	6	11	808
5	Wilker Mamuju	62	20	12	4	15	2	0	15	8	0	0	0	138
6	Wilker Pelabuhan Makassar	215	122	79	31	73	13	43	47	30	24	42	16	735
Total		1001	442	448	115	529	91	124	231	88	87	88	99	3343

Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.3, jumlah pemberian vaksin Meningitis selama tahun 2023 sebanyak 3.343 orang. Vaksinasi Meningitis tertinggi terdapat pada bulan Januari sebanyak 1.001 orang dan terendah di bulan oktober sebanyak 87 orang. Terjadi penurunan pemberian vaksinasi meningitis pada bulan february sampai bulan desember hal ini disebabkan karena semakin banyaknya pelaku perjalanan yang mengetahui tentang surat edaran dengan nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 yang berisi tentang pelaksanaan vaksinasi Meningitis bagi jamaah haji dan umrah. Dengan dikeluarkannya surat edaran ini sangat berpengaruh besar terhadap jumlah pemberian vaksinasi meningitis bagi jamaah umrah.

Tabel III.D.1.4
Distribusi Pemberian Vaksinasi Yellow Fever Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi Pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Kantor Induk	9	7	16	8	347	13	12	11	7	10	13	9	462
2	Wilker Palopo	12	0	14	4	17	10	12	17	10	31	19	14	160
3	Wilker Parepare	0	8	5	0	6	10	5	6	8	8	4	2	62
4	Wilker Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
5	Wilker Pelabuhan Makassar	26	0	43	28	26	39	86	141	4	45	103	43	584
Total		47	15	78	40	396	72	115	175	29	95	139	68	1269

Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.4, jumlah pemberian vaksin YF selama tahun 2023 sebanyak 1.269 orang. Jumlah vaksinasi YF tertinggi pada bulan Mei sebanyak 388 orang dan terendah pada bulan September sebanyak 29 orang.

Tabel III.D.1.5
Distribusi Pemberian Vaksinasi Covid-19 Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi Pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Kantor Induk	446	256	134	25	32	8	0	0	0	0	0	0	901
2	Wilker Pelabuhan Makassar	24	161	172	160	0	0	0	0	0	0	0	0	517
Total		470	417	306	185	32	8	0	0	0	0	0	0	1418

Sumber : Data Primer 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.5, jumlah pemberian vaksin Covid-19 selama tahun 2023 sebanyak 1.418 orang. Pelayanan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan di Kantor Induk, Terminal Keberangkatan Bandara SHIAM Makassar, Pelabuhan Laut Makassar, Jamaah Haji saat Embarkasi dan adanya beberapa kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Makassar, Pengadilan Tinggi Makassar, Kementerian Keuangan dan PT Pertamina - DPPU Hasanuddin.



Gambar III.D.1.1 Pemberian Vaksinasi

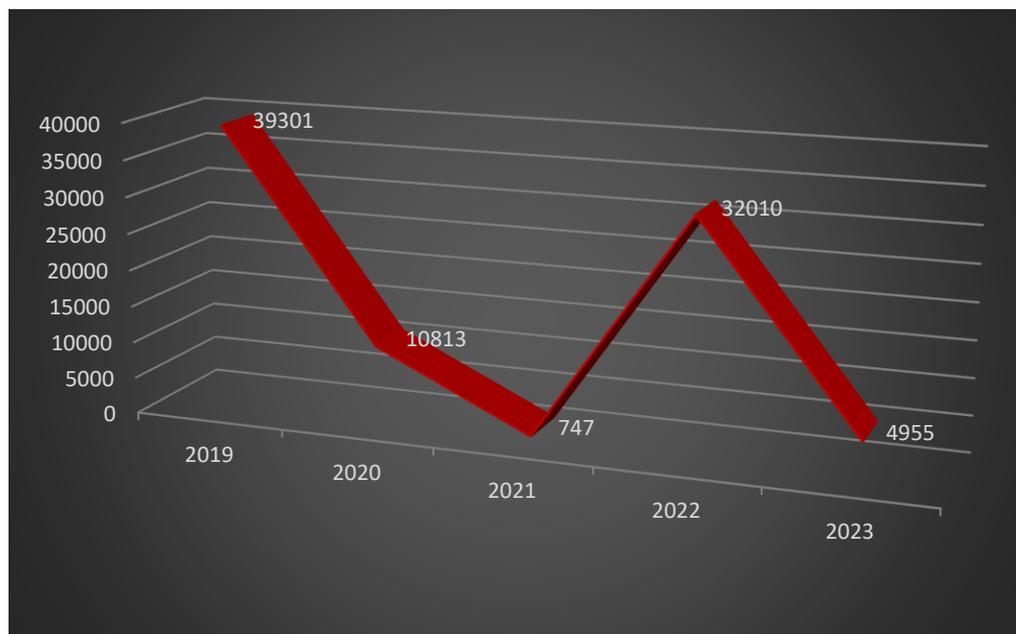
2) Penerbitan ICV

Sertifikat Vaksinasi Internasional adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa seseorang telah mendapatkan vaksinasi dan/atau profilaksis yang diperlukan untuk perjalanan internasional tertentu.

Setiap orang yang akan melakukan perjalanan internasional termasuk haji, dari dan ke negara terjangkit dan/atau endemis penyakit menular tertentu dan/atau atas permintaan negara tujuan diberikan vaksinasi tertentu dan diberikan sertifikat.

Gambaran jumlah penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik III.D.1.4
Jumlah Penerbitan ICV KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2019-2023

Berdasarkan grafik III.D.1.4 penerbitan ICV pada tahun 2023 mengalami penurunan sesuai dengan menurunnya pemberian vaksinasi. Jumlah penerbitan ICV tahun 2023 sebanyak 4.959 sertifikat.

Tabel III.D.1.6
Distribusi Penerbitan ICV Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi Pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Bajoe	94	79	59	10	86	3	12	23	17	2	18	10	413
2	Kantor Induk	387	73	147	24	460	46	25	45	18	36	32	51	1344
3	Wilker Palopo	128	61	55	25	51	14	47	30	14	50	23	32	530
4	Wilker Parepare	137	99	129	35	224	45	26	103	27	25	12	13	875
5	Wilker Mamuju	62	20	12	4	17	2	0	15	8	1	0	0	141
6	Wilker Pelabuhan Makassar	240	125	119	59	96	49	130	185	117	138	284	114	1656
Total		1048	457	521	157	934	159	240	401	201	252	369	220	4959

Sumber : Data Primer dan data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.6 jumlah penerbitan ICV di KKP Kelas I Makassar selama Tahun 2023 sebanyak 4.959 sertifikat. Jumlah penerbitan dokumen ICV

tertinggi pada bulan Januari sebanyak 1.048 sertifikat dan terendah pada bulan April sebanyak 157 orang.



Gambar III.D.1.2 Penerbitan ICV untuk calon jamaah umroh

c. Penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang, Tidak Laik Terbang dan Izin Angkut Orang Sakit

Grafik III.D.1.5
Distribusi Penerbitan Surat Keterangan Laik, Tidak Laik Terbang dan Izin Angkut Orang Sakit KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 - 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2019-2023

Berdasarkan grafik III.D.1.5 penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT) pada tahun 2023 sebanyak 5.671 dokumen, sedangkan Surat Keterangan Tidak Laik Terbang sebanyak 200 dokumen dan izin angkut orang sakit sebanyak 272 dokumen. SKLT ini diterbitkan bagi penumpang yang datang memeriksakan diri ke klinik Bandara sebelum terbang dan dinyatakan laik terbang, sedangkan SKTLT diterbitkan bagi penumpang yang dinyatakan tidak laik terbang setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter KKP. Surat izin angkut orang sakit diterbitkan bagi penumpang

yang sakit namun masih *transportable* (laik terbang dengan syarat fasilitas medis sesuai kondisi penyakitnya).

Tabel III.D.1.7
Distribusi Penerbitan SIAOS Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Awerange	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2	Wilker Bajoe	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6
3	Wilker Pelabuhan Laut Makassar	3	6	8	20	16	9	12	13	5	8	17	10	127
4	Wilker Parepare	5	5	9	7	11	4	10	2	3	3	8	7	74
5	Wilker Bandara SHIAM	5	5	3	1	2	6	10	2	7	3	5	4	53
6	Wilker Mamuju	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4
7	Wilker Bira	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
8	Pos Siwa	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	4
Total		14	20	21	28	30	20	32	21	16	16	31	23	272

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.7, jumlah penerbitan SIAOS selama tahun 2023 sebanyak 272 dokumen. Jumlah penerbitan SIAOS tertinggi pada bulan Juli sebanyak 32 dokumen dan terendah pada bulan Januari sebanyak 14 dokumen.

Tabel III.D.1.8
Distribusi Penerbitan SKLT Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Bandara SHIAM	497	401	422	406	430	377	512	477	569	527	513	451	5582
2	Wilker Mamuju	12	6	5	9	4	6	13	10	3	8	6	7	89
Total		509	407	427	415	434	383	525	487	572	535	519	458	5671

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

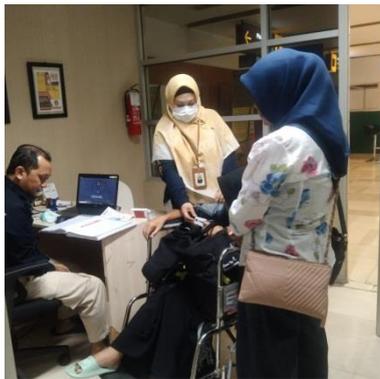
Berdasarkan tabel III.D.1.8, jumlah penerbitan SKLT selama tahun 2023 sebanyak 5671 dokumen. Jumlah penerbitan SKLT tertinggi pada bulan September sebanyak 572 dokumen dan terendah pada bulan Juni sebanyak 383 dokumen.

Tabel III.D.1.9
Distribusi Penerbitan SKTLT Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

NO	Lokasi pelayanan	BULAN												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Wilker Bandara SHIAM	16	7	15	9	15	18	18	18	23	18	23	19	199
2	Wilker Mamuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Total		16	7	15	9	15	18	18	18	23	18	24	19	200

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan tabel III.D.1.9, jumlah penerbitan SKTLT selama tahun 2023 sebanyak 200 dokumen. Jumlah penerbitan SKTLT tertinggi pada bulan November sebanyak 24 dokumen dan terendah pada bulan Februari sebanyak 7 dokumen.

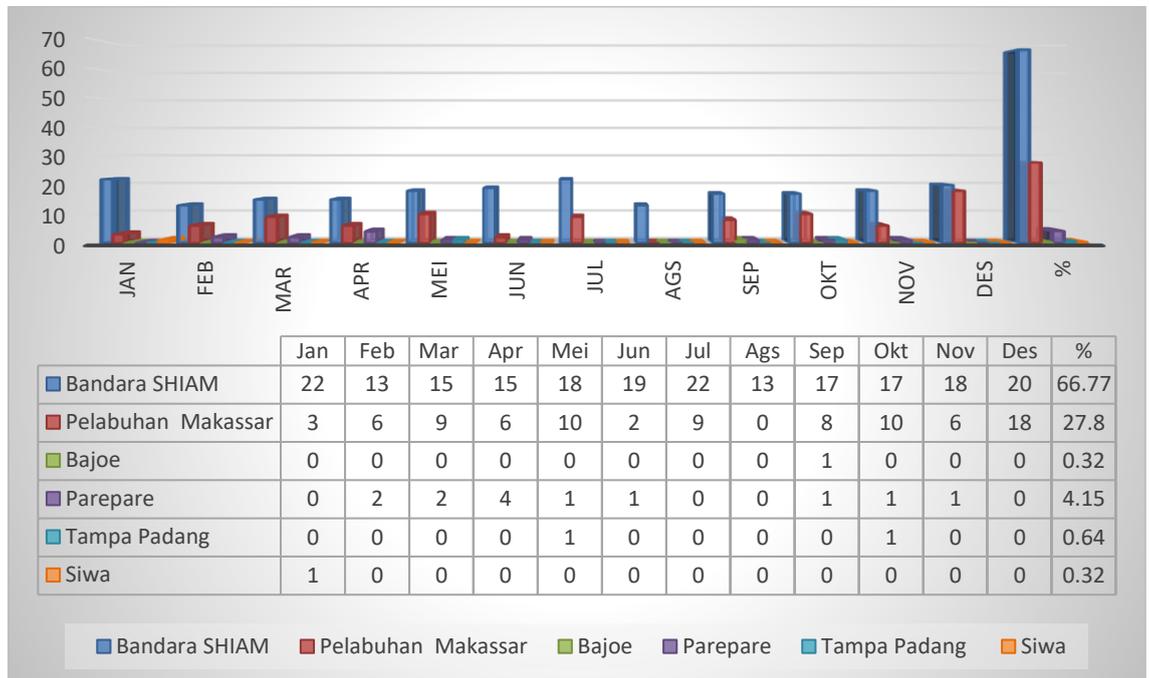


Gambar III.D.1.3 Pemeriksaan kesehatan penumpang yang dilakukan untuk menerbitkan dokumen kesehatan

d. Penggunaan Ambulans

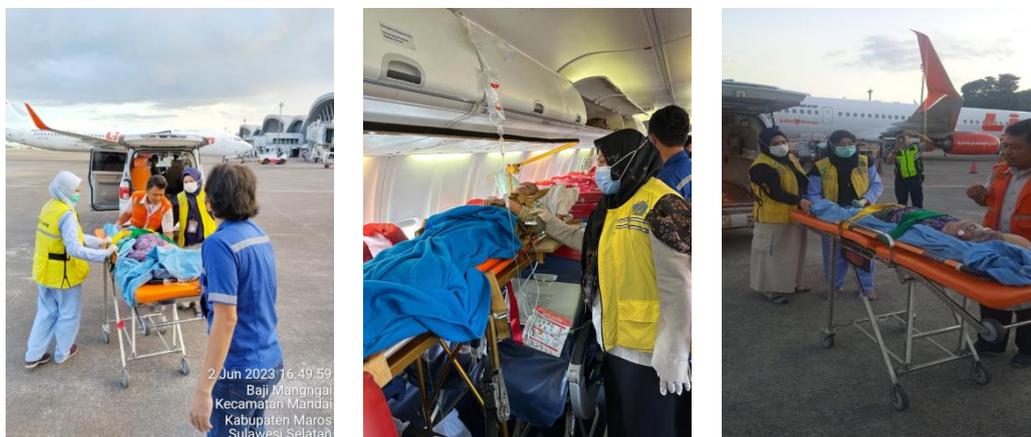
Penggunaan Ambulans ditujukan untuk kasus rujukan atau evakuasi pasien. Pasien rujukan yang menggunakan Ambulans sebagian besar berasal dari rujukan RS Kawasan Timur Indonesia dan rujukan pasien untuk kasus yang ditemukan oleh petugas medis yang bertugas di bandara/pelabuhan dalam wilayah kerja KKP Makassar.

Grafik III.D.1.6
Distribusi Penggunaan Ambulans Berdasarkan Bulan
di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan Grafik III.D.1.6, distribusi penggunaan ambulans terbanyak di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yaitu sebanyak 209 kali (66.77%) dan selanjutnya di Pelabuhan Makassar sebanyak 87 kali (27.8%). Hal ini disebabkan karena Makassar adalah pusat rujukan untuk kasus-kasus di Kawasan Timur Indonesia. Penggunaan ambulans untuk pasien rujukan terbanyak di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar disebabkan karena penggunaan transportasi udara membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk mencapai RS rujukan.



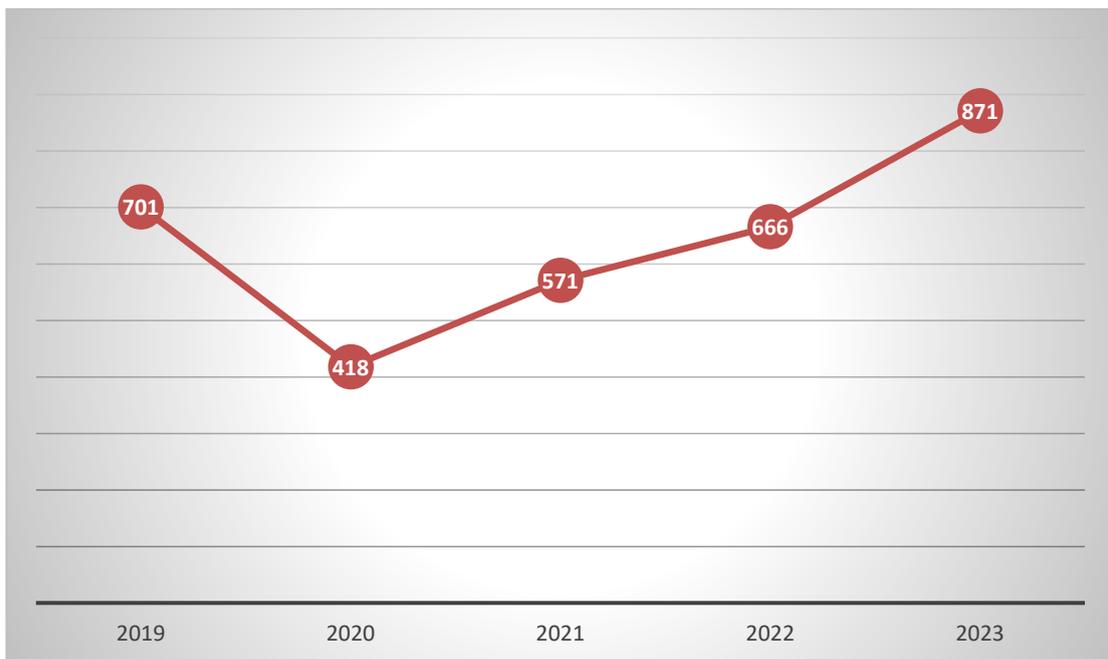
Gambar III.D.1.4 Evakuasi penumpang

e. Pemeriksaan/Penerbitan Dokumen Jenazah/ Abu Jenazah/ Kerangka

Setiap jenazah yang diangkut melalui bandara dan pelabuhan harus dilengkapi dengan Surat Izin Angkut Jenazah. Surat ini dikeluarkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dokumen jenazah.

Gambaran jumlah penerbitan surat izin angkut Jenazah / Abu Jenazah / Kerangka lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik III.52 :

Grafik III.D.1.7
Distribusi Pemeriksaan/Penerbitan Dokumen Jenazah/ Abu Jenazah/ Kerangka
KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2019-2023

Berdasarkan Grafik III.D.1.7, pemeriksaan/penerbitan dokumen jenazah/ abu jenazah/ kerangka pada tahun 2023 sebanyak 871 dokumen. Grafik ini memperlihatkan tren yang makin meningkat setiap tahun setelah terjadi penurunan pada tahun 2020. Sejak 2021 terjadi peningkatan jumlah pemeriksaan/penerbitan dokumen jenazah, setelah penurunan yang cukup signifikan pada awal masa pandemi Covid-19 (tahun 2020) semua jenazah khususnya Covid-19 tidak diberikan ijin angkut jenazah.

Tabel III.D.1.10
Distribusi Pemeriksaan/Penerbitan Dokumen Jenazah/ Abu Jenazah/ Kerangka
Berdasarkan Bulan di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

Lokasi Pelayanan	Bulan												Jumlah	%
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des		
Bandara Hasanuddin	62	54	69	43	60	57	69	65	62	94	63	65	763	87.6
Pelabuhan Makassar	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	4	0.5
Pelabuhan Bajoe	4	0	3	4	4	4	4	3	2	2	2	3	35	4
Pelabuhan Parepare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.1
Pelabuhan Bira	4	5	11	1	6	3	3	7	8	2	10	5	65	7.5
Pelabuhan Siwa	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0.3
Total	71	59	83	49	70	66	76	76	72	99	76	74	871	100

Sumber : Data Sinkarkes,2023

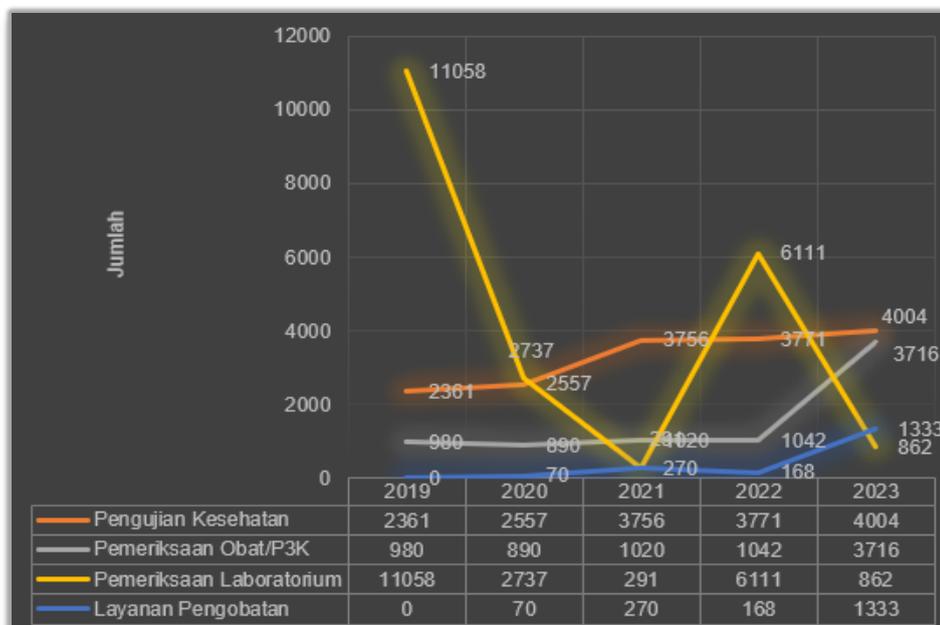
Berdasarkan Tabel III.D.1.10, pemeriksaan dokumen jenazah/ abu jenazah/ kerangka pada tahun 2023 terbanyak ada di Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yaitu sebanyak 783 dokumen (87.6 %), jumlah pemeriksaan dokumen jenazah/ abu jenazah/ kerangka pada tahun 2023 terbanyak pada bulan Oktober yaitu sebanyak 99 dokumen.

2. Sub Substansi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan

a. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang diberikan pada Sub Substansi Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan yaitu pemberian sertifikat pengujian Kesehatan, pemeriksaan obat/P3K, pemeriksaan laboratorium dan layanan pengobatan bagi awak kapal, taruna/calon taruna, pengguna jasa Pelabuhan dan bandara, karyawan instansi pemerintah, BUMN dan swasta yang ada di lingkungan Pelabuhan dan bandara. Layanan pengobatan tanpa biaya diberikan pada pekerja atau masyarakat Pelabuhan dan bandara. Adapun gambaran jumlah layanan kesehatan lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik III.D.2.1 Jumlah Pelayanan Kesehatan KKP Kelas I Makassar Tahun 2019 – 2023



Sumber : Data Primer dan Sinkarkes, 2019 – 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.1, pemeriksaan laboratorium selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan. Layanan pemeriksaan laboratorium adalah pemeriksaan plano tes bagi jamaah umrah dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) lainnya yang akan melakukan vaksinasi dan termasuk kategori wanita usia subur. Pemeriksaan laboratorium mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan penurunan kunjungan pelayanan vaksinasi.

Pemeriksaan laboratorium meningkat secara signifikan pada tahun 2022 dikarenakan pandemi Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perkembangan menuju arah yang lebih baik dan pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan sementara memasuki Wilayah Arab Saudi. Pada tahun 2023, pelayanan pemeriksaan laboratorium kembali mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan adanya

aturan yang tidak mewajibkan pelaku perjalanan luar negeri (umrah) untuk melakukan vaksinasi *meningitis meningococcus*.

1) Pengujian Kesehatan

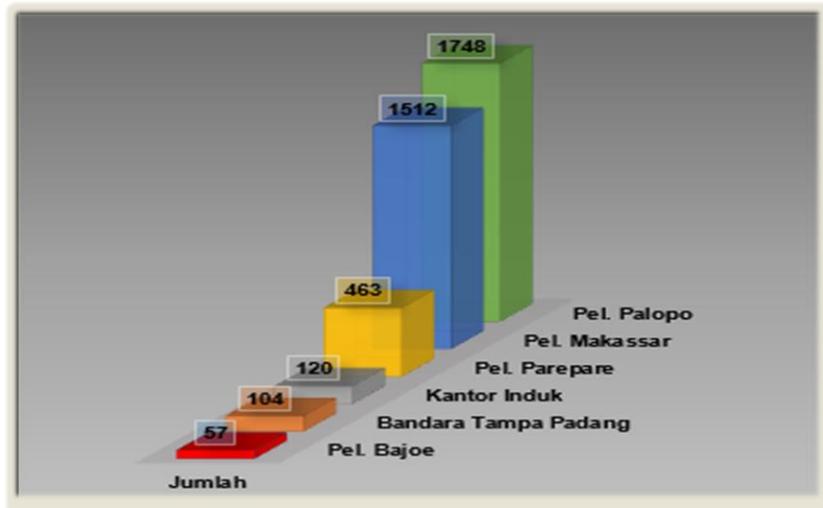
Pengujian kesehatan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan untuk mengetahui/mempertahankan derajat kesehatan tenaga kerja baik sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan, serta menilai kemungkinan adanya pengaruh dari pekerjaan sehingga sedini mungkin dapat dikendalikan dengan usaha-usaha pencegahan.



Gambar III.D.2.1 Pengujian Kesehatan di KKP Kelas I Makassar

Pengujian kesehatan telah terlaksana di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Wilker Pelabuhan Bajoe, Wilker Pelabuhan Makassar, Wilker Pelabuhan Palopo, Wilker Pelabuhan Parepare, Wilker Bandara Tamba Padang. Adapun jumlah pengujian kesehatan dapat dilihat pada grafik III.D.2.2 :

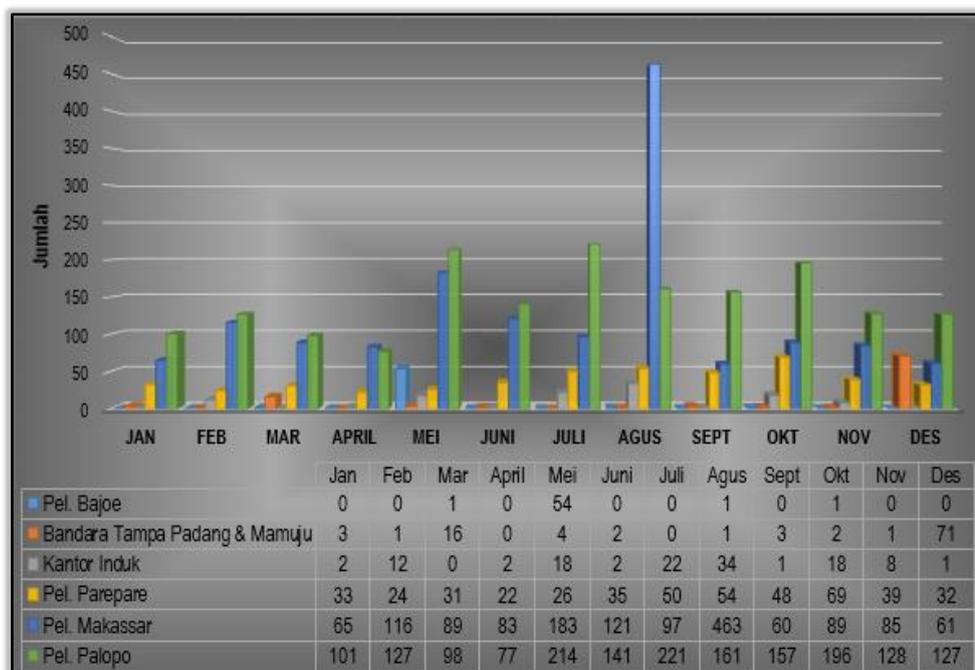
Grafik III.D.2.2
Distribusi Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
Berdasarkan Wilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik Grafik III.D.2.2, penerbitan sertifikat pengujian kesehatan tahun 2023 sebanyak 4004 sertifikat. Penerbitan terbanyak oleh Wilker Pelabuhan Palopo yakni sebesar 1748 sertifikat (43,7%). Penerbitan paling sedikit diterbitkan oleh Wilker Pelabuhan Bajoe yaitu sebesar 57 sertifikat (1,4%). Tingginya penerbitan di Wilker Palopo dikarenakan pengunjung berasal dari awak kapal dan taruna sebagai salah satu syarat pembuatan buku pelaut.

Grafik III.D.2.3
Distribusi Penerbitan Sertifikat Pengujian Kesehatan
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.3, menunjukkan bahwa penerbitan pengujian Kesehatan tertinggi dilakukan oleh Wilker Pelabuhan Makassar pada bulan Agustus sebanyak 463 sertifikat (11,6%) sedangkan terendah dilakukan oleh Wilker Pelabuhan Bajoe pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, September, November dan Wilker Bandara Tamba padang pada bulan Maret sebanyak masing-masing nihil sertifikat (0%). Tingginya penerbitan sertifikat pengujian pada bulan Agustus di Wilker Pelabuhan Makassar dikarenakan adanya perpanjangan kontrak kinerja oleh buruh TKBM Makassar. Dimana salah satu syarat perpanjangan kontrak adalah sertifikat/surat keterangan berbadan sehat.

2) Penerbitan Sertifikat P3K Alat Angkut

Kecelakaan dan cedera dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, baik di kapal, di rumah, di tempat kerja, saat mengemudi, olahraga atau aktivitas lainnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu bersiap menghadapi keadaan darurat medis tersebut. Persediaan kotak obat P3K sangat membantu menangani jika terjadi keadaan darurat medis secepat mungkin. Dalam keadaan darurat, penundaan meski hanya satu menit dapat memicu efek negatif jangka panjang yang lebih membahayakan.



Gambar III.D.2.2 Penerbitan Sertifikat P3K Alat Angkut oleh KKP Kelas I Makassar

Salah satu tugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan yaitu melakukan pengawasan/pemeriksaan kotak obat P3K dan alat kesehatan pada kapal dan pesawat untuk mengetahui jenis obat-obatan dan masa *expired date*. *Output* dari kegiatan tersebut adalah penerbitan sertifikat P3K. Pada tahun 2023, kegiatan ini dilakukan pada 14 Wilker Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar.

Tabel III.D.2.1
Penerbitan Sertifikat P3K di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2019-2023

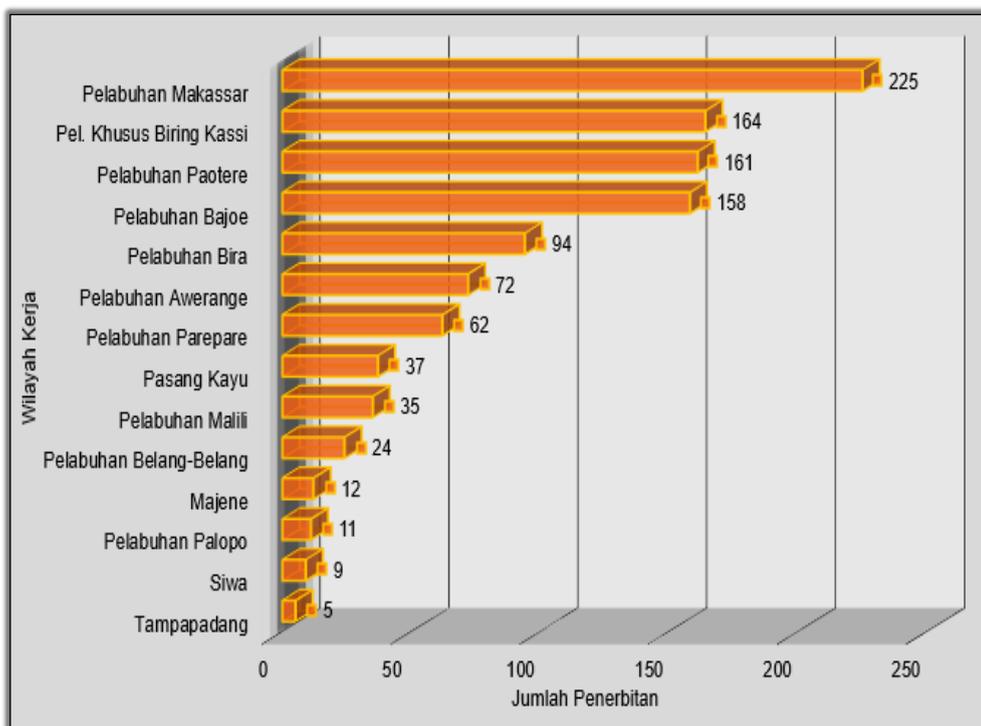
Wilker	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pelabuhan Makassar	220	184	154	160	225
Pelabuhan Parepare	48	85	30	33	62
Pelabuhan Awerange	62	42	64	104	72
Pelabuhan Biringkassi	208	187	184	178	164
Pelabuhan Bajoe	130	98	151	181	158
Pelabuhan Palopo	19	11	14	10	11
Pelabuhan Malili	21	37	41	44	35
Pelabuhan Bira	88	64	62	91	94
Pelabuhan Belang-Belang	26	35	34	37	24
Bandara Tampa Padang	1	3	113	30	5
Pelabuhan Paotere	157	144	155	168	161
Pelabuhan Siwa	0	0	18	6	9
Pelabuhan Pasang Kayu	0	0	0	0	37
Pelabuhan Majene	0	0	0	0	12
Jumlah	980	890	1020	1042	1069

Sumber : Data Sinkarkes, 2019 - 2023

Berdasarkan tabel III.D.2.1, penerbitan sertifikat P3K dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan jumlah kapal yang berlabuh/sandar menurun akibat dari pandemi Covid-19.

Pada tahun 2021, penerbitan sertifikat P3K di Wilker Tampa Padang mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya operasi penertiban dokumen kapal oleh Polair terhadap kapal nelayan yang mengharuskan seluruh dokumen kapal dilengkapi dan salah satunya adalah sertifikat P3K. Namun pada tahun 2022 dan 2023, kembali mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan operasi penertiban dokumen kapal oleh Polair tidak berjalan lagi.

Grafik III.D.2.4
Distribusi Penerbitan Sertifikat P3K Alat Angkut
Berdasarkan Wilker KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Sinkarkes, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.4, penerbitan sertifikat P3K tahun 2023 sebanyak 1069 sertifikat. Dimana Wilker dengan penerbitan sertifikat P3K terbanyak adalah Pelabuhan Makassar yaitu 225 sertifikat (21,0%) sedangkan Wilker dengan jumlah penerbitan sertifikat paling sedikit adalah Wilker Tampa padang, yaitu jumlah 5 sertifikat (0,5%). Hal ini disebabkan hanya 3 kapal yang aktif beroperasi dari hari ke hari. Selain itu, Pelabuhan Majene dan Pelabuhan Silopo sudah terpisah dari Wilker Tampa padang.

Tabel III.D.2.2
Penerbitan Sertifikat P3K di KKP Kelas I Makassar
Tahun 2023

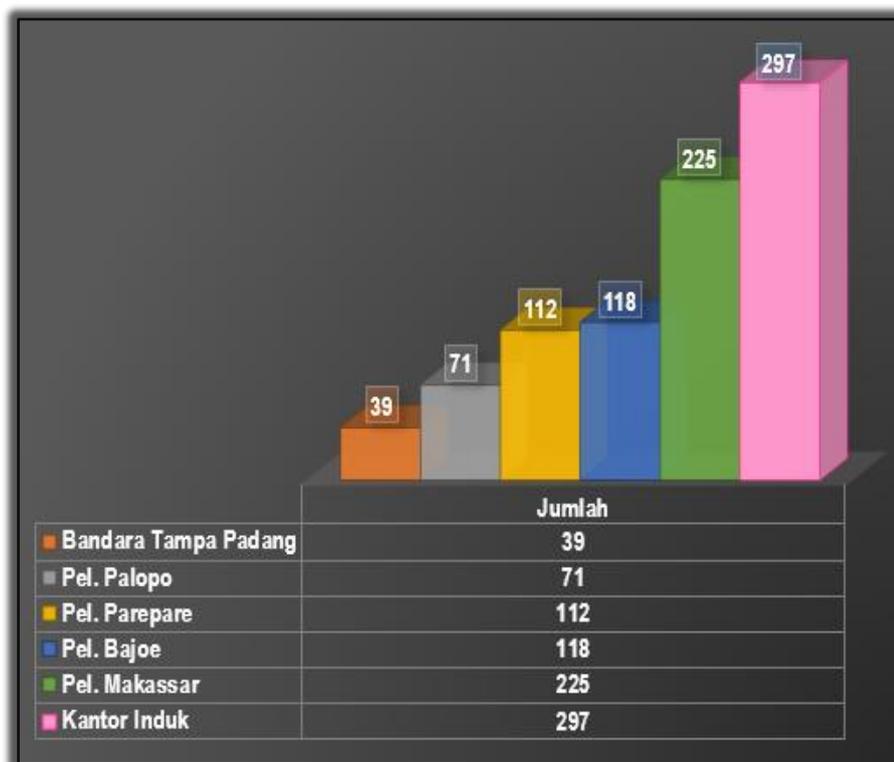
Wilayah Kerja	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Awerange	3	3	3	6	6	11	4	8	12	9	3	4	72
Pelabuhan Bajoe Bone	8	8	19	17	42	5	8	9	14	7	11	10	158
Pelabuhan Belang Belang & Mamuju	2	1	3	3	4	2	0	0	4	2	1	2	24
Pelabuhan Biringkassi	9	15	18	10	17	10	10	15	14	15	17	14	164
Pelabuhan Makassar	17	27	14	21	15	21	16	20	19	16	21	18	225
Pelabuhan Malili	2	0	5	7	1	2	3	2	2	7	2	2	35

Wilayah Kerja	Bulan												Jumlah
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Pelabuhan Palopo	0	1	2	0	0	0	1	1	0	4	1	1	11
Pelabuhan Parepare	2	2	2	3	5	1	1	0	3	10	16	17	62
Pelabuhan Bira Bulukumba	10	12	6	1	7	2	5	9	16	7	11	8	94
Pelabuhan Majene	0	0	2	0	3	2	1	1	2	0	1	0	12
Pelabuhan Mamuju	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5
Pelabuhan Paotere	17	15	14	12	21	12	9	4	14	12	15	16	161
Pelabuhan Pasangkayu	1	2	3	1	2	2	0	6	3	3	9	5	37
Pelabuhan Siwa	2	0	1	0	0	0	2	2	1	0	0	1	9
Jumlah	73	87	93	82	124	71	60	77	104	92	108	98	1069

Sumber : Data Sinkarkes, 2023

3) Pemeriksaan Laboratorium

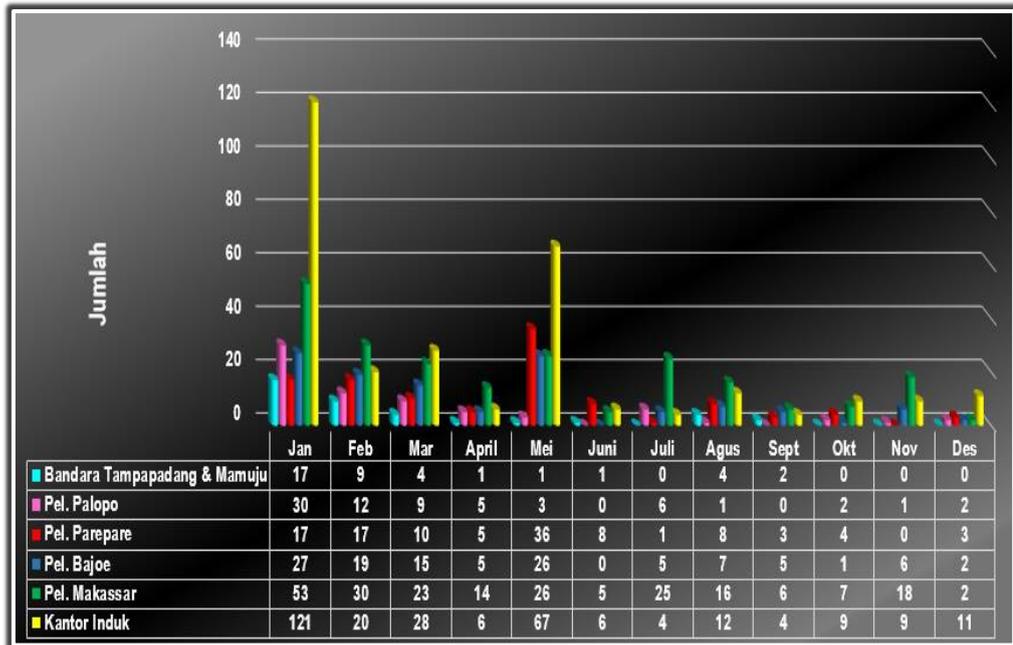
Grafik III.D.2.5
Distribusi Pemeriksaan Laboratorium (Plano tes)
KKP Kelas I Makassar Berdasarkan Wilker Tahun 2023



Sumber : Data Simkespel, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.5, layanan pemeriksaan laboratorium tahun 2023 sebanyak 862 orang. Pemeriksaan laboratorium terbanyak di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar, yaitu sebanyak 297 orang (33,5%) sedangkan terendah di Wilker Bandara Tanpa Padang, yaitu sebanyak 39 orang (4,5%).

Grafik III.D.2.6
Distribusi Pemeriksaan Laboratorium (Plano tes)
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.6, menunjukkan bahwa pelayanan pemeriksaan laboratorium tertinggi dilakukan oleh Kantor Induk pada bulan Januari yakni 121 orang (14,0%) sedangkan terendah dilakukan oleh Wilker Bandara Tamba padang (bulan Juli, Oktober, November dan Desember), Wilker Pelabuhan Palopo (bulan Juni dan Sempember), Wilker Pelabuhan Bajoe (bulan Juni) dan Wilker Pelabuhan Parepare (bulan November) yakni masing-masing nihil pemeriksaan (0%). Peningkatan maupun penurunan layanan pemeriksaan laboratorium sejalan dengan jumlah vaksinasi.



Gambar III.D.2.3 Pelayanan Laboratorium di KKP Kelas I Makassar

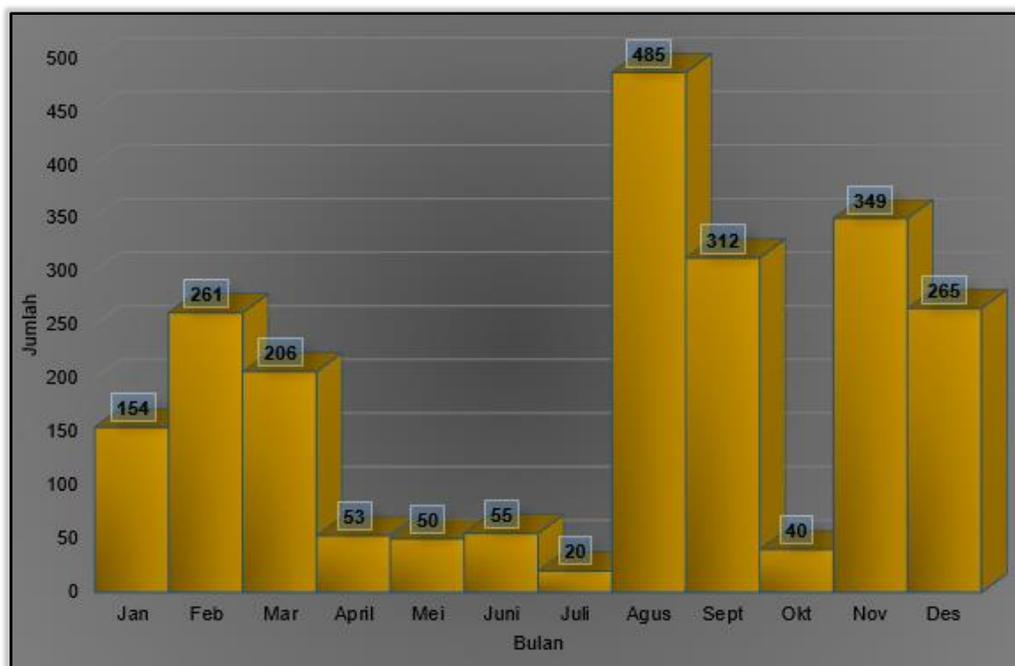
b. Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV-AIDS (*VCT Mobile*)

VCT Mobile (Voluntary Counseling and Testing) adalah kegiatan yang dilakukan di luar fasilitas layanan kesehatan. Dimana kegiatan ini terlaksana melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor di Wilker KKP Kelas I Makassar. Kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV-AIDS (*VCT Mobile*) dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sosialisasi dan edukasi penyakit HIV-AIDS pada penyedia dan pengguna jasa di Wilker KKP Kelas I Makassar
- 2) Pelaksanaan *screening* meliputi pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik), anamnesa dan pemeriksaan labotarorium dengan tes antibodi menggunakan strategi III, yakni pemeriksaan dengan menggunakan 3 jenis *rapid diagnostic test antibodi* yang berbeda sensitivitas dan spesifitasnya.

Pada tahun 2023, *VCT Mobile* dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya Pelabuhan Makassar, *New Port* Makassar, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bira, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Bajoe, Pelabuhan Siwa, Pelabuhan Paotere, Kantor Induk, Basarnas, Pengendapan Taxi Bandara dan Sekretariat TKBM. Adapun jumlah pemeriksaan *VCT Mobile* dapat dilihat pada tabel berikut :

Grafik III.D.2.7
Disribusi Pelaksanaan *VCT Mobile*
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

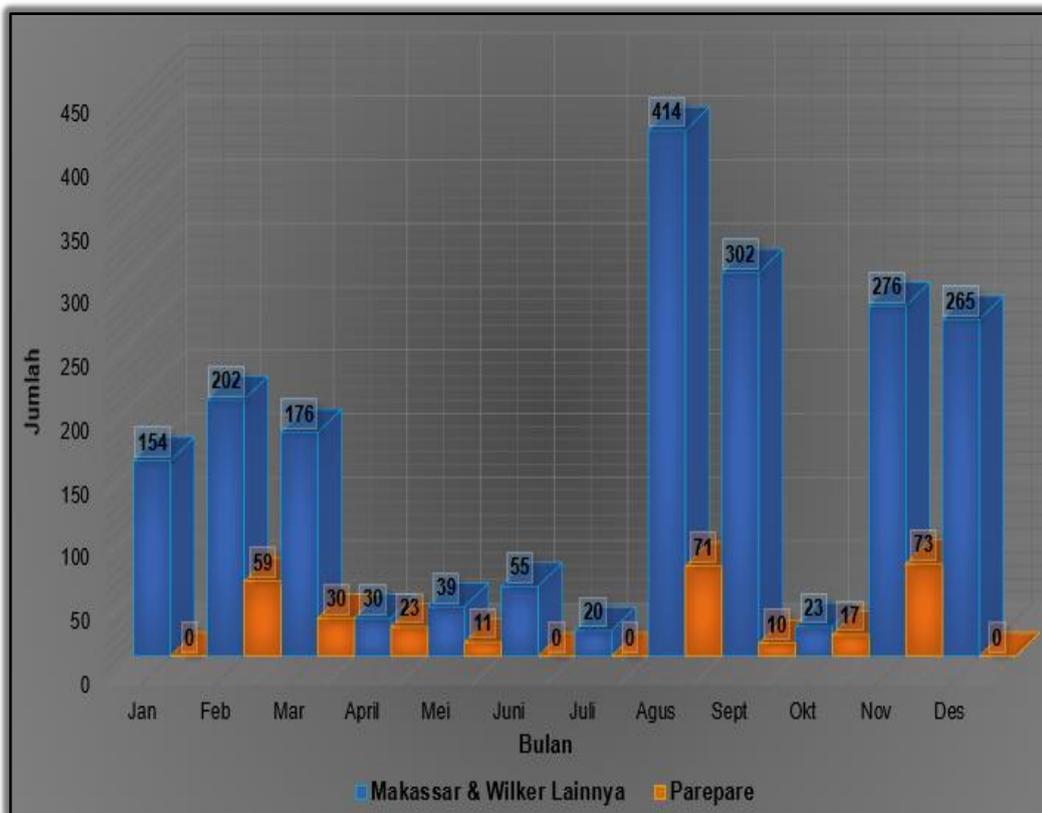


Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.7, pelaksanaan *VCT Mobile* di KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 2250 orang. *VCT Mobile* tertinggi pada bulan Agustus yaitu 485 orang (21,6%) sedangkan terendah pada bulan Juli sebanyak 20 orang (0,9%).

Pelaporan capaian *VCT Mobile* menggunakan aplikasi Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA). Untuk KKP Kelas I Makassar, pelaporan dilakukan pada dua wilayah yaitu Pelabuhan Parepare dan Pelabuhan Makassar. Pelabuhan Makassar meliputi seluruh Wilker kecuali Pelabuhan Parepare. Adapun cakupan pelaksanaan *VCT Mobile* berdasarkan penggunaan aplikasi SIHA dapat dilihat pada grafik berikut ini :

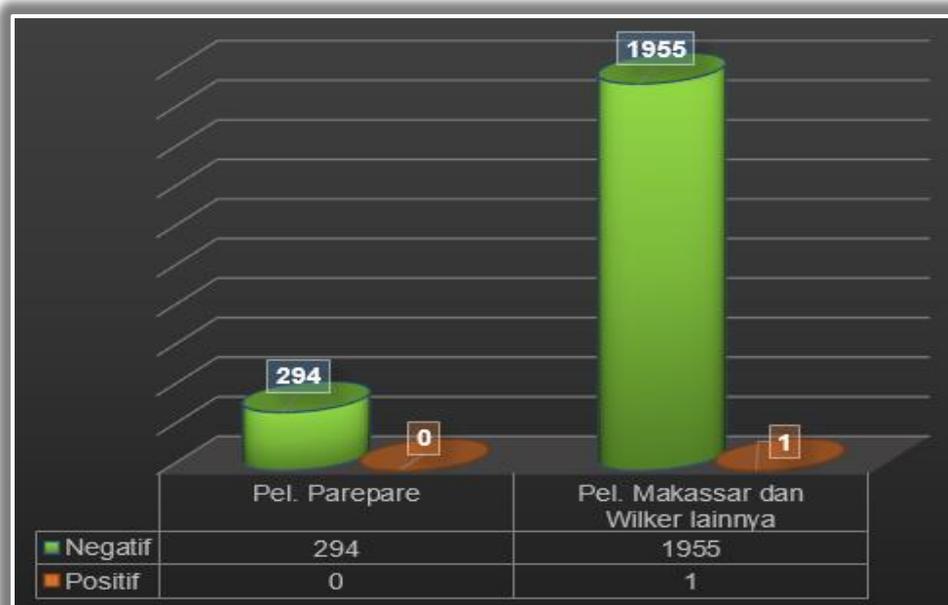
Grafik III.D.2.8
Cakupan Pelaksanaan *VCT Mobile*
Berdasarkan Penggunaan Aplikasi SIHA



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.8, menunjukkan bahwa pelaporan dengan penggunaan aplikasi SIHA tertinggi dilakukan oleh Wilayah Pelabuhan Makassar pada bulan Agustus sebanyak 414 hasil pemeriksaan (18,4%) sedangkan terendah dilakukan oleh Wilayah Pelabuhan Parepare pada bulan Januari, Juni, Juli, dan Desember yakni masing-masing nihi hasil pemeriksaan (0%).

Grafik III.D.2.9
Jumlah Hasil Pemeriksaan VCT Mobile
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.9, jumlah hasil pemeriksaan *VCT Mobile* KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 2250 orang dengan rincian hasil non reaktif sebanyak 294 orang (13,07%) dari *screening* Pelabuhan Parepare dan tidak ditemukan hasil pemeriksaan HIV reaktif sedangkan Pelabuhan Makassar dan Wilker lainnya telah dilakukan *screening* sebanyak 1956 orang dengan rincian hasil non reaktif sebanyak 1955 orang (86,89%) dan hasil reaktif sebanyak 1 orang (0,04%).



Gambar III.D.2.4 Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV-AIDS
(VCT Mobile) oleh KKP Kelas I Makassar

c. Layanan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB)

Tingginya angka kesakitan dan kematian Tuberkulosis (TB) tentunya menjadi tantangan dalam pembangunan di Indonesia. Pemerintah melalui berbagai instansi telah melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian untuk mewujudkan eliminasi TB 2030. Peran KKP Kelas I Makassar dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis adalah membantu penemuan kasus dengan melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi dan *screening*/deteksi dini pada pengguna dan penyedia jasa di Wilker pelabuhan dan bandara.

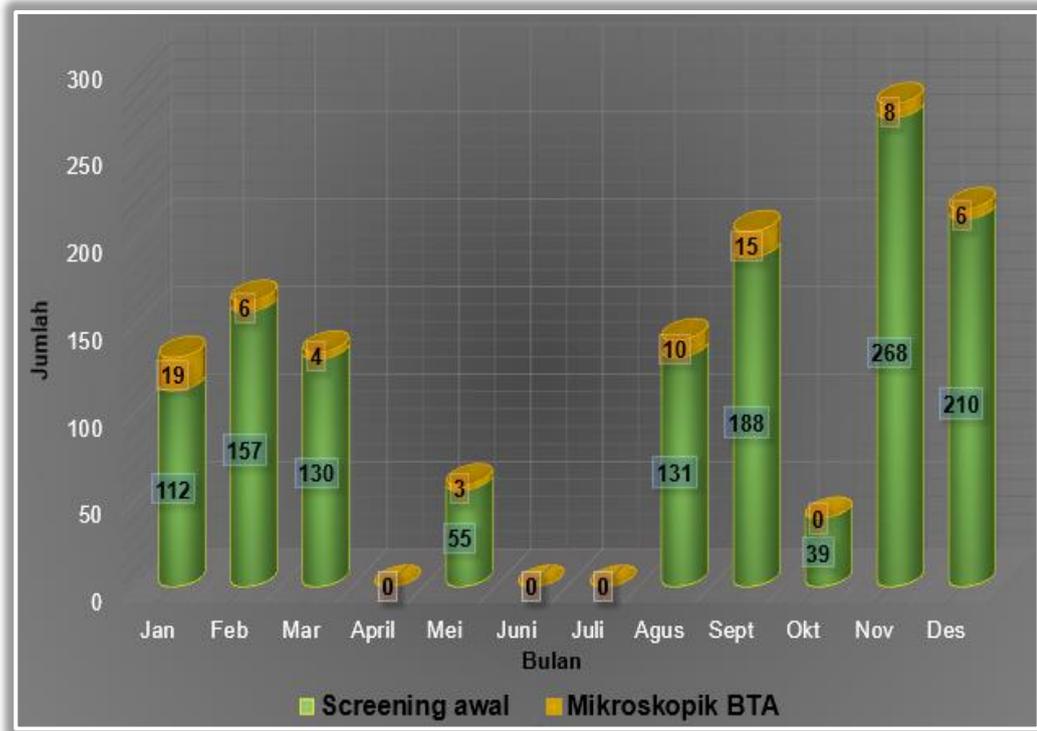
Kegiatan *screening*/deteksi dini ini meliputi penyuluhan penyakit tuberkulosis, pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan fisik), anamnesa riwayat penyakit, pemeriksaan laboratorium bagi peserta yang memiliki gejala atau faktor risiko penyakit TB dan pencatatan pelaporan. Pemeriksaan laboratorium dilakukan dengan pengambilan sampel sputum sewaktu yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopik BTA (Basil Tahan Asam) metode pewarnaan Zhiel Neelsen.



Gambar III.D.2.5 Layanan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB) oleh KKP Kelas I Makassar

Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa lokasi, diantaranya Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Palopo, Pelabuhan Parepare, Pelabuhan Bajoe, *New Port* Makassar, Pelabuhan Mamuju, Sekretariat TKBM Makassar, Kantor Induk, Pengendapan Taksi Bandara, dan Basarnas. Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat pada grafik berikut :

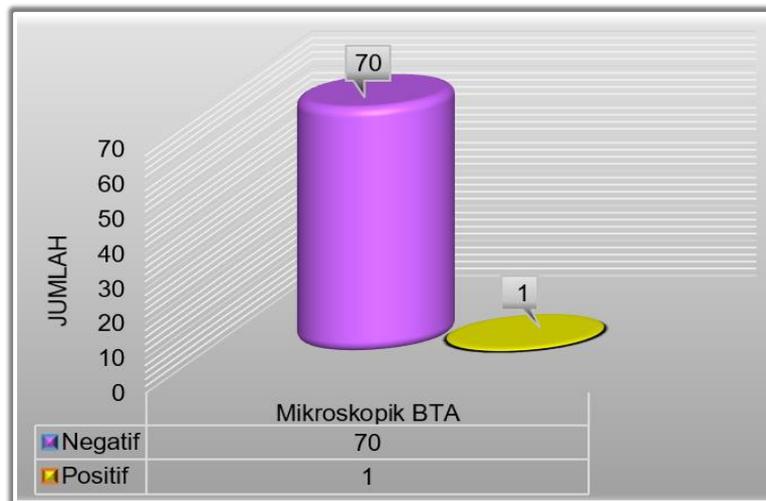
Grafik III.D.2.10
Distribusi Pelaksanaan Deteksi Dini TB
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.10, deteksi dini TB di tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1290 orang. Dimana deteksi dini tertinggi dilakukan pada bulan November yakni sebanyak 268 orang (20,8%) sedangkan terendah pada bulan Juni dan Juli yakni nihil (0%). Capaian deteksi dini pada bulan Juni dan Juli yang nihil dikarenakan adanya kegiatan Embarkasi dan Debarkasi Haji Makassar Tahun 2023 M/1445 H.

Grafik III.D.2.11
Jumlah Hasil Pemeriksaan Mikroskopik BTA Deteksi Dini TB
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.11, pemeriksaan mikroskopik BTA deteksi dini TB di KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 71 sampel. Peserta yang dilakukan pemeriksaan sputum adalah yang memiliki gejala klinis dan keluhan mendukung. Adapun rincian pemeriksaan mikroskopik BTA yaitu hasil negatif sebanyak 70 sampel (98,6%) dan hasil positif sebanyak 1 sampel (1,4%).

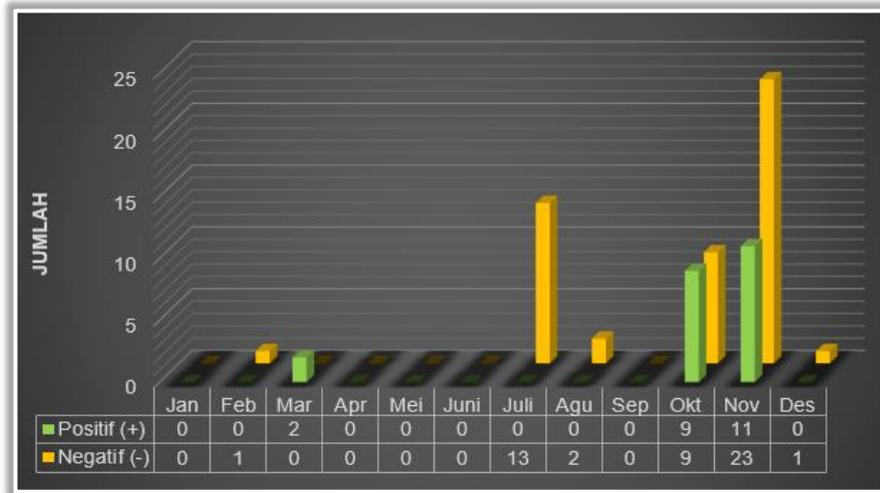
d. Screening Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan

Kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat dapat terjadi secara importasi yaitu sumber kedaruratan berasal dari luar wilayah dan epizentris yaitu sumber kedaruratan berasal dari dalam wilayah kerja. Kedua kondisi tersebut dapat timbul dalam situasi yang tidak dapat diprediksi sehingga kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus sedini mungkin akan mempengaruhi sejauh mana dampak kejadian kedaruratan dan penanganan pasca kejadian tersebut.

Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu cegah tangkal penyakit di pintu masuk negara, khususnya penyakit menular langsung (ILI/*Influenza Like Illness*, Covid-19 dan penyakit pernafasan lainnya). Penyakit pernafasan yang menular langsung dan disebabkan oleh virus memiliki gejala ringan sampai berat. Virus RNA ini sangat mudah dan cepat bermutasi serta berpotensi pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh KKP Kelas I Makassar adalah melakukan pengambilan sampel (swab) nasofaring bagi pelaku perjalanan yang berpotensi membawa penyakit potensial wabah untuk dilakukan pemeriksaan Antigen dan PCR Covid-19.

Kegiatan ini telah dilaksanakan di beberapa Wilker, diantaranya Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar, Pelabuhan Bira, Bandara Tampa Padang, dan Pelabuhan Siwa. Adapun cakupan pemeriksaan Covid-19 di KKP Kelas I Makassar tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

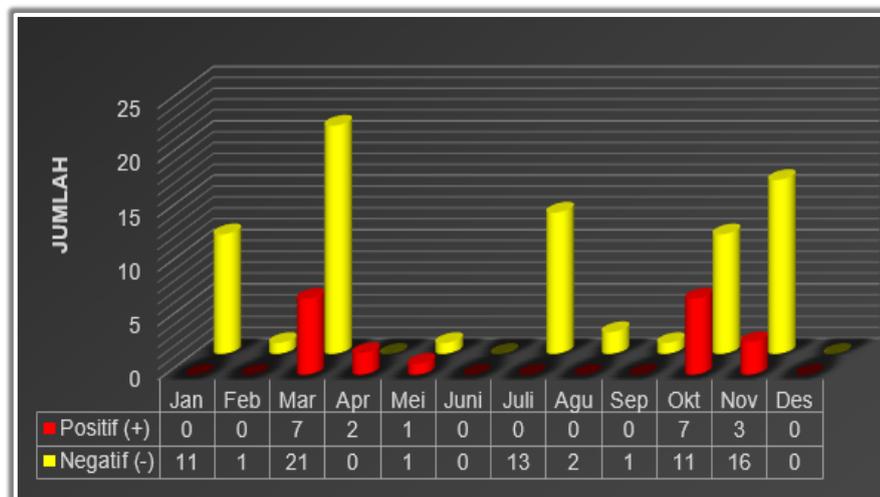
Grafik III.D.2.12
Jumlah Pengambilan Sampel (Swab nasofaring) Pemeriksaan PCR Covid-19
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.12, jumlah pengambilan sampel (swab nasofaring) untuk pemeriksaan PCR Covid-19 KKP Kelas I Makassar tahun 2023 sebanyak 71 orang. Pengambilan sampel PCR Covid-19 tertinggi pada bulan November sebanyak 34 orang (47,9%) dengan rincian hasil negatif sebanyak 23 orang (32,4%) dan hasil positif sebanyak 11 orang (15,5%). Tingginya pengambilan sampel (swab nasofaring) pada bulan November disebabkan adanya kasus kematian pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang berasal dari Arab Saudi (Jamaah Umrah), sehingga dilakukan *tracing* terhadap PPLN sebagai bentuk upaya penemuan kasus baru, dan memutus rantai penularan penyakit sedangkan pada bulan Januari, April, Mei, Juni dan September tidak ada pemeriksaan PCR Covid-19.

Grafik III.D.2.13
Jumlah Hasil Pemeriksaan Antigen Covid-19
KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.13, jumlah hasil pemeriksaan Antigen Covid-19 KKP Kelas I Makassar dari rentang bulan Januari sampai Desember 2023 sebanyak 97 orang. Jumlah pemeriksaan antigen Covid-19 tertinggi pada bulan Maret sebanyak 28 orang (28,9%) dengan rincian hasil negatif sebanyak 21 orang (21,6%) dan hasil positif sebanyak 7 orang (7,2%). Jumlah pemeriksaan Antigen Covid-19 terendah pada bulan Juni dan Desember yakni nihil.



Gambar III.D.2.6 Screening Kesehatan Bagi Pelaku Perjalanan

e. Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59

Hari Kesehatan Nasional (HKN) pertama kali diperingati pada 12 November 1964 untuk merayakan keberhasilan memberantas wabah malaria. Tahun 2023, Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-59 diperingati dengan mengusung tema “Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju”. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar sebagai salah satu UPT Pusat Kementerian Kesehatan ikut berpartisipasi dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis ke masyarakat pada tanggal 1 dan 9 November 2023.

Tanggal 1 November 2023, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar yang bertempat di Kantor Induk mengadakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Pemeriksaan Kesehatan untuk deteksi dini penyakit Tuberkulosis dilakukan oleh tenaga Kesehatan Kantor Kesehatan Pelabuhan, sementara kegiatan donor darah dilaksanakan dengan bekerjasama UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 08.00 hingga pukul 13.15 berhasil melakukan skrining terhadap 103 peserta donor dimana 75 peserta dapat mendonorkan darahnya sedangkan 28 peserta tidak dapat

mendonorkan darah karena dinyatakan belum memenuhi syarat. Untuk kegiatan skrining penyakit tuberkulosa tidak ditemukan peserta yang terindikasi untuk dilakukan pemeriksaan mikroskopis TB.

Peserta donor darah yang terlibat dalam kegiatan hari ini selain pegawai KKP Kelas I Makassar, juga berasal dari Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Angkasa Pura I, Basarnas Makassar, KPPBC TMPB, Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC), BMKG Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Asosiasi Taxi Bandara SHIAM, PT. Gapura Airport Services, PT. Prathita Titian Nusantara dan Polsek Bandara.



Gambar III.D.2.7 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59 Di Kantor Induk KKP Kelas I Makassar

Wilker Pelabuhan Laut Makassar pada hari Kamis, 9 November 2023 melaksanakan peringatan HKN ke-59 dengan menggandeng PT Pelindo IV (Persero) Makassar, Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, Unit Pelaksana Fungsional Balai Kesehatan Tradisional Makassar (BKTM) RSUD Tadjuddin Chalid. Kegiatan yang dilaksanakan berupa skrining Malaria sebanyak 75 orang, skrining penyakit tidak menular (PTM) sebanyak 102 orang, skrining TB sebanyak 102 orang, skrining HIV sebanyak 79 orang, pengobatan umum sebanyak 28 orang serta penyajian berbagai jenis jamu tradisional dari UPF (Unit Pelaksana Fungsional) BKTM sebanyak 102 layanan. Selain pemeriksaan gratis tersebut, juga digelar lomba Rangking I Bidang Kesehatan dan Lomba Yel Yel. Lomba Rangking I Bidang Kesehatan dijuarai oleh Balai Karantina Pertanian Wilayah Kerja Pelabuhan

Makassar, disusul Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Type Madya Pabean B Makassar dan Tenaga Kerja Bongkar Muat Makassar. Sementara juara lomba Yel Yel antar lintas sektor dimenangkan oleh PT Pelindo IV (Persero) Cabang Makassar.



Gambar III.D.2.8 Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-59 Di Wilker Pelabuhan Makassar

f. Tes Kebugaran Metode *Rockport* Pada ASN KKP Kelas I Makassar

Kebugaran merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari serta memberi dukungan kepada ASN untuk melaksanakan pekerjaan dalam jangka waktu relatif lama, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan.

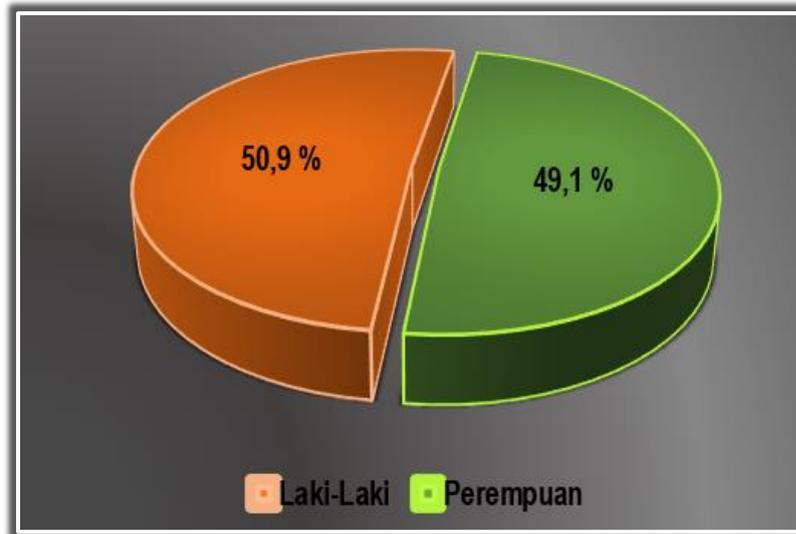
Tujuan pelaksanaan tes *Rockport* ini dilakukan adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jantung-paru atau *cardiorespirasi fitness* bagi ASN di lingkup KKP Kls I Makassar. Kesibukan aktivitas kantor yang begitu padat, membuat para ASN di lingkup KKP Kelas I Makassar kadang lalai untuk berolahraga atau beraktivitas fisik, sehingga mempengaruhi derajat kesehatan maupun kebugaran pekerja. Selain itu kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu faktor risiko pemicu penyakit tidak menular yang pada beberapa dekade telah mengalami transisi epidemiologi yakni meningkatnya penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Tujuan selanjutnya dilakukan tes *Rockport* adalah mengajak kepada para ASN untuk tetap aktif dan menghindari segala kebiasaan buruk sehingga bisa terhindar dari penyakit tidak menular, dengan demikian bisa mewujudkan ASN yang produktif dalam bekerja.



Gambar III.D.2.9 Tes Kebugaran Metode *Rockport* Pada ASN KKP Kelas I Makassar

Kegiatan pengukuran *Rockport* rutin dilakukan tiap tahun dan pelaksanaannya bersamaan dengan momentum perayaan bulan K3 Nasional yakni 12 Januari-12 Februari 2023, serta hari Karantina Kesehatan tanggal 12 Januari 2023. Tes Kebugaran Jasmani dilakukan dengan metode *Rockport* yaitu lari kecil sejauh 1.6 kilometer, metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan antara lain mudah dilakukan, tidak memerlukan alat khusus, aman bagi orang dengan resiko penyakit, dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok serta dilakukan sesuai dengan kemampuan. Jumariah mengharapkan para ASN untuk saling mendukung, mempertahankan, atau memperbaiki kebugarannya dengan melakukan olahraga rutin atau aktivitas fisik selama 30 menit tiap hari. Unsur-unsur kebugaran jasmani terdapat lima komponen, yaitu: daya tahan kardiorespirasi atau jantung-paru, kekuatan otot, daya tahan otot, kelenturan dan komposisi tubuh. Dari bermacam-macam komponen kebugaran jasmani tersebut, kebugaran kardiorespirasi merupakan komponen yang paling utama dan dapat dikatakan sebagai modal pokok bagi kebugaran jasmani. Adapun hasil pengukuran kebugaran metode *rockport* dapat dilihat pada grafik berikut ini :

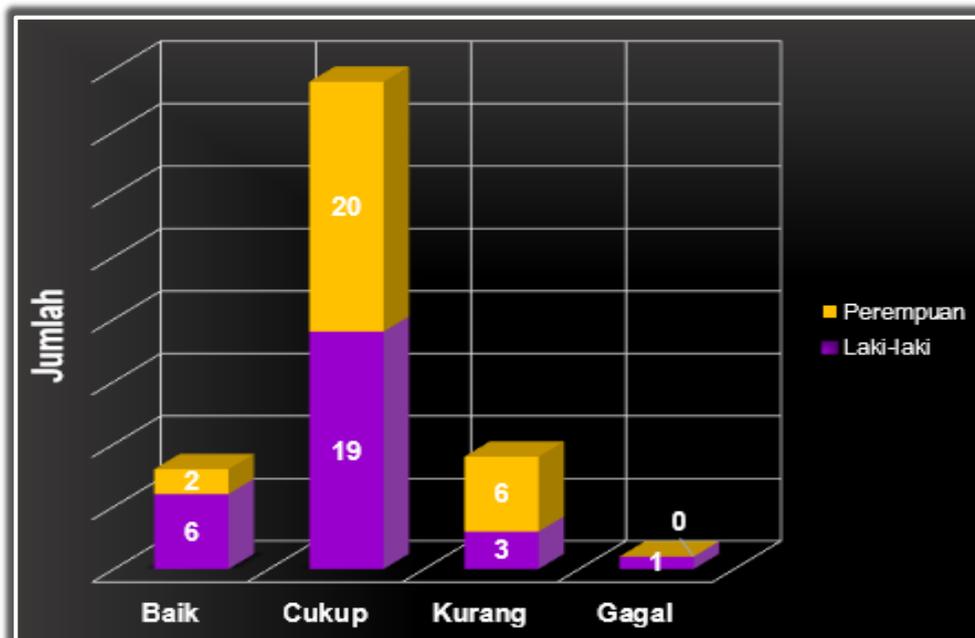
Grafik III.D.2.14
Distribusi Pengukuran Kebugaran Metode *Rockport*
ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.14, pengukuran kebugaran metode *rockport* pegawai KKP Kelas I Makassar tahun 2023 diikuti sebanyak 57 orang yang terdiri dari laki-laki 29 orang (50,9%) dan perempuan 28 orang (49,1%). Adapun gambaran hasil-hasil pemeriksaan MCU pegawai KKP Kelas I Makassar dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.D.2.15
Distribusi Pengukuran Kebugaran Metode *Rockport*
ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.15, pengukuran kebugaran metode *rockport* pegawai KKP Kelas I Makassar yang tergolong kategori baik sebanyak 8 orang (14,0%), terdiri dari laki-laki 6 orang (10,5%) dan perempuan 2 orang (3,5%). Untuk hasil kategori

cukup sebanyak 39 orang (68,4%), terdiri dari laki-laki 19 orang (33,3%) dan perempuan 20 orang (35,1%) sedangkan kategori kurang sebanyak 9 orang (15,8%), terdiri dari laki-laki 3 orang (5,3%) dan perempuan 6 orang (10,5%). Terdapat 1 orang (1,8%) yang gagal menyelesaikan pengukuran kebugaran.

Pada kesempatan pengukuran kebugaran dengan metode rokport tahun ini, Tim Pembimbing kesehatan Kerja memperkenalkan aplikasi SIPGAR. SIPGAR merupakan aplikasi pencatatan pemeriksaan kondisi fisik seseorang yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu menggunakan metode *Rockport*. Aplikasi ini dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sejak Januari 2021 dan bisa didownload pada *smartphone*. Dengan aplikasi SIPGAR bisa memudahkan ASN KKP Kls I Makassar untuk bisa menjaga kebugaran secara mandiri.

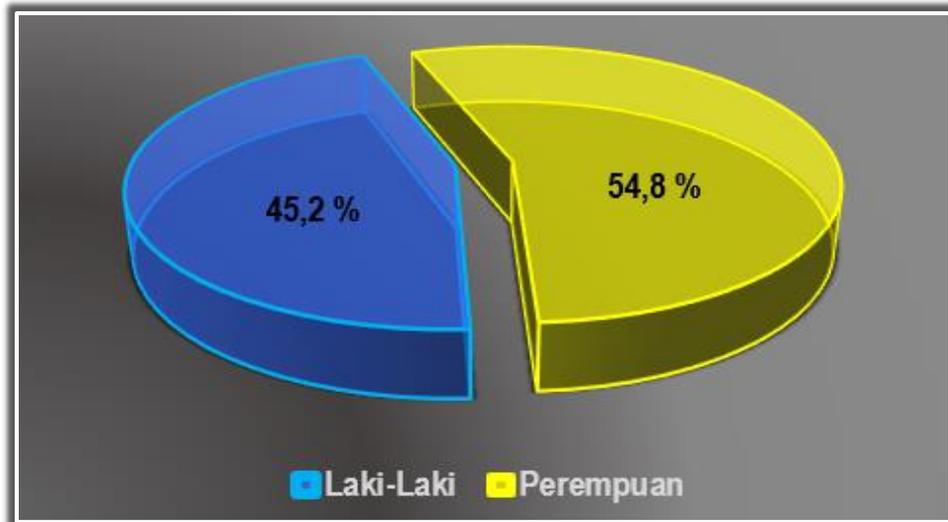
g. Pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) Pada ASN KKP Kelas I Makassar

Medical Check Up (MCU) bagi karyawan/pekerja adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di suatu lingkungan kerja. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini gangguan kesehatan yang mungkin dialami pegawai akibat faktor tertentu di lingkungan kerja.

MCU pegawai merupakan salah satu program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang perlu dilakukan oleh tiap instansi untuk mengetahui kondisi terkini dari kesehatan pegawai, sehingga instansi dapat menentukan kemampuan pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan yang dilihat dari sisi kesehatan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya penyakit atau kecelakaan yang mungkin ditimbulkan akibat bahaya yang muncul di lingkungan kerja. Dengan terjaminnya kesehatan pegawai yang didukung dengan lingkungan kerja yang aman, tidak hanya mempengaruhi kinerja dan produktivitas pegawai, namun juga mempengaruhi produktivitas dan reputasi organisasi secara keseluruhan.

Kegiatan MCU ini dilaksanakan pada tahun 2023 di Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan status kesehatan pegawai secara dini. Jenis pemeriksaan yang dilakukan dalam kegiatan MCU ini meliputi pemeriksaan fisik umum, pemeriksaan Laboratorium, elektrokardiogram (EKG) dan pemeriksaan tambahan bagi yang memiliki indikasi penyakit.

Grafik III.D.2.16
Distribusi Pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU)
ASN KKP Kelas I Makassar Tahun 2023

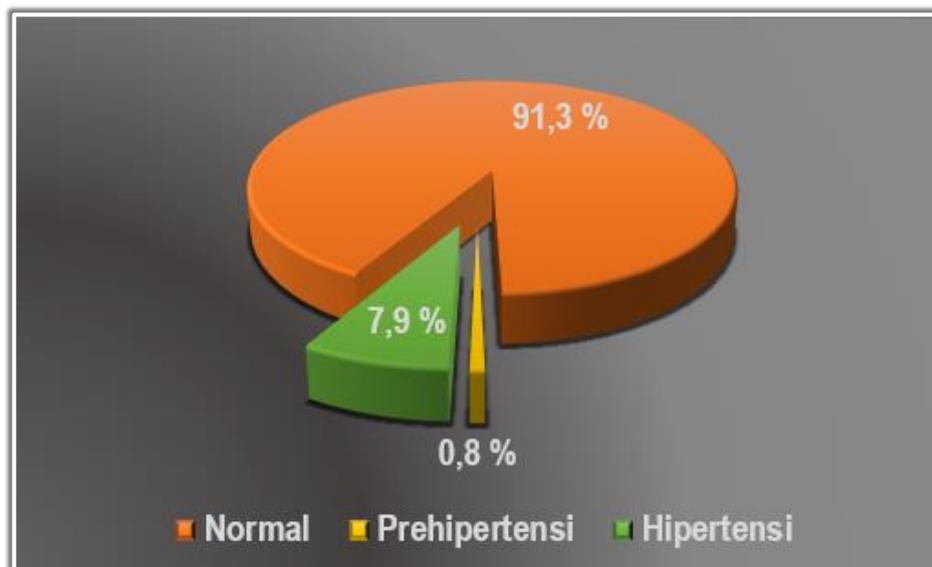


Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.16, distribusi pemeriksaan *Medical Check Up* (MCU) pegawai KKP Kelas I Makassar berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa pemeriksaan pada laki-laki sebanyak 57 orang (45,2%) dan perempuan sebanyak 69 orang (54,62%). Adapun gambaran hasil-hasil pemeriksaan MCU pegawai KKP Kelas I Makassar dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Pemeriksaan Fisik Umum

Grafik III.D.2.17
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tekanan Darah

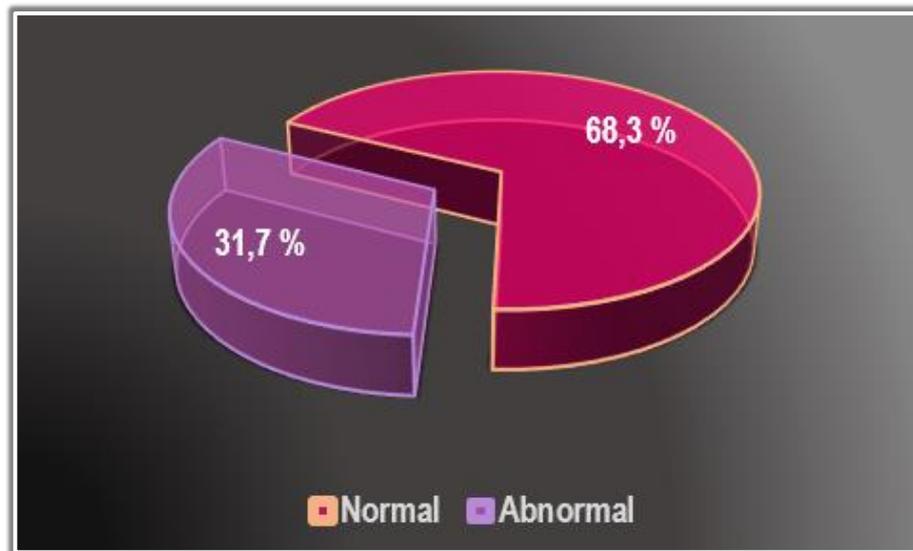


Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.17, distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar berdasarkan pemeriksaan tekanan darah yakni hasil dengan kategori normal

sebanyak 115 orang (91,3%), kategori prehipertensi sebanyak 1 orang (0,8%) dan kategori hipertensi sebanyak 10 orang (7,9%). Pembagian kategori tekanan darah di atas mengacu pada WHO dimana tekanan darah normal adalah $\leq 120/80$ mmHg, prehipertensi $> 120/80$ mmHg – $139/89$ mmHg dan kategori hipertensi bila tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg.

Grafik III.D.2.18
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visus



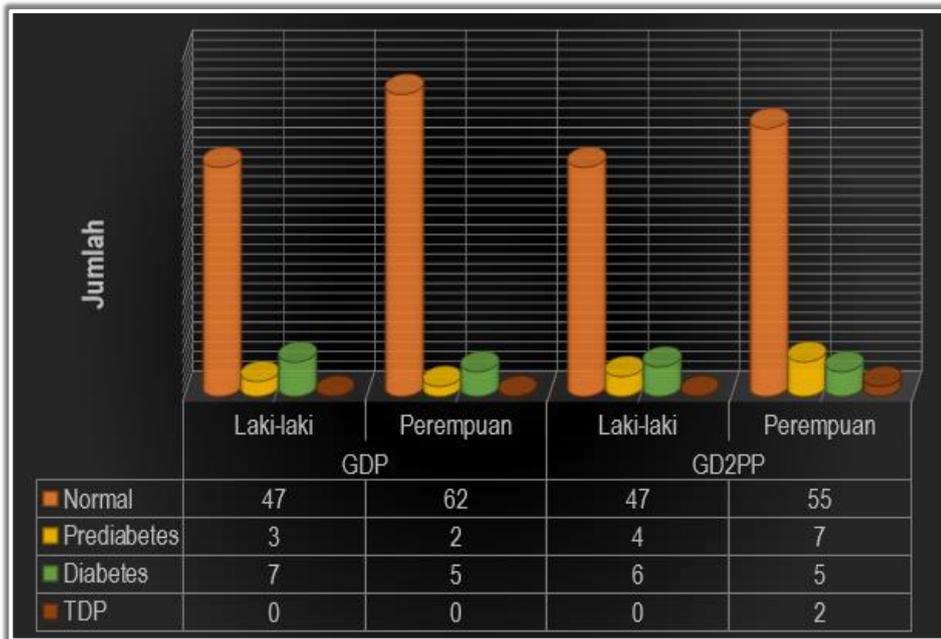
Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.18, distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar berdasarkan pemeriksaan visus yakni hasil normal sebanyak 86 orang (68,3%) sedangkan hasil abnormal sebanyak 40 orang (31,7%). Hasil pemeriksaan visus ini adalah hasil yang diperoleh tanpa adanya koreksi (penggunaan kacamata) bagi yang memiliki masalah penglihatan baik penglihatan jauh maupun dekat.

2) Pemeriksaan Laboratorium

Salah satu pemeriksaan penunjang dalam MCU pegawai KKP Kelas I Makassar adalah pemeriksaan laboratorium klinik. Pemeriksaan laboratorium bertujuan untuk mendeteksi secara dini penyakit, membantu menegakkan diagnosa, memantau perjalanan penyakit dan menentukan prognosis. Beberapa parameter pemeriksaan laboratorium yang dilakukan diantaranya :

Grafik III.D.2.19
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Gula Darah



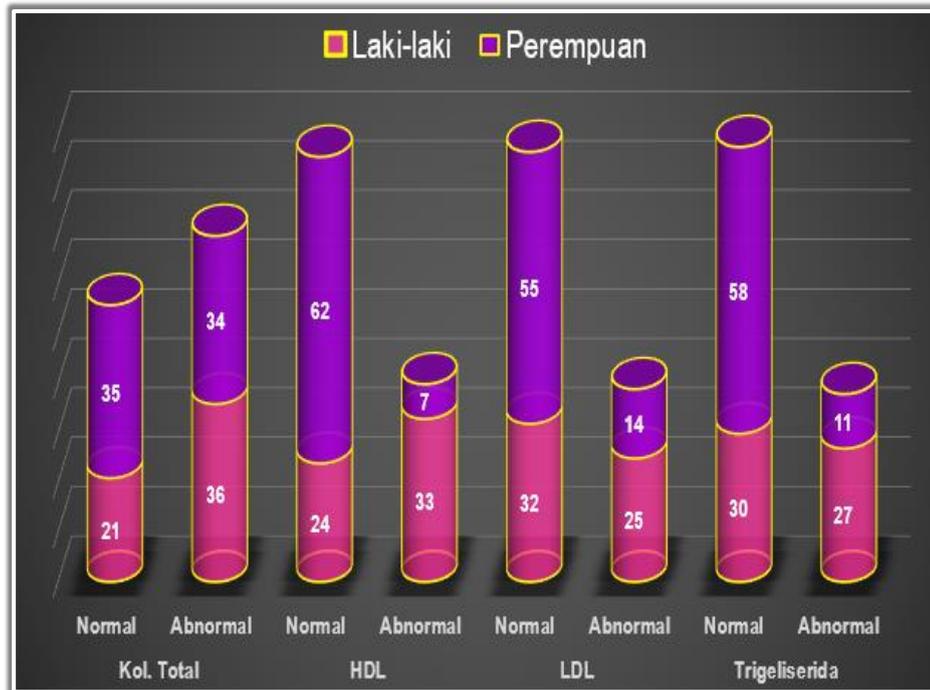
Sumber : Data Primer, 2023

Pemeriksaan gula darah terhadap ASN KKP Kelas I Makassar dilakukan dengan menggunakan dua parameter, yaitu gula darah puasa (GDP) dan gula darah dua jam post prandial (GD2PP). Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada grafik II.D.2.19. Dimana hasil pemeriksaan gula darah puasa normal (<100 mg/dL) sebanyak 109 orang (86,5%) yang terdiri dari laki-laki 47 orang (37,3%) dan perempuan 62 orang (49,2%). Hasil pemeriksaan gula darah puasa dengan kriteria prediabetes (100 - 125 mg/dL) sebanyak 5 orang (4,0%) terdiri dari laki-laki 3 orang (2,4%) dan perempuan 2 orang (1,6%) sedangkan kriteria diabetes (≥ 126 mg/dL) sebanyak 12 orang (9,5%) terdiri dari laki-laki 7 orang (5,6%) dan 5 orang (4,0%).

Pemeriksaan gula darah dua jam *post prandial* (GD2PP) dengan kriteria normal (<140 mg/dL) sebanyak 102 orang (81,0%) yang terdiri dari laki-laki 47 orang (37,3%) dan perempuan 55 orang (43,7%). Hasil pemeriksaan GD2PP dengan kriteria prediabetes (140-199 mg/dL) sebanyak 11 orang (8,7%) terdiri dari laki-laki 4 orang (3,2%) dan perempuan 7 orang (5,6%) sedangkan kriteria diabetes (≥ 200 mg/dL) sebanyak 11 orang (8,7%) terdiri dari laki-laki 6 orang (4,8%) dan 5 orang (4,0%). Sementara itu terdapat 2 orang (1,6%) yang tidak melanjutkan pemeriksaan GD2PP.

Berdasarkan data di atas perlu menjadi perhatian bagi pegawai agar mengontrol gula darah secara berkala dan melakukan upaya pembenahan terhadap berbagai macam faktor risiko penyakit khususnya diabetes.

Grafik III.D.2.20
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Profil Lipid



Sumber : Data Primer, 2023

Pemeriksaan profil lipid terhadap ASN KKP Kelas I Makassar dilakukan dengan menggunakan empat parameter, yaitu kolesterol total, trigeliserida, *High Density Lipoprotein* (HDL) dan *Low Density Lipoprotein* (LDL). Berdasarkan grafik III.D.2.20, hasil pemeriksaan kolesterol total yang normal sebanyak 56 orang (44,4%) dengan rincian laki-laki 21 orang (16,7%) dan perempuan 35 orang (27,8%) sedangkan hasil pemeriksaan abnormal sebanyak 70 orang dengan rincian laki-laki 36 orang (28,6%) dan perempuan 34 orang (27,0%).

Hasil pemeriksaan HDL normal sebanyak 86 orang (68,3%) dengan rincian laki-laki 24 orang (19,0%) dan perempuan 62 orang (49,2%) sedangkan hasil pemeriksaan abnormal sebanyak 40 orang (31,7%) dengan rincian laki-laki 33 orang (26,2%) dan perempuan 7 orang (5,6%). Untuk pemeriksaan LDL hasil normal sebanyak 87 orang (69%) dengan rincian laki-laki 32 orang (25,4%) dan perempuan 55 orang (43,7%) sedangkan hasil pemeriksaan abnormal sebanyak 39 orang (31,0%) dengan rincian laki-laki 25 orang (19,8%) dan perempuan 14 orang (11,1%).

Hasil pemeriksaan trigeliserida normal sebanyak 88 orang (69,8%) dengan rincian laki-laki 30 orang (23,8%) dan perempuan 58 orang (46,0%) sedangkan hasil pemeriksaan abnormal sebanyak 38 orang (30,2%) dengan rincian laki-laki 27 orang (21,4%) dan perempuan 11 orang (8,7%). Berdasarkan data tersebut diharapkan agar ASN yang memiliki hasil pemeriksaan abnormal agar

melakukan pemeriksaan secara berkala selain itu menghindari faktor risiko seperti makanan berlemak dan rutin olah raga.

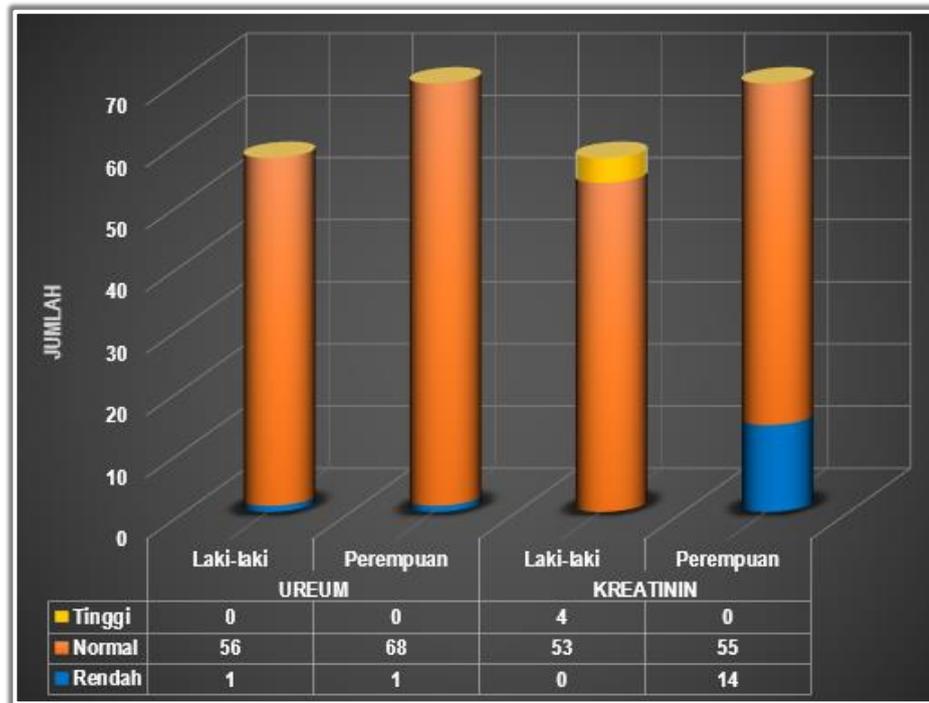
Grafik III.D.2.21
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fungsi Liver



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.21, pemeriksaan fungsi liver pada MCU ASN KKP Kelas I Makassar menggunakan dua parameter, yakni *serum glutamic oxaloacetic transaminase* (SGOT) dan *serum glutamic pyruvic transaminase* (SGPT). Hasil pemeriksaan SGOT normal sebanyak 110 orang (87,3%) dengan rincian laki-laki 46 orang (36,5%) dan perempuan 64 orang (50,8%) sedangkan hasil pemeriksaan tinggi sebanyak 16 orang (12,7%) dengan rincian laki-laki 11 orang (8,7%) dan perempuan 5 orang (4,0%). Adapun hasil pemeriksaan SGPT normal sebanyak 93 orang (73,8%) dengan rincian laki-laki 32 orang (25,4%) dan perempuan 61 orang (48,4%) sedangkan hasil pemeriksaan tinggi sebanyak 33 orang (26,2%) dengan rincian laki-laki 25 orang (19,8%) dan perempuan 8 orang (6,3%). Peningkatan kadar SGOT dan SGPT dapat mempengaruhi fungsi hati. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala untuk mengevaluasi fungsi hati atau menemukan penyebab masalah pada hati.

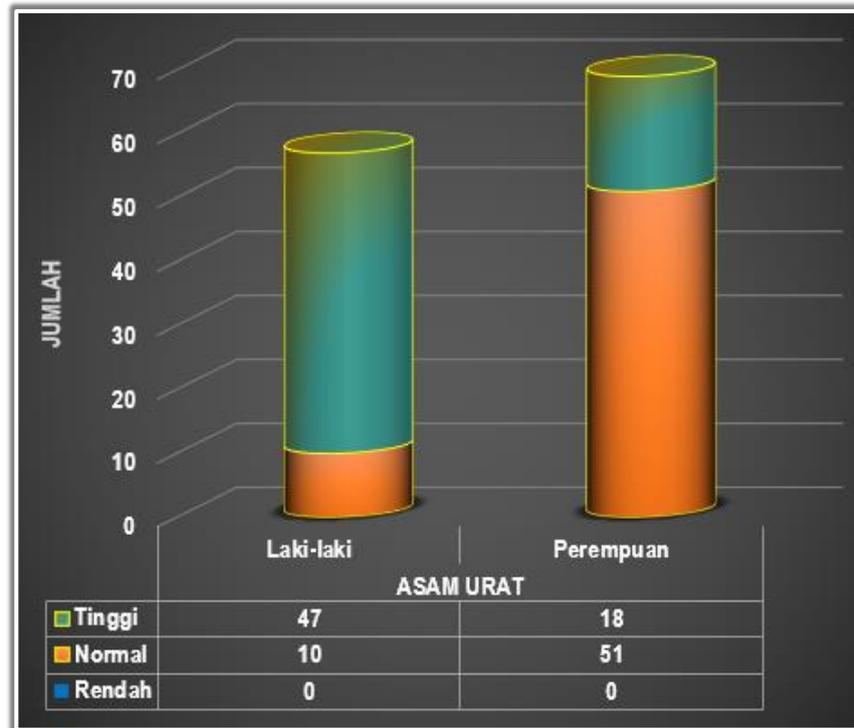
Grafik III.D.2.22
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fungsi Ginjal



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.22, pemeriksaan fungsi ginjal pada MCU ASN KKP Kelas I Makassar menggunakan dua parameter, yakni ureum dan kreatinin. Hasil pemeriksaan ureum normal sebanyak 124 orang (98,4%) dengan rincian laki-laki 56 orang (44,4%) dan perempuan 68 orang (54,0%) sedangkan hasil pemeriksaan rendah sebanyak 2 orang (1,6%) dengan rincian laki-laki 1 orang (0,8%) dan perempuan 1 orang (0,8%). Tidak ada hasil pemeriksaan yang tinggi. Adapun hasil pemeriksaan kreatinin normal sebanyak 108 orang (85,7%) dengan rincian laki-laki 53 orang (42,1%) dan perempuan 55 orang (43,7%). Hasil pemeriksaan tinggi sebanyak 4 orang (3,2%) semua berjenis kelamin laki-laki sedangkan hasil rendah sebanyak 14 (11,1%) semua berjenis kelamin perempuan. Peningkatan kadar ureum dan kreatinin dalam darah menunjukkan adanya gangguan pada fungsi ginjal. Maka dari itu, perlu adanya pemeriksaan secara berkala, menjaga pola makan, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, kelola stres dengan baik dan tidak sembarang mengonsumsi obat atau suplemen tanpa saran dokter.

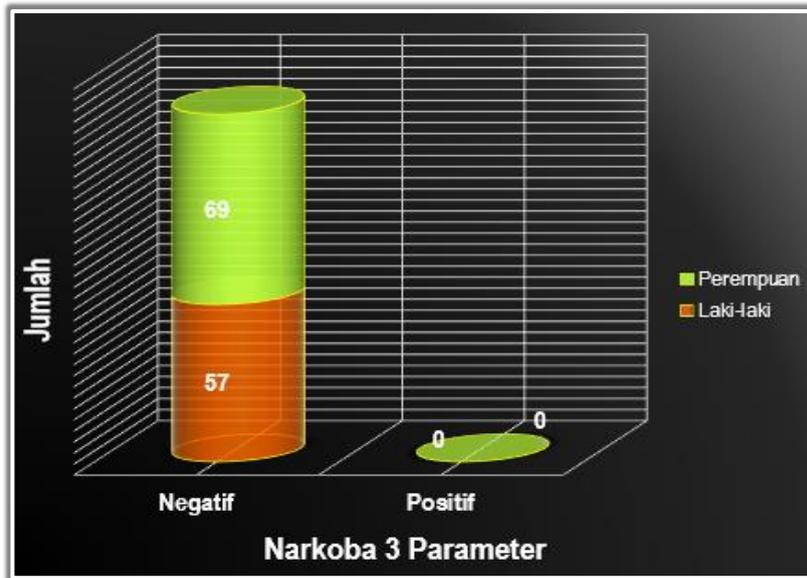
Grafik III.D.2.23
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Asam Urat



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.23, pemeriksaan asam urat ASN KKP Kelas I Makassar yang normal sebanyak 61 orang (48,4%) dengan rincian laki-laki 10 orang (7,9%) dan perempuan 51 orang (40,5%). Untuk hasil pemeriksaan yang tinggi sebanyak 65 orang (51,6%) dengan rincian laki-laki 47 orang (37,3%) dan perempuan 18 orang (14,3%) sedangkan hasil rendah yakni nihil. Pemeriksaan asam urat dapat membantu mendiagnosis dan mengontrol berbagai penyakit yang berkaitan dengan asam urat, seperti radang sendi (arthritis gout) atau batu ginjal. Oleh karena itu, ASN yang memiliki hasil pemeriksaan tinggi agar melakukan pemeriksaan secara berkala, rutin berolahraga dan menghindari faktor risiko seperti makanan yang mengandung purin.

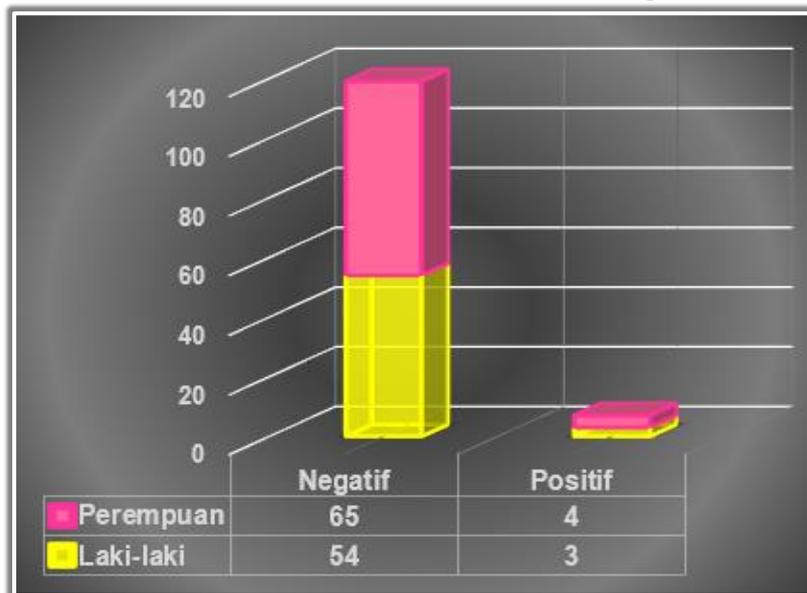
Grafik III.D.2.24
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba 3 Parameter



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.24, distribusi hasil pemeriksaan narkoba 3 parameter (Amphetamine, Morphine/Opiat dan Mariyuana) ASN KKP Kelas I Makassar didapatkan hasil bahwa seluruh ASN dinyatakan negatif. Tes narkoba adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi jenis dan kadar obat-obatan terlarang dalam tubuh. Oleh karena itu, pemeriksaan narkoba perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan ASN mengonsumsi obat-obatan terlarang atau tidak.

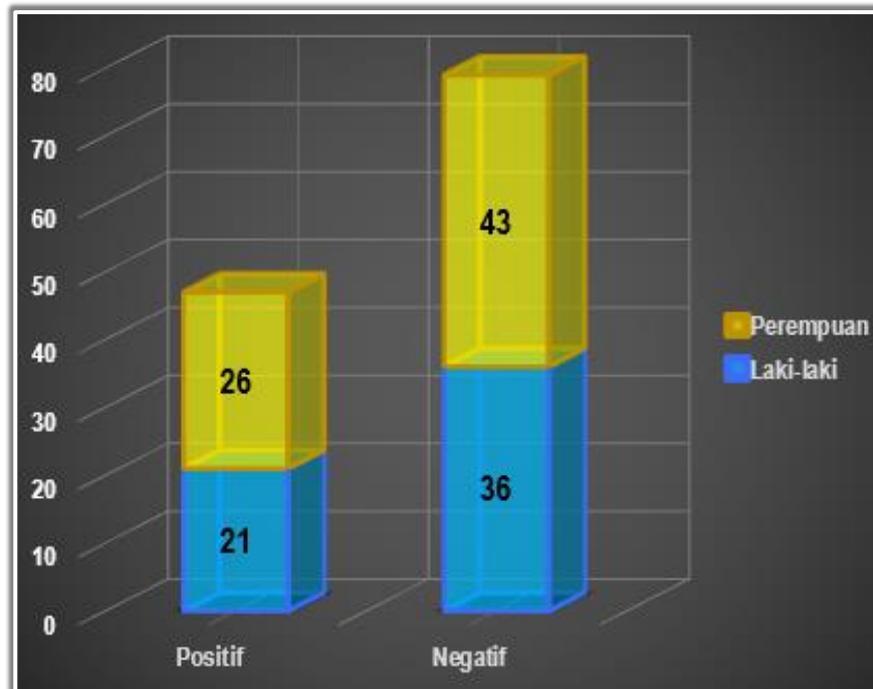
Grafik III.D.2.25
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan HBsAg



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.25, distribusi hasil negatif pemeriksaan HBsAg ASN KKP kelas I Makassar sebanyak 119 orang (94,4%) yang terdiri dari laki-laki 54 orang (42,9%) dan perempuan 65 orang (51,6%) sedangkan hasil positif sebanyak 7 orang (5,6%) yang terdiri dari laki-laki 3 orang (2,4%) dan perempuan 4 orang (3,2%). Terhadap hasil HbsAg positif telah dilakukan pemeriksaan HbeAg dan semua dinyatakan non reaktif yang menandakan Hepatitis B sudah tidak infeksius.

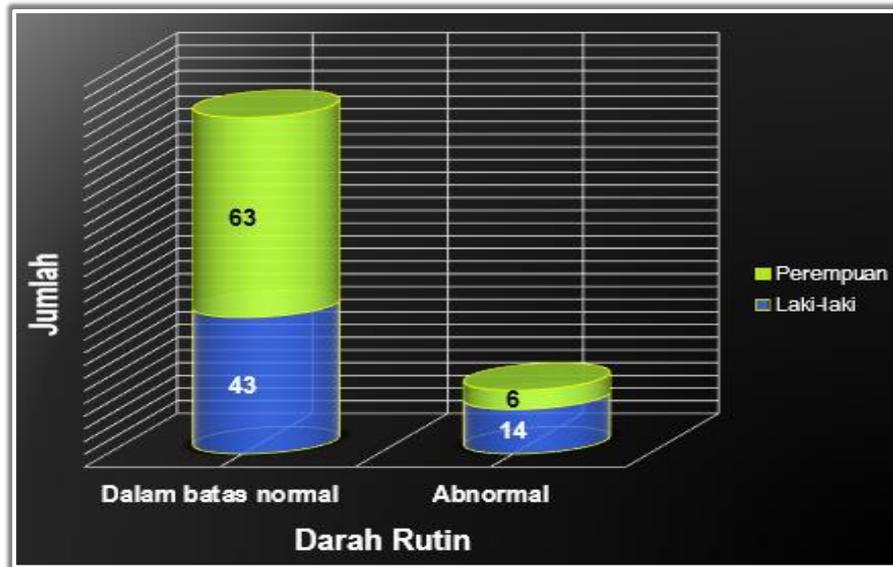
Grafik III.D.2.26
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan *Antistreptolysin O* (ASTO)



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.26, distribusi hasil negatif pemeriksaan *Antistreptolysin O* (ASTO) ASN KKP kelas I Makassar sebanyak 79 orang (62,7%) yang terdiri dari laki-laki 36 orang (28,6%) dan perempuan 43 orang (34,1%) sedangkan hasil positif sebanyak 47 orang (37,3%) yang terdiri dari laki-laki 21 orang (16,7%) dan perempuan 26 orang (20,6%). Hasil positif atau peningkatan kadar pada pemeriksaan ASTO menunjukkan adanya infeksi atau tubuh mengalami komplikasi akibat infeksi bakteri *Streptococcus* grup A. ASN dengan hasil positif dapat berkonsultasi dengan dokter, mengubah pola hidup menjadi lebih sehat dan memulai terapi obat untuk membantu mengatasi gejala akibat infeksi bakteri.

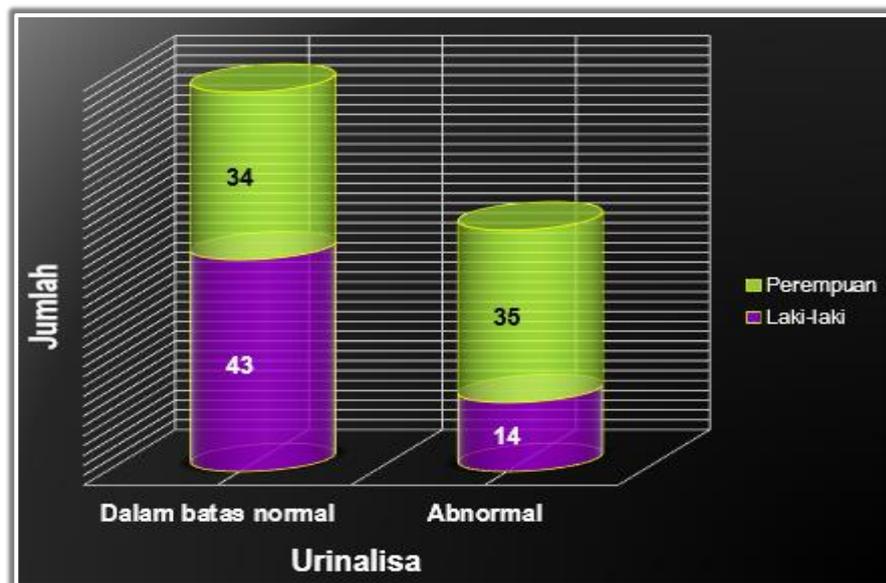
Grafik III.D.2.27
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Darah Lengkap



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.27, distribusi hasil dalam batas normal pemeriksaan darah rutin ASN KKP Kelas I Makassar sebanyak 106 orang (84,1%) yang terdiri dari laki-laki 43 orang (34,1%) dan perempuan 63 orang (50,0%) sedangkan hasil abnormal sebanyak 20 orang (15,9%) yang terdiri dari laki-laki 14 orang (11,1%) dan perempuan 6 orang (4,8%). Pemeriksaan darah lengkap sebagai bagian dari MCU bertujuan untuk memantau kesehatan umum dan memeriksa berbagai gangguan kelainan darah.

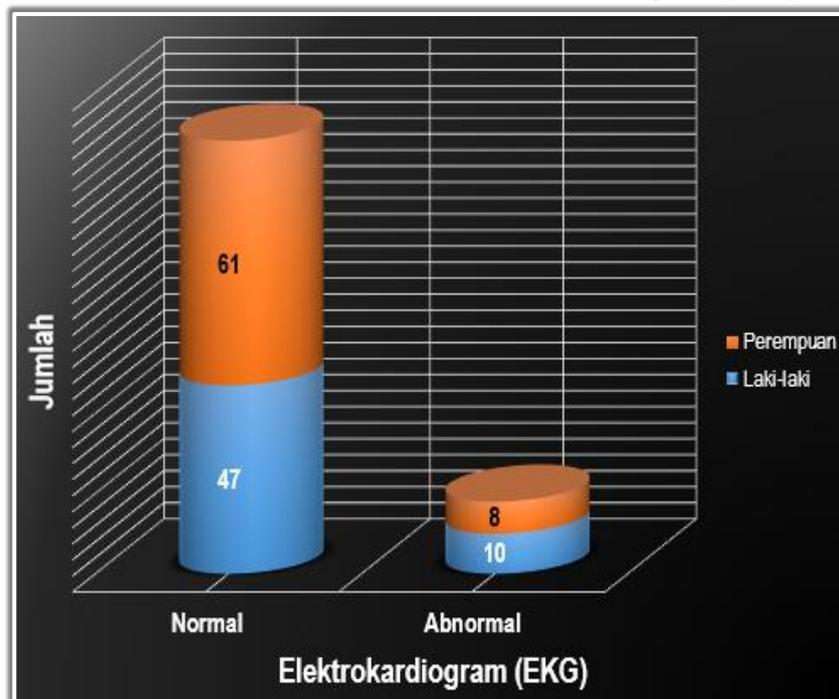
Grafik III.D.2.28
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urinalisa



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.28, distribusi hasil dalam batas normal pemeriksaan urinalisa ASN KKP Kelas I Makassar sebanyak 77 orang (61,1%) yang terdiri dari laki-laki 43 orang (34,1%) dan perempuan 34 orang (27,0%) sedangkan hasil abnormal sebanyak 49 orang (38,9%) yang terdiri dari laki-laki 14 orang (11,1%) dan perempuan 35 orang (27,8%). Hasil abnormal tinggi pada perempuan dapat disebabkan karena pada saat pengambilan sampel urine masih dalam kondisi menstruasi sehingga sel darah merah ikut terbaca dalam urin.

Grafik III.D.2.29
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Elektrokardiogram (EKG)

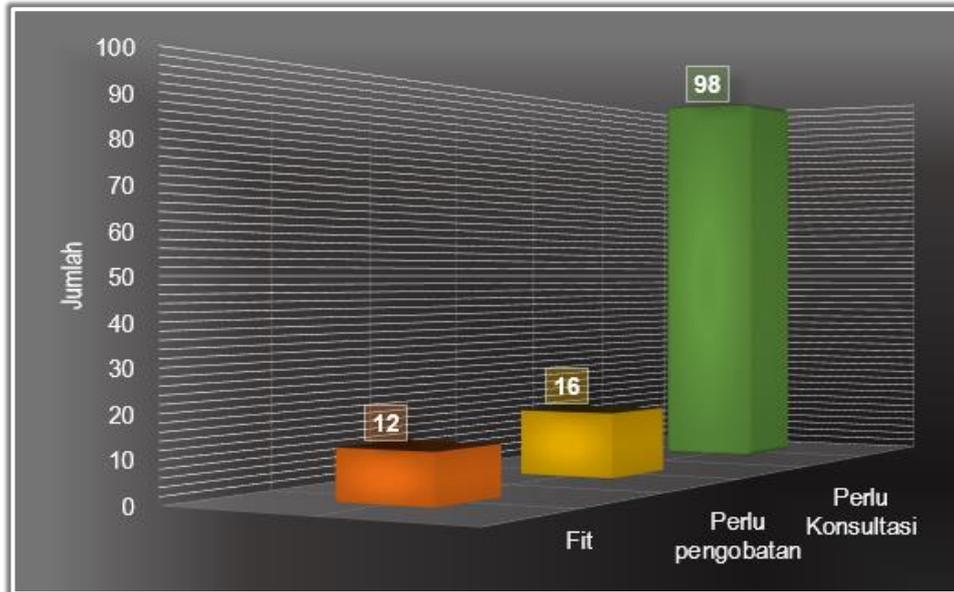


Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.29, distribusi hasil normal pemeriksaan *Elektrokardiografi* (EKG) ASN KKP kelas I Makassar sebanyak 108 orang (85,7%) yang terdiri dari laki-laki 47 orang (43,5%) dan perempuan 61 orang (56,6%) sedangkan hasil EKG abnormal sebanyak 18 orang (14,3%) yang terdiri dari laki-laki 10 orang (55,6%) dan perempuan 8 orang (44,4%). Dari hasil diperoleh dapat disimpulkan bahwa kelompok jenis kelamin perempuan cenderung memiliki hasil Pemeriksaan EKG lebih baik dibanding kelompok jenis kelamin laki-laki.

3) Rekomendasi Akhir

Grafik III.D.2.30
Distribusi MCU ASN KKP Kelas I Makassar
Berdasarkan Rekomendasi Dokter



Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan grafik III.D.2.30, distribusi hasil pemeriksaan MCU berdasarkan rekomendasi dari Dokter, ada 98 orang (77,8%) yang direkomendasikan untuk melakukan konsultasi lanjut dokter, 16 orang (12,7%) direkomendasikan untuk melakukan pengobatan dan 12 orang (9,5%) tidak direkomendasikan untuk melakukan konsultasi atau pengobatan karena dinyatakan fit dari hasil MCU. Walaupun demikian terhadap ASN yang dinyatakan fit tetap disarankan untuk menjalani perilaku hidup bersih dan sehat agar kondisi Kesehatan tetap terjaga.

Perjalanan ibadah haji merupakan perjalanan internasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai ujung tombak dalam rangka cegah tangkal penyakit melalui pintu masuk negara. KKP memegang peranan dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pelayanan kesehatan jamaah haji yang dimulai sejak memasuki asrama haji (masa embarkasi), hingga kembali ke tanah air (masa debarkasi). Sebelum pelaksanaan embarkasi dan debarkasi KKP Kelas I Makassar melakukan koordinasi dengan KKP wilayah timur yang jamaahnya berangkat dari Embarkasi Makassar.

Banyaknya Jamaah haji kelompok lansia tahun 2023 menjadi tantangan yang harus disikapi oleh seluruh elemen pemberi layanan haji. Pelayanan haji tahun 2023 mengambil *tagline* “**Haji Berkeadilan dan Ramah Lansia**”. *Tagline* tersebut diimplementasikan dengan memberikan layanan prioritas kepada lansia pada seluruh area pelayanan di tanah air maupun di Arab Saudi.

Sejalan dengan kebijakan ramah lansia, pelayanan haji tahun 2023 dilaksanakan dengan menerapkan “*One Stop Services*” (OSS). Layanan dengan metode OSS adalah mengintegrasikan beberapa layanan yang sebelumnya dilakukan pada beberapa lokasi ruangan/bangunan yang berbeda menjadi layanan pada satu lokasi/ruangan. Pemberian layanan seperti pembagian lembar akomodasi, pembagian gelang identitas, pembagian *living cost*, pemeriksaan kesehatan tahap III dilakukan pada satu lokasi yang sama yaitu di aula penerimaan. Metode ini sangat efisien karena dapat mengurangi waktu layanan dan risiko kelelahan bagi Jamaah, sehingga Jamaah mempunyai waktu istirahat yang cukup selama berada di asrama haji.

Pelayanan pemeriksaan kesehatan di embarkasi untuk menilai jamaah yang akan berangkat tersebut apakah status kesehatannya laik atau tidak laik terbang hal ini merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan peraturan kesehatan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jamaah Haji, serta Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Kesehatan RI No. 458 tahun 2000/No.1652.A/Menkes – Kesos/SKP/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk melaksanakan ibadah haji.

Pelayanan kesehatan Jamaah haji di Embarkasi Makassar pada dasarnya dilaksanakan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji. Kegiatan meliputi pelayanan medis, pengendalian kekarantinaan kesehatan, pemeriksaan dokumen kesehatan, pengawasan catering, pemeriksaan sanitasi asrama haji, pengawasan dan pengendalian vektor, kegiatan siskohatkes dan layanan kerumahtanggaan. Kegiatan

pelayanan medis antara lain pelayanan poliklinik, observasi/rawat inap, pelayanan rujukan, laboratorium, farmasi, dan pelayanan kegawatdaruratan.

1. Pra Embarkasi

Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Tahap I di Asrama Haji Embarkasi Makassar dilaksanakan tanggal 11 Januari 2023. Berdasarkan Permenkes No. 62 tahun 2016 pasal 32 ayat 2 huruf a, bahwa pelaksanaan pemeriksaan tahap pertama, inspeksi kesehatan lingkungan dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum jemaah haji masuk asrama haji dan/atau pada saat proses penentuan catering dengan rekomendasi perbaikan kepada pihak pengelola/penanggung jawab.

Pemeriksaan Kesehatan Lingkungan Tahap II di Asrama Haji Embarkasi Makassar dilaksanakan tanggal 10 Mei 2023. Berdasarkan Permenkes no . 62 tahun 2016 pasal 32 ayat 2 huruf b, tahap kedua inspeksi Kesehatan Lingkungan dan intervensi Kesehatan Lingkungan dilaksanakan pada 1 (satu) minggu sebelum jemaah haji masuk Asrama haji, untuk memastikan kesiapan embarkasi jemaah haji.

Pemeriksaan Flight Catering pada PT. Aeroprime Food Service yang ditunjuk langsung oleh PT. Garuda Indonesia sebagai penyedia makanan jemaah haji Indonesia selama penerbangan pada embarkasi/debarkasi haji Makassar Tahun 1444 H/2023 M. Penilaian dapur flight catering didasarkan pada hasil penilaian secara rutin dalam wilayah pengawasan KKP Kelas I Makassar pada Bulan Mei 2023 dengan hasil penilaian 94,44 kategori memenuhi syarat kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Dilaksanakan meal test pada saat pelantikan PPIH tanggal 19 Mei 2023. Pemeriksaan sampel flight catering untuk Kloter I dimulai pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Penerbangan GA 1101.

Kursus Higiene Sanitasi Pangan dan pemeriksaan kesehatan serta pengambilan rectal swab bagi penjamah pangan catering CV. Arky Jaya selaku penyedia konsumsi Jemaah Calon Haji Embarkasi/ Debarkasi Haji Tahun 2023. Kursus dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 55 orang, sedangkan untuk pengawasan pangan di pesawat maka dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan penjamah melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan pada Dapur Catering PT. Aeroprime Food Service.

Penentuan kuota haji tiap daerah yang baru dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada pertengahan April 2023 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan haji khususnya vaksinasi meningitis di wilayah. Kebijakan vaksinasi meningitis di beberapa kab/kota telah dilakukan berdasarkan informasi dari Kemenag bahwa akan

diselenggarakan haji Tahun 2023.

Kegiatan pendampingan vaksinasi dan legalisasi *International Certificate of Vaccination* (ICV) terlaksana sesuai dengan perencanaan KKP Kelas I Makassar dan permintaan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Kegiatan dilakukan pada 11 (sebelas) kab/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat yang dilakukan akhir 16 Maret – 12 Mei 2023. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan tersebut tidak dilakukan ke semua kab/kota di Propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi Sulawesi Barat. Adapun kab/kota yang didampingi, yaitu Kab. Gowa, Kab. Jeneponto, Kab. Bantaeng, Kab. Bulukumba, Kab. Pangkep, Kab. Enrekang, Kab. Sidrap, Kab. Barru, Kab. Bone, Kota Palopo, Kota Parepare, Kota Mamuju, dan Kab. Majene. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi petugas daerah dan sekaligus melakukan legalisasi ICV, serta pemberian edukasi kesehatan kepada Jemaah calon haji untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Kegiatan ini tidak begitu maksimal sehingga pada saat pelayanan kesehatan tahap akhir di embarkasi cukup banyak ditemukan kendala khususnya terkait validasi ICV.

2. Masa Embarkasi Haji



Gambar III.E.1
Jamaah Calon Haji di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji

Embarkasi haji dimulai dengan apel pembukaan pada tanggal 22 Mei 2023 dilanjutkan dengan rapat koordinasi terkait alur pelayanan OSS. Pelaksanaan embarkasi haji tanggal 23 Mei 2023 dengan masuknya kloter 1 di Asrama Haji Makassar.

Jamaah calon haji yang masuk embarkasi Makassar berjumlah 15.855 orang terdiri atas 15.657 orang Jamaah dan 198 petugas yang berasal dari Tujuh Provinsi yaitu Provinsi

Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat dan terbagi atas kloter 1 sampai 43, sedangkan kloter 44 sebanyak 23 orang berangkat melalui Embarkasi Balikpapan. Adapun Provinsi Gorontalo merupakan embarkasi antara dengan jumlah jamaah sebanyak 1.005 orang dan 14 orang petugas kloter. Dari keseluruhan jamaah calon haji yang masuk embarkasi Makassar, sebanyak 9 orang jamaah yang batal berangkat, sehingga jumlah Jamaah calon haji berangkat sebanyak 15.846 orang. Untuk lebih jelasnya distribusi tersebut sebagaimana terlihat pada tabel III.E.1 berikut :

Tabel III.E.1
Distribusi Jamaah Calon Haji dan Petugas Kloter Yang Berangkat
Berdasarkan Jenis Kelamin Embarkasi Makassar
Tahun 1444 H/2023 M

No	Jenis Kelamin	Provinsi Asal							Jumlah	%
		SulSel	SulBar	Sultra	Maluku	Malut	Papua	Papua Barat		
1	Pria	2.766	529	814	454	530	444	300	5.837	36.84
2	Wanita	5.215	1.051	1.359	677	650	598	459	10.009	63.16
Total		7.981	1.580	2.173	1.131	1.180	1.042	759	15.846	100

Sumber : Data Primer, 2023

Tabel II.E.1 menunjukkan bahwa Jamaah calon haji embarkasi Makassar yang berangkat / laik terbang berjumlah 15.846 orang terdiri atas 5.837 pria (36,84%) dan 10.009 wanita (63,16%). Berdasarkan Provinsi jamaah calon haji terbanyak berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7.981 orang (50,36 %).

Tabel III.E.2
Distribusi Jamaah Calon Haji dan Petugas Kloter Yang Berangkat
Berdasarkan Kelompok Umur Embarkasi Makassar
Tahun 1444 H/2023 M

No	Umur	Provinsi Asal							Jumlah	%
		SulSel	SulBar	Sultra	Maluku	Malut	Papua	Papua Barat		
1	≤ 39 Thn	697	134	205	95	91	145	124	1.491	9.41
2	40-49 Thn	1.956	409	473	228	214	340	203	3.823	24.13
3	50 – 59 Thn	2.488	467	579	237	248	302	217	4.538	28.64
4	≥ 60 Thn	2.840	570	916	571	627	255	215	5.994	37.83
Total		7.981	1.580	2.173	1.131	1.180	1.042	759	15.846	100

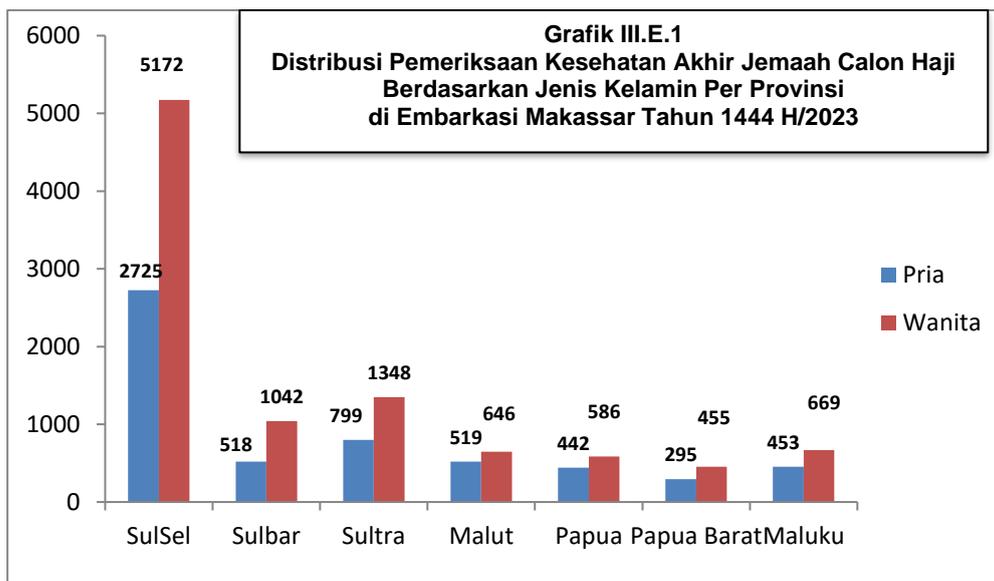
Sumber : Data Primer, 2023

Tabel III.E.2 menunjukkan bahwa jamaah calon haji embarkasi Makassar yang terbanyak kelompok umur lansia ≥ 60 tahun berjumlah 5.994 orang (37,83%).

a. Pemeriksaan kesehatan jamaah calon haji

Jamaah calon haji dari daerah asal, masuk asrama haji langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui risiko tinggi yang dimiliki supaya petugas kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih di kloter selama melaksanakan rangkaian ibadah haji.

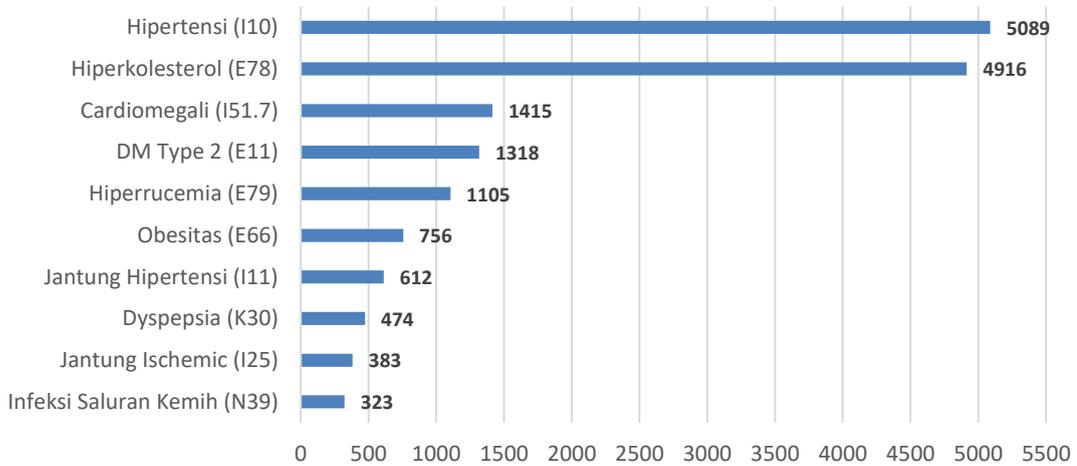
Dari jumlah jamaah calon haji yang masuk embarkasi sebanyak 15.855 orang, pemeriksaan kesehatan Jamaah calon haji dilakukan sebanyak 15.867 kali pada Embarkasi Makassar (terdapat jamaah haji yang diperiksa lebih dari satu kali).



Sumber : Data Primer, 2023

Jamaah calon haji yang dilakukan pemeriksaan tahap ketiga di embarkasi berjumlah 15.669 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan akhir ada 9 (sembilan) JCH yang batal berangkat (4 orang pria dan 5 orang wanita) yang disebabkan karena sakit 5 orang, hamil 3 orang dan lain-lain 1 orang (pendamping). Jamaah calon haji terbanyak pada jenis kelamin perempuan yakni 9.918 orang (63,29%) sedangkan laki-laki sebanyak 5.751 orang (36,71%).

Grafik III.E.2
Distribusi Penyakit Terbanyak pada Jemaah Calon Haji dan
Petugas Kloter Yang Berangkat di Embarkasi Makassar
Tahun 1444 H/ 2023 M



Penyakit terbanyak pada jemaah calon haji dan petugas kloter yang berangkat di Embarkasi Makassar tahun 1444 H/2023 M adalah Hipertensi (I10) sebanyak 5.089 (25,31%).

Tabel III.E.3
Distribusi Jamaah Calon Haji Risiko Tinggi
Berdasarkan Asal Provinsi dan Jenis Kelamin
Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M

No	Jenis Kelamin	Provinsi							Jumlah	%
		Sulsel	Sulbar	Sultra	Maluku	Malut	Papua	Papua Barat		
1	Pria	2155	431	660	393	462	339	236	4676	37.10
2	Wanita	4049	845	1068	592	581	447	345	7927	62.90
T o t a l		6204	1276	1728	985	1043	786	581	12603	100

Sumber : Data Primer, 2023

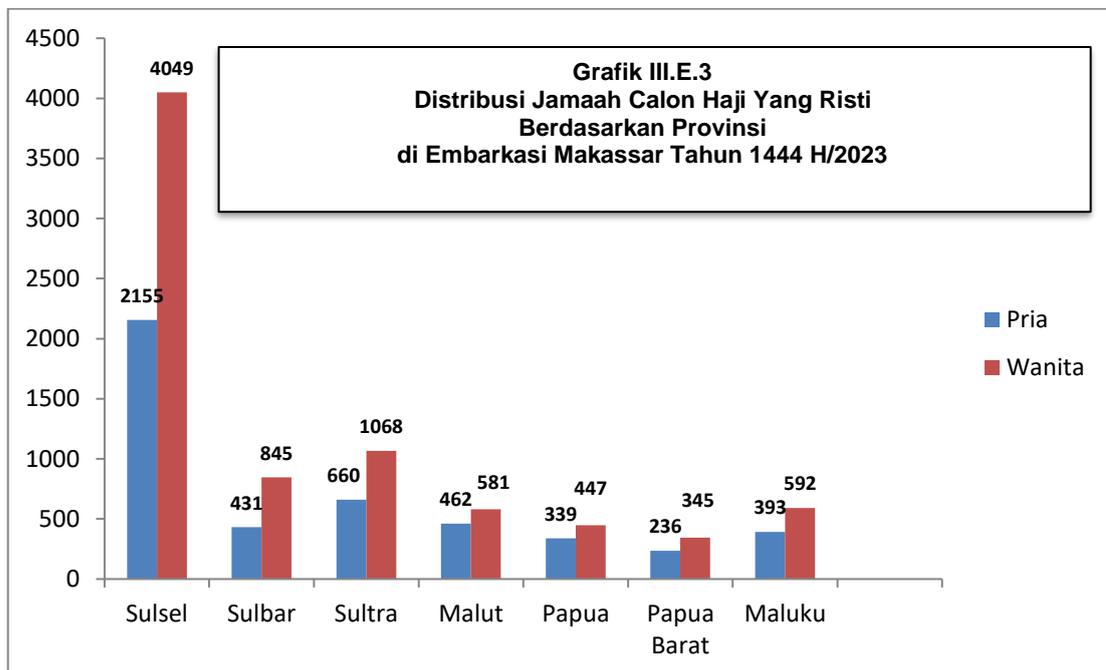
Tabel III.E.3, menunjukkan bahwa Jamaah calon haji risiko tinggi berjumlah 12.603 orang, terbanyak pada jenis kelamin wanita yaitu 7.927 orang (62.90%) dan pada pria sebanyak 4.676 orang (37,10%).

Tabel III.E.4
Distribusi Jamaah Calon Haji Yang Risti Berdasarkan Asal Provinsi
Embarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M

Asal Daerah	Pria	Wanita	Jumlah	%
Sulsel	2155	4049	6204	78.56
Sulbar	431	845	1276	81.79
Sultra	660	1068	1728	80.48
Malut	462	581	1043	89.53
Papua	339	447	786	76.46
Papua Barat	236	345	581	77.47
Maluku	393	592	985	87.79
Total	4676	7927	12603	80.43

Sumber : Data Primer

Pada tabel III.E.4, menunjukkan bahwa jumlah Jamaah risti tertinggi pada Provinsi Maluku Utara yaitu 1.043 (89.53%) dari jumlah Jamaah Maluku Utara yang diperiksa sebanyak 1.165, dan terendah Provinsi Papua yaitu 786 (76.46%) dari jumlah Jamaah sebanyak 1.028.



Sumber : Data Primer, 2023



Gambar III.E.2
Pemeriksaan Tahap Ketiga Jamaah Calon Haji
di Aula Penerimaan UPT Asrama Haji

b. Skrining Kehamilan untuk Wanita Usia Subur (WUS)

Pelaksanaan skrining bagi wanita usia subur (WUS) Jamaah calon haji dilakukan dengan pemeriksaan palpasi dan plano tes.

Jamaah calon haji wanita usia subur yang dilakukan plano tes sejumlah 4.272 orang termasuk petugas TKHI wanita. Hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya JCH WUS yang positif hamil sebanyak 6 (enam) orang. WUS positif 3 (tiga) orang tidak laik terbang karena usia kehamilan <14 minggu sehingga dipulangkan ke daerah asal Jamaah yaitu Kabupaten Bone, Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan, dan Kabupaten Mimika Papua, sedangkan 3 (tiga) orang WUS positif hamil laik untuk terbang dengan usia kehamilan > 14 minggu dan < 26 minggu.



Gambar III.E.3
Meja Pemeriksaan Khusus Wanita Usia Subur (WUS) Calon Jamaah Haji

c. Layanan Berobat Jamaah Calon Haji di Poliklinik Asrama Haji Makassar

Pelayanan kesehatan diberikan kepada Jamaah calon haji sakit dan semua petugas yang terlibat di Embarkasi Makassar. Pelayanan kesehatan ini sifatnya hanya berobat, konsultasi dan observasi.



Gambar III.E.4
Layanan Berobat Calon Jamaah Haji di Poliklinik Asrama Haji

d. Pelayanan Observasi di Poliklinik Embarkasi Haji

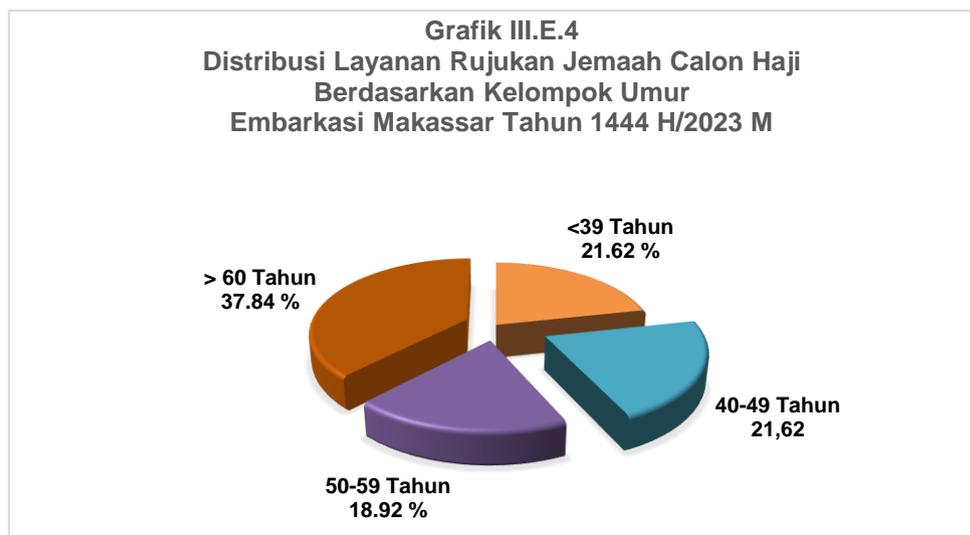
Pelayanan observasi diberikan kepada Jamaah calon haji yang sakit di klinik embarkasi minimal 4 jam. Bagi Jamaah calon haji yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat pelayanan yang lebih memadai.



Gambar III.E.5
Pelayanan Observasi Calon Jamaah Haji di Poliklinik Asrama Haji

e. Layanan Rujukan

Salah satu layanan kesehatan yang diberikan kepada Jamaah calon haji adalah layanan rujukan baik ke rumah sakit maupun konsultasi.



Grafik III.E.4 menunjukkan bahwa jumlah rujukan terbanyak pada kelompok umur \geq 60 Thn yaitu 14 orang (37.84%), terendah pada kelompok umur 50-59 thn yaitu 7 orang (18,92%).



Gambar III.E.6
Layanan Rujukan Calon Jamaah Haji Menggunakan Ambulance

f. Penyuluhan Kesehatan Jamaah Haji

Jamaah calon haji yang baru tiba di asrama haji dari daerah asal dikumpulkan di aula. Jamaah calon haji diberikan penyuluhan oleh petugas KKP. Materi yang diberikan kepada jamaah calon haji berkaitan menjaga kesehatan masing-masing, penggunaan fasilitas asrama haji yang kaitannya dengan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan asrama haji, informasi kesehatan di Arab Saudi, penanganan masalah kesehatan fisik jamaah calon haji selama penerbangan, pemakaian fasilitas pesawat dll.



Gambar III.E.7
Penyuluhan Kesehatan Calon Jamaah Haji

g. Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengamatan secara langsung terhadap media lingkungan dalam rangka pengawasan berdasarkan standar, norma dan baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Pengawasan kesehatan lingkungan asrama haji merupakan pengamatan yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap komponen penilaian yang meliputi penyehatan sarana dan bangunan, penyehatan air dan sanitasi, pengamanan limbah dan pengendalian vektor dan Binatang pembawa penyakit.

Adapun hasil pengukuran media lingkungan sebagai berikut :

1) Pengukuran kualitas udara ruang

Pengukuran tingkat pencahayaan di asrama haji bertujuan untuk mengetahui tingkat pencahayaan di asrama haji sesuai dengan syarat umum yang ditetapkan. Pengukuran tingkat pencahayaan dilakukan agar penghuni asrama dapat nyaman melakukan aktifitas dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kurangnya tingkat pencahayaan.

2) Kualitas air bersih/air minum

Berdasarkan informasi dari pihak pengelola Asrama Haji Makassar bahwa air bersih yang digunakan selama proses embarkasi terdapat 2 (dua) sumber, yaitu air tanah/ sumur bor dan air PDAM. Air tanah diperuntukkan untuk keperluan sanitasi di wisma-wisma sedangkan air yang bersumber dari PDAM diperuntukkan dalam keperluan aktifitas dapur, poliklinik dan mesjid. Dalam rangka pemantauan kualitas air bersih maka dilakukan pemeriksaan sampel air dengan menggunakan metode *rapid test* menggunakan alat *water test kit*. Selama proses embarkasi dilakukan pemantauan kualitas air yang digunakan di dapur.

3) Pengawasan Katering Asrama Haji

Kegiatan pengawasan katering Jamaah haji merupakan pemeriksaan sanitasi lingkungan dapur dan ruang makan wisma dilaksanakan sebanyak 46 kali. Pemantauan kesehatan lingkungan dapur dan ruang makan menyesuaikan dengan jadwal makan Jamaah. Secara teknis beberapa variabel yang ditemukan tidak memenuhi syarat dengan pemberian catatan perbaikan. Variabel yang dimaksud seperti kebersihan lingkungan, *personal hygiene*, pengelolaan sampah dan limbah cair serta keberadaan vektor di lingkungan dapur.

Perbaikan kualitas lingkungan dapur diupayakan dengan pendekatan melalui edukasi kepada pengelola catering dan penjamah pangan.

Pengawasan kualitas makanan Jamaah calon haji dilakukan setiap sesaat sebelum dilakukan penyajian selama embarkasi. Setiap produk pangan siap saji yang disajikan untuk Jamaah calon haji, diambil untuk pemeriksaan laboratorium dan disimpan sebagai *bank sampel*. Penyimpanan *bank sampel* diperlakukan sesuai dengan aturan penyimpanan pangan dan dimusnahkan setelah 3x24 jam. Sampel produk pangan siap saji diperiksa dengan parameter organoleptik, kimia dan mikrobiologi.



Gambar III.E.8
Pengawasan kualitas makanan calon jamaah haji

4) Pengelolaan Limbah

Produksi limbah di asrama haji terbagi dalam 3 (tiga) jenis, yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah medis. Limbah padat dan cair merupakan hasil aktifitas di lingkungan asrama haji yang bersumber dari wisma, dapur, kantin dan bangunan lainnya sedangkan limbah medis dihasilkan dari aktifitas kegiatan poliklinik. Tujuan dari pengawasan limbah adalah terkendalinya faktor risiko kesehatan penghuni asrama akibat potensi pencemaran limbah yang berbahaya di Asrama haji.

5) Pengamatan dan Pengendalian Vektor

Pengamatan dan Pengendalian vektor merupakan salah satu upaya pencegahan faktor risiko penyakit yang ditimbulkan oleh serangga / binatang penular penyakit. Pengamatan dan Pengendalian vektor dan Binatang Penular

Penyakit dilakukan untuk menekan populasi vektor yang bisa menularkan penyakit antara lain nyamuk, lalat, kecoa dan tikus. Pelaksanaan kegiatan pengendalian vektor diasrama haji dikerjakan secara terpadu, antara lain : menjaga kebersihan lingkungan Asrama haji, pemantauan Lalat di asrama haji, pengawasan Jentik dan Nyamuk, survey tikus, dan pengendalian vektor.



Gambar III.E.9
Pengamatan dan pengendalian vektor

3. Debarkasi Haji

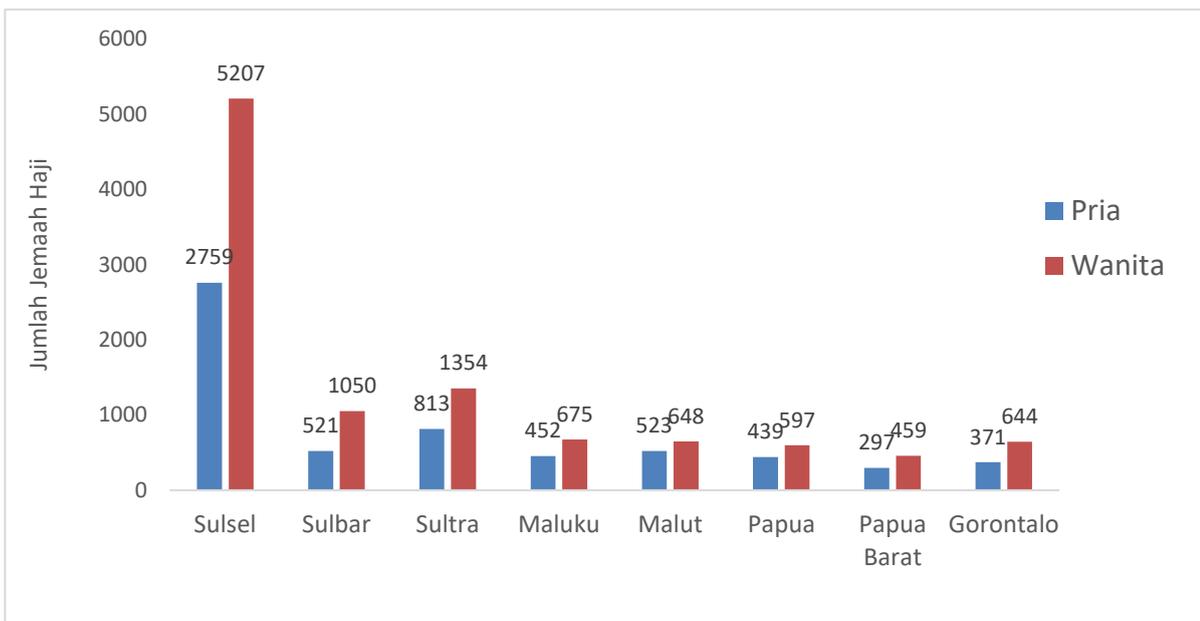
Pelaksanaan debarkasi haji tahun 2023 dimulai pada tanggal 05 Juli 2023. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor SR.02.04/C/3067/2023 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Jamaah Haji Selama Masa Debarkasi Pada Masa Penyelenggaraan Haji Tahun 2023 M/ 1444 H, pada saat debarkasi haji dilakukan pengamatan penyakit menular terutama terhadap kemungkinan terjangkitnya penyakit Covid-19, MERS-CoV, Meningitis, Polio, Influenza tipe baru dan penyakit berpotensi menimbulkan *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) lainnya yang mungkin terjadi pada saat musim haji dan dapat ditularkan oleh Jamaah yang baru tiba dari Arab Saudi.

Rangkaian kegiatan debarkasi didahului dengan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat (*gendec, manifest*), deteksi dini berdasarkan laporan TKHK sebelumnya, pengukuran suhu tubuh dan evakuasi Jamaah sakit serta rujukan Jamaah haji dengan kondisi emergency. Setibanya di asrama haji, Jamaah melalui thermal scanner untuk pemindaian suhu tubuh dan pemberian Kartu kewaspadaan kesehatan Jamaah haji

(K3JH)/*health alert card* (HAC). Layanan kesehatan lainnya yang diberikan selama di debarkasi antara lain observasi, rawat jalan, rujukan dan penyuluhan kesehatan. Poliklinik asrama haji juga memberikan layanan farmasi dan pemeriksaan penunjang kesehatan. Di bidang pengendalian risiko lingkungan dilakukan kegiatan pengawasan disinfeksi pesawat yang dilaksanakan oleh awak kabin, pemeriksaan sanitasi, disinfeksi dan fogging asrama, pengambilan dan pemeriksaan sampel air dan makanan serta pengawasan sanitasi lingkungan lainnya.

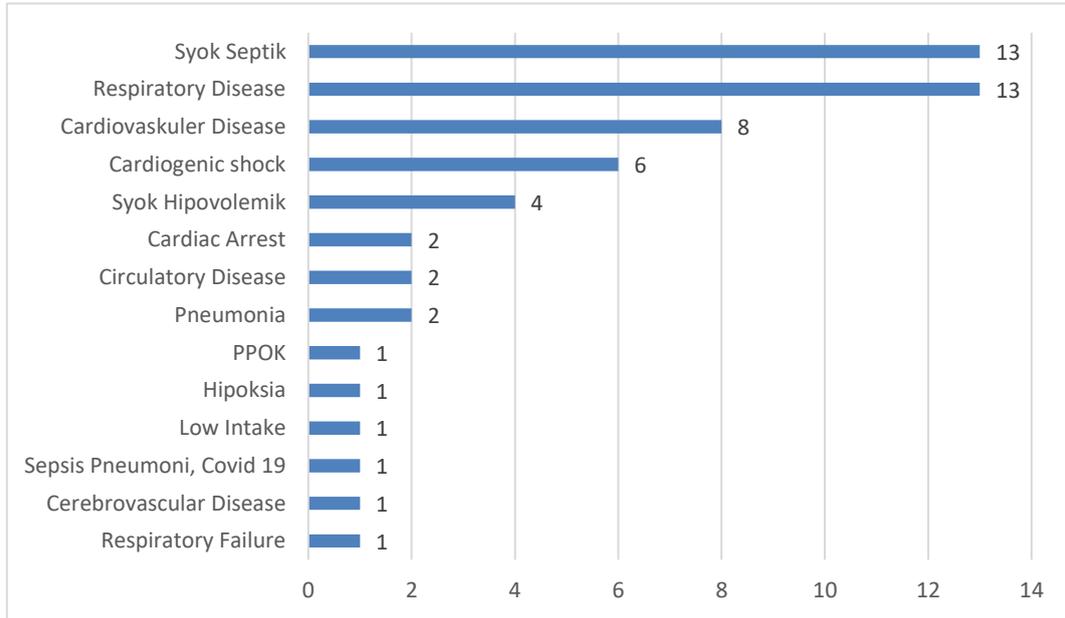
Jemaah haji yang berangkat dari embarkasi UPG berjumlah 16.865 orang, jumlah jemaah haji yang kembali sebanyak 16.809 orang jemaah. Sebanyak 50 orang jemaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi dan 6 orang masih dirawat di Arab Saudi. Berikut data jemaah haji yang tiba di debarkasi Haji Makassar:

Grafik III.E.5
Distribusi Jemaah Haji Berdasarkan Daerah Asal dan Jenis Kelamin
Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M



Jemaah haji Embarkasi Makassar yang kembali ke tanah air berjumlah 16.809 orang termasuk petugas kloter. Jemaah yang kembali ke tanah air terdiri dari 6.175 orang pria (36,74 %) dan 10.634 orang wanita (63,26 %). Jika dilihat berdasarkan asal daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah di Provinsi Papua Barat.

Grafik III.E.6
Distribusi Jemaah Haji Wafat Berdasarkan Penyebab Kematian
Debakasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M



Jemaah wafat di Arab Saudi 50 orang, 3 orang di pesawat (2 di pesawat internasional dan 1 di pesawat domestik), 1 orang di poliklinik asrama haji dan 2 orang di rumah sakit rujukan. Penyebab kematian terbanyak adalah *Respiratory Disease* sebanyak 13 orang (23,21 %) dan Syok Septik sebanyak 13 orang (23,21 %), selanjutnya *Cardiovaskuler Diseases* sebanyak 8 orang (14,29 %), *Cardiogenic shock* sebanyak 6 orang (10,91%) dan paling sedikit penyakit *Respiratory Failure*, *Cerebrovascular Disease*, *Low Intake*, *Sepsis Pneumoni*, *Covid 19*, *Hipoksia* dan *PPOK* masing-masing sebanyak 1 orang (1,79 %).

a. Pemeriksaan General Declaration

Pesawat Garuda Indonesia Airlines membawa Jemaah haji dari Arab Saudi menuju Makassar. Setelah tiba di bandara dilakukan pemeriksaan dokumen dan faktor risiko penyakit, selanjutnya diminta General Declaration (Gendec) dan manifest penumpang. Setelah diberikan izin maka Jemaah haji turun dari pesawat namun sebelumnya dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermal gun, lalu menuju bus yang sudah disiapkan dan selanjutnya ke asrama haji.

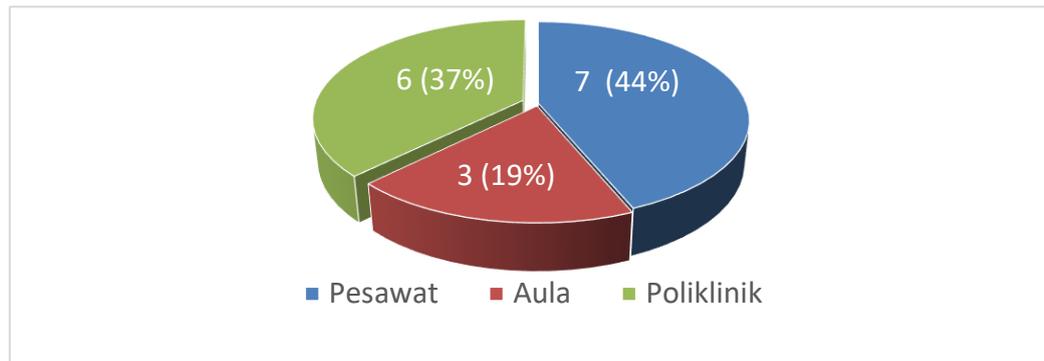
Pada saat kedatangan, petugas surveilans dan dokter dari KKP telah siap di pintu pesawat untuk berkoordinasi dengan pursher dan petugas TKHK terkait kondisi Jemaah haji. Jika ada yang sakit maka dilakukan evakuasi oleh tim KKP menuju

ambulans untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

b. Pengukuran suhu tubuh

Pemindaian suhu Jemaah dilakukan di pesawat dengan menggunakan *thermal gun* dan di asrama haji dengan menggunakan *thermal scanner*.

Grafik III.E.7
Distribusi Jemaah Haji Demam dan Ada Riwayat Demam
Berdasarkan Tempat Pengukuran Suhu
Debarkasi Makassar 1444 H/2023 M



Jemaah haji dengan suhu $\geq 38^{\circ}\text{C}$ sebanyak 14 orang dan 2 orang dengan riwayat demam (suhu $\leq 38^{\circ}\text{C}$). Sebanyak 7 orang (44%) jemaah haji ditemukan demam saat pengukuran suhu dengan *thermal gun* di pesawat, 3 orang (19%) ditemukan demam di aula kedatangan asrama haji Makassar dan sebanyak 6 orang (37 %) ditemukan demam saat observasi di poliklinik. Semua jemaah haji yang suspek Covid-19 dan *Influenza Like Illnes* (ILI) dilanjutkan dengan pemeriksaan antigen Covid-19 dan RT-PCR Covid-19 serta diberikan notifikasi ke dinas kesehatan setempat. Seluruh jemaah haji yang tiba dari Arab Saudi diberikan Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji (K3JH) atau *Health Allert Card* (HAC) untuk dilakukan pemantauan selama 21 hari oleh dinkes kabupaten/kota dimana jemaah haji berdomisili.

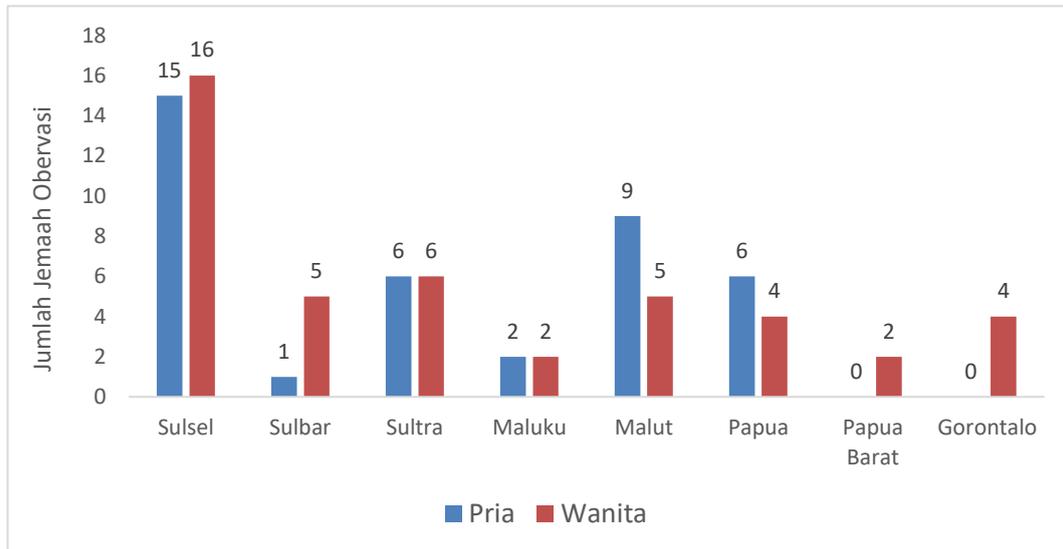


Gambar III.E.10
Pengukuran suhu jemaah haji di pesawat

c. Layanan kesehatan di poliklinik asrama haji

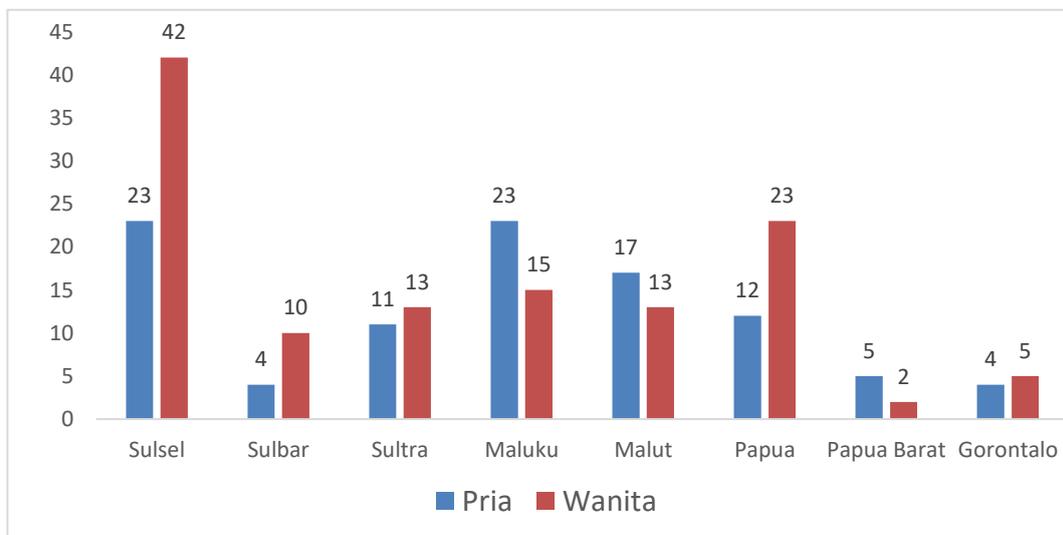
Layanan kesehatan yang diberikan kepada jemaah haji selama masa debarkasi yakni observasi dan rawat jalan jemaah haji.

Grafik III.E.8
Distribusi Jemaah Haji Observasi Berdasarkan Asal Daerah dan Jenis Kelamin
Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M



Jumlah jemaah haji yang observasi pada saat debarkasi sebanyak 83 orang, pria sebanyak 39 orang (46,99 %) dan wanita sebanyak 44 orang (53,01 %). Jika dilihat Berdasarkan asal daerah maka jemaah observasi tertinggi berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah dari Provinsi Papua Barat.

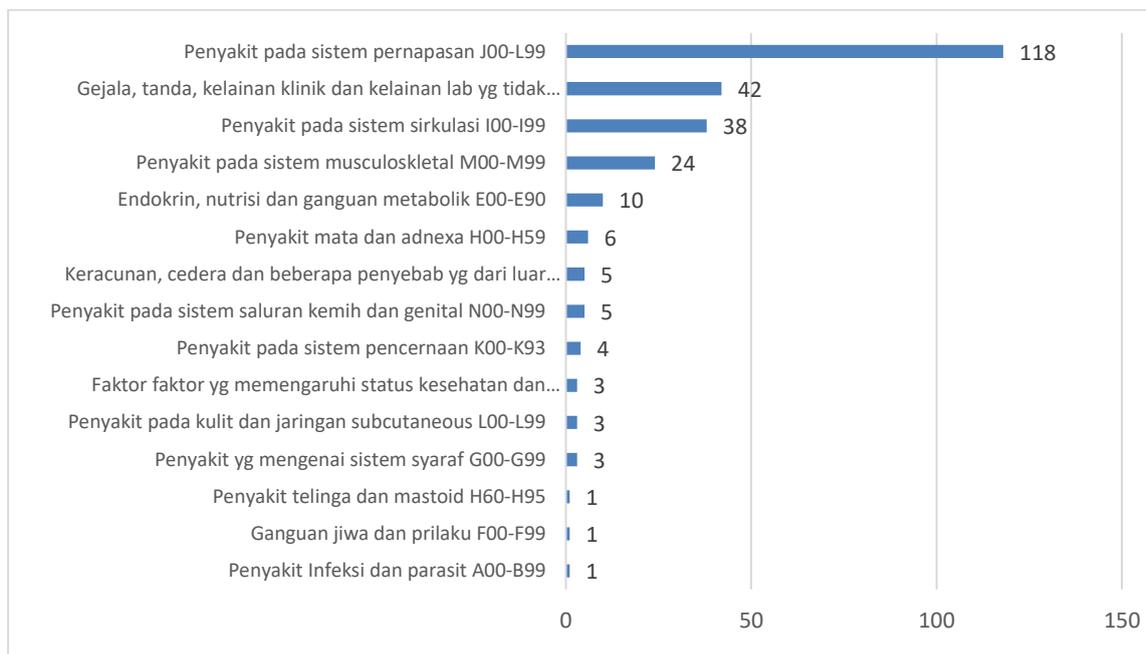
Grafik III.E.9
Distribusi Jemaah Haji Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Asal Daerah
Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M



Jumlah jemaah haji yang dirawat jalan pada saat debarkasi sebanyak 222 orang, pria sebanyak 99 orang (44,59 %) dan wanita sebanyak 123 orang (55,41 %). Jemaah rawat jalan berdasarkan asal daerah tertinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan terendah dari Provinsi Papua Barat.

Jemaah rawat jalan asal Provinsi Gorontalo yang merupakan debarkasi antara dilakukan di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar saat menunggu penerbangan menuju Provinsi Gorontalo.

Grafik III.E.10
Distribusi Rawat Jalan Jemaah Haji Berdasarkan Klasifikasi Penyakit
Debarkasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M

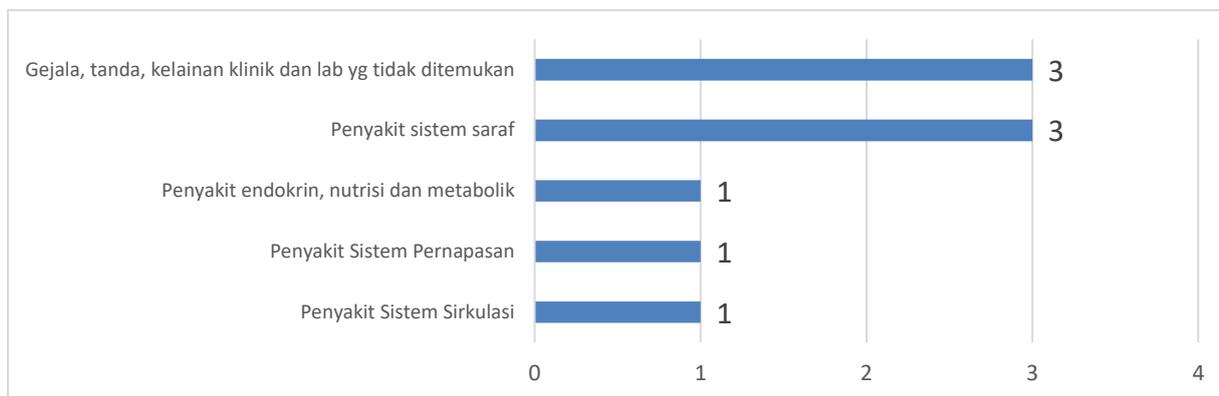


Jumlah rawat jalan sebanyak 264 orang, terbanyak jenis penyakit pada sistem pernapasan yaitu 118 orang (44.70 %) dan paling sedikit jenis penyakit infeksi dan parasit, gangguan jiwa dan prilaku, penyakit telinga dan mastoid masing-masing sebanyak 1 orang (0.38 %).

d. Layanan rujukan

Pelayanan kesehatan diberikan kepada Jamaah haji sakit dan semua petugas PPIH yang terlibat di debarkasi Makassar. Pelayanan kesehatan ini sifatnya memerlukan penanganan lebih lanjut.

Grafik III.E.11
Distribusi Rujukan Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Penyakit
Debakasi Makassar Tahun 1444 H/2023 M



Jumlah rujukan sebanyak 9 orang, terbanyak jenis penyakit sistem saraf yaitu 3 orang (33,33 %) dan paling sedikit jenis penyakit sirkulasi, pernafasan dan penyakit endokrin masing-masing 1 orang (11,11 %). Sedangkan berdasarkan jenis kelamin lebih banyak wanita yang dirujuk dari pada pria.

e. Kelengkapan dokumen kesehatan haji

Pada saat Jamaah haji tiba di Asrama Haji Makassar dilakukan pemberian K3JH atau HAC dengan memberi cap tanggal kedatangan dan tanggal akhir masa pemantauan di lembar kartu tersebut.

f. Penyuluhan Kesehatan haji

Setiap kedatangan kloter diberikan penyuluhan selama 15 menit di asrama haji tentang penggunaan kartu kewaspadaan kesehatan Jamaah haji dan HAC serta edukasi tentang protokol kesehatan pasca haji dan perilaku hidup bersih dan sehat bagi pelaku perjalanan dari luar negeri.

g. Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan

Kegiatan pengendalian Faktor Risiko Lingkungan diantaranya yakni pengawasan pangan, pemeriksaan kesehatan lingkungan dan pengawasan disinfeksi pesawat, pengawasan sanitasi lingkungan Asrama Haji, dan pelaksanaan disinfeksi. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pengamatan dan pengendalian Vektor di asrama haji yang dikerjakan secara terpadu antara lain : menjaga kebersihan lingkungan asrama haji, pemantauan lalat di asrama haji, pengawasan jentik dan nyamuk, survei tikus, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), spraying, pemasangan perangkap tikus dan kecoak.

TIM PENYUSUN PROFIL
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I MAKASSAR
TAHUN 2023

Pengarah	:	Agus Jamaludin, SKM, M.Kes
Penanggung Jawab	:	Nirwan SKM, M. Kes
Ketua	:	Yusrianto, SKM
Wakil Ketua	:	H. Nur Kamar, SKM, M.Kes
Sekretaris	:	Arfiani, SKM
Anggota	:	1. Dra. Aisyah Sufrie, MSc.PH
		2. dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes
		3. Amran, SKM, M.Kes
		4. dr. Ridha Ilahi
		5. Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
		6. Hj. Nur Magfirah, SKM, M.Kes
		7. dr. Hj. Rini Astuty
		8. Arni Angriany Amir, ST
		9. Karyadi Eka Putra, SKM
		10. Abdul Rahman Mustafa, SKM
		11. Rina Virgiana Thamrin, S.Tr.KL
		12. Syahrianti Said, SKM
		13. Musdalifah, AMKL
		14. dr. Marselina Sili Papu, MPH
		15. Fatimahsari, S.Tr.Kes
		16. Ismainar, AMK
		17. Abd. Gani Buatan, SKM
		18. Hj. Sitti Hamdiah, SKM, M.Kes
		19. Maria Veronika Ambabunga, SKM
		20. Mardiyana, SKM, M.Adm.Kes
		21. Andi Kudrat, SKM
		22. Nining Ayu Purnama, S.Kom
		23. Yusran, S.Kom